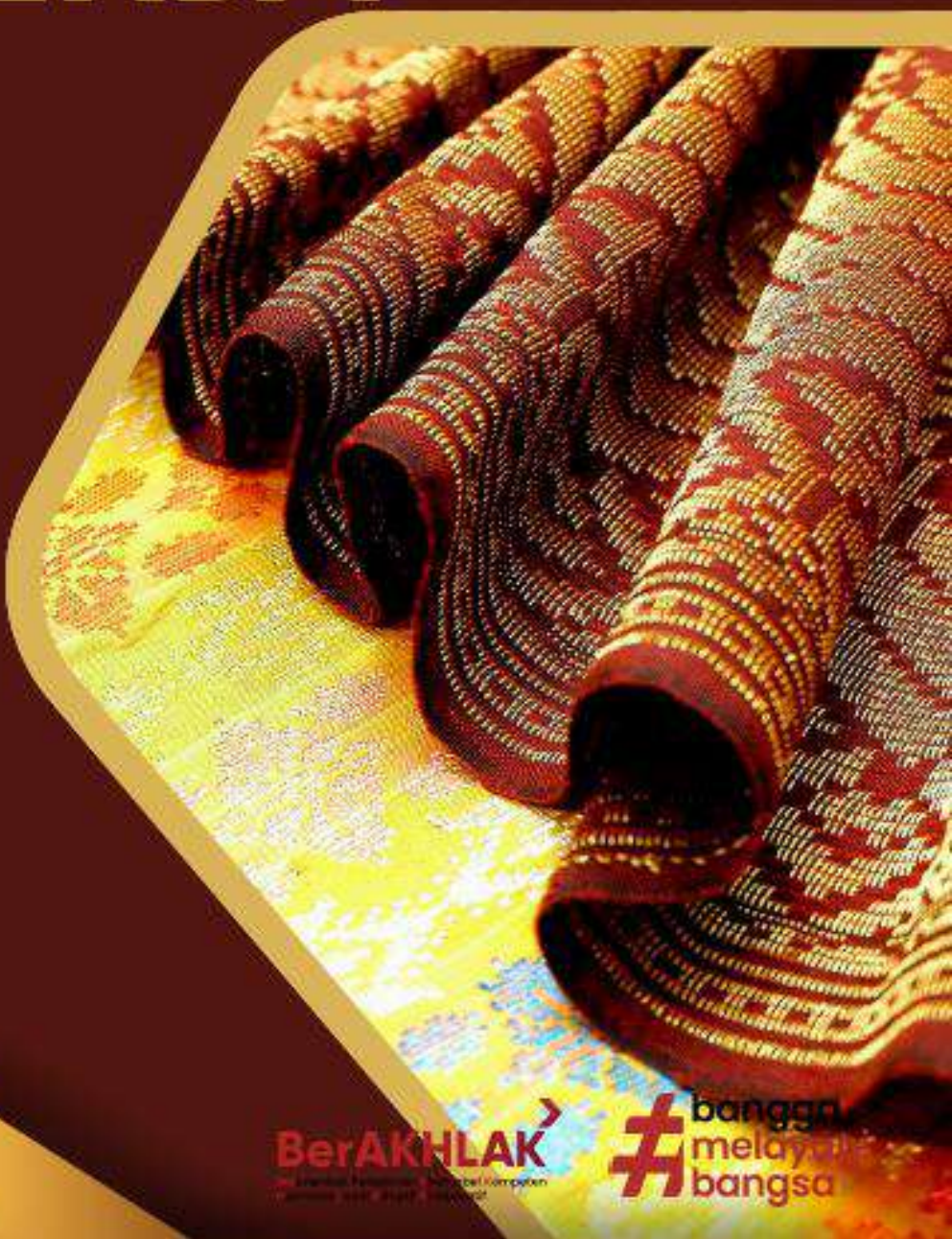




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2025 LAPORAN KINERJA



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen
untuk mewujudkan Sumatra Barat yang lebih baik

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Padang, Maret 2026

INSPEKTUR,



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xii

BAB I..... 1

- 1.1. Gambaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat... 1
- 1.2. Permasalahan Utama Provinsi Sumatra Barat... 4

BAB II..... 11

- 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran... 11
- 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025... 16

BAB IV..... 333

- 4.1. Kesimpulan..... 333
- 4.2. Upaya Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang..... 334

BAB III..... 26

- 3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja 26
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja 27
- 3.3. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja..... 32

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing..... 32
- Misi 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah..... 68
- Misi 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan..... 108
- Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital..... 150
- Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata..... 195
- Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan..... 210
- Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas..... 288

- 3.4. Realisasi Anggaran..... 331

LAMPIRAN

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025





Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP ini telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP tahun 2025 berisikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan, tetapi juga evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan yang harus dibenahi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk penguatan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan evaluasi dan pengendalian. Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi referensi strategis dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depannya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025. Semoga upaya dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatra Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Gubernur Sumatra Barat,

Mahyeldi

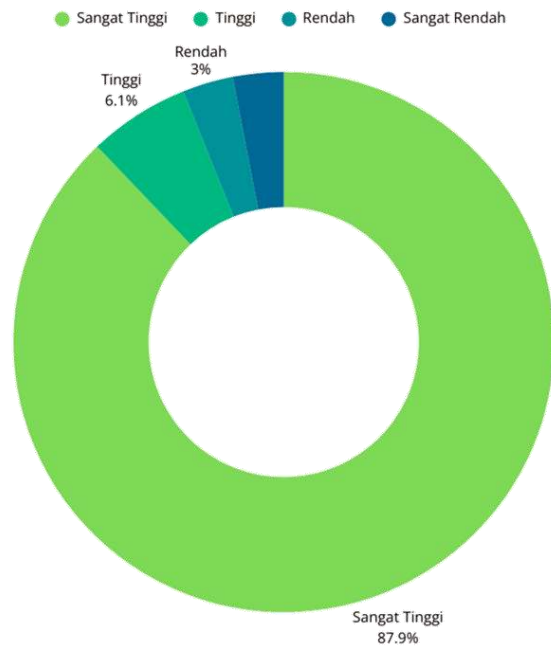




Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 menyajikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2025 adalah 111,71% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**. Berdasarkan perhitungan diketahui terdapat 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi**, 1 tujuan dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **tinggi**, 1 sasaran dengan kategori kinerja **rendah** dan 1 sasaran dengan kategori kinerja sangat rendah. Adapun sasaran yang tercapai dengan kategori kinerja sangat rendah adalah Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera.

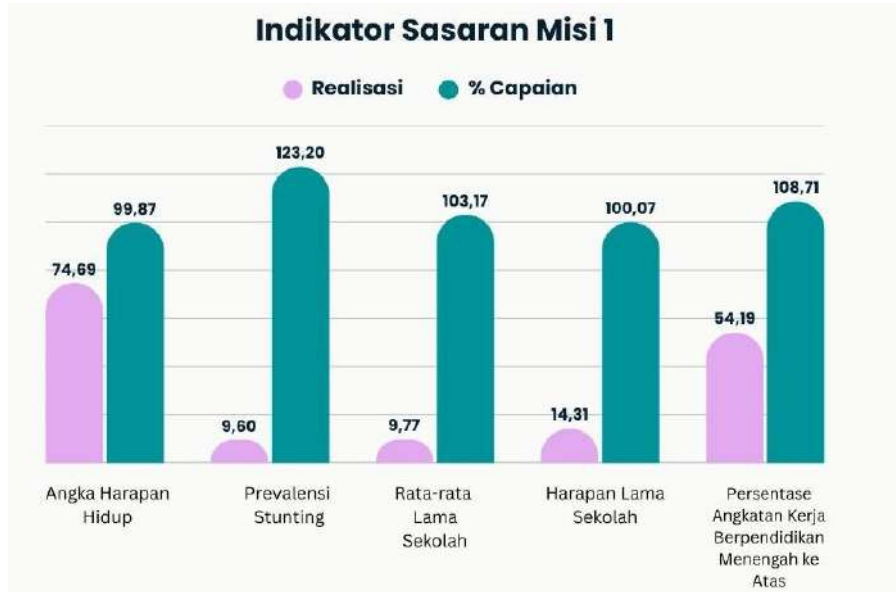


Berikut ini akan diuraikan pencapaian masing-masing misi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025:

Misi 1

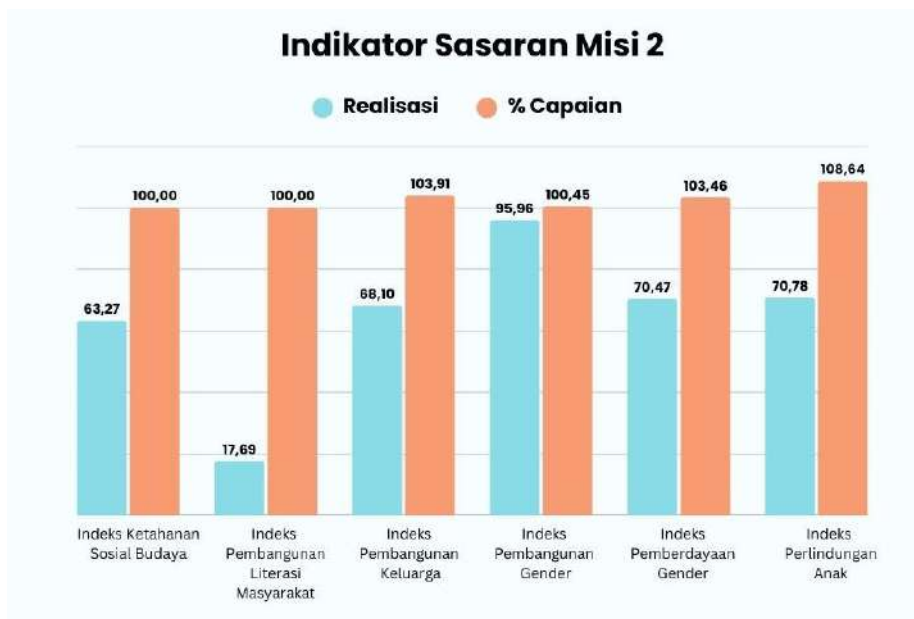
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing





Misi 2

Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiġ Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah





Misi 3

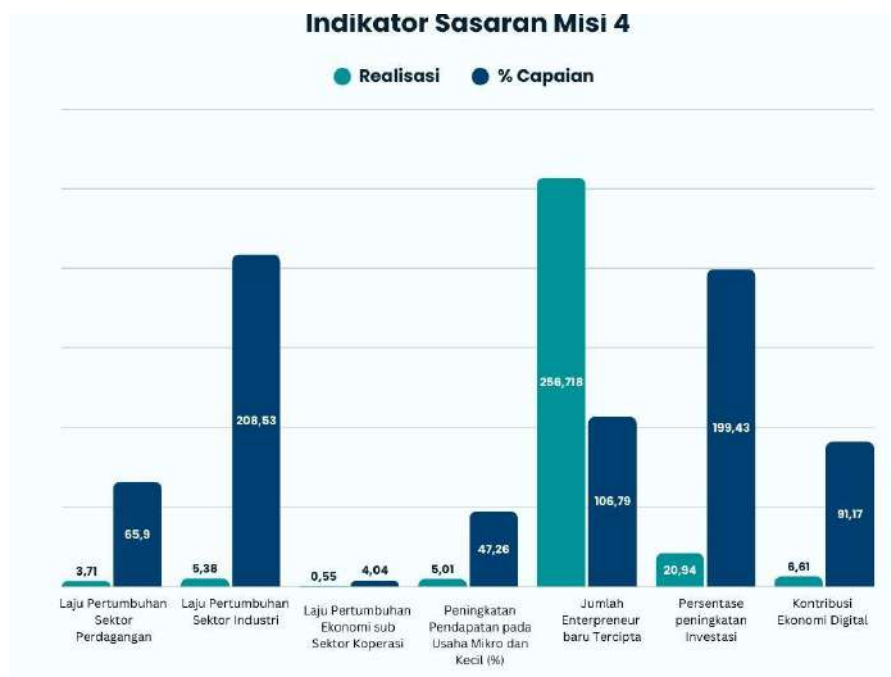
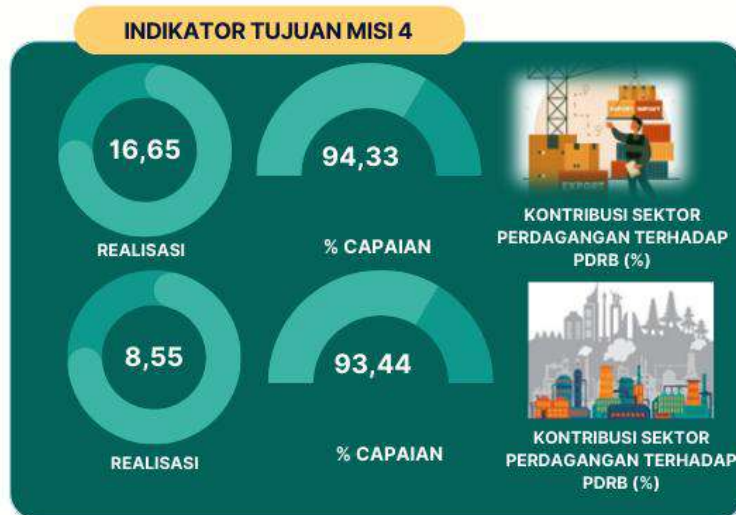
Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan





Misi 4

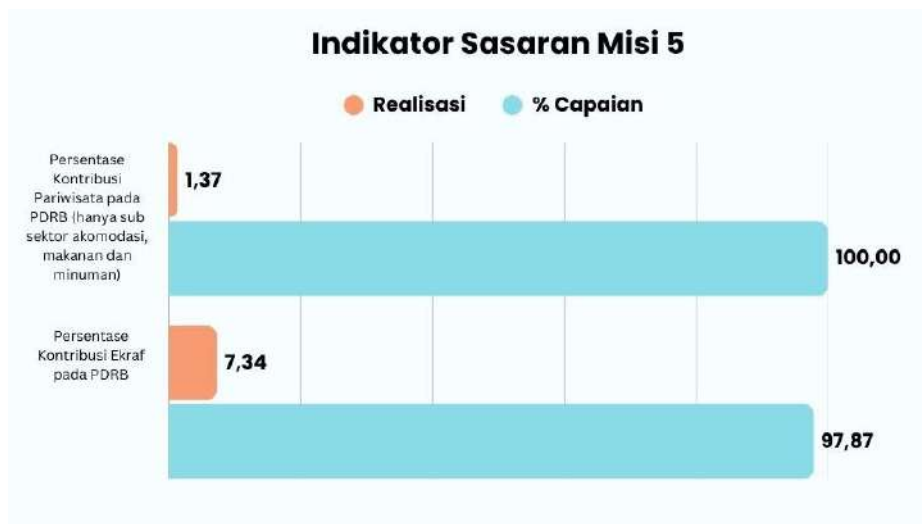
Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital





Misi 5

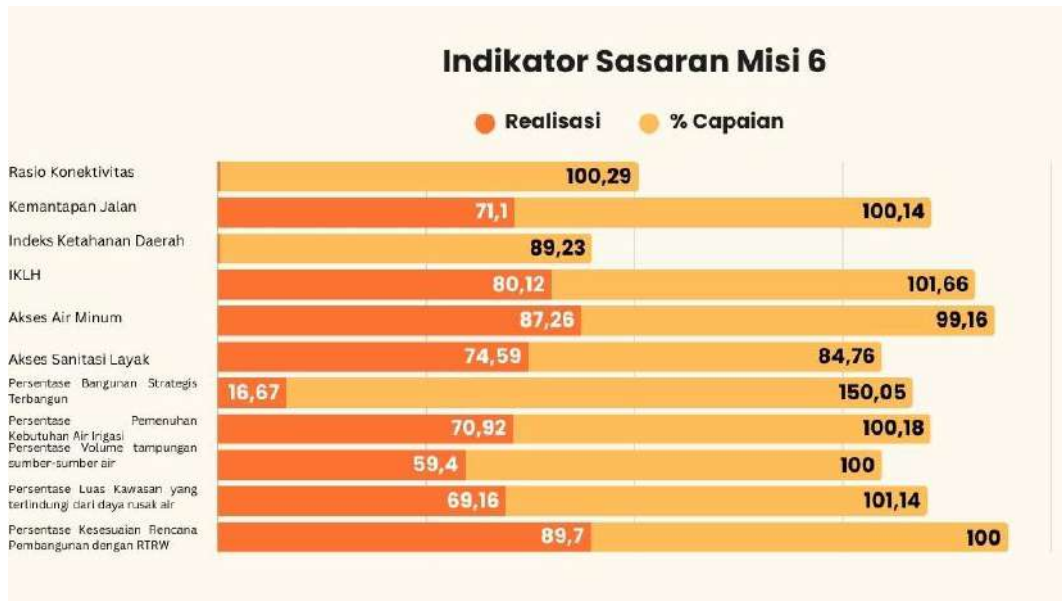
**Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan
Daya Saing Kepariwisata**



Misi 6

**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan
dan berkelanjutan**





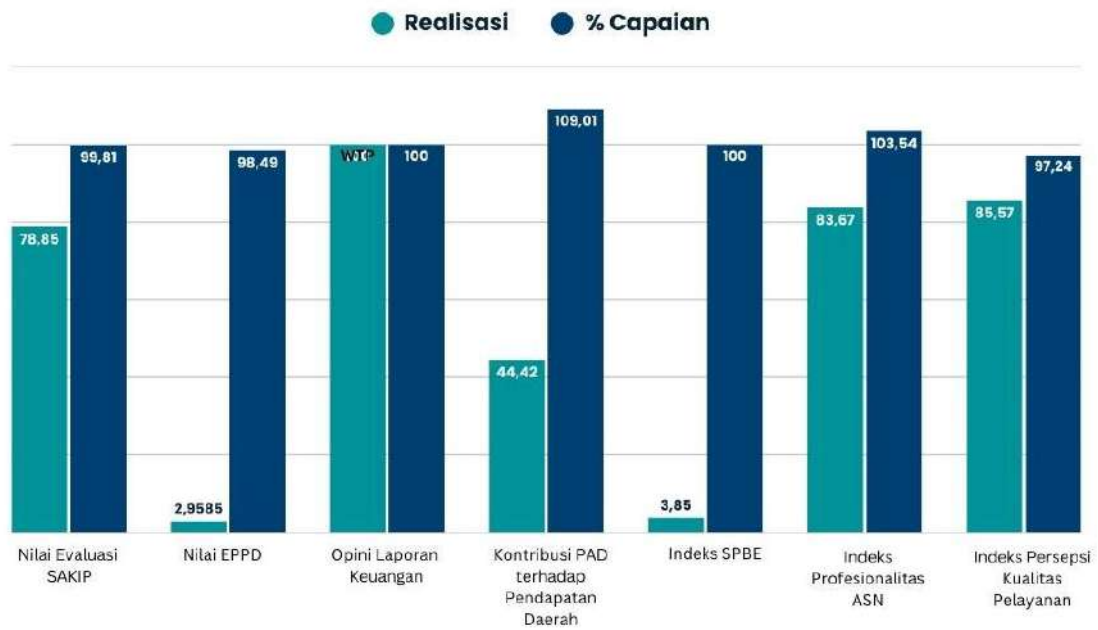
Misi 7

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas





Indikator Sasaran Misi 7





Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	12
Tabel 2. 2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	14
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025	16
Tabel 3. 1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025	28
Tabel 3. 2	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1	45
Tabel 3. 3	Prevalensi <i>Stunting</i> per Kabupaten/Kota berdasarkan data e-pggbm melalui intervensi serentak pada bulan Agustus Tahun 2025	47
Tabel 3. 4	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2	51
Tabel 3. 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3	52
Tabel 3. 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3	61
Tabel 3. 7	Angkatan Kerja Berpendidikan menengah ke atas se Sumatra Barat Tahun 2025	63
Tabel 3. 8	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4	67
Tabel 3. 9	Capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatra Barat	73
Tabel 3. 10	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1	79
Tabel 3. 11	IPLM Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2024	81
Tabel 3. 12	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2	86
Tabel 3. 13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3	87
Tabel 3. 14	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3	107
Tabel 3. 15	Rincian Peningkatan Pendapatan Petani	109
Tabel 3. 16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1	111
Tabel 3. 17	Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2025	119
Tabel 3. 18	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1	134
Tabel 3. 19	Indikator Pengukuran IKP	136
Tabel 3. 20	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2	143
Tabel 3. 21	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025	145
Tabel 3. 22	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3	149
Tabel 3. 23	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1	151
Tabel 3. 24	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1	166
Tabel 3. 25	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2	171
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3	172
Tabel 3. 27	Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025	178
Tabel 3. 28	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3	181
Tabel 3. 29	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4	184
Tabel 3. 30	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5	190
Tabel 3. 31	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1	204
Tabel 3. 32	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2021-2025	207
Tabel 3. 33	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2	209
Tabel 3. 34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1.	214
Tabel 3. 35	Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025	222
Tabel 3. 36	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1	227
Tabel 3. 37	Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah	229
Tabel 3. 38	Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah	234
Tabel 3. 39	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2	237
Tabel 3. 40	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	240
Tabel 3. 41	IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025	240
Tabel 3. 42	Kategori Indeks Kualitas Air	241
Tabel 3. 43	Kategori Indeks Kualitas Lahan	246
Tabel 3. 44	Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL	247
Tabel 3. 45	Kategori Indeks Kualitas Air Laut	248





Tabel 3. 46	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3	254
Tabel 3. 47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4	256
Tabel 3. 48	Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	268
Tabel 3. 49	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2025	271
Tabel 3. 50	Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatra Barat.....	276
Tabel 3. 51	Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatra Barat.....	277
Tabel 3. 52	Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2025	279
Tabel 3. 53	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4	283
Tabel 3. 54	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5	287
Tabel 3. 55	Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	289
Tabel 3. 56	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2024 dan 2025.....	290
Tabel 3. 57	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1.	294
Tabel 3. 58	Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2024 dan 2025.....	296
Tabel 3. 59	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	301
Tabel 3. 60	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1	312
Tabel 3. 61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2.	313
Tabel 3. 62	IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025.....	320
Tabel 3. 63	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2	324
Tabel 3. 64	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025	327
Tabel 3. 65	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3	330
Tabel 3. 66	Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2025.....	331





Daftar Grafik

Grafik 1. 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat	3
Grafik 2. 1	Misi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026.....	12
Grafik 3. 1	IPM 19 se Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025	34
Grafik 3. 2	Perbandingan IPM Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2025.....	35
Grafik 3. 3	Perkembangan IPM dari tahun 2021-2025.....	36
Grafik 3. 4	Angka Harapan Hidup Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025	41
Grafik 3. 5	Perkembangan Angka Harapan Hidup dari tahun 2021-2025	42
Grafik 3. 6	Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra.....	43
Grafik 3. 7	Perkembangan Prevalensi <i>stunting</i> dari tahun 2020-2025.....	49
Grafik 3. 8	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025	54
Grafik 3. 9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2021-2025	55
Grafik 3. 10	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah secara Nasional dan Regional Tahun 2025	56
Grafik 3. 11	Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat	57
Grafik 3. 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2021-2025	58
Grafik 3. 13	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Regional	59
Grafik 3. 14	Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	64
Grafik 3. 15	Data Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (Nasional) dan Provinsi di Pulau Sumatra	65
Grafik 3. 16	Perbandingan IPK Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra	71
Grafik 3. 17	Perkembangan IPK Provinsi Sumatra Barat dari Tahun 2020 s.d 2024.....	71
Grafik 3. 18	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra	75
Grafik 3. 19	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020-2024	75
Grafik 3. 20	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra	83
Grafik 3. 21	IPLM Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2024.....	83
Grafik 3. 22	Perkembangan iBangga dari tahun 2022-2025.....	89
Grafik 3. 23	IPG Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2025.....	93
Grafik 3. 24	IPG Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra	94
Grafik 3. 25	Perkembangan IPG dari tahun 2021-2025	94
Grafik 3. 26	IDG Menurut Kab/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025.....	98
Grafik 3. 27	IDG Provinsi di Pulau Sumatra dan Nasional Tahun 2025	99
Grafik 3. 28	Perkembangan IDG Sumatra Barat dari tahun 2021-2025	100
Grafik 3. 29	IPA Menurut Kab/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025.....	103
Grafik 3. 30	Perkembangan IPA dari tahun 2021-2025.....	104
Grafik 3. 31	Perbandingan IPA Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2025	105
Grafik 3. 32	Nilai Tukar Petani Januari s.d Desember 2025.....	112
Grafik 3. 33	Perbandingan NTP Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra.....	114
Grafik 3. 34	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2022-2025	114
Grafik 3. 35	Nilai Tukar Usaha Petani Januari s.d Desember 2025	115
Grafik 3. 36	Perbandingan NTUP Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra.....	116
Grafik 3. 37	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani Tahun 2022-2025	117
Grafik 3. 38	Pendapatan Pembudidaya Ikan Sumatra Barat Tahun 2022-2025 (dalam juta rupiah)	120





Grafik 3. 39	Pendapatan Nelayan Sumatera Barat Tahun 2022-2025 (dalam juta rupiah)	125
Grafik 3. 40	Perkembangan Pendapatan Peternak dari Tahun 2022 s.d 2025 (ribu)	128
Grafik 3. 41	Perbandingan Peningkatan Pendapatan Petani Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatera tahun 2025	132
Grafik 3. 42	IKP 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025....	138
Grafik 3. 43	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	139
Grafik 3. 44	Indeks Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.....	140
Grafik 3. 45	Perkembangan Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dari tahun 2021-2025	146
Grafik 3. 46	Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	153
Grafik 3. 47	Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025	153
Grafik 3. 48	Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	157
Grafik 3. 49	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025.....	158
Grafik 3. 50	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	163
Grafik 3. 51	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2020-2024.....	163
Grafik 3. 52	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	168
Grafik 3. 53	Laju Pertumbuhan sub sektor koperasi tahun 2022-2025.....	175
Grafik 3. 54	Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2021-2025	188
Grafik 3. 55	Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital.....	193
Grafik 3. 56	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2021-2025	201
Grafik 3. 57	Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2025	202
Grafik 3. 58	Perbandingan Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	208
Grafik 3. 59	IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025	235
Grafik 3. 60	IKA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025.....	242
Grafik 3. 61	IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025.....	244
Grafik 3. 62	IKL Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025.....	247
Grafik 3. 63	Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2025.....	249
Grafik 3. 64	Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2025.....	258
Grafik 3. 65	Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2025 .	258
Grafik 3. 66	Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2021-2025	261
Grafik 3. 67	Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2025	262
Grafik 3. 68	Volume Tampung Sumber-Sumber Air Tahun 2021-2025.....	275
Grafik 3. 69	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2021-2025.....	278
Grafik 3. 70	Nilai evaluasi SAKIP tahun 2021-2025.....	297
Grafik 3. 71	Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	301
Grafik 3. 72	Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera	302
Grafik 3. 73	Jumlah Opini WTP (2012-2024).....	305
Grafik 3. 74	Gambaran PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2025.....	310
Grafik 3. 75	Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2025..	310
Grafik 3. 76	Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025	315
Grafik 3. 77	Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2021-2025.....	316
Grafik 3. 78	IP ASN Sumatera Barat tahun 2021-2025.....	321
Grafik 3. 79	Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2020-2024.....	329





BABI

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT

a. *Dasar Pembentukan*

Provinsi Sumatra Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
- 3) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.





- 4) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBDP, perubahan APBDP, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDP, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

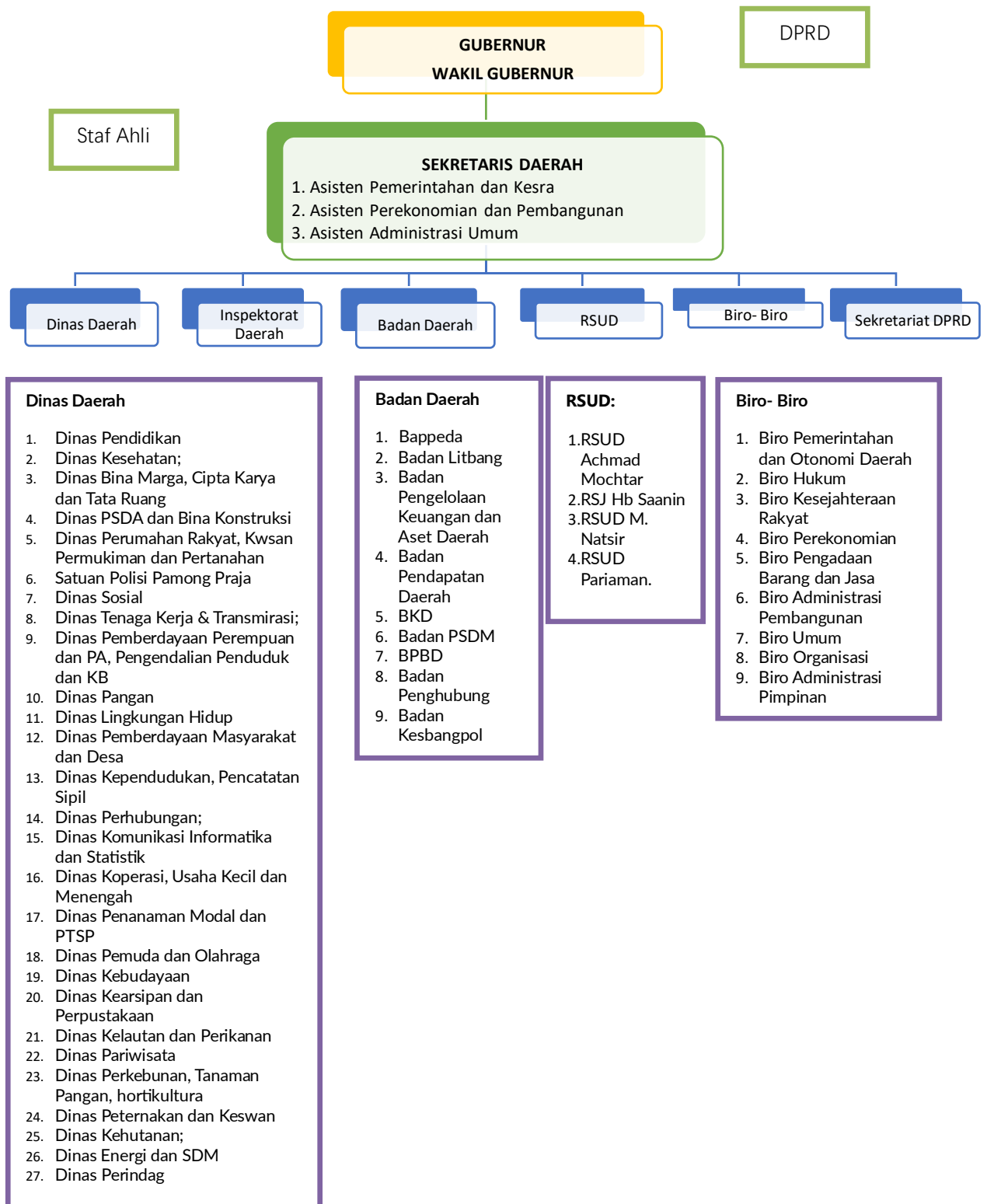
- 1) Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
- 2) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:



Grafik 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat





1.2. PERMASALAHAN UTAMA PROVINSI SUMATRA BARAT

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatra Barat meliputi:

1. *Pembangunan Manusia*

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan dan pendidikan yaitu:

- Pandemi *COVID-19* yang belum mereda mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Sumatra Barat dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).
- Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatra Barat memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia, perlindungan dan penanganan wabah penyakit menular atau tidak menular, penerapan pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan.
- Permasalahan gizi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

2. *Pembangunan Kebudayaan*

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Sebuah tatanan masyarakat yang mampu memadukan antara adat budaya dengan nilai-nilai agama. Dalam sektor kepemimpinan, nilai ABS SBK tercermin dalam satu ungkapan *Tungku Tigo Sajarangan*, model kepemimpinan ini terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan *cadiak pandai*. Nilai-nilai ABS SBK dalam tatanan kehidupan sehari-hari terlihat dari perilaku dan tutur sapa ketika berinteraksi secara individu maupun secara sosial. Cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan nilai-nilai di atas dari waktu-ke waktu tergerus oleh budaya asing sehingga generasi muda Sumatra Barat kurang mengetahui dan memahami nilai-nilai adat ABS SBK. Ada beberapa isu dalam pengimplementasian ABS SBK yaitu:



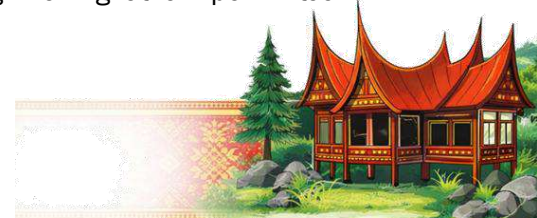


- a. Perlunya peta jalan Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), peta jalan ini penting untuk dirumuskan agar pelaksanaan ABS SBK secara bertahap bisa diimplementasikan serta adanya keberlanjutan program antar satu pemimpin dengan pemimpin berikutnya.
- b. Pengimplementasian ABS SBK sebagai pelajaran Muatan Kearifan Lokal yang sinergis antara Dikdas dan Dikmen. Pewarisan budaya pada usia dini penting dilakukan agar generasi Minangkabau mengetahui akar historis dan identitas kebudayaannya.
- c. Penguatan limbago adat berupa pelatihan terhadap pemangku adat sebagai sebuah upaya agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif tentang ABS SBK.
- d. Integritas falsafah ABS SBK dalam proses pendidikan formal sehingga generasi muda milenial minang kurang memahami falsafah ABS SBK sehingga belum menggambarkan nilai ABS SBK.
- e. Perlunya penguatan pembangunan keluarga terutama dalam menghadapi perubahan paradigma dalam membangun ketahanan keluarga terutama pada Generasi milenial dan generasi Z serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.
- b. Pembangunan sektor pertanian Sumatra Barat berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial.
- c. Masih banyaknya irigasi yang rusak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga dapat berfungsi optimal.
- d. Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi.
- e. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama.
- f. Isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yaitu: (1) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (2) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah buahan, sayuran, tanaman obat serta perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan



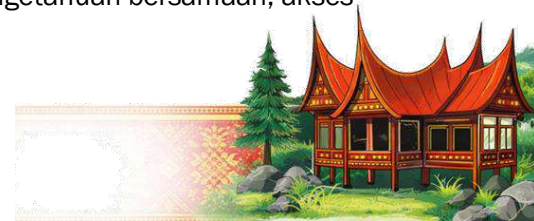


- terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (3) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.
- g. Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
 - h. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya: antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai.
 - i. Ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.
 - j. Provinsi Sumatra Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu, Provinsi Sumatra Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi.

4. *Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda*

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatra Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja *daring* dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatra Barat. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi *startup*, wirausahawan milenial, *women entrepreneur* dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses





permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemitraan strategis di tingkat regional, perlu dilakukan kerjasama untuk mendorong ekonomi wilayah melalui kerjasama regional. Kerjasama diarahkan untuk hilirisasi industri agrikultur, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agrikultur dan industri proses yang bernilai tambah. Salah satu kerjasama regional yang mempunyai nilai strategis adalah Indonesia, Malaysia, *Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang meliputi kerjasama negara Indonesia (Provinsi di Pulau Sumatra), Malaysia dan Thailand.

5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

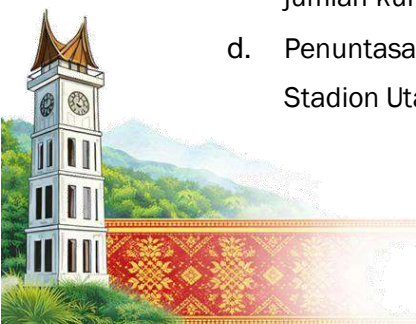
Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah, beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti seperti:

- a. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014 – 2025
- b. Sinergi antara Pusat – Provinsi – Kabupaten dan *stakeholder* terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.
- d. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatra Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan berhadapan dengan sejumlah isu strategis yaitu:

- a. Penuntasan jalan tol dalam membangun koneksi Sumatra Barat ke jaringan tol trans Sumatra.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan, akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan agar dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian.
- c. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian.
- d. Penuntasan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara



(shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatra, antara lain; Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSS Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman).

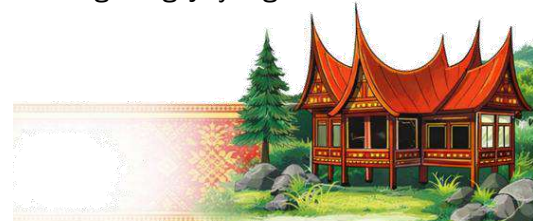
- e. Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.
- f. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas.
- g. Penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikarenakan peningkatan produksi timbulan sampah.
- h. Penyediaan tenaga listrik untuk daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu.
- i. Pengembangan/pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM Regional dan IPLT Regional).
- j. Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait dengan implementasi reformasi birokrasi antara lain proses deregulasi kebijakan yang belum berjalan efektif, penyederhanaan birokrasi, penyusunan peta proses bisnis menyeluruh dan efektif, belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, belum optimalnya implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan fungsi pengawasan yang masih belum optimal.

Terkait dengan aparatur, permasalahan utama yang harus dituntaskan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen ASN adalah dalam hal tingkat gaji yang tidak





memenuhi standar hidup minimal pegawai. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini, dimana dilakukan penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Dalam hal pelayanan publik, harapan masyarakat adalah memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat yang dapat diperbaiki secara terus menerus, dan pelayanan publik serta birokrasi akan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi. Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam perkembangan akan berkonsekuensi untuk memenuhi kebutuhan dalam transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi yang lebih baik.





PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026 adalah:

SUMATERA BARAT YANG UNGGUL

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

MASYARAKAT MADANI

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.



Uraian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026 sebagaimana digambarkan pada grafik 2.1.



Grafik 2 1 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026



Sumber data: RPJMD Sumbar 2021-2026

Untuk mencapai 7 Misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 tujuan dengan 26 sasaran. Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran sudah menggunakan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tergambar pada pohon kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
No	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1.1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.2	Menurunnya prevalensi <i>stunting</i>
				1.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan
				1.1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan	2.1	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
				2.1.2	Meningkatnya Budaya Literasi

No	MISI		TUJUAN		SASARAN
	Falsafah Adaiik Basandi Syara', syara' basandi kitabullah			2.1.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.1	Meningkatkan kesejahteraan petani	3.1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
				3.1.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
				3.1.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	4.1	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	4.1.1	Sumatra barat sebagai pusat perdagangan
				4.1.2	Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
				4.1.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
				4.1.4	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
				4.1.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi
				4.1.6	Meningkatnya peran ekonomi digital
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	5.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat
				5.1.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6.1	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	6.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
				6.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
				6.1.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
				6.1.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
				6.1.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	7.1.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
				7.1.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi
				7.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025-2029. Adapun visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel 2.2:

Tabel 2. 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI Sumatra Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan					
No	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	1.1	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
				1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
2	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	2.1	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2.1.1	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
				2.1.2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	3.1	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	3.1.1	Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal
				3.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
4	Sumatra Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatra Bagian Barat	4.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	4.1.1	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
				4.1.2	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
				4.1.3	Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
5	Membangun Infrastruktur	5.1	Terwujudnya infrastruktur yang	5.1.1	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	5.1.2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan 5.1.3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
6	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	6.1 Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	6.1.1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat 6.1.2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan 6.1.3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
7	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	7.1 Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 7.1.2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil
8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	8.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	8.1.1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan 8.1.2 Meningkatnya kualitas layanan publik 8.1.3 Meningkatnya Pendapatan Daerah

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani pada bulan Maret 2025. Untuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (7 Misi, 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran)

Berikut ini diuraikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING					
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia		77,41	Lintas PD
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH		74,79	D. Kesehatan RSUD
1.2	Menurunnya prevalensi <i>stunting</i>	Prevalensi <i>stunting</i>		12,50	D. Kesehatan RSUD
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1	Rata-rata lama sekolah	9,47	D. Pendidikan
		1.3.2	Harapan Lama Sekolah	14,30	D. Pendidikan
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		49,85	D. Pendidikan D. Nakertrans
MISI 2 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK		63,10	Lintas PD
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya		63,27	B. Kesbangpol Satpol PP
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		17,69	D. Kearsipan & Perpustakaan
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	65,54	D. P3AP2KB
		2.3.2	Indeks Pembangunan Gender	95,53	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
		2.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender	68,11	
		2.3.4	Indeks Perlindungan Anak	65,15	
MISI 3 MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN					
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani		5	Lintas PD Lingkup Pertanian
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60	Lintas PD
		3.1.2	Nilai Tukar Usaha Petani	105,03	Lingkup Pertanian
		3.1.3	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	54,838	D. Kelautan Perikanan
		3.1.4	Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	44,158	
		3.1.5	Pendapatan Peternak (Rp. Ribu)	55.418	D. Peternakan dan Keswan
		3.1.6	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		83,22	D. Pangan
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan		5	D. Kehutanan
MISI 4 MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL					
4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		17,65	D. Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		9,15	
4.1	Sumatra barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		5,63	D. Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri		2,58	
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	13,60	D. Koperasi dan UKM
		4.3.2	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	10,60	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta		240.385	Lintas PD
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi		10,50	D. Penanaman Modal PTSP
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital		7,25	Lintas PD
MISI 5 MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN					
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif		4,43	D. Pariwisata
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)		1,37	D. Pariwisata
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB		7,50	D. Pariwisata
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN					
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur		0,786	Lintas OPD
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1	Rasio Konektifitas	0,691	D. Perhubungan
		6.1.2	Kemantapan Jalan	71	D. Bina Marga CKTR
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0,65	BPBD
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,81	D. Lingkungan Hidup
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1	Akses Air Minum	88	D. Bina Marga CKTR
		6.4.2	Akses Sanitasi Layak	88	
		6.4.3	Persentase bangunan strategis terbangun	11,11	
		6.4.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,79	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		6.4.5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,4	
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38	
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		89,70	D. Bina Marga CKTR

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS					
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		87	Biro Organisasi
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (79)	Biro Organisasi
		7.1.2	Nilai EPPD	3,0040	Biro Pemerintahan
		7.1.3	Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		7.1.4	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,75	B. Pendapatan Daerah
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1	Indeks SPBE	3,85	D. Kominfortik
		7.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	80,81	B. Kepegawaian Daerah
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		88	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	223.279.567.013,00	238.689.760.884,00
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	136.719.017.414,00	146.271.509.918,00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	610.094.800,00	585.739.700,00
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	6.970.000,00	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	928.419.000,00	646.161.000,00
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	27.672.584.959,00	35.836.104.824,00
6	Program Rehabilitasi Sosial	57.342.480.840,00	55.350.245.442,00
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	109.948.188.909,00	109.133.103.839,00
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	108.746.514.909,00	108.087.432.839,00
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.201.674.000,00	1.045.671.000,00
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	655.125.219.295,00	704.678.284.875,00
1	Program Pengelolaan Pendidikan	651.345.972.784,00	702.084.118.864,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	300.000.000,00	81.227.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.229.646.511,00	493.370.011,00
4	Program pengendalian perizinan pendidikan	100.000.000,00	
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	49.600.000,00	19.569.000,00

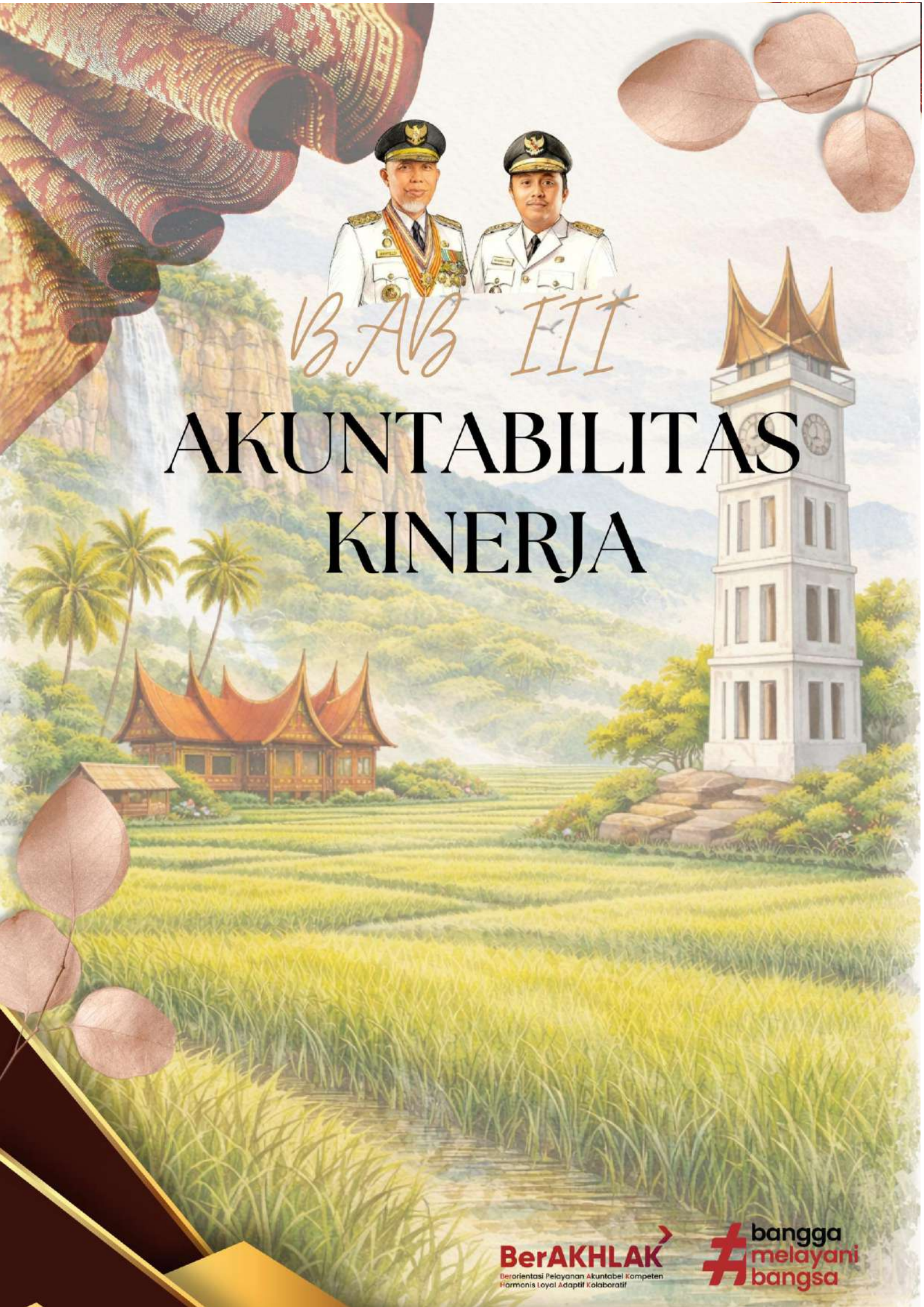
NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	4.743.255.196,00	3.914.513.695,00
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.727.957.490,00	2.659.068.490,00
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	29.258.000,00	6.900.000,00
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	177.172.300,00	70.933.250,00
4	Program Hubungan Industrial	182.835.000,00	134.020.000,00
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	222.936.475,00	172.718.985,00
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	71.659.931,00	41.974.970,00
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	38.330.000,00	15.687.000,00
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	421.040.000,00	113.060.000,00
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	872.066.000,00	700.151.000,00
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	43.435.426.371,00	54.301.781.493,00
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.854.672.595,00	2.604.886.500,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.883.189.200,00	5.731.475.792,00
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.574.000,00	563.850.000,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	713.720.000,00	671.020.000,00
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	841.900.000,00	1.628.335.000,00
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.336.637.919,00	2.355.383.579,00
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.750.000,00	775.000,00
8	Program Pengembangan Kebudayaan	5.929.732.000,00	6.600.750.523,00
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.812.226.000,00	2.891.527.970,00
10	Program Pembinaan Sejarah	287.880.000,00	109.570.000,00
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		98.520.800,00
12	Program Pengelolaan Permuseuman	2.842.634.927,00	3.067.291.841,00
13	Program Kesejahteraan Rakyat	16.562.003.628,00	26.426.262.768,00
14	Program Pemberdayaan Sosial	1.355.916.100,00	1.112.330.650,00
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	771.090.829,00	372.258.315,00
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	131.499.173,00	67.542.755,00
F	Meningkatnya Budaya Literasi	1.624.217.000,00	1.411.352.900,00
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1.511.810.500,00	1.308.114.900,00
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	112.406.500,00	103.238.000,00
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.381.020.000,00	6.776.687.000,00
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	943.787.000,00	940.625.000,00
2	Program Perlindungan Perempuan	1.097.031.000,00	1.048.577.000,00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.275.000,00	606.326.000,00
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.759.000,00	6.705.000,00
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	254.256.000,00	398.825.000,00
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2.566.626.000,00	2.536.949.000,00
7	Program Pengendalian Penduduk	17.920.000,00	14.840.000,00
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	99.670.000,00	51.616.000,00
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.337.696.000,00	1.172.224.000,00
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	151.793.213.139,00	126.418.713.861,00
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	21.649.837.482,00	24.331.034.749,00
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70.890.505.239,00	65.748.825.689,00
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	45.360.000,00	70.560.000,00
4	Program Penyuluhan Pertanian	1.779.352.720,00	1.290.274.920,00
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	714.362.860,00	671.541.335,00
6	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	2.931.650.490,00	448.614.745,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.630.315.100,00	7.151.355.724,00
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.299.042.388,00	5.707.290.858,00
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.358.361.150,00	452.204.850,00
10	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	597.262.000,00	794.015.760,00
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.928.929.204,00	13.075.485.652,00
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.922.877.805,00	667.696.392,00
13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.866.061.311,00	5.759.746.937,00
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	203.653.890,00	26.060.500,00
15	Program Penyuluhan Pertanian	975.641.500,00	224.005.750,00
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	3.963.789.154,00	2.751.032.444,00
1	Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.059.070.948,00	2.058.192.214,00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	417.902.990,00	321.400.000,00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	486.815.216,00	371.440.230,00
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	9.426.729.302,00	10.969.031.440,00
1	Program Pengelolaan Hutan	6.058.753.102,00	7.006.123.826,00
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.267.976.200,00	3.862.907.614,00
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100.000.000,00	100.000.000,00
K	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	3.643.294.070,00	3.455.112.649,00
1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.694.043.960,00	1.638.682.649,00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.949.250.110,00	1.816.430.000,00
L	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah		4.892.822.943,00
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		4.721.228.943,00
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		16.714.000,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		154.880.000,00
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan Ukm Yang Sejahtera	18.725.146.800,00	9.103.040.700,00
1	Program Pemberdayaan dan Perindungan Koperasi	1.901.613.900,00	1.612.058.500,00
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	10.795.826.000,00	4.471.442.000,00
3	Program Pengembangan UMKM	4.788.276.000,00	2.652.192.200,00
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.220.000.000,00	367.348.000,00
5	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	19.430.900,00	
N	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	4.814.010.548,00	3.475.646.750,00
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.814.010.548,00	3.475.646.750,00
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1.739.308.000,00	606.181.906,00
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	371.965.000,00	44.327.600,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	218.524.900,00	89.729.450,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	843.563.600,00	287.978.356,00
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	286.105.500,00	174.572.000,00
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.149.000,00	9.574.500,00
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatra Barat	5.986.872.000,00	7.052.514.000,00
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.118.182.000,00	1.751.361.000,00
2	Program Pemasaran Pariwisata	4.868.690.000,00	5.301.153.000,00
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatra Barat	2.552.913.700,00	3.046.624.464,00
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.039.188.700,00	1.666.992.464,00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.513.725.000,00	1.379.632.000,00
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	291.170.016.439,00	244.730.092.172,00
1	Program Penyelenggaraan Jalan	286.704.615.510,00	241.464.868.800,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.253.810.929,00	1.742.471.372,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	6.710.000,00	3.172.000,00
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	4.880.000,00	2.880.000,00
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.200.000.000,00	1.516.700.000,00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.281.034.370,00	7.453.984.942,00
1	Program Penanggulangan Bencana	5.067.632.970,00	5.684.387.776,00
2	Program Penanganan Bencana	213.401.400,00	1.769.597.166,00
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	12.511.278.930,00	9.808.009.013,00
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	16.775.000,00	8.235.000,00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.214.009.922,00	1.115.613.922,00
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	225.486.660,00	124.073.600,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	28.594.000,00	30.114.000,00
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.061.805.000,00	834.647.000,00
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.260.000,00	13.965.000,00
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.195.000,00	24.525.000,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	3.948.683.659,00	3.381.526.473,00
9	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.800.000.000,00	666.524.000,00
10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.050.644.739,00	3.608.785.018,00
11	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	101.824.950,00	
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	167.914.532.671,00	139.261.462.343,69
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.814.502.000,00	679.938.248,00
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.526.515.000,00	1.712.654.800,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	853.424.000,00	677.149.125,00
4	Program Penataan Bangunan Gedung	59.382.364.995,00	39.164.362.561,00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	95.053.187.934,00	91.548.837.032,69
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.500.704.000,00	846.360.470,00
7	Program Pengembangan Perumahan	281.530.990,00	560.394.990,00
8	Program Kawasan Permukiman	5.497.533.752,00	4.071.765.117,00
9	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	4.770.000,00	
V	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.456.690.221,00	886.809.261,00
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.430.155.221,00	873.389.261,00
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	8.235.000,00	4.270.000,00
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.575.000,00	3.050.000,00
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.575.000,00	3.050.000,00
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	4.575.000,00	1.525.000,00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
6	Program Penetapan Tanah Ulayat	4.575.000,00	1.525.000,00
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.589.715.170.477,00	4.584.969.037.714,52
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	930.150.004.700,00	933.027.133.368,49
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.246.955.000,00	880.347.000,00
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.923.393.580,00	2.687.879.280,00
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.862.619.100,00	2.826.274.624,00
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.578.573.800,00	507.327.000,00
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.371.298.000,00	766.461.262,00
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.244.898.500,00	626.656.990,00
8	Program Penataan Organisasi	350.355.650,00	198.836.725,00
9	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	475.852.984,00	327.636.984,00
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	386.135.000,00	335.425.000,00
11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	312.043.000,00	184.520.000,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.644.813.041.163,00	3.642.600.539.481,03
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	24.910.808.607,00	20.270.317.391,25
1	Program Kepegawaian Daerah	2.328.824.500,00	1.950.362.501,00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.572.971.928,00	3.118.256.700,00
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.662.353.000,00	5.023.368.851,00
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.719.116.959,00	8.338.931.719,25
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	212.484.000,00	73.539.000,00
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	92.400.000,00	48.340.000,00
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	387.624.000,00	347.277.000,00
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	611.005.400,00	182.574.000,00
9	Program Pengelolaan Arsip	87.965.900,00	56.773.700,00
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14.431.000,00	9.800.000,00
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.221.631.920,00	1.121.093.920,00
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97.908.390.736,00	88.243.018.830,00
1	Program Pelayanan Penghubung	3.704.399.870,00	2.908.443.460,00
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	93.743.956.866,00	85.087.153.370,00
3	Program Pendaftaran Penduduk	195.242.000,00	124.220.000,00
4	Program Pencatatan Sipil	117.834.000,00	57.103.000,00
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.518.000,00	58.413.000,00
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.440.000,00	7.686.000,00
TOTAL		6.438.050.092.948,00	6.386.298.937.510,46



BAV III

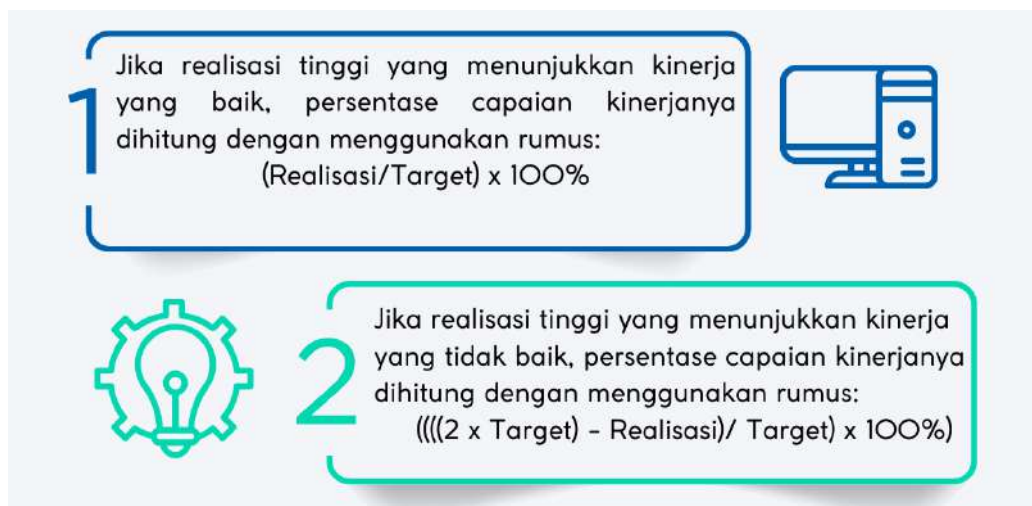
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

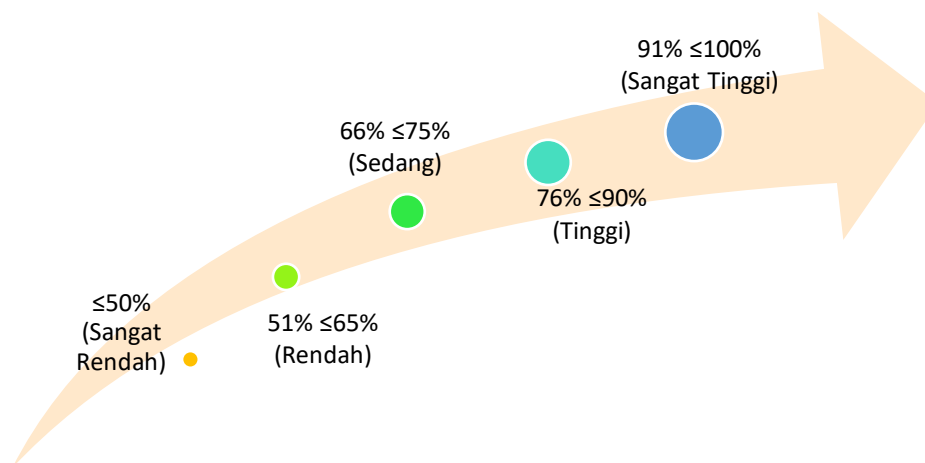
Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:



Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efesiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran pencapaian 7 tujuan dan 26 sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
MISI 1						
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING						
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia		77,41	77,27	99,82
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH		74,79	74,69	99,87
1.2	Menurunnya prevalensi <i>stunting</i>	Prevalensi <i>stunting</i>		12,50	9,6	123,20
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1	Rata-rata lama sekolah	9,47	9,77	103,17
		1.3.2	Harapan Lama Sekolah	14,30	14,31	100,07
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		49,85	54,19	108,71
MISI 2						
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH						
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK		63,10	59,34	94,04
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya		63,27	63,27	100
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		17,69	17,69	100
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	65,54	68,10	103,91
		2.3.2	Indeks Pembangunan Gender	95,53	95,96	100,45
		2.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender	68,11	70,47	103,46
		2.3.4	Indeks Perlindungan Anak	65,15	70,78	108,64
MISI 3						
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN						
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani		5	7,13	142,60
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura,	3.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60	127,94	125,93
		3.1.2	Nilai Tukar Usaha Petani	105,03	132,17	125,84

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
	Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.3	Pendapatan Pembudidayaan Ikan (Rp. Juta)	54,838	54,61924	99,60
		3.1.4	Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	44,158	43.966796	99,57
		3.1.5	Pendapatan Peternak (Rp. Ribu)	55.418	58.445,34	105,46
		3.1.6	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5	10,66	213,20
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		83,22	77,72	93,39
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan		5	15,81	316,20

MISSION 4

MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL

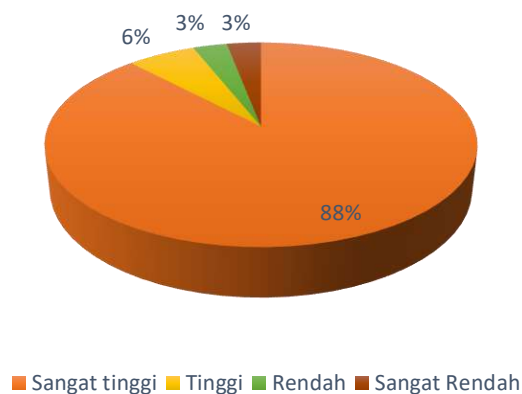
4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		17,65	16,65	94,33
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		9,15	8,55	93,44
4.1	Sumatra barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		5,63	3,71	65,90
4.2	Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri		2,58	5,38	208,53
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	13,60	0,55	4,04
		4.3.2	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	10,60	5,01	47,26
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta		240.385	256.718	106,79
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi		10,50	20,94	199,43
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital		7,25	6,61	91,17

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
MISI 5 MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN						
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif		4,43	4,36	98,42
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)		1,37	1,37	100
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB		7,50	7,34	97,87
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN						
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur		0,786	0,678	86,31
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1	Rasio Konektifitas	0,691	0,693	100,29
		6.1.2	Kemantapan Jalan	71	71,10	100,14
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0,65	0,58	89,23
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,81	80,12	101,66
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1	Akses Air Minum	88	87,26	99,16
		6.4.2	Akses Sanitasi Layak	88	74,59	84,76
		6.4.3	Persentase bangunan strategis terbangun	11,11	16,67	150,05
		6.4.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,79	70,92	100,18
		6.4.5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40	59,40	100
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38	69,16	101,14
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		89,70	89,70	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS					
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	87	89,32	102,67
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	79	78,85	99,81
		7.1.2 Nilai EPPD	3,0040	2,9585	98,49
		7.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		7.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,75	44,42	109,01
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1 Indeks SPBE	3,85	3,85	100
		7.2.2 Indeks Profesionalitas ASN	80,81	83,67	103,54
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	88	85,57	97,24
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran					111,71

Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2025 adalah 111,71% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**. Berdasarkan perhitungan diketahui terdapat 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi**, 1 tujuan dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **tinggi**, 1 sasaran dengan kategori kinerja **rendah** dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **sangat rendah**. Adapun sasaran yang tercapai dengan kategori kinerja **sangat rendah** adalah Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera.

Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran





3.3. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisa pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi RPJMD tahun 2021-2026:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Untuk pencapaian misi “meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing” ditetapkan tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Tujuan ini tertuang pada Misi 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat periode 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”**. Dalam hal mengetahui bagaimana mengukur sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkarakter, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. IPM mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Nilai kategori IPM menurut BPS yaitu Sangat tinggi ($IPM \geq 80$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Rendah ($IPM \leq 60$).

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,41. Target IPM ini meningkat sebesar 0,98 dibandingkan IPM tahun 2024. Pencapaian tujuan “mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing” adalah sebagai berikut:





Peningkatan nilai IPM Sumatra Barat didukung oleh peningkatan semua komponen pembangun IPM. Data realisasi IPM tahun 2025 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor No. 68/11/13/Th. XXVIII, tanggal 5 November 2025 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025. Merujuk pada pengelompokan nilai IPM, capaian pembangunan manusia Sumatra Barat tahun 2025 termasuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

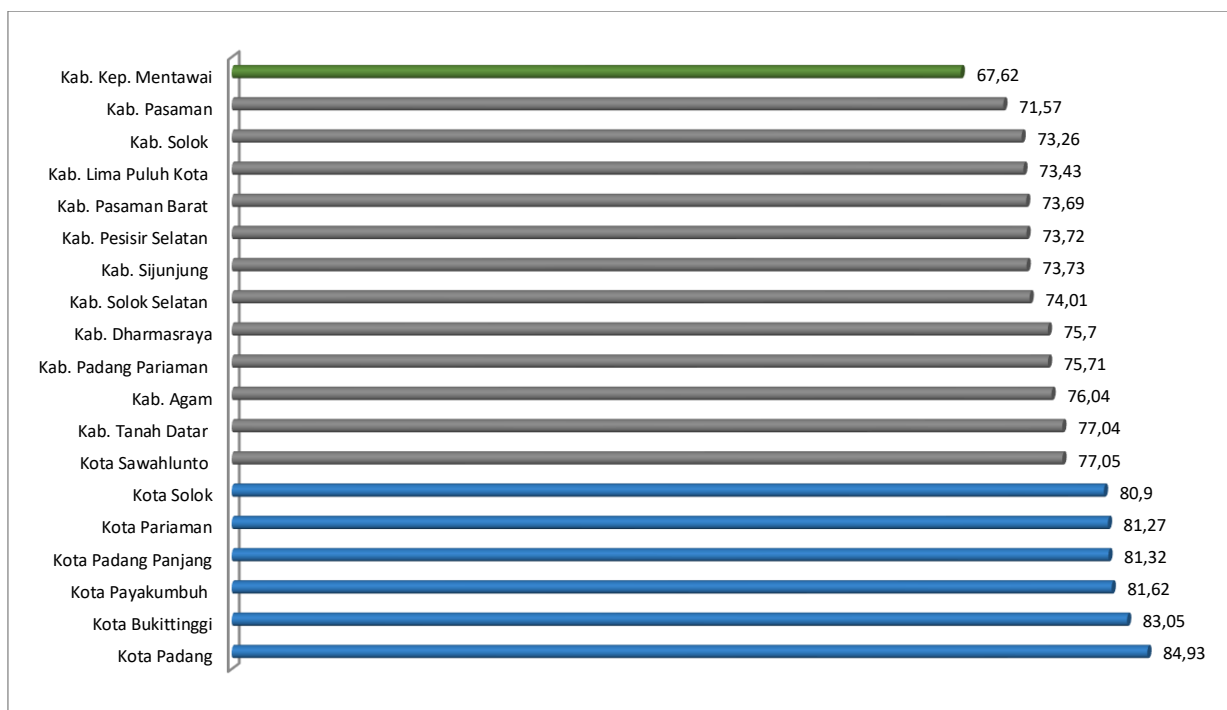


IPM Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 77,27 merupakan refleksi agregat dari capaian 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Berdasarkan grafik IPM Tahun 2025, distribusi capaian menunjukkan bahwa terdapat 6 daerah yang telah berada pada kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$), yaitu Kota Padang (84,93), Kota Bukittinggi (83,05), Kota Payakumbuh (81,62), Kota Padang Panjang (81,32), Kota Pariaman (81,27), dan Kota Solok (80,90). Keenam daerah tersebut merupakan wilayah perkotaan dengan karakteristik akses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang relatif lebih maju. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi mencatat nilai IPM tertinggi dan menjadi kontributor utama terhadap capaian provinsi.

Sebanyak 12 daerah berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dengan rentang nilai antara 71,57 hingga 77,05. Kabupaten Tanah Datar (77,04) dan Kota Sawahlunto (77,05) merupakan daerah dengan capaian tertinggi dalam kelompok ini, mendekati rata-rata provinsi, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada pada kategori sedang (IPM 67,62) dan menjadi daerah dengan capaian terendah di Sumatra Barat. Selisih antara IPM tertinggi (Kota Padang) dan terendah (Kepulauan Mentawai) mencapai lebih dari 17 poin, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah. Komposisi ini memperlihatkan pola yang cukup jelas, dimana wilayah perkotaan mendominasi kategori sangat tinggi, wilayah daratan non-perkotaan berada pada kategori tinggi, dan wilayah kepulauan masih tertinggal. Nilai IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat digambarkan seperti grafik 3.1.

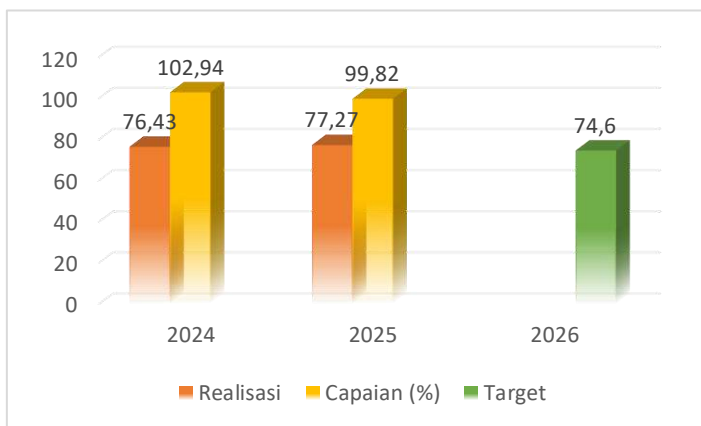


Grafik 3. 1 IPM 19 se Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator IPM menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IPM tahun 2025 tercatat sebesar 77,27,



meningkat 0,84 poin dari Tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,43. Peningkatan ini mengindikasikan keberlanjutan hasil pembangunan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun demikian, jika dilihat dari sisi terjadi penurunan. Pada Tahun 2024, tingkat capaian

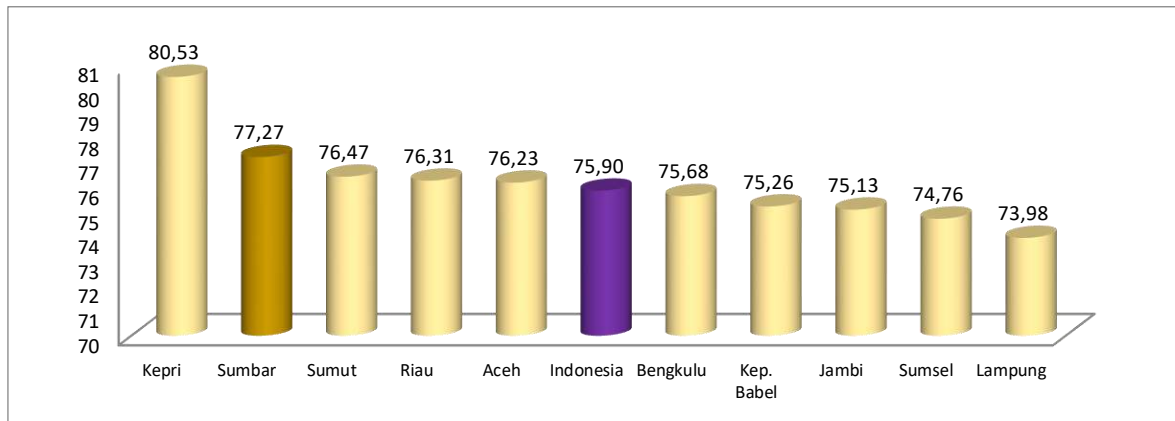
mencapai 102,94%, yang berarti realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada Tahun 2025 capaian berada pada angka 99,82%, atau sedikit di bawah target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun jangka menengah, IPM Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 yang mencapai 77,27, melampaui target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar 74,60 atau sekitar 103,58% dari target tahun 2026, sehingga capaian ini tercapai satu tahun lebih cepat dengan selisih 2,67 poin. Oleh karena itu, capaian ini perlu dimaknai sebagai momentum untuk menetapkan target yang lebih progresif pada periode perencanaan berikutnya, serta



memperkuat dimensi yang pertumbuhannya relatif lambat, sehingga tujuan mewujudkan SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing tetap terjaga secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatra Barat.

Grafik 3. 2 Perbandingan IPM Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2025



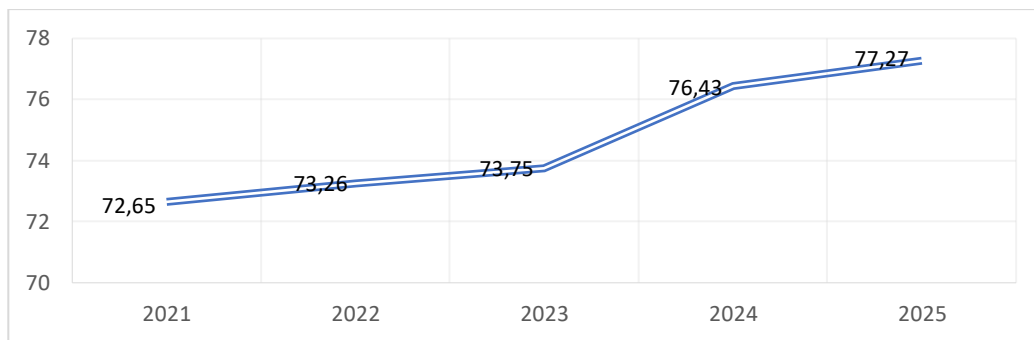
Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

Berdasarkan grafik di atas, secara nasional IPM Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 77,27 lebih tinggi 1,37 poin dibandingkan IPM Nasional. Selisih tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di Sumatra Barat berada pada tingkat yang lebih baik daripada rata-rata Indonesia. Pada regional Sumatra, Sumatra Barat menempati peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau yang mencatat IPM sebesar 80,53. Posisi ini mencerminkan daya saing pembangunan manusia Sumatra Barat yang relatif kuat di kawasan Sumatra.

Perkembangan IPM dari tahun 2021-2025 meningkat secara konsisten dengan kenaikan total 4,62 poin, dimana lonjakan terbesar terjadi pada periode 2023-2024 sebesar 2,68 poin dan tetap tumbuh positif pada 2024-2025 meskipun lebih moderat dibandingkan lonjakan tahun sebelumnya. Tren ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia di Sumatra Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin menguat dalam dua tahun terakhir. Dengan capaian Tahun 2025 sebesar 77,27, posisi IPM provinsi semakin mendekati kategori yang lebih tinggi, sekaligus memperlihatkan konsistensi kebijakan pembangunan manusia selama periode RPJMD 2021-2026. Namun demikian, untuk mempertahankan tren peningkatan ini, diperlukan penguatan intervensi yang lebih terfokus pada pemerataan kualitas layanan dasar antar wilayah agar pertumbuhan IPM tetap stabil dan berkelanjutan. Perkembangan IPM tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.3.



Grafik 3. 3 Perkembangan IPM dari tahun 2021-2025



Sumber Data: Berita Resmi Statistik Nomor 68/11/13/Th.XXVII, tanggal 5 November 2025

Peningkatan nilai IPM, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terkait kesehatan, pendidikan dan daya saing masyarakat. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain:

1. Kesehatan:

- a. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencakup skrining kesehatan berdasarkan usia yang dapat diakses warga pada hari ulang tahun mereka yang telah dimulai pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pemerintah provinsi Sumatra Barat menargetkan untuk menjangkau 46% penduduk Sumatra Barat melalui cek kesehatan gratis pada tahun 2026.
- b. Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) melalui perkuatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan finansial saat mengakses layanan medis. Di beberapa daerah, masyarakat kini cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas yang bekerja sama.
- c. Modernisasi fasilitas kesehatan melalui revitalisasi dan peningkatan standar RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) serta Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Penguatan upaya preventif dan promotif dengan cara:
 - 1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui sosialisasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan olahraga melalui penyuluhan publik.
 - 2) Sanitasi dan Gizi melalui peningkatan standar higiene, sistem sanitasi aman, dan program perbaikan gizi untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan usia harapan hidup.
 - 3) Pengembangan layanan khusus untuk kesehatan jiwa dan kesehatan lansia
 - 4) Implementasi digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan standar mutu, efisiensi, dan transparansi tata kelola rumah sakit daerah.

2. Pendidikan:

- a. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yaitu 8 RKB di jenjang SMA, 3 USB dan 1 RKB di jenjang SMK selama tahun 2025
- b. Memberikan beasiswa kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima di jenjang SMA sebanyak 510 orang, di jenjang SMK sebanyak 242 orang, di jenjang SLB sebanyak 300, serta berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang.
- c. Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi sarana/prasarana pendidikan yaitu revitalisasi 51 SMK di Sumatra Barat selama tahun 2025
- e. Penguatan Kebijakan dan Peran Lembaga Pendidikan Lokal
Penguatan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatra Barat Periode 2025–2030 merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kualitas pendidikan, inklusivitas, dan relevansi kebutuhan abad 21. Peran Dewan Pendidikan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran.
- f. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah

3. Peningkatan Daya Saing Masyarakat:

- a. Memberikan beasiswa kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima di jenjang SMA sebanyak 510 orang, di jenjang SMK sebanyak 242 orang, di jenjang SLB sebanyak 300, serta berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang.
- b. Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan



- d. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah
- e. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja
- f. Penguatan kerja sama antara SMK dengan DUDI melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan, magang industri, dan keterlibatan industri dalam proses pembelajaran
- g. Pengembangan SMK BLUD (SMK Badan Layanan Usaha Daerah) dan SMK PK (SMK Pusat Keunggulan) melalui SK Gubernur untuk adaptasi kurikulum *link and match* dengan topografi Sumatra Barat
- h. Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis pada kompetensi kepada 3.495 orang dan pemagangan dalam negeri kepada 262 orang.

Di samping upaya di atas, masih ditemukan kendala dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing. Hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Pada beberapa daerah, akses ke lokasi pelayanan kesehatan masih terbatas.
2. Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan serta pemerataan tenaga kesehatan dan pendidikan yang belum optimal.
3. Pola asuh masyarakat dan praktek PHBS yang masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang pola asuh dan praktek PHBS.
4. Masih adanya SDM tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
5. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
6. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang.
7. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
8. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.
9. Keterbatasan daya serap dunia kerja terhadap lulusan pendidikan vokasi, karena masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan
10. Belum meratanya kualitas dan intensitas kemitraan antara SMK dan DUDI
11. Belum optimalnya jumlah SMK unggul berbasis potensi daerah





Untuk kedepannya, dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing akan diupayakan hal-hal berikut:

1. Secara konsisten mengiatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan.
4. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.
6. Melaksanakan pelatihan dengan *upskilling* dan *reskilling* dan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
7. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.
8. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan

Upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul, dan berdaya saing dijabarkan ke dalam empat sasaran utama, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi *stunting*, meningkatnya kualitas pendidikan, serta meningkatnya daya saing masyarakat. Keempat sasaran tersebut menjadi fokus strategis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan manusia. Adapun evaluasi dan analisis atas capaian masing-masing sasaran diuraikan pada bagian berikut.





Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan komponen mendasar dalam pembangunan manusia dan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan menjadi bagian dalam pencapaian Tujuan 1. Hal ini dikarenakan kualitas kesehatan yang memadai akan memperkuat dimensi pendidikan dan kesejahteraan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Untuk mengukur tercapainya sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH menggambarkan rata-rata perkiraan lamanya hidup seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan pola mortalitas yang berlaku pada suatu periode tertentu. Nilai AHH yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya kualitas layanan kesehatan, perbaikan status gizi, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta membaiknya kondisi lingkungan dan perilaku hidup masyarakat. Dengan demikian, AHH menjadi indikator yang relevan dan representatif dalam menilai keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan Angka Harapan Hidup dapat mencapai angka 74,79. Target angka harapan hidup tahun 2025 naik 0,42 tahun dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun 2024 sebesar 74,37. Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

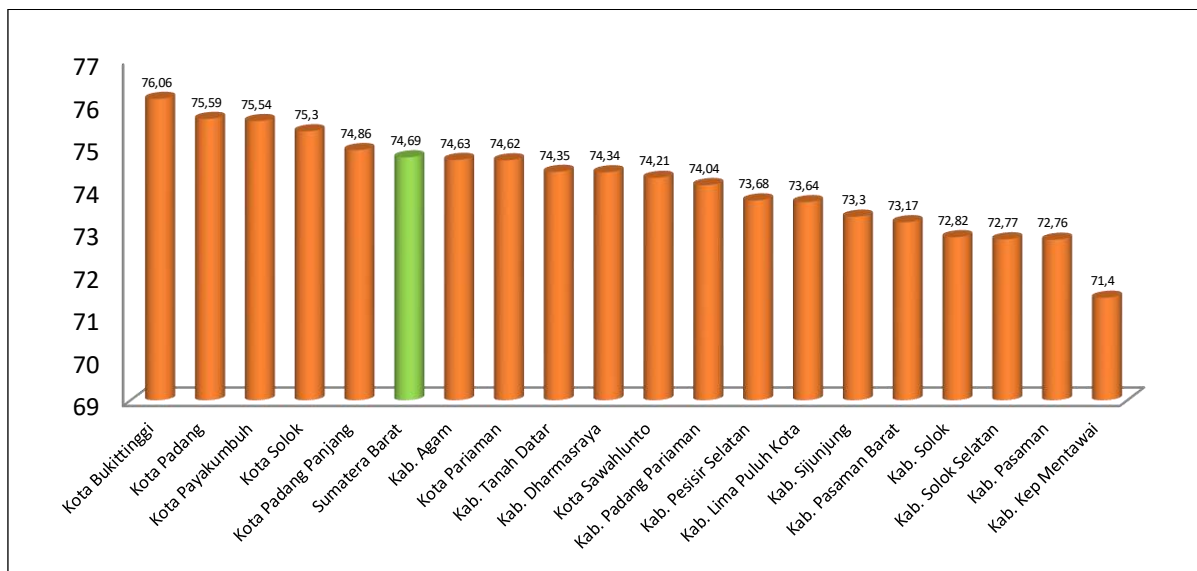




Data realisasi AHH Tahun 2025 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor 68/11/13/Th. XXVIII tanggal 5 November 2025 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025. Berdasarkan BRS tersebut, AHH Provinsi Sumatra Barat pada Tahun 2025 mencapai 74,69 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 74,37 tahun. Angka harapan hidup mencapai 74,79 tahun ini bermakna bayi yang lahir pada Tahun 2025 di Sumatra Barat diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia tersebut apabila pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap berlangsung.

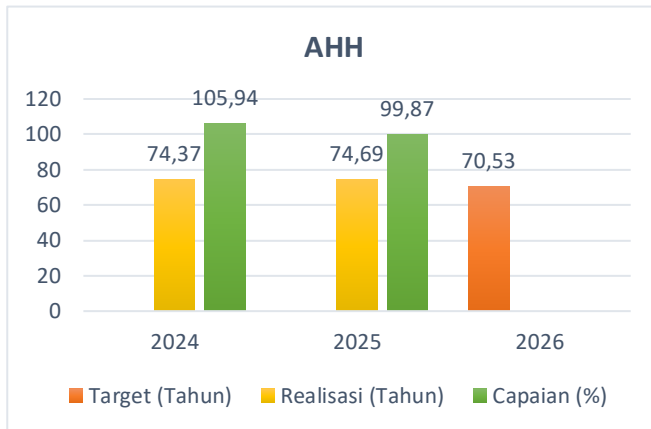
Berdasarkan data Tahun 2025, AHH Provinsi Sumatra Barat sebesar 74,69 tahun dengan variasi capaian antar Kabupaten/Kota yang cukup beragam. AHH tertinggi tercatat di Kota Bukittinggi (76,06 tahun), diikuti Kota Padang (75,59) dan Kota Payakumbuh (75,54), yang umumnya didukung oleh akses layanan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sedangkan AHH terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (71,40 tahun). Selisih sekitar 4,66 tahun antara daerah tertinggi dan terendah menunjukkan masih adanya kesenjangan derajat kesehatan antar wilayah. Meskipun secara umum UHH Sumatra Barat berada pada tren yang positif, pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi fokus penting untuk memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. Gambaran angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota tahun 2025 disajikan pada grafik 3.4.

Grafik 3. 4 Angka Harapan Hidup Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Perhitungan capaian indikator AHH menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 74,69 tahun, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 74,37 tahun, atau naik 0,32 tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan

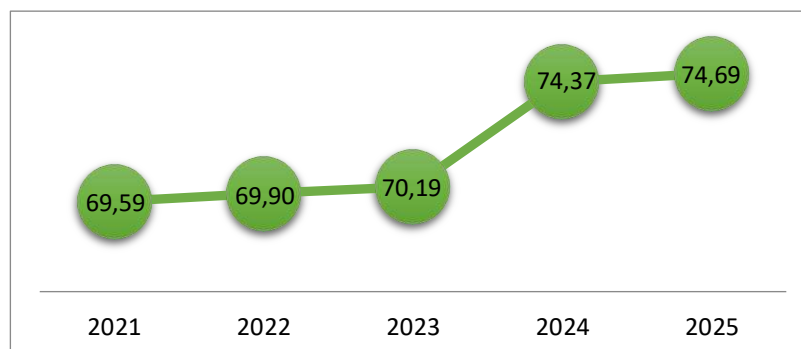


derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, dari sisi capaian, Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang melampaui target dengan capaian 106,21%, sedangkan Tahun 2025 berada pada angka 99,87%, sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai AHH meningkat

secara absolut, target Tahun 2025 ditetapkan lebih progresif sehingga realisasinya belum sepenuhnya mencapai sasaran.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,53 tahun, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sekitar 4,16 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator AHH secara substansial telah melebihi proyeksi jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, dari perspektif lima tahunan, kinerja pembangunan kesehatan berada pada jalur yang sangat baik dan bahkan melampaui target akhir periode.

Grafik 3. 5 Perkembangan Angka Harapan Hidup dari tahun 2021-2025



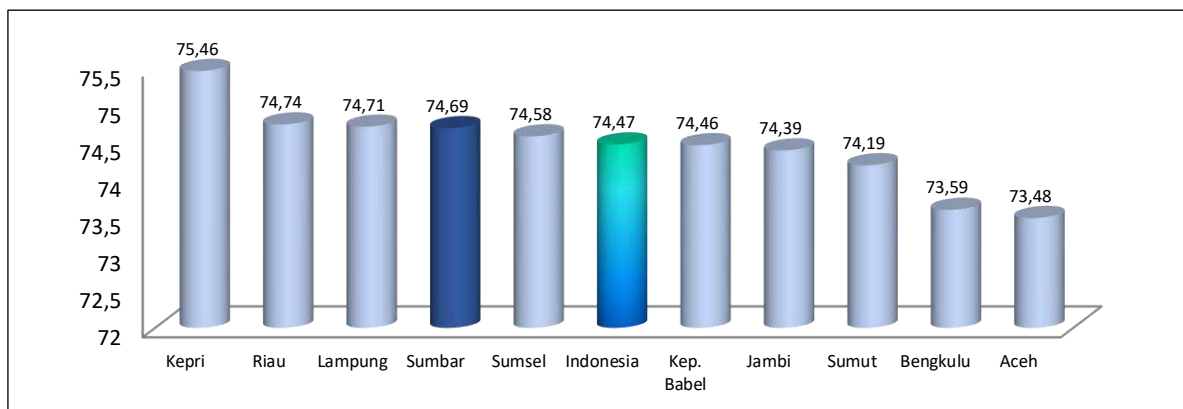
Sumber data: BPS Sumatra Barat

Berdasarkan grafik di atas, terlihat peningkatan yang konsisten dari 69,59 tahun pada Tahun 2021 menjadi 74,69 tahun pada Tahun 2025 atau naik sebesar 5,10 tahun dalam lima tahun terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2023–2024 yang menunjukkan adanya percepatan perbaikan derajat kesehatan masyarakat, sementara pada Tahun 2025 peningkatan tetap berlanjut meskipun dengan laju yang lebih moderat. Tren ini mencerminkan bahwa pembangunan sektor kesehatan berjalan secara berkelanjutan dan efektif dalam

memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJMD, namun tetap memerlukan penguatan intervensi terutama untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah agar peningkatan UHH dapat terjaga secara stabil dan merata.

Jika dibandingkan dengan nasional, AHH Sumatra Barat tercatat sebesar 74,69 tahun, berada 0,22 tahun di atas rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun dan menempati posisi keempat tertinggi di Sumatra setelah Kepulauan Riau (75,46 tahun), Riau (74,74 tahun), dan Lampung (74,71 tahun). Capaian ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Sumatra Barat relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Sumatra, seperti Sumatra Selatan (74,58 tahun), Kepulauan Bangka Belitung (74,46 tahun), Jambi (74,39 tahun), Sumatra Utara (74,19 tahun), Bengkulu (73,59 tahun), dan Aceh (73,48 tahun). Perbandingan angka harapan hidup Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.6.

Grafik 3. 6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: BPS

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator dan perbandingan kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat menunjukkan tren yang positif, meskipun masih terdapat tantangan terkait pemerataan dan optimalisasi capaian di beberapa wilayah. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :

- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencakup skrining kesehatan berdasarkan usia yang dapat diakses warga pada hari ulang tahun mereka yang telah dimulai pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pemerintah

provinsi Sumatra Barat menargetkan untuk menjangkau 46% penduduk Sumatra Barat melalui cek kesehatan gratis pada tahun 2026.

- b. Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) melalui perkuatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan finansial saat mengakses layanan medis. Di beberapa daerah, masyarakat kini cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas yang bekerja sama.
- c. Modernisasi Fasilitas Kesehatan melalui revitalisasi dan peningkatan standar RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) serta Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Penguatan Upaya Preventif dan Promotif dengan cara:
 - 1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Sosialisasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan olahraga melalui penyuluhan publik.
 - 2) Sanitasi dan Gizi melalui peningkatan standar higiene, sistem sanitasi aman, dan program perbaikan gizi untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan usia harapan hidup.
 - 3) Pengembangan layanan khusus untuk kesehatan jiwa dan kesehatan lansia
 - 4) Implementasi digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan standar mutu, efisiensi, dan transparansi tata kelola rumah sakit daerah.

Di samping upaya yang dilakukan, masih ditemukan beberapa hambatan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu:

1. Distribusi dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang tidak merata di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Meskipun jumlah lulusan medis meningkat, penempatan mereka masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
2. Masih banyak puskesmas dan RSUD yang memiliki fasilitas medis minim, serta keterbatasan sarana penunjang seperti ketersediaan air bersih dan listrik yang stabil (misalnya belum adanya genset cadangan di beberapa instansi daerah).
3. Upaya transformasi kesehatan melalui Rekam Medis Elektronik (RME) terhambat oleh masalah konektivitas internet di daerah serta ketidaksiapan petugas dalam menggunakan sistem komputerisasi. Isu keamanan siber dan privasi data pasien juga menjadi kekhawatiran besar dalam adopsi teknologi ini.
4. Pemerintah masih berjuang menangani angka *stunting* dan gizi buruk yang tinggi di samping meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM).
5. Masih terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi dan belum optimalnya alokasi anggaran menghambat eksekusi program-program strategis.



6. Kondisi geografis yang sulit di beberapa mengakibatkan masyarakat kesulitan menjangkau layanan kesehatan primer, sehingga memerlukan penguatan program seperti puskesmas atau posbindu keliling.
7. Penurunan kualitas lingkungan, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pengelolaan sampah yang belum optimal berkontribusi pada penurunan derajat kesehatan masyarakat di daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Berikut beberapa langkah ke depan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan yang berkualitas, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.
2. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Germas.
3. Kolaborasi dengan pihak terkait dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini dapat memperluas cakupan program-program kesehatan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien.
4. Pemantauan dan Evaluasi program-program kesehatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilaksanakan 5 Program dengan 18 Kegiatan dan 68 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 238.689.760.884,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	18	68	238.689.760.884,00	214.427.971.490,00
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5	33	146.271.509.918,00	130.250.517.920,00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	2	585.739.700,00	463.265.532,00

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	3	646.161.000,00	594.450.920,00
4	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4	10	35.836.104.824,00	35.055.419.709,00
5	Program Rehabilitasi Sosial	4	20	55.350.245.442,00	48.064.317.409,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 238.689.760.884,00,- terealisasi sebesar Rp. 214.427.971.490,00,- atau 89,84%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.261.789.394,00,- (10,16%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercapai 99,87% dengan realisasi anggaran (89,84%) diperoleh tingkat efisiensi sebesar 75,09%.



Sasaran menurunnya prevalensi *stunting* merupakan bagian strategis untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing. *Stunting* tidak hanya mencerminkan permasalahan gizi kronis pada anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, termasuk perkembangan kognitif, produktivitas, dan daya saing di masa depan. Oleh karena itu, penurunan *stunting* menjadi intervensi fundamental dalam pembangunan manusia, karena kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak usia dini sangat menentukan kualitas generasi mendatang.

Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan indikator Prevalensi *Stunting*, yaitu persentase balita yang memiliki tinggi badan menurut umur di bawah standar (di bawah minus dua standar deviasi) berdasarkan standar pertumbuhan anak yang ditetapkan secara nasional. Semakin rendah angka prevalensi *stunting*, semakin baik kondisi gizi dan kesehatan anak di suatu wilayah. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran yang relevan dalam menilai efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan status gizi masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021–2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan target prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita Tahun 2025 sebesar 12,50%. Angka ini lebih tinggi 3,20 poin dibandingkan realisasi 2024 sebesar 9,3%. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan penurunan *stunting* secara bertahap dan terukur dalam kerangka perencanaan jangka menengah daerah. Pencapaian sasaran menurunnya prevalensi *stunting* tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi e-PPGBM pada sistem Sigizikesga Terpadu sebagai instrumen penilaian kinerja program gizi.

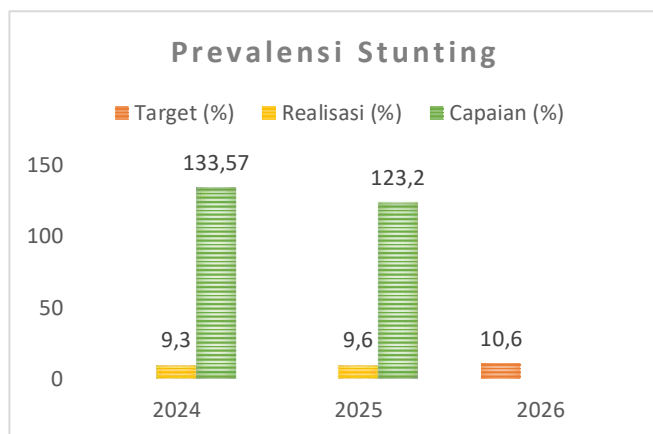
Prevalensi *stunting* pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat menunjukkan bahwa terdapat 8 daerah dengan prevalensi di bawah rata-rata provinsi, sementara 11 daerah masih berada di atas angka 9,6%. Prevalensi terendah tercatat di Kota Payakumbuh (2,7%) dan Kota Padang (2,8%), yang mencerminkan efektivitas intervensi gizi serta dukungan layanan kesehatan yang relatif lebih baik di wilayah perkotaan. Sebaliknya, prevalensi tertinggi berada di Kabupaten Pasaman (17,7%) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (17,5%). Selisih antara daerah dengan prevalensi terendah dan tertinggi mencapai sekitar 15%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam capaian pembangunan gizi antarwilayah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan intervensi yang lebih terarah, khususnya pada daerah dengan prevalensi di atas rata-rata provinsi. Rincian *prevalensi stunting* se Sumatra Barat digambarkan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Prevalensi Stunting per Kabupaten/Kota berdasarkan data e-ppgbm melalui intervensi serentak pada bulan Agustus Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	% Stunting
1	Kota Payakumbuh	8483	230	2,7
2	Kota Padang	56065	1565	2,8
3	Kota Sawahlunto	3958	222	5,6
4	Kabupaten Dharmasraya	15097	933	6,2
5	Kabupaten Pesisir Selatan	32554	2091	6,4
6	Kabupaten Agam	28450	2361	8,3
7	Kabupaten Padang Pariaman	26237	2254	8,6

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	% Stunting
8	Kota Solok	3717	352	9,5
9	Kota Padang Panjang	3321	319	9,6
10	Kota Pariaman	5854	612	10,5
11	Kota Bukittinggi	5567	629	11,3
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	21167	2547	12,0
13	Kabupaten Pasaman Barat	32654	4054	12,4
14	Kabupaten Solok	27811	3603	13,0
15	Kabupaten Solok Selatan	9429	1237	13,1
16	Kabupaten Tanah Datar	15850	2339	14,8
17	Kabupaten Sijunjung	16312	2608	16,0
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7460	1309	17,5
19	Kabupaten Pasaman	19952	3535	17,7
20	Sumatra Barat	339938	32800	9,6

Perhitungan capaian indikator *prevalensi stunting* menggunakan *metode pengukuran kriteria kedua*. Realisasi prevalensi *stunting* meningkat dari 9,3% pada Tahun 2024 menjadi 9,6% pada



Tahun 2025, atau naik sebesar 0,3%.

Secara substansi, kenaikan ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan angka *stunting* dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, dari sisi capaian terhadap target, kinerja Tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik dengan capaian 123,20%, meskipun

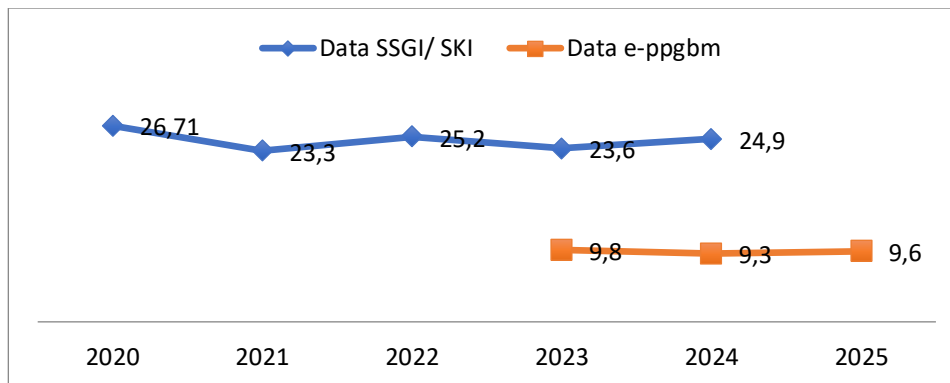
lebih rendah dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 139,73%. Penurunan persentase capaian tersebut bukan disebabkan oleh penurunan kinerja secara signifikan, melainkan karena realisasi Tahun 2025 relatif lebih mendekati target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan realisasi prevalensi *stunting* Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD (2026), terlihat bahwa capaian Tahun 2025 sebesar 9,6% telah lebih rendah dibandingkan target akhir jangka menengah yang ditetapkan sebesar 10,6%. Selisih sebesar 1,0 % ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan *stunting* telah melampaui proyeksi akhir periode perencanaan. Dengan demikian, dari perspektif lima tahunan, indikator prevalensi *stunting* berada pada jalur yang sangat baik dan bahkan telah mencapai kondisi yang lebih baik dari target akhir RPJMD sebelum periode berakhir. Meskipun demikian, konsistensi intervensi tetap diperlukan untuk menjaga agar angka prevalensi tidak kembali meningkat serta memastikan penurunan yang lebih merata di seluruh .

Berdasarkan perkembangan Tahun 2020–2025, prevalensi *stunting* menunjukkan perbedaan tren antara data survei nasional SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dan data rutin e-PPGBM

(elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Data SSGI berada pada kisaran 23–26% dengan pola fluktuatif, namun pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan survei SSGI sehingga tidak tersedia angka pembandingan berbasis survei nasional untuk tahun tersebut. Sementara itu, berdasarkan e-PPGBM, prevalensi *stunting* tercatat 9,8% pada Tahun 2023, menurun menjadi 9,3% pada Tahun 2024, dan sedikit meningkat menjadi 9,6% pada Tahun 2025. Perbedaan angka antar sumber data disebabkan oleh perbedaan metodologi, dimana SSGI/SKI menggunakan pendekatan survei sampling representatif untuk estimasi makro, sedangkan e-PPGBM merupakan data rutin pelayanan berbasis pencatatan langsung balita di Posyandu yang lebih mencerminkan monitoring operasional program di tingkat daerah. Perkembangan prevalensi *stunting* dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.7.

Grafik 3. 7 Perkembangan Prevalensi *stunting* dari tahun 2020-2025



Sumber data: Hasil SSGI dan e-PPGBM

Jika dibandingkan dengan capaian Prevalensi *Stunting* Nasional sebesar 19,8% (Berdasarkan data SSGI Tahun 2024 yang dirilis 2025), angka Sumatra Barat sebesar 24,9% (SSGI tahun 2024), secara komparatif masih 5,1% lebih tinggi dari rata-rata nasional apabila menggunakan sumber survei yang sama. Namun pada Tahun 2025 tidak dilakukan SSGI, sehingga pembandingan terbaru tetap mengacu pada data 2024. Sementara itu, apabila menggunakan data e-PPGBM Tahun 2025, prevalensi *stunting* Sumatra Barat tercatat sebesar 9,6%. Angka ini secara nominal jauh lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8%, tetapi perbandingan ini tidak sepenuhnya setara karena perbedaan metodologi, dimana SSGI berbasis survei sampling representatif, sedangkan e-PPGBM merupakan data operasional hasil pencatatan langsung pelayanan di Posyandu.

Untuk menangani *stunting*, Pemerintah Sumatra Barat telah mensinergikan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah . Hal-hal yang dilakukan untuk menangani *stunting* di Sumatra Barat, yaitu:

1. Peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi dilaksanakan melalui supervisi lapangan, monitoring terpadu imunisasi, penerbitan Surat Edaran Gubernur terkait Akselerasi Capaian Imunisasi Kabupaten/Kota, serta evaluasi dan umpan balik capaian imunisasi secara berkala (mingguan dan triwulanan)
2. Penguatan pelaksanaan Surveilans gizi melalui aplikasi sigizikesga (system informasi Kesehatan keluarga dan gizi)
3. Penguatan pelayanan kesehatan remaja melalui workshop atau implementasi Sekolah/Madrasah Sehat untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah
4. Optimalisasi edukasi ke masyarakat melalui aktivasi kelas ibu hamil.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan program gizi ke Kabupaten/Kota dan puskesmas
6. Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal untuk balita bermasalah gizi dan Ibu hamil KEK
7. Optimalisasi Pembinaan UKMB (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
8. Penguatan Implementasi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Sehat
9. Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Surveilans Air Minum Rumah Tangga
10. Optimalisasi Keluarga Akses Jamban Sehat

Berbagai hambatan/kendala dihadapi dalam penanganan *stunting*, hambatan tersebut antara lain:

1. Masih lemahnya kolaborasi antar OPD terhadap intervensi penanganan *stunting*
2. Anggaran untuk program pencegahan *stunting* sering kali tidak mencukupi untuk kegiatan monitoring, edukasi, dan pengadaan makanan tambahan.
3. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, terutama di Puskesmas yang jauh dari pusat kota.
4. Masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang berkualitas.
5. Sebagian pemimpin daerah belum sepenuhnya mendukung prioritas intervensi *stunting* dalam kebijakan lokal.
6. Kebiasaan memberi makanan instan atau kurang gizi kepada anak masih terjadi di beberapa wilayah.
7. Daerah yang sulit diakses menjadi tantangan untuk distribusi makanan tambahan, pelayanan kesehatan, dan edukasi langsung.





Upaya penanganan *stunting* ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat validasi dan integrasi data melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.
2. Memberikan pelatihan teknis berkelanjutan kepada tenaga kesehatan dan kader Posyandu.
3. Mengupayakan peningkatan alokasi dana dari APBD maupun dana desa untuk penanganan *stunting*.
4. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya gizi dan pola asuh melalui media lokal dan kader.
5. Mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat dalam intervensi *stunting*.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, dilaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan dan 7 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 109.133.103.839,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran menurunnya prevalensi *stunting*. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran menurunnya prevalensi *stunting* dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Menurunnya Prevalensi <i>Stunting</i>	2	7	109.133.103.839,00	105.042.551.350,00
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	2	108.087.432.839,00	104.107.859.850,00
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	5	1.045.671.000,00	934.691.500,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 109.133.103.839,00,- terealisasi sebesar Rp. 105.042.551.350,00,- atau 96,25%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.090.552.489,00,- (3,75%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran menurunnya prevalensi *stunting* yang tercapai 123,20% dengan realisasi anggaran (96,25%) diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kapasitas intelektual, keterampilan, karakter, serta daya saing masyarakat. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan dua indikator utama, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, sehingga mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat saat ini. Sementara itu, HLS menunjukkan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal pada masa yang akan datang. Kedua indikator tersebut saling melengkapi, dimana RLS merepresentasikan kondisi aktual tingkat pendidikan penduduk, sedangkan HLS mencerminkan prospek keberlanjutan akses pendidikan. Dengan demikian, peningkatan RLS dan HLS menjadi ukuran yang relevan dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan manusia secara menyeluruh. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata lama sekolah	9,47	9,77	103,17
Harapan Lama Sekolah	14,30	14,31	100,07
Rata-rata Capaian			101,62

Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 101,62%, termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”.





Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh masyarakat, yang pada akhirnya mencerminkan kualitas sumber daya manusia dari sisi pencapaian pendidikan aktual. Perhitungan RLS dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat atau kelas tertinggi yang diselesaikan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, rata-rata lama sekolah tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai 9,47 tahun. Meningkat 0,03 tahun dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang sebesar **9,44 tahun**. Pencapaian indikator kinerja RLS tahun 2025 adalah sebagai berikut:



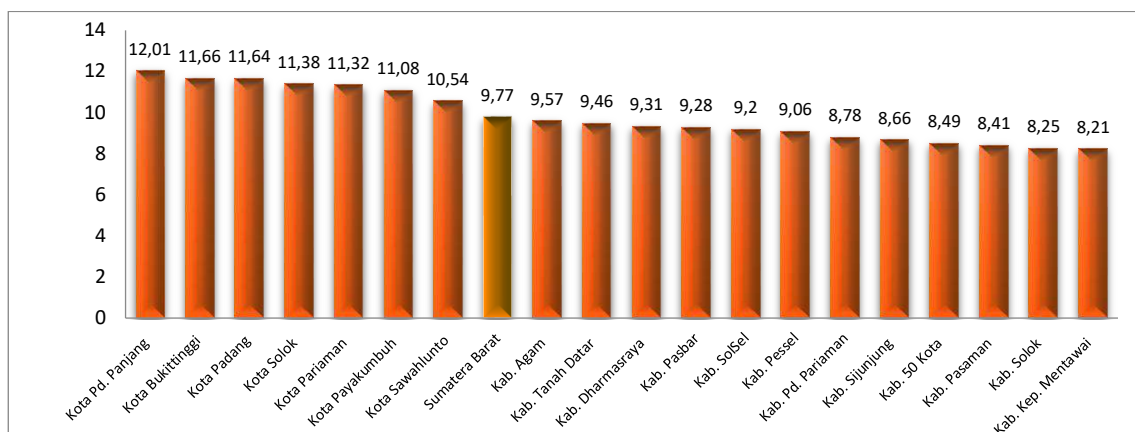
Data realisasi RLS Tahun 2025 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik No. 68/11/13/Th. XXVIII, 5 November 2025 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025. Nilai RLS sebesar 9,77 tahun mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatra Barat telah menempuh pendidikan formal hampir setara dengan kelas XI jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Secara spasial, capaian RLS tertinggi di Sumatra Barat berada pada wilayah perkotaan, yaitu Kota Padang Panjang (12,01 tahun), diikuti Kota Bukittinggi (11,66 tahun) dan Kota Padang (11,64 tahun). Nilai di atas 11 tahun pada kota-kota tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA bahkan sebagian memasuki pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan akses pendidikan yang relatif lebih baik, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang lebih mendukung keberlanjutan pendidikan.



Sebaliknya, beberapa kabupaten masih berada pada kisaran 8–9 tahun, dengan capaian terendah tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (8,21 tahun) dan Kabupaten Solok (8,25 tahun). Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat di wilayah tersebut masih berada pada jenjang SMP. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses dan keberlanjutan pendidikan antara wilayah perkotaan dan sebagian wilayah kabupaten, yang dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi sosial ekonomi, serta distribusi fasilitas pendidikan. Gambaran RLS tahun 2025 disajikan pada grafik 3.8.

Grafik 3. 8 Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator rata-rata lama sekolah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 dan 2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten baik dari sisi realisasi maupun capaian kinerja. Realisasi RLS



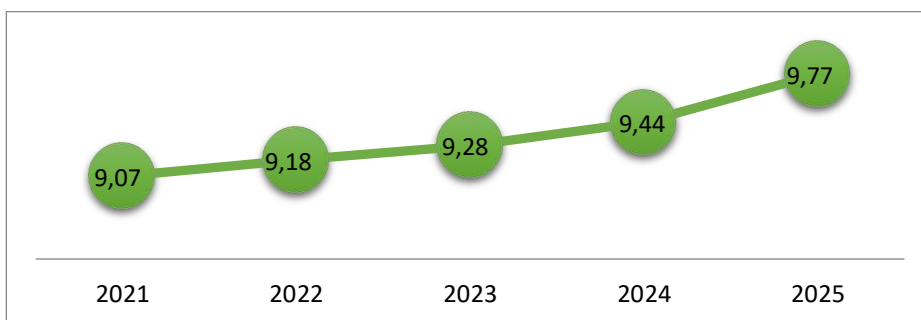
meningkat dari 9,44 tahun pada 2024 menjadi 9,77 tahun pada 2025 atau bertambah 0,33 tahun, sementara tingkat capaian naik dari 100,64% menjadi 103,17%. Hal ini menegaskan bahwa kinerja tahun 2025 tidak hanya mempertahankan capaian di atas target, tetapi juga menunjukkan akselerasi peningkatan kualitas pendidikan yang semakin memperkuat pembangunan sumber daya

manusia di Sumatra Barat.

Jika dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2026, realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 sebesar 9,77 tahun telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,57 tahun. Terdapat selisih positif sebesar 0,20 tahun, yang

menunjukkan bahwa capaian indikator ini telah melampaui sasaran akhir periode perencanaan. Secara persentase, realisasi Tahun 2025 setara dengan sekitar 102,09% terhadap target akhir RPJMD, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan berada pada jalur yang sangat baik dan bahkan lebih cepat dari proyeksi yang direncanakan.

Grafik 3. 9 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2021-2025

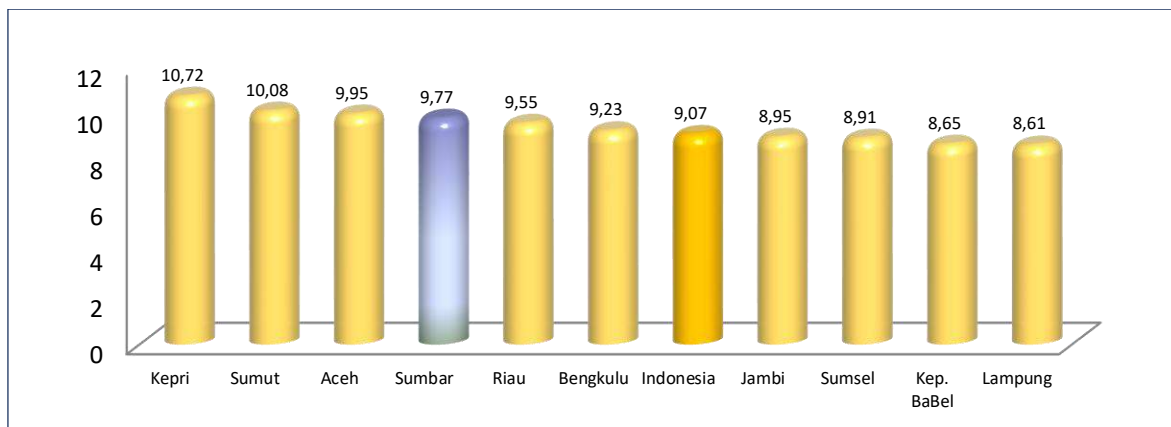


Sumber data: BPS Sumbar

Berdasarkan grafik di atas, terlihat tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. RLS Sumatra Barat meningkat dari 9,07 tahun pada 2021, menjadi 9,18 tahun pada 2022, 9,28 tahun pada 2023, 9,44 tahun pada 2024, dan mencapai 9,77 tahun pada 2025. Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,70 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam durasi pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2024–2025, yang mengindikasikan adanya akselerasi capaian pendidikan pada tahun terakhir.

Nilai RLS Sumatra Barat menempati peringkat ke-10 secara Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Barat menempati ke-4, berada di bawah Kepulauan Riau, Sumatra Utara, dan Aceh, serta di atas sebagian besar provinsi lainnya di wilayah tersebut. Secara nasional, realisasi tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia sebesar 9,07 tahun dengan selisih 0,70 tahun, sehingga menempatkan Sumatra Barat dalam kelompok provinsi dengan tingkat pendidikan menengah atas. Posisi ini menunjukkan bahwa kualitas capaian pendidikan di Sumatra Barat relatif kompetitif baik pada level regional maupun nasional. Perbandingan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.10.

Grafik 3. 10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah secara Nasional dan Regional Tahun 2025

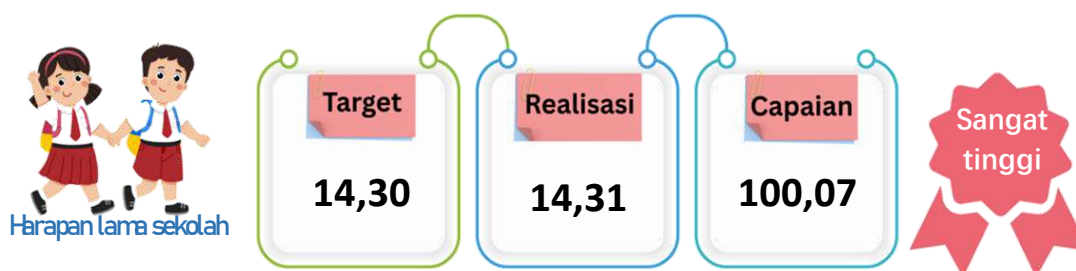


Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun untuk menjalani pendidikan formal di masa mendatang, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap berlaku. Berbeda dengan RLS yang merefleksikan capaian pendidikan penduduk saat ini, HLS lebih bersifat prospektif karena menunjukkan potensi keberlanjutan pendidikan generasi yang akan datang. Dengan demikian, HLS memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing, karena semakin tinggi angka HLS maka semakin besar peluang anak-anak memperoleh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

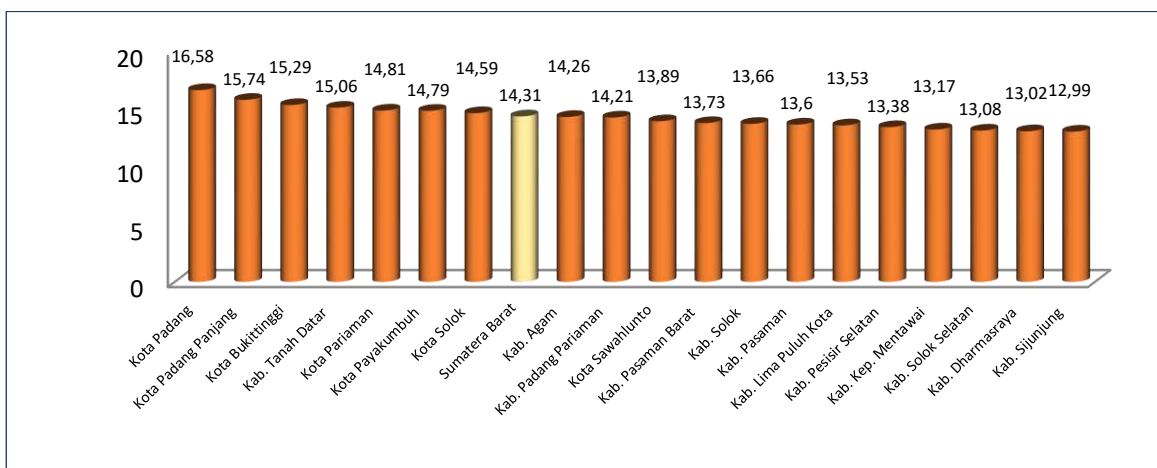
Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026, target Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 14,30 tahun. Penetapan target ini disesuaikan dengan realisasi Tahun 2024 yang telah mencapai 14,30 tahun, sekaligus mempertimbangkan bahwa target tahunan RPJMD untuk Tahun 2025 pada dasarnya telah terlampaui pada periode sebelumnya. Dengan demikian, penyesuaian target Tahun 2025 mengikuti capaian aktual Tahun 2024 sebagai bentuk rasionalisasi perencanaan agar tetap realistis dan terukur. Pencapaian indikator kinerja HLS tahun 2025 adalah sebagai berikut:



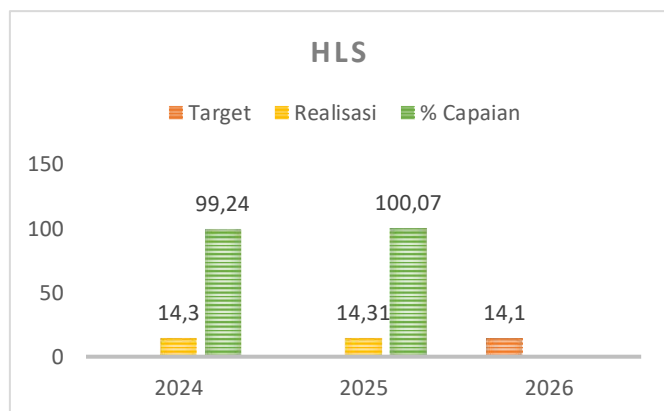
Realisasi HLS tahun 2025 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Nomor 68/11/13/Th.XXVIII tanggal 5 November 2025 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025. Nilai HLS sebesar 14,31 tahun mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga sekitar semester awal perguruan tinggi, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini berlanjut.

HLS Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 14,31 tahun merupakan agregasi dari capaian 19 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tahun 2025, dari 19 daerah terdapat 8 daerah yang memiliki HLS di atas rata-rata provinsi dan 11 daerah masih berada di bawah rata-rata provinsi. HLS tertinggi tercatat di Kota Padang (16,58 tahun), diikuti Kota Padang Panjang (15,74 tahun) dan Kota Bukittinggi (15,29 tahun), sedangkan HLS terendah berada di Kabupaten Sijunjung (12,99 tahun), disusul Kabupaten Dharmasraya (13,02 tahun) dan Kabupaten Solok Selatan (13,08 tahun). Selisih antara nilai tertinggi dan terendah mencapai sekitar 3,59 tahun, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan ekspektasi lama sekolah antar wilayah. Gambaran tersebut menegaskan bahwa meskipun rata-rata provinsi telah berada pada level yang baik, tantangan pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan di beberapa kabupaten masih perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan pendidikan ke depan. Gambaran HLS 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.11.

Grafik 3. 11 Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat



Sumber data: BPS Sumatra Barat



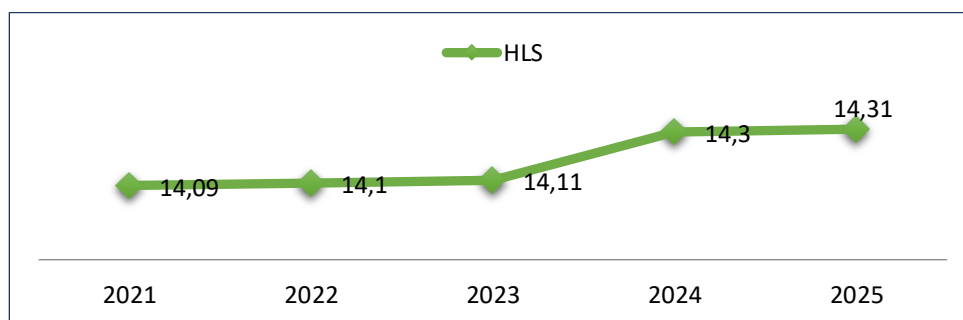
Perhitungan capaian indikator HLS menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari segi realisasi, HLS meningkat dari 14,30 tahun pada 2024 menjadi 14,31 tahun pada 2025, meskipun kenaikannya relatif moderat sebesar 0,01 tahun. Dari sisi capaian kinerja, terjadi perbaikan yang lebih signifikan, yaitu dari

99,24% pada 2024 menjadi 100,07% pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi masih sedikit di bawah target, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, terlihat bahwa realisasi Tahun 2025 sebesar 14,31 tahun telah melampaui target akhir 2026 sebesar 14,10 tahun. Terdapat selisih positif sebesar 0,21 tahun, yang menunjukkan bahwa capaian indikator ini telah melebihi sasaran yang direncanakan untuk akhir periode RPJMD. Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat perlu menetapkan standar kinerja yang lebih progresif pada periode perencanaan berikutnya.

HLS Sumatra Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 0,22 tahun. Nilai HLS meningkat dari 14,09 tahun pada 2021, menjadi 14,10 tahun pada 2022, dan 14,11 tahun pada 2023, yang menunjukkan kenaikan yang relatif stabil meskipun masih dalam rentang pertumbuhan yang moderat. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2024, di mana HLS naik menjadi 14,30 tahun, atau meningkat sebesar 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut berlanjut pada Tahun 2025 dengan capaian 14,31 tahun, meskipun kenaikannya hanya 0,01 tahun dari Tahun 2024. Perkembangan HLS dari tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.12.

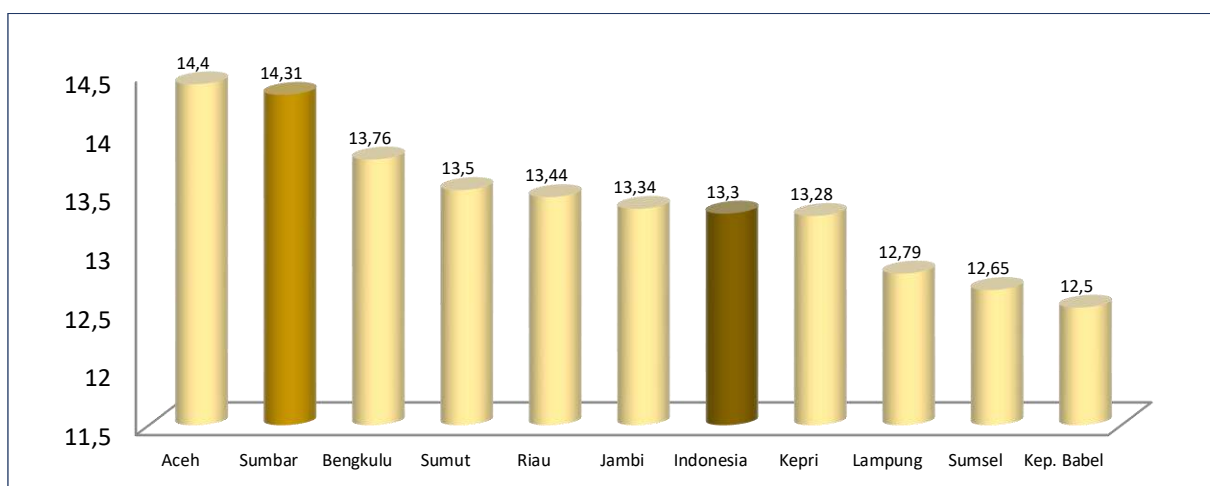
Grafik 3. 12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2021-2025



Sumber data: BPS Sumbar

Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 14,31 tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun regional. Dibandingkan dengan angka nasional sebesar 13,47 tahun, HLS Sumatra Barat lebih tinggi sekitar 0,84 tahun, yang mencerminkan ekspektasi lama sekolah yang lebih panjang dibandingkan rata-rata Indonesia. Pada tingkat regional Pulau Sumatra, Sumatra Barat menempati peringkat kedua tertinggi setelah Aceh (14,40 tahun) dan berada di atas provinsi lain seperti Bengkulu, Sumatra Utara, Riau, dan Jambi. Posisi ini menegaskan bahwa secara komparatif pembangunan pendidikan di Sumatra Barat memiliki daya saing yang kuat, baik dalam konteks nasional maupun regional. Perbandingan HLS Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Regional dapat dilihat pada grafik 3.13.

Grafik 3. 13 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Regional



Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melakukan upaya yang maksimal sesuai kewenangannya. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yaitu 8 RKB di jenjang SMA, 3 USB dan 1 RKB di jenjang SMK selama tahun 2025.
2. Memberikan beasiswa kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima di jenjang SMA sebanyak 510 orang, di jenjang SMK sebanyak 242 orang, di jenjang SLB sebanyak 300, serta berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang.
3. Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang



4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi sarana/prasarana pendidikan yaitu revitalisasi 51 SMK di Sumatra Barat selama tahun 2025
5. Penguatan Kebijakan dan Peran Lembaga Pendidikan Lokal
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatra Barat Periode 2025–2030 merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kualitas pendidikan, inklusivitas, dan relevansi kebutuhan abad 21. Peran Dewan Pendidikan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran.
6. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Masih adanya SDM tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
2. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang.
4. Rasio kebutuhan guru belum seimbang.

Untuk ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan beberapa upaya akan dilakukan yaitu:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,
2. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
3. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dilaksanakan 5 Program dengan 4 Kegiatan dan 78 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 704.678.284.875,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya



kualitas pendidikan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	78	704.678.284.875,00	677.671.114.949,00
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	72	702.084.118.864,00	675.229.439.938,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	1	81.227.000,00	31.840.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2	493.370.011,00	396.053.511,00
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1	2	19.569.000,00	13.781.500,00
5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 704.678.284.875,00,- terealisasi sebesar Rp.677.671.114.949,00,- atau 96,17%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 27.007.169.926,00,- (3,83%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang tercapai 100,07% dengan realisasi anggaran 96,17% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 59,76%.



Sasaran 1.1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

Sasaran meningkatnya daya saing masyarakat merupakan bagian integral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing, karena kualitas kesehatan dan pendidikan pada akhirnya harus tercermin dalam kemampuan masyarakat berkompetisi di pasar kerja dan menghasilkan nilai tambah ekonomi. Daya saing masyarakat menggambarkan kapasitas individu dalam memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi.

Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, yang menunjukkan proporsi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat hingga perguruan tinggi. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula kesiapan dan kualitas tenaga kerja daerah dalam mendukung pertumbuhan



ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, sehingga indikator ini menjadi representasi konkret dari keberhasilan pembangunan manusia pada aspek ketenagakerjaan dan daya saing.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas dapat mencapai angka 49,85. Pencapaian sasaran meningkatnya daya saing masyarakat adalah sebagai berikut:



Realisasi indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diukur berdasarkan pada data persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2025, berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik kondisi Februari 2025. formula perhitungan realisasi indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diukur sebagai berikut:

$$\text{Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas} = \frac{1.711.154}{3.157.912} \times 100 = 54,19\%$$

Keterangan:

Jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 2025 = 1.711.154 orang

Jumlah angkatan kerja 2025 = 3.157.912 orang

Secara agregat Provinsi Sumatra Barat mencatat persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 54,19%, dengan jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebanyak 1.711.154 orang dari total angkatan kerja 3.157.912 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja di Sumatra Barat telah memiliki pendidikan minimal SMA/ sederajat hingga perguruan tinggi, yang mencerminkan struktur tenaga kerja yang semakin berkualitas.

Angkatan Kerja Provinsi Sumatra Barat diperoleh dari akumulasi Angkatan Kerja pada 19 di Sumatra Barat. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas tertinggi tercatat di Kota Padang Panjang (78,35%), diikuti Kota Padang (73,52%), Kota Pariaman (73,09%), dan Kota Bukittinggi (70,73%). Secara umum, wilayah perkotaan menunjukkan proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang lebih tinggi. Sebaliknya, persentase terendah

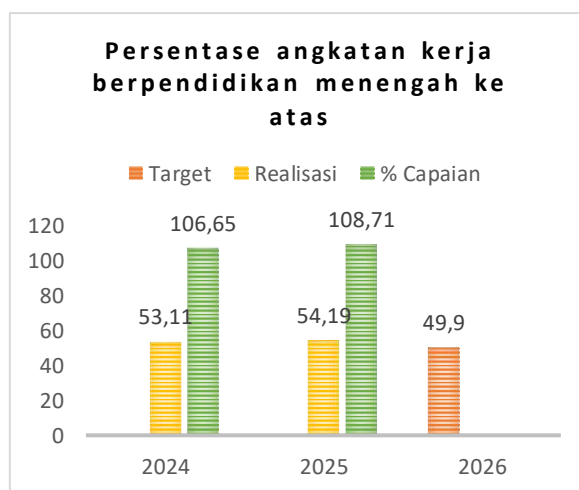


tercatat di Kabupaten Pasaman (37,81%), Kabupaten Kepulauan Mentawai (38,13%), dan Kabupaten Solok (39,87%), yang menunjukkan masih tingginya proporsi angkatan kerja dengan pendidikan di bawah jenjang menengah keatas. Informasi angkatan kerja berpendidikan menengah keatas pada 19 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Angkatan Kerja Berpendidikan menengah ke atas se Sumatra Barat Tahun 2025

No	Nama	Data Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas	Jumlah Angkatan Kerja	% Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas
1	Kota Padang Panjang	22.868	29.188	78,35%
2	Kota Padang	357.769	486.638	73,52%
3	Kota Pariaman	37.734	51.627	73,09%
4	Kota Bukittinggi	46.376	65.572	70,73%
5	Kota Solok	28.865	41.606	69,38%
6	Kota Payakumbuh	51.272	77.876	65,84%
7	Kota Sawahlunto	23.197	38.256	60,64%
8	Kabupaten Agam	160.614	300.912	53,38%
9	Kabupaten Padang Pariaman	120.416	233.318	51,61%
10	Kabupaten Pesisir Selatan	136.260	264.779	51,46%
11	Kabupaten Pasaman Barat	111.171	224.154	49,60%
12	Kabupaten Dharmasraya	65.856	135.394	48,64%
13	Kabupaten Tanah Datar	101.986	217.070	46,98%
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	101.542	229.727	44,20%
15	Kabupaten Solok Selatan	47.834	111.766	42,80%
16	Kabupaten Sijunjung	53.089	129.529	40,99%
17	Kabupaten Solok	95.170	238.683	39,87%
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	21.627	56.722	38,13%
19	Kabupaten Pasaman	64.352	170.214	37,81%
	Sumatra Barat	1.711.154	3.157.912	54,19

Perhitungan capaian indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas menggunakan metode *pengukuran kriteria pertama*. Dari aspek realisasi, Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas meningkat dari 53,11% pada Tahun 2024 menjadi 54,19% pada Tahun 2025, atau naik sebesar 1,08%. Hal ini menunjukkan perbaikan struktur pendidikan tenaga kerja di Sumatra Barat. Dari sisi capaian kinerja, terjadi peningkatan dari 106,65% pada



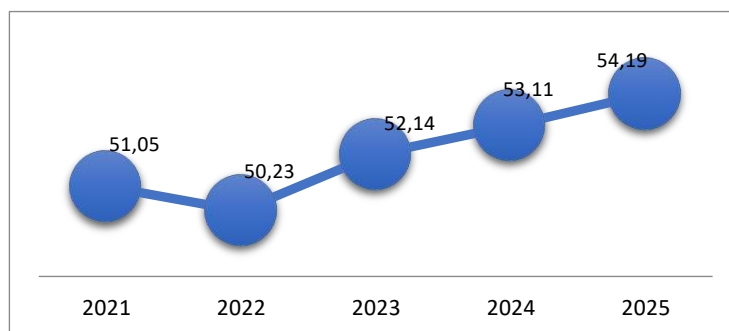


2024 menjadi 108,71% pada 2025, sehingga secara keseluruhan kinerja Tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 49,90%, realisasi persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas Tahun 2025 yang mencapai 54,19% menunjukkan capaian yang jauh melampaui sasaran jangka menengah. Terdapat selisih positif sebesar 4,29%, yang mengindikasikan bahwa struktur pendidikan angkatan kerja telah berkembang lebih cepat dari proyeksi perencanaan.

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas Tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada Tahun 2021 persentase tercatat sebesar 51,05%, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 50,23% atau turun sekitar 0,82 poin persentase. Setelah itu, terjadi pemulihan pada Tahun 2023 menjadi 52,14%, meningkat 1,91 poin dibandingkan Tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada Tahun 2024 sebesar 53,11%, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 54,19%, atau naik 1,08 poin dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif, dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 3,14% dari 51,05% menjadi 54,19%. Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas tergambar pada grafik 3.14.

Grafik 3. 14 Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas

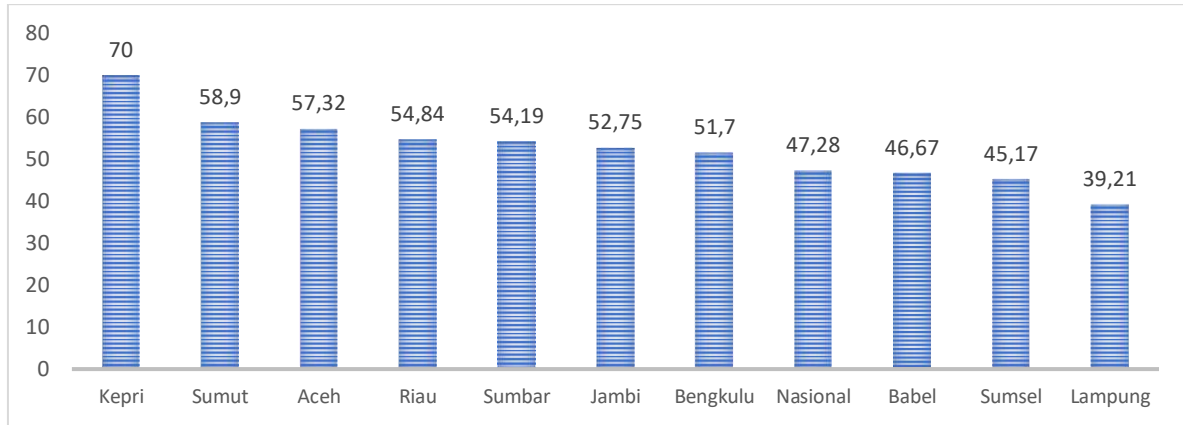


Secara nasional, persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas Sumatra Barat tercatat sebesar 54,19%, lebih tinggi 6,91 poin persentase dibandingkan rata-rata nasional sebesar 47,28%. Sehingga secara nasional Sumatra Barat berada pada kelompok provinsi dengan struktur pendidikan angkatan kerja yang relatif baik. Di tingkat regional Pulau Sumatra, Sumatra Barat menempati peringkat ke-4 dari 10 provinsi, berada di bawah Sumatra Utara (58,90%), Aceh (57,32%), dan Riau (54,84%), namun lebih tinggi dibandingkan Jambi (52,75%), Bengkulu (51,70%), Sumatra Selatan (45,17%), Kepulauan Bangka Belitung (46,67%), dan Lampung (39,21%). Posisi ini menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Sumatra Barat secara regional tergolong kuat dan berada pada kelompok provinsi dengan kualitas pendidikan



angkatan kerja yang relatif tinggi di Pulau Sumatra. Perbandingan angka harapan hidup Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.15.

Grafik 3. 15 Data Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (Nasional) dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : BPS

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan daya saing masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan beasiswa kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima di jenjang SMA sebanyak 510 orang, di jenjang SMK sebanyak 242 orang, di jenjang SLB sebanyak 300, serta berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang.
2. Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatra Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
4. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah
5. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja
6. Penguatan kerja sama antara SMK dengan DUDI melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan, magang industri, dan keterlibatan industri dalam proses pembelajaran

7. Pengembangan SMK BLUD (SMK Badan Layanan Usaha Daerah) dan SMK PK (SMK Pusat Keunggulan) melalui SK Gubernur untuk adaptasi kurikulum *link and match* dengan topografi Sumatra Barat
8. Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis pada kompetensi kepada 3.495 orang dan pemagangan dalam negeri kepada 262 orang.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam meningkatkan daya saing masyarakat antara lain:

1. Keterbatasan daya serap dunia kerja terhadap lulusan pendidikan vokasi, karena masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan
2. Belum meratanya kualitas dan intensitas kemitraan antara SMK dan DUDI
3. Belum optimalnya jumlah SMK unggul berbasis potensi daerah
4. Masih adanya SDM tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
5. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
6. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang.

Untuk meningkatkan daya saing masyarakat, ke depannya diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi kepada pencari kerja, pelatihan peningkatan produktivitas (P3), Pelatihan Kewirausahaan mandiri/tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja se Sumatra Barat dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan Permendagri baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta maupun Lembaga Pemerintahan.
- c. Melakukan program *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Misalnya kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan.
- d. Program revitalisasi SMK sesuai topografi wilayahnya.
- e. Program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual.
- f. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan



Untuk meningkatkan daya saing masyarakat, dilaksanakan 9 Program dengan 8 Kegiatan dan 24 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 3.914.513.695,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya daya saing masyarakat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya daya saing masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	12	24	3.914.513.695,00	3.784.755.180,00
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	3	2.659.068.490,00	2.621.276.690,00
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	1	6.900.000,00	5.550.000,00
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	2	3	70.933.250,00	68.913.250,00
4	Program Hubungan Industrial	2	3	134.020.000,00	122.238.000,00
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	3	172.718.985,00	148.688.000,00
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	3	41.974.970,00	41.781.240,00
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	2	15.687.000,00	15.555.000,00
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1	2	113.060.000,00	108.985.000,00
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	4	700.151.000,00	651.768.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.914.513.695,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.784.755.180,00,- atau 96,69%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 129.758.515,00,- (3,31%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing masyarakat yang tercapai 106,65 % dengan realisasi anggaran 96,69% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 76,04%.



Misi 2

Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ditetapkan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 2.1 Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat

Tujuan ke-2 dari Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026 yaitu “Mewujudkan AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat”, merupakan arah pembangunan yang menekankan penguatan nilai-nilai adat dan syariat sebagai landasan perilaku sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta pembentukan karakter masyarakat Sumatra Barat. Falsafah *AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) tidak hanya diposisikan sebagai identitas kultural, tetapi sebagai sistem nilai yang membimbing praktik sosial, kelembagaan adat, pendidikan, kehidupan keluarga, serta interaksi sosial kemasyarakatan.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut digunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini relevan karena mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan secara komprehensif, meliputi dimensi ketahanan budaya, ekspresi budaya, pendidikan budaya, ekonomi budaya, serta tata kelola kebudayaan. IPK bersifat *lagging indicator*, dimana nilai yang dipublikasikan pada tahun berjalan merupakan hasil pengukuran tahun sebelumnya.

IPK menjadi instrumen kuantitatif yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk menggambarkan sejauh mana nilai-nilai ABS-SBK tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan dan diintegrasikan dalam dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian,





peningkatan nilai IPK menunjukkan penguatan peran kebudayaan termasuk nilai adat dan agama—sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 63,10 atau lebih tinggi 3,76 poin dari IPK tahun 2024. Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Data realisasi IPK tahun 2025 sebesar 59,34, diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan pada rilis portal data pendidikan tanggal 14 Januari 2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024.

Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 59,34 dibentuk oleh tujuh dimensi pembangunannya dengan capaian yang beragam. Dimensi Pendidikan (75,12) menjadi kontributor tertinggi, diikuti Budaya Literasi (69,45), Warisan Budaya (64,73), dan Ketahanan Sosial Budaya (63,27) yang menunjukkan kondisi relatif baik dalam menjaga nilai dan kohesi sosial masyarakat. Dimensi Kesenjangan Gender (60,44) juga berada pada level cukup kuat. Namun, Dimensi Ekspresi Budaya (39,80) dan terutama Ekonomi Budaya (25,28) masih rendah, sehingga menjadi area prioritas penguatan.



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Berdasarkan grafik perbandingan Tahun 2024–2025, dari sisi realisasi, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang digunakan pada Tahun 2025 masih sebesar 59,34, sama dengan realisasi Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena hingga penyusunan laporan ini, realisasi IPK Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Kebudayaan,



sehingga angka yang digunakan masih mengacu pada data pelaporan terakhir, yaitu IPK Tahun



2024. Dengan demikian, secara substansi belum dapat dilakukan perbandingan peningkatan atau penurunan realisasi antara Tahun 2024 dan 2025.

Namun, capaian IPK Tahun 2024 tercatat sebesar 94,64%, sedangkan pada Tahun 2025 capaian menjadi 94,04%. Terjadi penurunan capaian sebesar 0,60%, yang disebabkan oleh meningkatnya target Tahun 2025 dalam RPJMD menjadi 63,10,

sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,34.

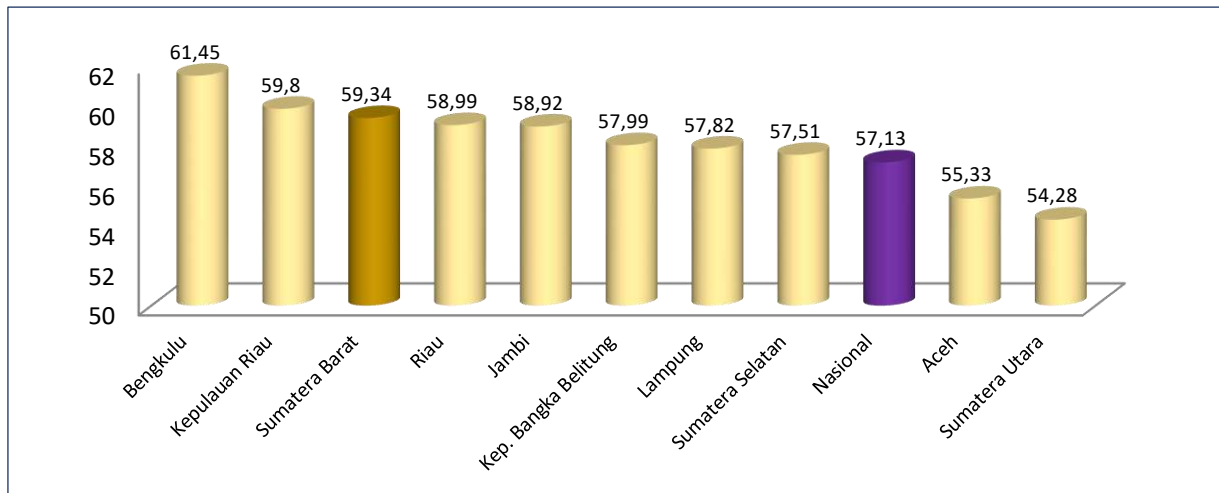
Realisasi IPK Tahun 2025 sebesar 59,34 masih berada di bawah target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 64,50, sehingga terdapat selisih sebesar 5,16 poin yang harus dicapai pada sisa periode perencanaan. Artinya IPK telah mencapai sekitar 92% dari target akhir RPJMD. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa angka realisasi Tahun 2025 tersebut masih menggunakan data IPK yang dirilis Tahun 2024, karena sampai dengan penyusunan laporan ini nilai IPK Tahun 2025 secara resmi belum dirilis oleh Kementerian Kebudayaan (mekanisme pelaporan IPK bersifat n-1). Dengan demikian, secara substansi belum terdapat perubahan nilai realisasi antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam laporan ini. Namun percepatan peningkatan kinerja tetap diperlukan agar selisih 5,16 poin tersebut dapat ditutup dalam satu tahun terakhir periode RPJMD.

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun pelaporan 2025 (yang masih menggunakan data realisasi Tahun 2024), nilai IPK Provinsi Sumatra Barat tercatat sebesar 59,34. Secara regional Pulau Sumatra, capaian tersebut menempatkan Sumatra Barat pada peringkat ke-3 tertinggi, setelah Provinsi Bengkulu (61,45) dan Kepulauan Riau (59,80). Jika dibandingkan dengan IPK Nasional sebesar 57,13, maka IPK Sumatra Barat berada 2,21 poin di atas rata-rata nasional, menunjukkan posisi yang relatif kuat dalam pembangunan kebudayaan. Perbandingan IPK Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.16.





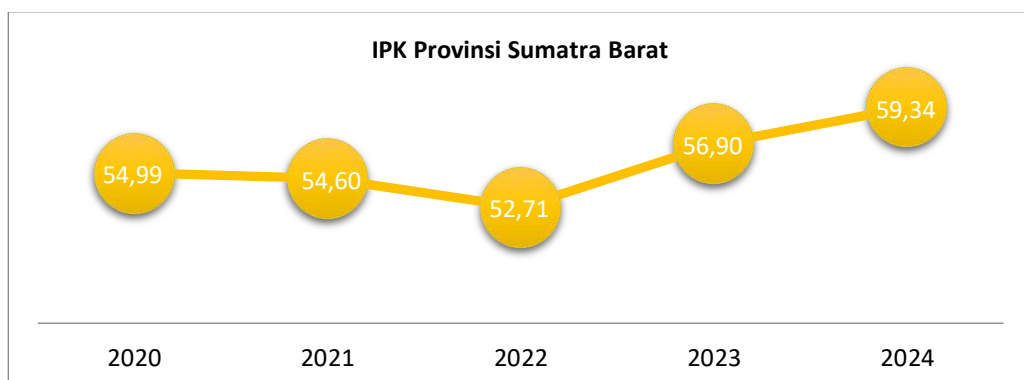
Grafik 3. 16 Perbandingan IPK Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024), terlihat bahwa tren IPK mengalami fluktuasi pada awal periode dan kemudian menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Sejak Tahun 2023 terjadi tren pemulihan yang signifikan dengan capaian sebesar 56,90, dan kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 59,34. Kenaikan sebesar 2,44 poin dari Tahun 2023 ke 2024 menunjukkan penguatan pada sebagian besar dimensi pembangunan kebudayaan, meskipun tetap diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih terarah untuk menjaga konsistensi kenaikan hingga akhir periode RPJMD. Perlu ditegaskan bahwa dalam pelaporan Tahun 2025 ini, data yang digunakan masih merupakan realisasi hingga Tahun 2024 karena nilai IPK Tahun 2025 belum dirilis oleh kementerian terkait. Perkembangan IPK tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.17.

Grafik 3. 17 Perkembangan IPK Provinsi Sumatra Barat dari Tahun 2020 s.d 2024



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Untuk peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ke depannya berupaya lebih mendorong dengan dukungan program kegiatan dan peningkatan koordinasi dan fasilitasi agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sumatra Barat yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai ABS-SBK masyarakat di Sumatra Barat, dan mendukung capaian berbagai dimensi pendukung IPK ini.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran yakni Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK , Meningkatnya Budaya Literasi, dan Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



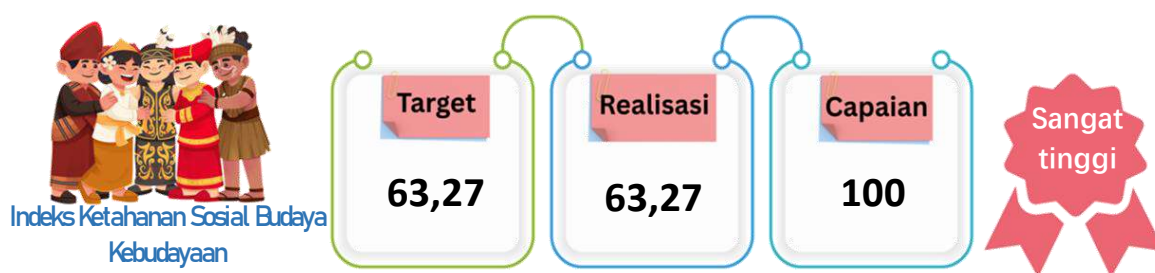
Sasaran 2.1.1 **Meningkatnya ketahanan Sosial Budaya** **Masyarakat Berlandaskan ABS SBK**

Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS-SBK mengandung makna terwujudnya masyarakat Sumatra Barat yang memiliki daya tahan sosial yang kuat, kohesivitas yang tinggi, serta sistem nilai budaya yang tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjadikan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan normatif dan moral. Ketahanan sosial budaya dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian adat dan tradisi, tetapi juga sebagai kemampuan masyarakat menjaga dan melestarikan nilai, norma, serta praktik sosial budaya, sekaligus beradaptasi terhadap perubahan dan pengaruh luar untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berkeadaban.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran tersebut digunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IKSB). peningkatan IKSB tidak hanya berkontribusi terhadap capaian sasaran "Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS-SBK", tetapi juga secara langsung mendukung peningkatan nilai Indeks Pengembangan Kebudayaan secara keseluruhan.



Target Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IKSB) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 63,27, disesuaikan dengan capaian realisasi Tahun 2024 yang telah mencapai angka tersebut. Penyesuaian ini dilakukan karena target IKSB dalam RPJMD untuk Tahun 2025 telah terlampaui pada Tahun 2024, dengan realisasi sebesar 63,27. Dengan demikian, penetapan target Tahun 2025 tidak lagi semata-mata mengacu pada tahapan target RPJMD, melainkan mempertimbangkan capaian kinerja aktual agar tetap realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi faktual terbaru. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK tergambar sebagai berikut:



**Angka realisasi tahun 2024*

Sama halnya dengan realisasi IPK, realisasi IKSB tahun 2025 sebesar 63,27, diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan pada rilis portal data pendidikan tanggal 14 Januari 2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan, hasil pengukuran resmi Indeks Pembangunan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—di mana IKSB merupakan salah satu dimensi pembentuknya—belum dirilis untuk Tahun 2025. Rilis terakhir yang tersedia pada portal data pendidikan tertanggal 14 Januari 2025 masih memuat hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 (data tahun n-1).

Rincian indikator yang menjadi komponen penilaian IKSB 63,27 diuraikan pada tabel 3.9.

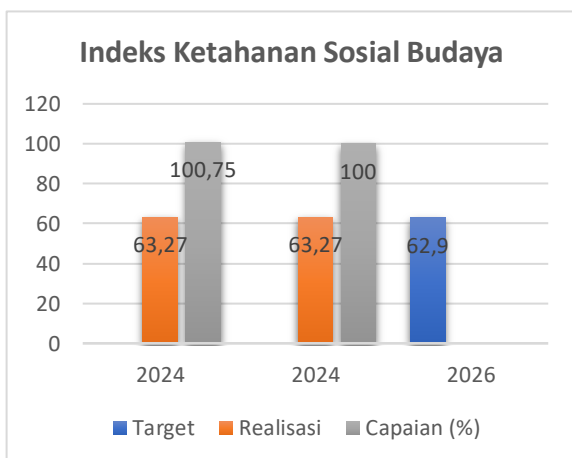
Tabel 3. 9 Capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatra Barat

No	Indikator	Sumbar
1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	33,57
2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	64,09
3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	65,71
4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	86,87
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	78,34
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	34,94



No	Indikator	Sumbar
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	14,13
8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	70,92

Berdasarkan tabel indikator nilai variabel pembentuk IKSB, aspek toleransi dan hubungan sosial masyarakat Sumatra Barat tergolong baik, tercermin dari tingginya persetujuan berteman dengan berbeda suku (86,87%) dan berbeda agama (65,71%), serta tingkat kepercayaan kepada tetangga (70,92%) dan partisipasi kegiatan sosial (78,34%). Namun demikian, partisipasi dalam gotong royong (34,94%) dan penerimaan terhadap aktivitas kelompok berbeda agama di lingkungan sekitar (33,57%) masih relatif lebih rendah, sehingga perlu penguatan. Secara umum, ketahanan sosial budaya cukup kuat, tetapi peningkatan pada aspek partisipasi kolektif dan penguatan toleransi di ruang publik masih diperlukan.



Perhitungan capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IKSB) Tahun 2025 tercatat sebesar 63,27, namun angka tersebut masih menggunakan data realisasi Tahun 2024 karena hasil pengukuran terbaru belum dirilis oleh kementerian terkait. Dengan demikian, dari sisi realisasi tidak terdapat perubahan antara Tahun 2024 dan 2025

(stagnan pada 63,27). Dari sisi capaian kinerja, Tahun 2025 tercatat sebesar 100%, menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 yang mencapai 100,75%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh turunnya nilai realisasi, melainkan karena pada Tahun 2025 target telah disesuaikan sama dengan realisasi terakhir (63,27) dan data realisasi yang dilaporkan masih kondisi tahun sebelumnya.

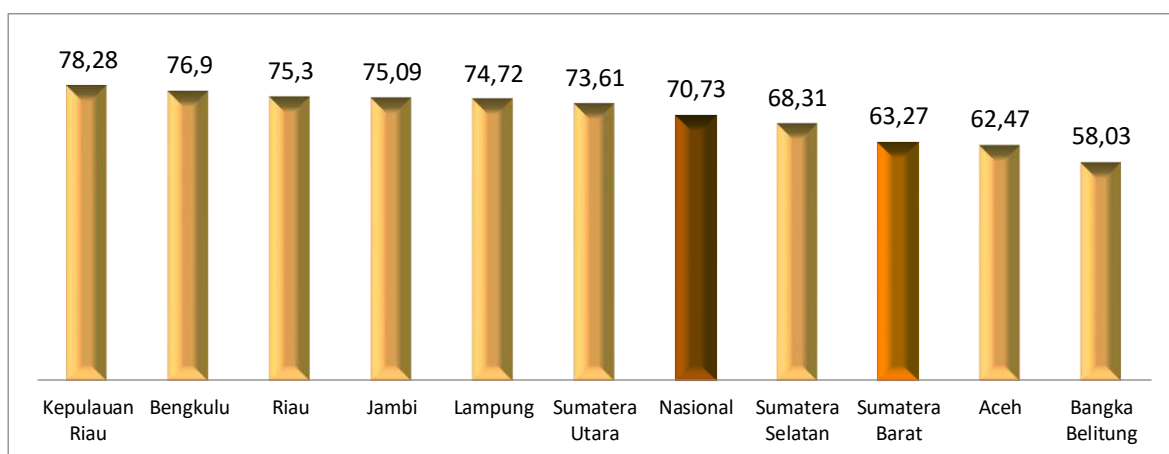
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,90, maka realisasi 63,27 telah melampaui target akhir tersebut sebesar 0,37 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial indikator IKSB telah tercapai bahkan melampaui target jangka menengah, meskipun peningkatan nilai riil Tahun 2025 masih menunggu rilis data resmi terbaru.

Secara nasional, IKSB Sumatra Barat sebesar 63,27 masih berada 7,46 poin di bawah rata-rata nasional sebesar 70,73. Pada lingkup regional Pulau Sumatra, Sumatra Barat menempati peringkat ke-8 dari 10 provinsi, atau urutan ketiga terendah setelah Aceh (62,47) dan Banten (58,03). Sementara itu, provinsi dengan nilai tertinggi di Pulau Sumatra adalah Kepulauan Riau



(78,28), Bengkulu (76,9), dan Riau (75,3). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian IKSB Sumatra Barat telah memenuhi target daerah, secara komparatif posisi provinsi masih relatif tertinggal dibandingkan capaian nasional dan sebagian besar provinsi di Pulau Sumatra, sehingga diperlukan penguatan pada aspek-aspek pembentuk ketahanan sosial budaya. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.18.

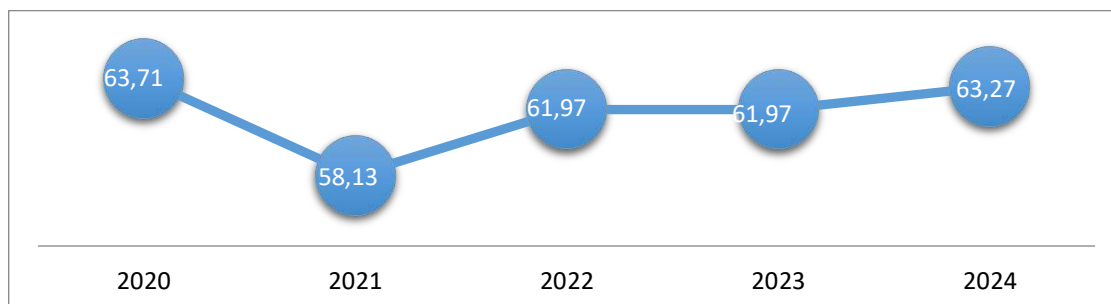
Grafik 3. 18 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: www.ipk.kemdikbud.go.id

Tren realisasi IKSB Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung membaik di akhir periode. Setelah berada pada 63,71 (2020), nilai IKSB turun signifikan menjadi 58,13 (2021), kemudian pulih pada 2022 dan 2023 di angka 61,97, serta kembali meningkat menjadi 63,27 pada 2024. Secara umum, kondisi 2024 menunjukkan pemulihan dan penguatan ketahanan sosial budaya mendekati capaian tertinggi lima tahun terakhir. Untuk pelaporan Tahun 2025, analisis tren masih mengacu pada data hingga 2024 karena realisasi terbaru belum dirilis oleh kementerian terkait. Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.19.

Grafik 3. 19 Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020-2024



Sumber: www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat di tahun 2025 untuk mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Sosial Budaya antara lain:

1. Menjalin komunikasi dan koordinasi antar elemen masyarakat melalui kemitraan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kondusivitas daerah. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama

Tahun 2025 telah dilaksanakan dua kali rapat FKUB Provinsi Sumatra Barat yang diikuti 30 orang pengurus untuk mendukung dialog antarumat beragama, penyaluran aspirasi, dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah, serta satu kali rapat koordinasi FKUB tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatra Barat dengan 60 peserta guna memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

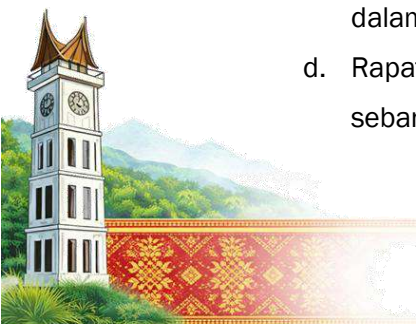
- b. Pelaksanaan rapat strategis, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang meliputi:

- 1) Rapat TKDPD dalam rangka audiensi buruh dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat serta deteksi dini perkembangan situasi politik, sosial budaya dan keamanan di Sumatra Barat. Rapat ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari instansi vertikal (BINDA, Polda Sumbar, Kejati, Lantamal, Lanud, Kanwil Kemenkumham, Pemberantasan BNNP Sumbar, TNI dan Pol PP Sumbar).
- 2) Rapat TKDPD dalam rangka pembahasan penyaluran aspirasi terkait sektor pertanian dan lingkungan serta silaturahmi Gubernur Sumatra Barat dengan BEM SI Kerakyatan di Sumatra Barat. Rapat ini diikuti oleh 28 orang peserta yang terdiri dari Ketua BEM dari beberapa Universitas di Sumatra Barat.

- c. Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan wadah komunikasi dan kerja sama antarwarga dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan budaya untuk memperkuat persatuan serta mencegah konflik sosial; pada Tahun 2025 telah dilaksanakan tiga kali rapat FKDM Provinsi Sumatra Barat dengan total 101 peserta guna menghimpun dan mengelola informasi kewaspadaan dini sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

- d. Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatra Barat sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 101 orang, dalam rangka



- penghimpunan dan pengelolaan informasi kewaspadaan dini sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkopimda)
- Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 11 kali FGD Forkopimda yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Barat dan OPD terkait. Kegiatan ini menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas keamanan di Sumatra Barat.
2. Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai Pancasila di beberapa daerah di Sumatra Barat dengan total 662 peserta. Kegiatan tersebut meliputi bimbingan teknis, pelatihan, pendidikan, serta penguatan pembauran kebangsaan, yang diikuti oleh generasi muda, pengurus OSIS SMA/SMK/MA, guru TK/PAUD, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dari berbagai kabupaten/kota seperti Solok Raya, Pariaman, Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Sijunjung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta pengamalan nilai kebangsaan, bela negara, dan Pancasila di masyarakat.
 3. Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dengan melindungi masyarakat dari dampak narkoba, memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, menjaga nilai dan norma sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadaban melalui sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi 60 orang generasi muda Kota Pariaman, 240 orang generasi muda dan tokoh masyarakat Kota Padang dan 140 orang siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang sehat, memperkuat nilai persatuan dan toleransi, membangun sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui pelaksanaan pendidikan politik bagi 2.644 orang generasi muda dan tokoh masyarakat di beberapa kabupaten/kota se-Sumatra Barat.
 5. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Daerah, melalui penguatan kapasitas dan peran serta organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai perekat sosial dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga toleransi, gotong royong, serta pencegahan konflik sosial. Pada Tahun 2025, kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan bagi pengurus ormas tingkat provinsi (50 orang), Kota Bukittinggi (100 orang), PW/PC Nahdlatul Ulama Sumatra Barat (100 orang), Karang Taruna Kota Payakumbuh (110 orang), Pemuda Panca Marga se-Sumatra Barat (100 orang), serta KNPI Kabupaten Lima Puluh Kota (50 orang).





Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Provinsi Sumatra Barat antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam pelaksanaan program pembinaan sosial budaya secara berkelanjutan.
2. Koordinasi lintas OPD dan lintas sektor yang belum optimal, sehingga sinergi program belum sepenuhnya terintegrasi.
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi, khususnya dalam kegiatan penguatan nilai kebangsaan dan toleransi.
4. Dinamika sosial dan pengaruh globalisasi, termasuk media sosial, yang berpotensi memengaruhi nilai dan harmoni sosial budaya
5. Masih adanya potensi konflik sosial berbasis perbedaan identitas dan kepentingan di beberapa wilayah.

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD serta pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program penguatan ketahanan sosial budaya.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan, seperti FKUB, FPK, FKDM dan TKDPD.
3. Mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan kearifan lokal, termasuk nilai *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*.
4. Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, melalui peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.
5. Mendorong peningkatan literasi digital masyarakat untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu harmoni sosial budaya.

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK, dilaksanakan 16 Program dengan 25 Kegiatan dan 50 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 54.301.781.493,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK dapat dilihat pada tabel 3.10



Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	25	50	54.301.781.493,00	50.538.664.246,00
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	4	2.604.886.500,00	2.356.192.925,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	1	5.731.475.792,00	5.573.794.200,00
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	563.850.000,00	545.100.000,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	2	671.020.000,00	653.490.000,00
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	4	1.628.335.000,00	503.148.000,00
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	9	2.355.383.579,00	2.326.428.400,00
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	1	775.000,00	775.000,00
8	Program Pengembangan Kebudayaan	3	5	6.600.750.523,00	6.121.612.619,00
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	1	2.891.527.970,00	2.873.696.029,00
10	Program Pembinaan Sejarah	1	1	109.570.000,00	106.260.000,00
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	2	98.520.800,00	92.701.600,00
12	Program Pengelolaan Permuseuman	1	4	3.067.291.841,00	2.941.534.202,00
13	Program Kesejahteraan Rakyat	3	8	26.426.262.768,00	25.259.614.071,00
14	Program Pemberdayaan Sosial	2	3	1.112.330.650,00	779.566.000,00
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	3	372.258.315,00	337.320.200,00
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	1	67.542.755,00	67.431.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 54.301.781.493,00,- terealisasi sebesar Rp. 50.538.664.246,00,- atau 93,07%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.763.117.247,00,- (6,93%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK yang tercapai 100% dengan realisasi anggaran 93,07% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 67,33%.



Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Budaya Literasi

Budaya literasi adalah kebiasaan, perilaku, dan tradisi masyarakat dalam membaca, menulis, mencari informasi, dan belajar sepanjang hayat. budaya literasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dengan membangun budaya literasi yang kuat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang merefleksikan tingkat ketersediaan dan akses layanan perpustakaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, serta dukungan ekosistem literasi di daerah. Dengan demikian, peningkatan nilai IPLM menunjukkan semakin kuatnya budaya literasi masyarakat yang berkontribusi pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya di Sumatra Barat.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026, target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 17,69. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa capaian tahun sebelumnya telah melampaui target yang direncanakan dalam tahapan RPJMD, sehingga target Tahun 2025 disesuaikan dengan realisasi terakhir agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi kinerja aktual. Pencapaian sasaran “meningkatnya budaya literasi” diuraikan sebagai berikut:



Realisasi IPLM di tahun 2025 masih menggunakan data Tahun 2024 karena nilai IPLM Tahun 2025 belum dirilis. Realisasi terakhir yang tersedia adalah nilai IPLM Tahun 2024 sebesar 17,69, yang diukur berdasarkan Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik



Indonesia. Nilai yang disajikan merupakan skor IPLM hasil rilis Perpunas yang telah dikonversikan, dan termasuk dalam kategori “Tinggi”.

Nilai IPLM Provinsi Sumatra Barat sebesar 17,69 (hasil konversi skor 82,47) didukung kuat oleh 7 aspek. Secara umum, struktur pendukung IPLM menunjukkan fondasi kelembagaan dan tata kelola sudah kuat, tetapi peningkatan partisipasi dan akses layanan masih perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan literasi yang lebih optimal. Rincian Skor IPLM Sumatra Barat berdasarkan unsur pembangun IPLM disajikan sebagai berikut.

No	Indikator Indeks Pembangun IPLM	Nilai	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (indikator : Jumlah Perpustakaan)	5.332	0,6070
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan (indikator : Jumlah Koleksi cetak dan digital)	1 : 6	0,7438
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan (indikator : Jumlah Pustakawan dan tenaga teknis)	1 : 4010	1,0000
4	Tingkat kunjungan masyarakat (indikator : Jumlah kunjungan/hari (onsite & online)	0,84	0,4221
5	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (indikator : Jumlah Perpustakaan yang dibina)	49,81%	1,0000
6	Keterlibatan masyarakat dlm sosialisasi perpustakaan (Indikator :Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan)	12,69%	1,0000
7	Anggota Perpustakaan (indikator :Jumlah anggota Perpustakaan)	53,23%	1,0000
Skor IPLM			82,47
Skor IPLM hasil konversi (4,66)			17,69

IPLM Provinsi Sumatra Barat sebesar 17,69 merupakan agregasi dari capaian 19 kabupaten/kota. Secara komparatif, daerah dengan nilai di atas rata-rata provinsi didominasi wilayah perkotaan, yaitu Kota Bukittinggi (21,01), Kota Padang Panjang (20,77), Kota Solok (20,74), dan Kota Sawahlunto (20,35), yang menunjukkan ekosistem literasi relatif lebih maju. Sementara itu, beberapa daerah masih berada jauh di bawah rata-rata provinsi, terutama Kabupaten Tanah Datar (8,55), Kabupaten Solok (10,70), dan Kabupaten Padang Pariaman (11,06). Rekapitulasi IPLM per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 disajikan pada tabel 3.11.

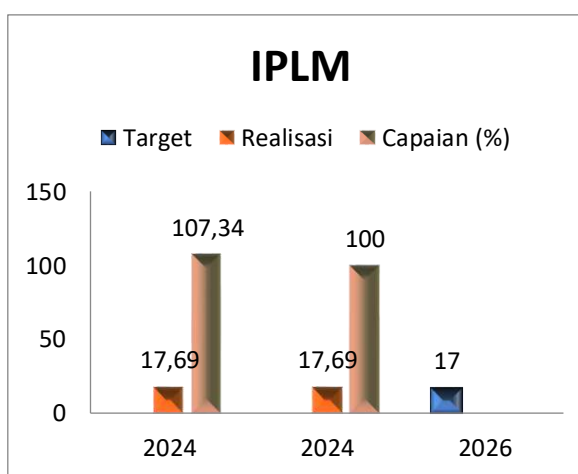
Tabel 3. 11 IPLM Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2024

No	Nama Kabupaten /Kota	IPLM	IPLM (Konversi)
1	Kota Bukittinggi	97,9	21,01
2	Kota Pd. Panjang	96,78	20,77
3	Kota Solok	96,63	20,74
4	Kota Sawahlunto	94,81	20,35
5	Kabupaten 50 kota	89,72	19,25
6	Kabupaten Pasaman	86,64	18,59
7	Kabupaten Sijunjung	86,5	18,56

No	Nama Kabupaten /Kota	IPLM	IPLM (Konversi)
8	Kota Padang	85,47	18,34
9	Kabupaten Pessel	84,42	18,12
10	Kabupaten Agam	72,92	15,65
11	Kota Payakumbuh	72,15	15,48
12	Kota Pariaman	71,89	15,43
13	Kabupaten Pasbar	66,56	14,28
14	Kabupaten Dharmasraya	63,3	13,58
15	Kabupaten Kep. Mentawai	57,59	12,36
16	Kabupaten Solsel	56,13	12,05
17	Kabupaten Pd. Pariaman	51,55	11,06
18	Kabupaten Solok	49,85	10,70
19	Kabupaten Tanah Datar	39,86	8,55
20	Prov. Sumbar	82,47	17,69

Sumber data: Perpunas RI

Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari sisi capaian kinerja, Tahun 2025 tercatat sebesar 100%, menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 yang mencapai 107,34%. Penurunan ini bukan karena turunnya realisasi, melainkan karena target Tahun 2025 disesuaikan sama dengan realisasi terakhir Tahun 2024



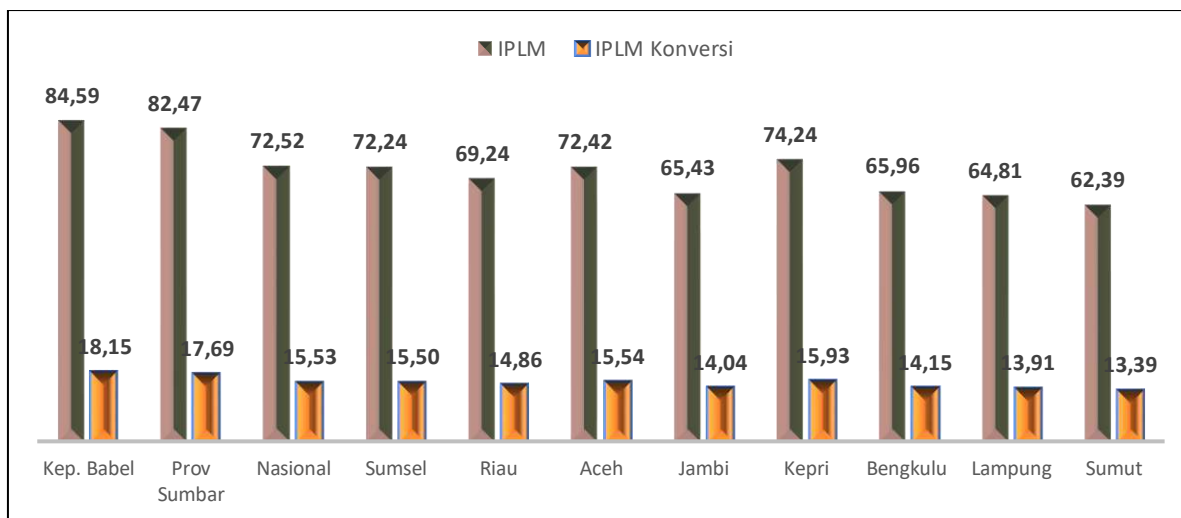
sebesar 17,69. Selain itu, realisasi Tahun 2025 yang digunakan masih merupakan angka Tahun 2024 karena hasil pengukuran terbaru belum dirilis. Dengan demikian, realisasi Tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara substantif dengan Tahun 2024 karena masih menggunakan angka yang sama.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 17, maka realisasi 17,69 telah melampaui target tersebut sebesar 0,69 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara kinerja, sasaran peningkatan budaya literasi telah mencapai bahkan melampaui target akhir periode perencanaan, meskipun pembaruan capaian riil Tahun 2025 masih menunggu rilis resmi terbaru.

Secara Nasional, IPLM Sumatra Barat tahun 2024 sebesar 17,69, berada 2,16 poin di atas rata-rata nasional yang tercatat 15,53. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan literasi masyarakat Sumatra Barat secara agregat lebih baik dibandingkan capaian nasional. Dalam lingkup regional Sumatra, nilai IPLM konversi Sumatra Barat menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kepulauan Bangka Belitung (18,15). Sumatra Barat unggul dibandingkan provinsi lain seperti Kepulauan Riau (15,93), Aceh (15,54), Sumatra Selatan

(15,50), Riau (14,86), Jambi (14,04), Bengkulu (14,15), Lampung (13,91), dan Sumatra Utara (13,39). Berikut perbandingan nilai IPLM Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra.

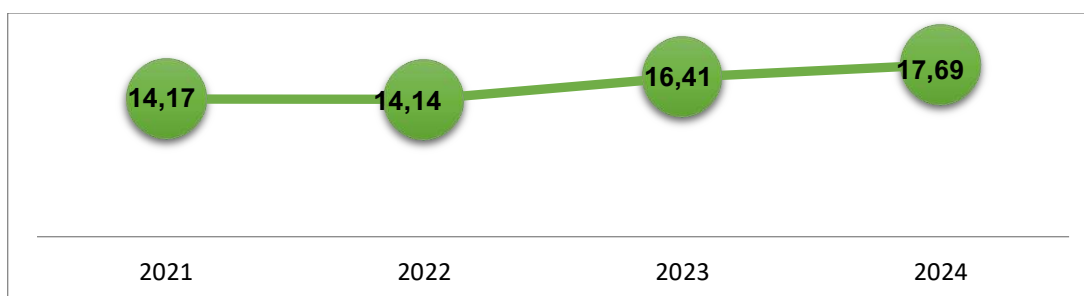
Grafik 3. 20 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Perpustakaan Nasional

Kinerja IPLM selama empat tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, meskipun sempat turun tipis pada 2022 (14,14), kemudian naik signifikan pada 2023 (16,41) dan kembali meningkat pada 2024 (17,69). Kenaikan terbesar terjadi pada periode 2022–2023, mencerminkan akselerasi penguatan literasi masyarakat. Pada pelaporan Tahun 2025, tren baru dapat disajikan hingga Tahun 2024 karena nilai 2025 belum dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI, sehingga analisis masih mengacu pada data terakhir yang tersedia. Perkembangan IPLM 2021–2024 ditampilkan pada grafik 3.21.

Grafik 3. 21 IPLM Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2024



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id



Peningkatan budaya literasi masyarakat didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berikut ini:

1. Pemerataan layanan perpustakaan di daerah dengan dukungan teknologi informasi dan internet sehingga dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran hidup sepanjang hayat.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota juga telah berupaya dalam menambah koleksi perpustakaan baik cetak atau elektronik/digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi informasi yang dibutuhkan. Karena pola kebiasaan masyarakat juga beragam, seperti generasi millenial terbiasa dengan buku cetak tetapi generasi z pada umumnya terbiasa dengan *gadget* sehingga koleksi digital dapat dijadikan opsi dalam meningkatkan literasi generasi z.
3. Kegiatan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan platform media sosial seperti youtube, facebook, instagram dan lainnya agar setiap program dan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat di perpustakaan dapat diakses secara langsung.
4. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat seperti lomba, pelatihan, konser literasi, pameran buku maupun menyediakan perpustakaan untuk kegiatan tematik komunitas sekitarnya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat.
5. Melakukan pembinaan perpustakaan secara intens dan berkelanjutan ke satuan pendidikan menengah dan khusus sesuai standar perpustakaan agar perpustakaan sekolah dapat bertransformasi secara utuh dalam mewujudkan ekosistem digital dan menunjang pelaksanaan program pembelajaran.

Walaupun capaian IPLM sudah melewati target akhir RPJMD, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan dan pembangunan literasi masyarakat Sumatra Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana dan SDM untuk memberikan layanan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemberian layanan di tingkat daerah kabupaten/kota karena setiap jenis perpustakaan yang ada baik di sekolah/nagari/kecamatan di kab/kota
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk literasi digital belum optimal, terutama pada kelompok masyarakat tertentu.
3. Koordinasi dan sinergi antar lembaga/instansi terkait literasi masih perlu ditingkatkan, agar program literasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.





4. Pengaruh media digital dan hiburan yang membuat masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak menghabiskan waktu pada aktivitas non-literasi
5. Kurangnya minat masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara onsite maupun secara online.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk meningkatkan budaya literasi:

1. Meningkatkan infrastruktur perpustakaan dengan menyediakan fasilitas yang nyaman, koleksi buku yang beragam, serta akses ke sumber daya digital. perpustakaan harus menjadi tempat yang menarik dan ramah bagi pengunjung.
2. Pelatihan dan pengembangan SDM yaitu melakukan pelatihan bagi pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan layanan, mengelola koleksi, dan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas yaitu membangun kemitraan dengan sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat untuk mengadakan kegiatan literasi, seperti lomba membaca, diskusi buku, dan seminar tentang pentingnya literasi.
4. Kampanye kesadaran literasi yaitu meluncurkan kampanye kesadaran literasi yang melibatkan media sosial, iklan, dan acara publik untuk menarik perhatian masyarakat tentang pentingnya membaca dan belajar sepanjang hayat.
5. Pengembangan sumber daya digital yaitu memperluas akses ke sumber daya digital, seperti e-book, jurnal online, dan platform pembelajaran, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah terpencil.
6. Penyediaan program khusus untuk kelompok rentan yaitu mengembangkan program literasi yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap literasi.
7. Dukungan kebijakan dan anggaran yaitu mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memadai untuk program-program literasi dan pengembangan perpustakaan.
8. Penyelenggaraan festival literasi yaitu mengadakan festival literasi yang melibatkan penulis, pembaca, dan masyarakat umum untuk merayakan budaya membaca dan menulis, serta memperkenalkan buku-buku baru dan penulis lokal.

Untuk meningkatkan budaya literasi, dilaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 1.411.352.900,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya



budaya literasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya budaya literasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Budaya Literasi	5	18	1.411.352.900,00	1.375.084.126,00
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	12	1.308.114.900,00	1.276.420.126,00
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3	6	103.238.000,00	98.664.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.411.352.900,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.375.084.126,00,- atau 97,43%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 36.268.774,00,-(2,57%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi yang tercapai 100% dengan realisasi anggaran 97,43% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 56,42%.



Sasaran 2.1.3 **Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Ketahanan keluarga mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan, menjaga harmoni, serta menghadapi tekanan sosial-ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi elemen strategis untuk memastikan terciptanya keluarga yang setara, aman, dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sasaran “Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” merupakan arah kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan sasaran strategis meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam misi ke 3 RPJMD 2021-2026. Untuk mengukur keberhasilannya, ditetapkan 4 indikator kinerja yang capaiannya terlihat pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga	65,54	68,10	103,91
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,53	95,96	100,45
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,11	70,47	103,46
Indeks Perlindungan Anak	65,15	70,78	108,64
Rata-rata			104,12

Rata-rata capaian Sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tercapai 104,12% dengan kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

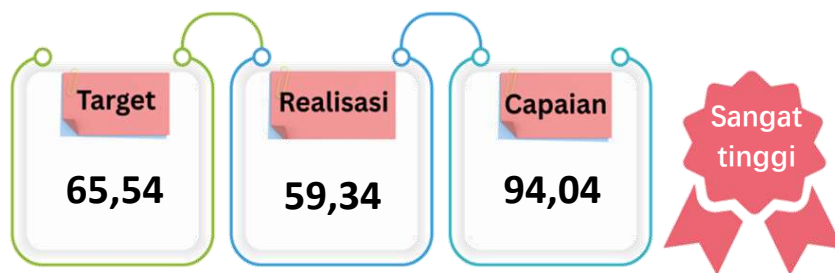
Penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Ibangga menggambarkan tingkat pembangunan keluarga melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek seperti kualitas pengasuhan, ketahanan ekonomi keluarga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Ibangga, semakin kuat ketahanan keluarga dan semakin baik kesejahteraan serta perlindungan yang diterima anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Melalui pengukuran Ibangga, pemerintah dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan yang berorientasi pada penguatan institusi keluarga sekaligus memastikan bahwa pembangunan sosial berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Nilai iBangga berkisar antara 0-100. Kategori nilai iBangga dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu “Rentan” jika nilainya <40, “Berkembang” jika nilainya 40-70, dan “Tangguh” jika nilainya >70.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021–2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2025 sebesar 65,54. Target tersebut meningkat sebesar 4,34 poin dibandingkan capaian Tahun 2024 yang tercatat sebesar 61,20. Pencapaian indeks Ketahanan Keluarga diuraikan sebagai berikut:



Realisasi iBangga tahun 2025 sebesar 68,1 diukur berdasarkan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang diolah dari data Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) oleh BKKBN. Nilai iBangga 68,10 menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Sumatra Barat berada pada kategori “Berkembang” (rentang 40–70), dengan kecenderungan menuju kategori yang lebih baik apabila tren peningkatan dapat dipertahankan.

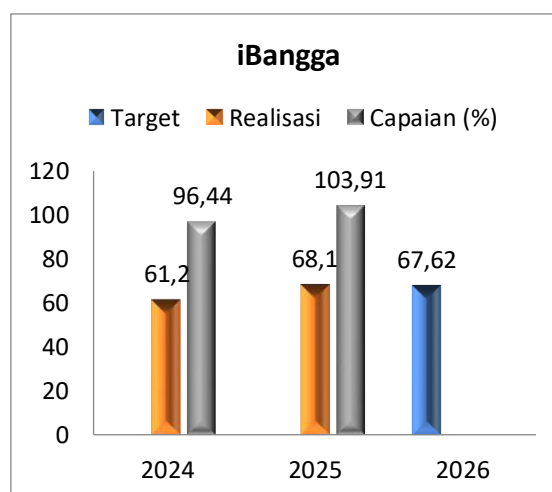


Nilai iBangga Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 68,1 dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu Ketenteraman (79,4), Kemandirian (66,6), dan Kebahagiaan (58,3). Dimensi Ketenteraman menjadi penyumbang tertinggi dengan nilai 79,4, menunjukkan bahwa kondisi keamanan, keharmonisan, dan stabilitas dalam keluarga relatif kuat. Dimensi Kemandirian sebesar 66,6 mencerminkan kemampuan keluarga dalam aspek ekonomi, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berada

pada kategori cukup baik. Sementara itu, dimensi Kebahagiaan memiliki nilai terendah yaitu 58,3, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan pada aspek kualitas relasi, kepuasan hidup keluarga, serta keseimbangan sosial-emosional.

Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dengan capaian sebesar 103,91%, target Tahun 2025 telah terlampaui, berbeda dengan kondisi Tahun 2024 yang hanya mencapai 96,44% sehingga

belum memenuhi target tahunan. Dari aspek realisasi, iBangga Sumatra Barat Tahun 2025





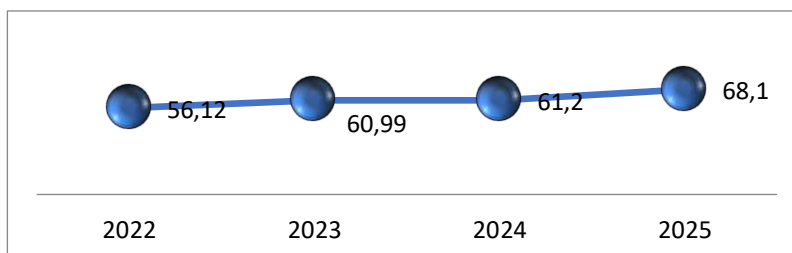
sebesar 68,1, meningkat signifikan dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 61,20, atau naik sekitar 6,9 poin.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 67,62, realisasi Tahun 2025 (68,1) telah melampaui target akhir tersebut sebesar 0,48 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa secara perencanaan jangka menengah, capaian iBangga telah berada di atas trajectory yang direncanakan dan menunjukkan kinerja yang sangat progresif.

Dari sisi peringkat nasional, dengan nilai 68,1 Sumatra Barat berada pada peringkat ke-16 dari 38 provinsi, menunjukkan posisi yang relatif kompetitif di tingkat nasional. Sementara itu, dalam lingkup regional Sumatra, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatra, Sumatra Barat menempati peringkat ke-7 (Peringkat 3 terbawah). Nilai iBangga Sumatra Barat berada di bawah Kepulauan Riau (75,6), Kepulauan Bangka Belitung (73,0), Aceh (71,2), Bengkulu (70,4), Riau (69,7), Sumatra Selatan (69,7), dan Jambi (69,2), namun lebih tinggi dibandingkan Lampung (66,9) dan Sumatra Utara (62,9).

Perkembangan iBangga Provinsi Sumatra Barat dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Pada tahun 2022 nilai iBangga tercatat sebesar 56,12, kemudian meningkat pada 2023 menjadi 60,99 dan kembali naik pada 2024 menjadi 61,20. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, dengan capaian sebesar 68,1. Secara kumulatif, dalam empat tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 11,98 poin (dari 56,12 menjadi 68,1), yang menunjukkan adanya percepatan kinerja pembangunan keluarga, terutama pada periode 2024–2025. Tren ini mengindikasikan bahwa intervensi dan penguatan program ketahanan serta kesejahteraan keluarga berjalan semakin efektif dari tahun ke tahun. Perkembangan ibangga dari tahun 2022-2025 tergambar pada grafik 3.22.

Grafik 3. 22 Perkembangan iBangga dari tahun 2022-2025



Keberhasilan dalam upaya pencapaian target iBangga pada tahun 2025 didorong oleh faktor-faktor pendukung dan pelaksanaan program pembangunan keluarga yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan



- keluarga melalui Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader KB, Bimtek Peningkatan Kapasitas Pokja Kampung KB dan Orientasi Lapangan Kader BKB dan Kelompok Bina Keluarga Balita.
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemilihan ASN Model program KKBPK sebagai Duta ASIK (ASN Informan KKBPK) dalam bentuk Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Program KKBPK, Bimtek Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan.
 3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK dan Gerakan Bersama Cegah Stunting dengan bentuk kegiatan Bimtek TOT Tim Pendamping Keluarga, Sosialisasi dan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK-R dan Orientasi Lapangan TPK terhadap Keluarga beresiko Stunting.
 4. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatra Barat 2019– 2039 dengan serta melakukan advokasi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah (LKjIP) 2025 123 DP3AP2KB PROVINSI SUMATRA BARAT dan sosialisasi GDPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan kabupaten/kota tentang penyerasian Kebijakan Pusat dan Daerah dan Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait Lintas Sektor tentang Pemanfaatan GDPK.
 5. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis Keluarga melalui Koordinasi dengan OPD terkait dan Mitra Kerja dalam penyediaan data TFR, CPR, MUKP dan Unmet Need KB.

Faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian iBangga adalah:

1. Masih tingginya tingkat perceraian, KDRT, pelecehan seksual, kenakalan remaja dan kasus *stunting* di Sumatra Barat.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan serta kader-kader dalam pengelolaan ketahanan keluarga.
3. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah *Stunting*.

Agar tercapainya target jangka menengah pada Indikator Kinerja iBangga, maka upaya yang perlu dilaksanakan dan dimaksimalkan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong ditetapkannya kebijakan implementasi iBangga pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Menyusun bahan advokasi dan KIE yang komprehensif sesuai konsep iBangga.





- Melaksanakan advokasi kepada *stakeholders* di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sesuai dengan komponen-komponen pendukung iBangga.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi dasar pembangunan manusia. IPG pada prinsipnya membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap laki-laki, khususnya pada aspek kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Dalam konteks perencanaan pembangunan, IPG berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Nilai IPG yang semakin mendekati atau melebihi 100 menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan gender dalam akses dan hasil pembangunan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat pembangunan. Dengan demikian, IPG tidak hanya menggambarkan tingkat kemajuan perempuan, tetapi juga menjadi ukuran kualitas keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Target IPG tahun 2025 ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sebesar 95,53. Penetapan ini mempertimbangkan realisasi IPG Tahun 2024 yang telah mencapai 94,93, sehingga target Tahun 2025 dinaikkan sebesar 0,60 poin sebagai bentuk komitmen untuk terus memperkecil kesenjangan gender dalam pembangunan. Target tersebut telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian IPG tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan rilis tabel statistik "[UHH Hasil Long Form SP2020]"

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota” yang dipublikasikan pada tanggal 10 April 2025. Data yang digunakan merupakan hasil pengolahan dan analisis data Tahun 2024 sebagai data terbaru yang tersedia pada saat penyusunan laporan.

Rincian perhitungan IPG adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Gender (IPG)} = \frac{75,98}{79,18} \times 100 = 95,96$$

Keterangan:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan 2025 (analisis data 2024) = 75,98

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki 2025 (analisis data 2024) = 79,18

Berdasarkan indikator pembentuknya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 tercatat sebesar 95,96, yang diperoleh dari perbandingan IPM Perempuan sebesar 75,98 terhadap IPM Laki-laki sebesar 79,18. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan telah mencapai sekitar 95,96% dari capaian laki-laki, sehingga kesenjangan gender relatif kecil. Uraian data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

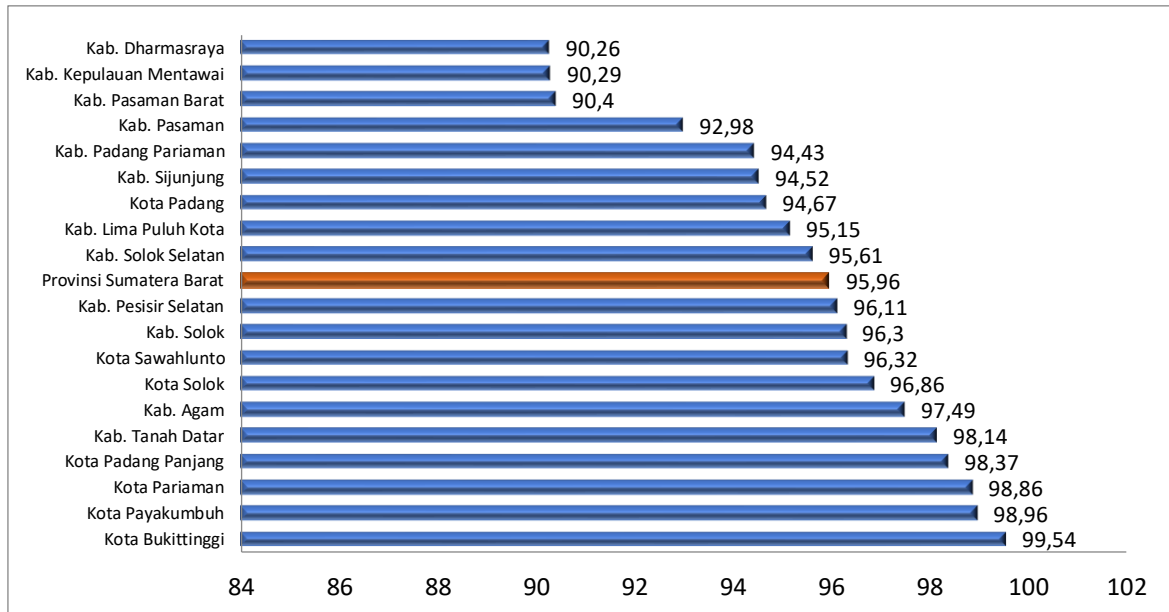
No	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Selisih (L-P)
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	71,90	76,97	-5,07
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,81	14,86	-1,05
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,36	9,53	-0,17
4	Pengeluaran per Kapita (ribu Rp/tahun)	16,416	10,510	+5,906
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,18	75,98	+3,20

Selisih (L-P) positif menunjukkan nilai laki-laki lebih tinggi, negatif menunjukkan nilai perempuan lebih tinggi.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (Rilis 10 April 2025)

Ditinjau dari komponennya, perempuan memiliki keunggulan pada indikator Umur Harapan Hidup (76,97 tahun dibanding 71,90 tahun pada laki-laki), Harapan Lama Sekolah (14,86 tahun dibanding 13,81 tahun), serta Rata-rata Lama Sekolah (9,53 tahun dibanding 9,36 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa dari aspek kesehatan dan pendidikan, posisi perempuan relatif lebih baik atau setidaknya setara dengan laki-laki. Namun demikian, pada indikator Pengeluaran per Kapita, laki-laki masih lebih tinggi (16.416 ribu Rp/orang/tahun) dibanding perempuan (10.510 ribu Rp/orang/tahun). Kesenjangan pada dimensi ekonomi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan IPM perempuan masih berada di bawah laki-laki, sehingga IPG belum mencapai angka 100.



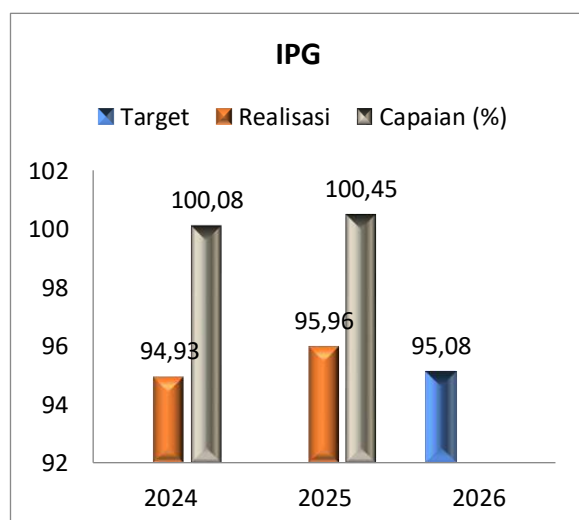
Grafik 3. 23 IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

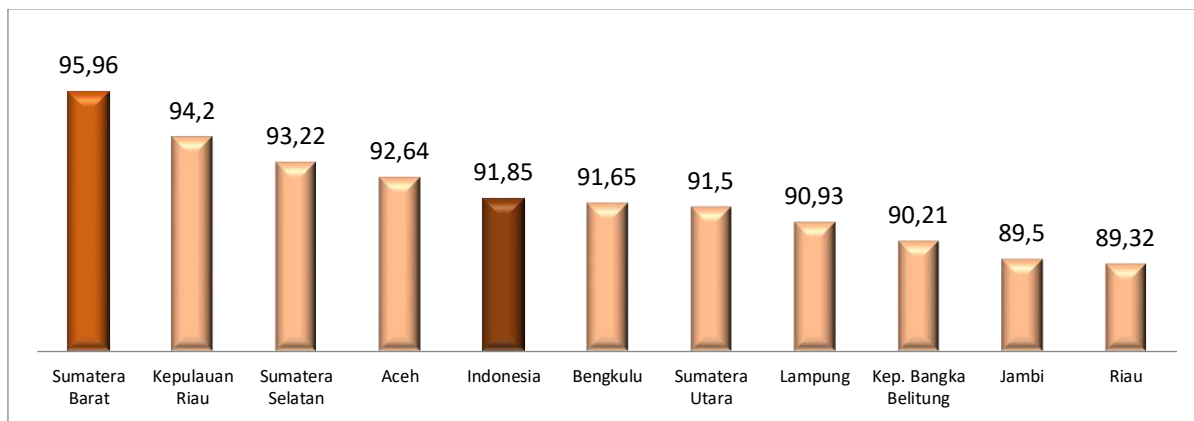
Berdasarkan grafik IPG Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2025 (analisis data 2024), terlihat bahwa seluruh daerah memiliki nilai IPG di atas 90, yang menunjukkan tingkat kesenjangan gender relatif rendah. Nilai IPG Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,96 berada pada kelompok menengah dan mencerminkan agregasi dari 19 kabupaten/kota. Capaian tertinggi terdapat pada Kota Bukittinggi (99,54), diikuti Kota Payakumbuh (98,96) dan Kota Pariaman (98,86), yang menunjukkan kesetaraan gender yang sangat tinggi. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada Kabupaten Dharmasraya (90,26) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (90,29), meskipun masih berada dalam kategori baik.

Perhitungan capaian indikator IPG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari sisi capaian kinerja, IPG di tahun 2025 tercapai melebihi target dan lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2024. Dari aspek realisasi, IPG Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 tercatat sebesar 95,96, meningkat sebesar 1,03 poin dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 94,93. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan gender dan semakin mengecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan tahun sebelumnya.



Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 95,08, realisasi Tahun 2025 yang telah mencapai 95,96 berarti sudah melampaui target akhir sebesar 0,88 poin satu tahun lebih awal.

Grafik 3. 24 IPG Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra

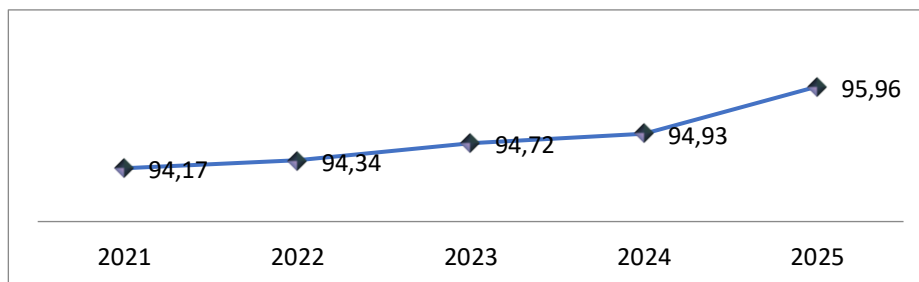


Sumber data: BPS

Secara Nasional, IPG Provinsi Sumatra Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional (91,85) dengan selisih sebesar 4,11 poin yang mencerminkan kinerja pembangunan gender relatif lebih baik. Secara regional Pulau Sumatra, IPG Sumatra Barat menempati peringkat pertama. Lebih tinggi dari Kepulauan Riau (94,20), Sumatra Selatan (93,22), Aceh (92,64), Bengkulu (91,65), Sumatra Utara (91,50), Lampung (90,93), Kep. Bangka Belitung (90,21), Jambi (89,50), dan Riau (89,32). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Sumatra Barat relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Sumatra.

Perkembangan IPG di Sumatra Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan positif. Data IPG yang dilaporkan setiap tahunnya adalah data n-1. Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir IPG Sumatra Barat naik sebesar 1,79 poin (dari 94,17 menjadi 95,96). Kenaikan paling tinggi terjadi pada periode 2024 – 2025 sebesar 1,03 poin. Perkembangan IPG dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.25.

Grafik 3. 25 Perkembangan IPG dari tahun 2021-2025



Sumber data: BPS

Beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2025 dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) diantaranya adalah:

1. Memperkuat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
2. Mendorong penguatan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah melalui penyusunan dan penerbitan Surat Edaran Gubernur mengenai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di kabupaten/kota.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah provinsi serta kabupaten/kota dalam implementasi pengarusutamaan gender pada proses pembangunan daerah.
4. Memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan daerah dalam penerapan pengarusutamaan gender pada berbagai sektor pembangunan.
5. Mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam proses perencanaan program dan kegiatan di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada Focal Point.
6. Memperkuat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
7. Mendorong percepatan LPLPP sebagai lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan untuk menyiapkan Standardisasi bagi organisasi perempuan.

IPG diukur dari perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Lambatnya kenaikan komposit pembentuk IPM perempuan dibandingkan laki-laki, khususnya dalam hal pemerataan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

1. Norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dapat menghambat akses mereka terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial. Yang berdampak pada rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.
2. Kurangnya akses perempuan ke pendidikan menengah dan tinggi sehingga dapat membatasi peluang dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi.
3. Rendahnya pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.





4. Masih adanya kebijakan di persyaratkan khusus terkait adanya Peraturan Daerah yang isinya khusus membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan harus dipisahkan dengan urusan lainnya. Contoh : adanya Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan lainnya. Sedangkan di Peraturan Daerah Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah (LKjIP) 2025 46 DP3AP2KB PROVINSI SUMATRA BARAT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini telah mengakomodir di beberapa pasal terkait dengan pengarusutamaan gender.
5. Belum semua Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Provinsi Sumatra Barat belum mengusulkan untuk standarisasi dan menunggu dari pusat untuk usulan standarisasi. Melakukan standarisasi adalah pusat sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP untuk menyiapkan kelengkapan standarisasi.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, ke depannya akan diupayakan hal-hal berikut:

1. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender di Sumatra Barat.
2. Percepatan Implementasi PUG di segala sektor baik melalui Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah dengan memperhatikan AMPK (Akses, Manfaat, Partisipasi dan Kontrol).

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya produktif. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menitikberatkan pada kesenjangan capaian pembangunan dasar antara laki-laki dan perempuan, IDG lebih menekankan pada dimensi pemberdayaan, seperti keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, dan teknis, serta kontribusi pendapatan perempuan terhadap laki-laki. Semakin tinggi nilai IDG, semakin besar tingkat keterlibatan dan pengaruh perempuan dalam ruang publik dan sektor strategis, sehingga indeks ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang responsif gender.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menetapkan IDG tercapai 61,75. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi IDG tahun 2024 yang tercapai 65,34 (lebih tinggi dari target dalam RPJMD tahun 2021-2026) maka target IDG tahun 2025 disesuaikan menjadi 68,11. Target tahun 2025 lebih tinggi 2,77 dibandingkan





dengan IDG 2024 (65,34) dan sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian indikator kinerja IDG tergambar sebagai berikut:



Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat melalui tabel statistik berjudul *"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)" Tahun 2024*, yang terakhir diperbarui pada tanggal 25 April 2025. Data yang digunakan merupakan hasil pengolahan dan analisis data Tahun 2024 sebagai data terbaru (data n-1) yang tersedia pada saat penyusunan laporan kinerja Tahun 2025.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 dibentuk oleh tiga komponen utama dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen.

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen Tahun 2025 sebesar 15,38%, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 10,94%. Terjadi kenaikan 4,44 poin, yang menunjukkan adanya penguatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

2. Perempuan sebagai Pengambil Keputusan/Tenaga Profesional

Persentase perempuan pada posisi pengambil keputusan/tenaga profesional Tahun 2025 sebesar 59,82%, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 61,04%. Penurunan sebesar 1,22 poin ini menjadi area yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan peran perempuan di sektor strategis.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

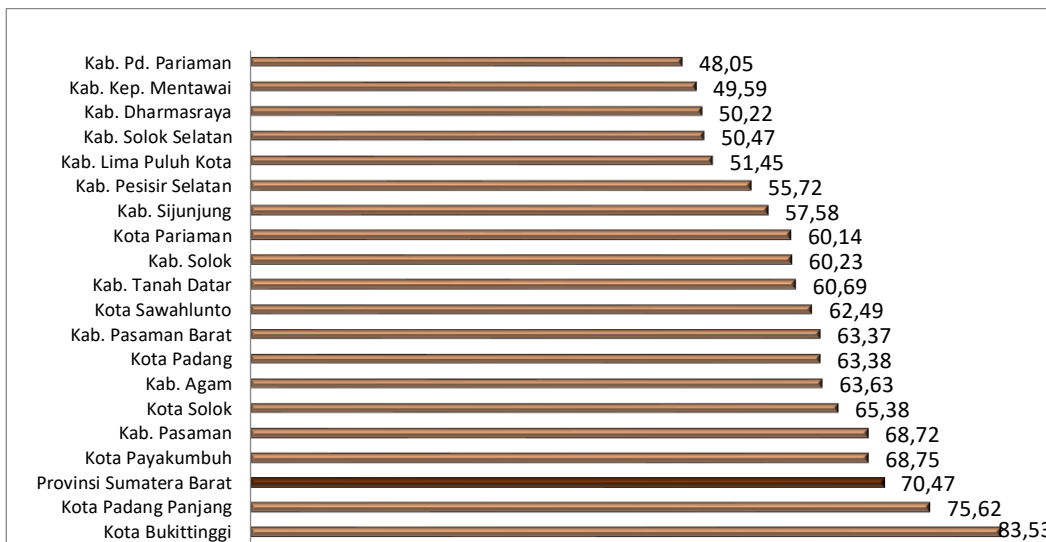
Persentase kontribusi pendapatan perempuan Tahun 2025 sebesar 37,85%, meningkat 0,33 poin dibandingkan Tahun 2024 (37,55%). Hal ini mencerminkan adanya perbaikan peran ekonomi perempuan dalam struktur pendapatan rumah tangga maupun daerah

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 70,47 merupakan hasil akumulasi dari capaian IDG kabupaten/kota di seluruh wilayah Sumatra Barat. Data IDG pada 19 kabupaten/kota memberikan informasi bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Bukittinggi (83,53) dan Kota Padang Panjang (75,62) yang menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan yang relatif



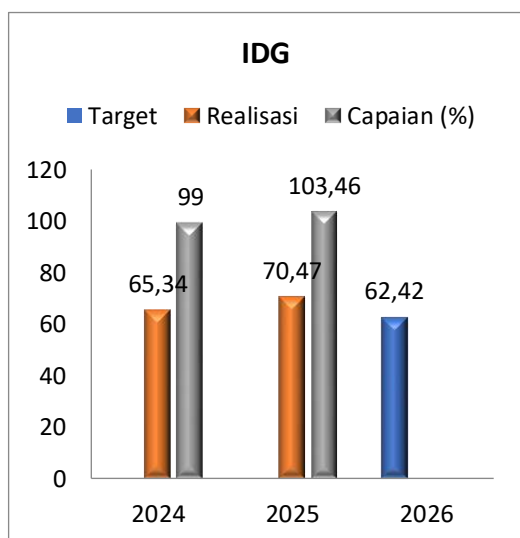
lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, capaian terendah tercatat pada Kabupaten Padang Pariaman (48,05), diikuti Kabupaten Kepulauan Mentawai (49,59). Perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah mencapai 35,48 poin, yang menggambarkan masih adanya kesenjangan tingkat pemberdayaan perempuan antar kabupaten/kota di Sumatra Barat. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2025 digambarkan pada grafik 3.26.

Grafik 3. 26 IDG Menurut Kab/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari sisi realisasi, IDG tahun 2025 sebesar 70,47 mengalami peningkatan 5,13 poin dibandingkan IDG tahun 2024 sebesar 65,34. Sejalan dengan



peningkatan realisasi tersebut, capaian kinerja juga meningkat, dari 99% pada Tahun 2024 menjadi 103,46% pada Tahun 2025, atau naik sekitar 4,46%, yang menunjukkan perbaikan kinerja dalam pencapaian indikator pemberdayaan gender.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,42, realisasi IDG Tahun 2025 sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 8,05 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan

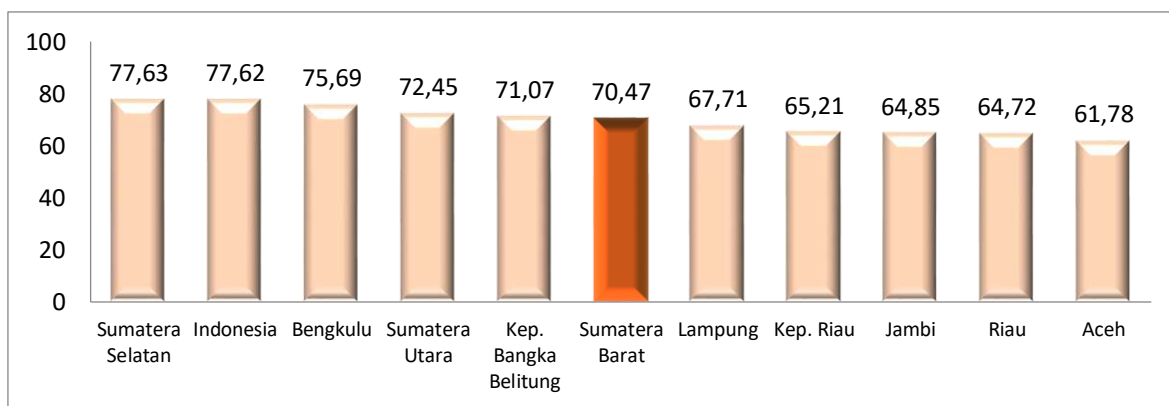
pemberdayaan gender di Sumatra Barat telah berada di atas target yang direncanakan hingga



akhir periode RPJMD, sekaligus mencerminkan perkembangan yang positif dalam peningkatan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Secara Nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 70,47 berada sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 77,62, dengan selisih 7,15 poin. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatra, posisi Sumatra Barat berada pada peringkat ke-5 dari 10 provinsi. Capaian ini masih berada di bawah beberapa provinsi seperti Sumatra Selatan (77,63), Bengkulu (75,69), Sumatra Utara (72,45), dan Kepulauan Bangka Belitung (71,07). Namun demikian, nilai IDG Sumatra Barat masih lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di wilayah Sumatra, seperti Lampung (67,71), Kepulauan Riau (65,21), Jambi (64,85), Riau (64,72), dan Aceh (61,78). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan gender di Sumatra Barat berada pada kategori menengah di kawasan Sumatra. Gambaran ini terlihat pada grafik 3.27.

Grafik 3. 27 IDG Provinsi di Pulau Sumatra dan Nasional Tahun 2025



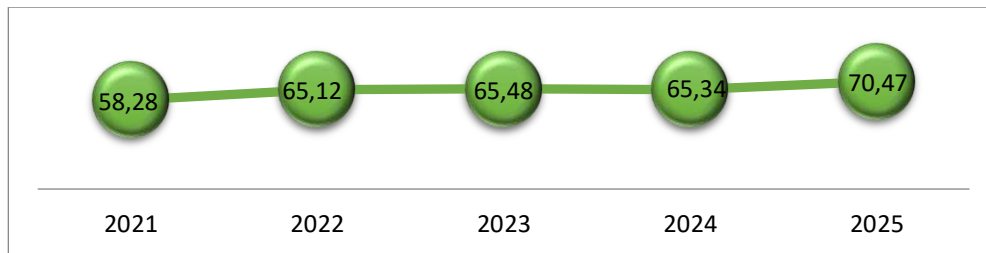
Sumber data: BPS Sumbar

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatra Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Nilai IDG meningkat dari 58,28 pada Tahun 2021 menjadi 65,12 pada Tahun 2022, dan kembali naik menjadi 65,48 pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 65,34, namun pada Tahun 2025 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 70,47. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir IDG Sumatra Barat meningkat sebesar 12,19 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat pemberdayaan perempuan di daerah. Perkembangan IDG Sumatra Barat selama 5 tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.28.





Grafik 3. 28 Perkembangan IDG Sumatera Barat dari tahun 2021-2025



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IDG Sumatera Barat di tahun 2025, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG). Upaya tersebut adalah:

1. Peningkatan Ekonomi Perempuan mayoritas untuk perempuan rentan/marginal yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri Rumahang, perempuan korban kekerasan, perempuan putus sekolah, mahasiswa dan lainnya melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP) sebanyak 17 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 660 orang. Dengan lokasi kegiatan di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Materi yang disampaikan terkait dengan peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner, souvenir, menjahit, anyaman, membantik, akrilik, buat papan bunga dan sulaman.
2. Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik, organisasi perempuan dan serta filantropi terkait sebanyak 3 kali kegiatan dengan peserta 200 orang.
3. Melakukan Pendampingan dan Advokasi serta Monitorig Evaluasi kegiatan peningkatan ekonomi perempuan pasca pelaksanaan kegiatan dengan peserta sebanyak 45 orang.

Sedangkan hambatan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Sumatera Barat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Perubahan pola pikir bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga sehingga terbatas pengembangan diri dalam peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kewirausahaan dan pengaruh budaya lokal adat daerah.
2. Perempuan pekerja masih lemah pengetahuan dan keterampilan secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.
3. Dukungan dari keluarga belum sepenuhnya optimal dalam peningkatan ekonomi perempuan.





4. Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
5. Belum optimalnya advokasi dan sosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh
6. Budaya patriarki yang masih kuat dimana:
 - a. Nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, meskipun menganut sistem matrilineal, masih cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
 - b. Perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses posisi strategis di pemerintahan dan politik.

Untuk menghadapi tantangan ini, ke depannya segala upaya yang telah dilakukan harus lebih optimal dengan pendekatan yang lebih progresif dan sinergis, dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Perlu pengembangan kewirausahaan baru perempuan dalam bentuk digitalisasi pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan usaha atau rumah tangga serta pengelolaan keamanan pangan produk.
2. Menyiapkan dukungan digitalisasi pemasaran bagi kewirausahaan perempuan yang belum tergolong UMKM dan masih industri rumahan.
3. Peningkatan SDM melalui TOT PUG dan PPRG bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten / Kota di Sumatra Barat
4. Mendorong pihak swasta/lembaga nonpemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSR dan budaya politik perempuan

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

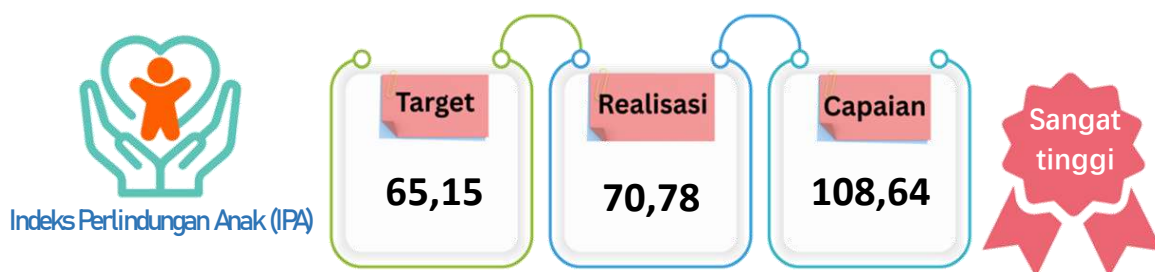
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan kondisi perlindungan anak yang dilihat dari berbagai aspek, seperti lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik pula kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah tersebut.





Dalam konteks pembangunan daerah, IPA digunakan sebagai indikator untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Peningkatan nilai IPA menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak, meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga, serta memperluas akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial telah berjalan secara efektif.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan Indeks Perlindungan angka (IPA) dapat mencapai angka 65,15, meningkat 3,77 poin dibandingkan dengan realisasi IPA 2024 sebesar 62,38. Pencapaian sasaran meningkatnya Indeks Perlindungan Anak tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tabel statistik *"Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Dimensi Pembentuknya"*. Data yang digunakan merupakan hasil pengolahan dan analisis data Tahun 2024, sehingga dalam pelaporan kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai data terbaru (data n-1) yang tersedia pada saat penyusunan laporan.

Berdasarkan data dimensi pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA), nilai IPA Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar 70,78, merupakan agregasi dari lima dimensi perlindungan anak. Dimensi dengan nilai tertinggi terdapat pada indeks Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 81,62, diikuti oleh Indeks Perlindungan Khusus sebesar 80,31, yang menunjukkan pemenuhan hak identitas dan perlindungan bagi anak sudah relatif baik. Sementara itu, indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya berada pada angka 69,35. Adapun nilai yang masih relatif rendah terdapat pada indeks Lingkungan



Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebesar 63,82 serta indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebesar 61,22, sehingga kedua aspek tersebut masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak di Provinsi Sumatra Barat.

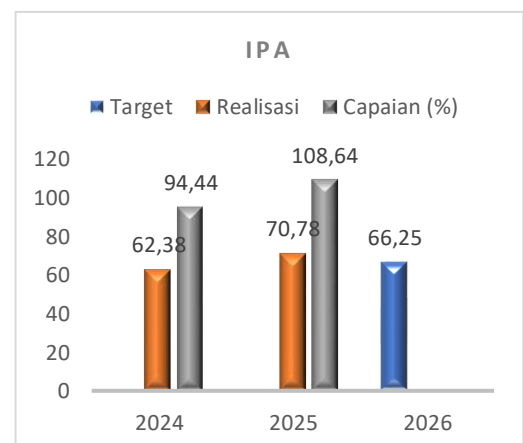
Berdasarkan grafik Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025, nilai rata-rata provinsi tercatat sebesar 70,78. Tiga daerah dengan capaian IPA tertinggi adalah Kota Padang Panjang (79,81), Kota Sawahlunto (77,10), dan Kota Solok (75,56). Sementara itu, tiga daerah dengan capaian IPA terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (61,81), Kabupaten Pesisir Selatan (66,92), dan Kabupaten Solok (66,98). Perbedaan antara daerah dengan nilai tertinggi dan terendah mencapai 17,99 poin (79,81 dibandingkan 61,81), yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian perlindungan anak antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2025 digambarkan pada grafik 3.29.

Grafik 3. 29 IPA Menurut Kab/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator IPA menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari sisi realisasi, IPA Sumatra Barat Tahun 2025 sebesar 70,78 mengalami peningkatan 8,40 poin dari IPA tahun 2024 sebesar 62,38. Begitupun dari sisi capaian, capaian kinerja 2025 sebesar 108,64% juga meningkat 14,2 poin dari capaian tahun 2024 sebesar 94,44%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Sumatra Barat.

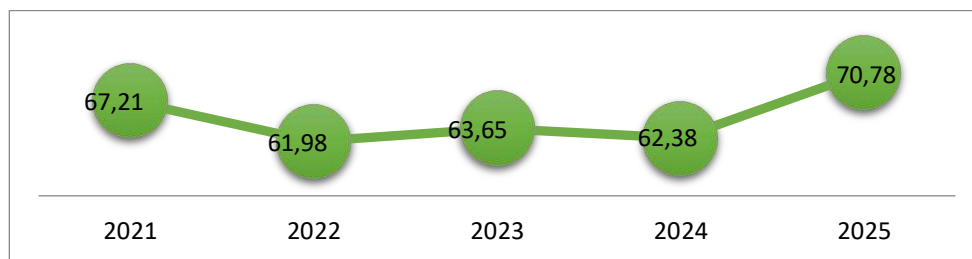




Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 66,25, realisasi IPA tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 4,53 poin, yang menandakan bahwa kinerja indikator IPA telah berada pada kondisi yang sangat baik sebelum berakhirnya periode perencanaan.

Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sumatra Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021 IPA tercatat sebesar 67,21, kemudian menurun pada 2022 menjadi 61,98. Pada 2023 nilai IPA kembali meningkat menjadi 63,65, namun sedikit menurun pada 2024 menjadi 62,38. Selanjutnya pada 2025 IPA mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 70,78, atau naik 8,40 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Sumatra Barat pada tahun terakhir pengamatan. Perkembangan IPA dari tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.30.

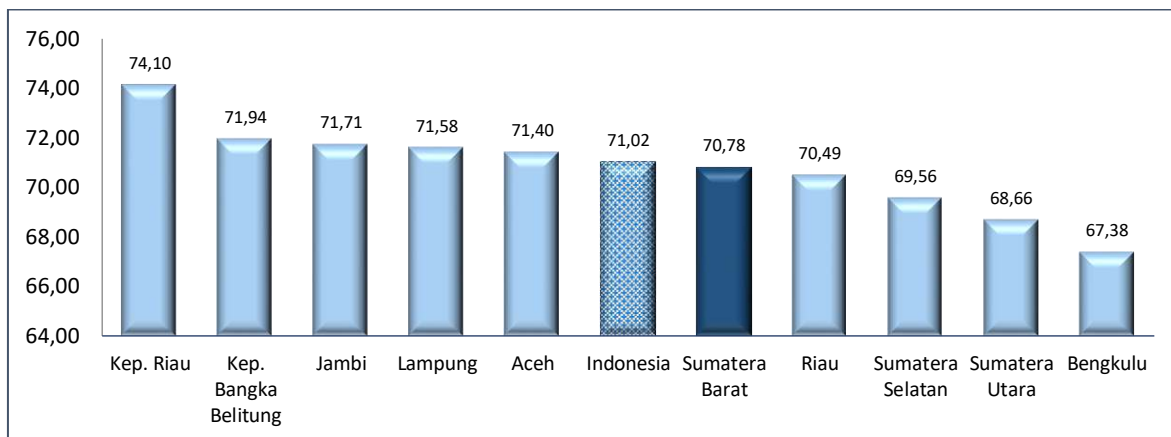
Grafik 3. 30 Perkembangan IPA dari tahun 2021-2025



Sumber data: Kementerian PPPA

Secara Nasional, nilai IPA Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 tercatat sebesar 70,78, sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 71,02. Dalam lingkup regional Pulau Sumatra, capaian tersebut menempatkan Sumatra Barat pada peringkat ke-7 dari 11 provinsi, berada di bawah Kepulauan Riau (74,10), Kepulauan Bangka Belitung (71,94), Jambi (71,71), Lampung (71,58), dan Aceh (71,40), namun masih lebih tinggi dibandingkan Riau (70,49), Sumatra Selatan (69,56), Sumatra Utara (68,66), dan Bengkulu (67,38). Posisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlindungan anak di Sumatra Barat berada pada kategori menengah di wilayah Sumatra, sehingga masih diperlukan penguatan kebijakan dan program perlindungan anak untuk meningkatkan capaian kinerja lebih baik lagi. Perbandingan IPA Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.31.

Grafik 3. 31 Perbandingan IPA Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2025



Sumber data: Kementerian PPPA

Dalam rangka memperkuat perlindungan anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka, Provinsi Sumatra Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis sepanjang tahun 2025. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memperkuat komitmen dan kebijakan daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, melalui penguatan regulasi serta integrasi isu perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan daerah.
2. Mendorong pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai pendekatan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4. Mendorong penguatan sistem layanan perlindungan anak melalui pengembangan kelembagaan dan jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.
5. Meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
6. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, termasuk melalui penguatan data dan informasi terkait kondisi anak di daerah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak di Sumatra Barat, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi agar capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dapat lebih optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang masih dihadapi:



1. Belum optimalnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.
3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan layanan perlindungan anak.
4. Belum optimalnya ketersediaan dan integrasi data terkait kondisi anak, yang diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
5. Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk meningkatkan Indeks Perlindungan Anak di masa mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan isu perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan daerah.
2. Mendorong percepatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem layanan perlindungan anak agar mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem data dan informasi perlindungan anak sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan.
5. Mendorong peningkatan partisipasi keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak
6. Memperluas sosialisasi mengenai keberadaan UPTD PPA dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, agar informasi lebih menjangkau masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak yang lebih mudah diakses.
8. Kerja sama dengan universitas dan organisasi profesi guna menghadirkan tenaga psikolog dan advokat secara sukarela.
9. Standardisasi layanan perlindungan anak dengan menerapkan pedoman layanan standar di seluruh lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta melakukan audit berkala untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.

Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan 9 Program dengan 17 Kegiatan dan 34 sub kegiatan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 6.776.687.000,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan



dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	34	6.776.687.000,00	6.202.320.159,00
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	6	940.625.000,00	896.353.000,00
2	Program Perlindungan Perempuan	3	5	1.048.577.000,00	844.098.976,00
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	2	606.326.000,00	587.176.000,00
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	2	6.705.000,00	6.671.000,00
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	5	398.825.000,00	392.149.000,00
6	Program Perlindungan Khusus Anak	3	6	2.536.949.000,00	2.382.066.783,00
7	Program Pengendalian Penduduk	1	2	14.840.000,00	6.180.000,00
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	2	51.616.000,00	49.243.000,00
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	4	1.172.224.000,00	1.038.382.400,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 6.776.687.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 6.202.320.159,00,- atau 91,52%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 574.366.841,00,- (8,48%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercapai 104,12% dengan realisasi anggaran 91,52% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 81,49%.



Misi 3 **Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

Misi 3 “*Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*” merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sejalan dengan misi tersebut, ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan usaha pertanian. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani

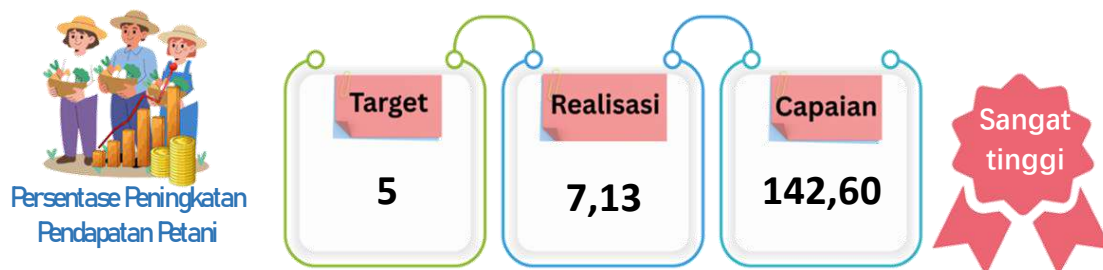
Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan di Provinsi Sumatra Barat yang mayoritas penduduknya bergantung pada aktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai tujuan yang harus dicapai agar misi ke-3 RPJMD 2021-2026 terwujud. Perumusan strategi dan program yang tepat sangat diperlukan agar produktivitas, akses pasar, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi petani meningkat.

Untuk mengukur tercapainya tujuan meningkatnya kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani. Pengukuran indikator ini berdasarkan pada rata-rata pencapaian 5 indikator yaitu pendapatan pembudidaya ikan, pendapatan nelayan, pendapatan peternak, pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dan pendapatan petani hutan.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan peningkatan pendapatan petani sebesar 5% setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2025. Target tersebut ditetapkan sebagai standar pertumbuhan minimal yang diharapkan dapat dicapai secara berkelanjutan sepanjang periode pembangunan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 10,08%, maka target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah sebesar 5,08. Penetapan target yang lebih moderat ini



mempertimbangkan dinamika sektor pertanian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, fluktuasi harga komoditas, serta stabilitas produksi hasil pertanian. Pencapaian indikator “Persentase peningkatan pendapatan petani” dijelaskan sebagai berikut :



Persentase peningkatan pendapatan petani yang tercapai 7,13% diukur berdasarkan rata-rata peningkatan dari pendapatan petani yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, peternak, petani tanaman pangan dan hortikultura dan petani hutan. Perhitungan peningkatan pendapatan petani dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Rincian Peningkatan Pendapatan Petani

Keterangan	Pendapatan		% Peningkatan Pendapatan
	2024	2025	
Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Juta)	54,526 87	54,61924	0,17
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42,513858	43,966796	3,42
Pendapatan peternak (Rp. Ribu)	55.349	58.445,34	5,59
Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)		10,66	10,66
Pendapatan petani hutan (Rp.juta)		15,81	15,81
		Total	35,65
Rata-rata peningkatan pendapatan petani			7,13

Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan pendapatan petani di Sumatra Barat tahun 2025 berasal dari beberapa subsektor pertanian dengan tingkat peningkatan yang berbeda. Peningkatan tertinggi terjadi pada petani hutan sebesar 15,81%, diikuti oleh petani tanaman pangan dan hortikultura sebesar 10,66%, serta peternak sebesar 5,59%. Sementara itu, pendapatan nelayan meningkat sebesar 3,42%, dan pembudidaya ikan sebesar 0,17% sebagai peningkatan terendah. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan pendapatan petani mencapai 7,13%, yang menunjukkan adanya perbaikan pendapatan pada berbagai subsektor pertanian di Sumatra Barat.

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2025 tercatat



sebesar 142,6%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 201,6%, atau turun 59%. Dari sisi realisasi, peningkatan pendapatan petani pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,13%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 10,08%, atau turun 2,95%. Meskipun demikian, nilai realisasi tersebut masih berada di atas target tahunan



yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani tetap berada pada jalur yang positif.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, realisasi peningkatan pendapatan petani pada tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih 2,13 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan

bahwa dari perspektif pencapaian jangka menengah, kinerja peningkatan pendapatan petani di Sumatra Barat telah berada di atas proyeksi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Analisa terkait upaya yang dilaksanakan, hambatan, upaya yang dilakukan ke depannya dan program pendukung untuk peningkatan pendapatan petani secara lebih rinci diuraikan pada penjelasan masing-masing indikator sasaran yang mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan petani ini.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai melalui pencapaian 3 sasaran yaitu meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan), meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dan meningkatnya pendapatan petani hutan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:





Sasaran 3.1.1
Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)

Sasaran “meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan)” diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha di sektor tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan petani, diharapkan tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dapat tercapai secara berkelanjutan. Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai tukar Petani (NTP)	101,60	127,94	125,93
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03	132,17	125,84
Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	54.838	54.619,24	99,60
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	44.158	43.966,796	99,57
Pendapatan Peternak (Rp. Ribu)	55.418	58.445,34	105,46
Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	10,66	213,20
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			128,27

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian adalah 128,77% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Evaluasi dan analisis indikator tersebut adalah sebagai berikut:

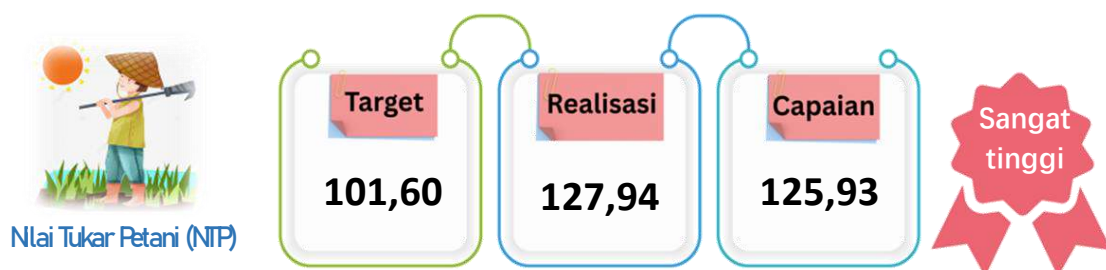




1. Nilai Tukar Petani (NTP)

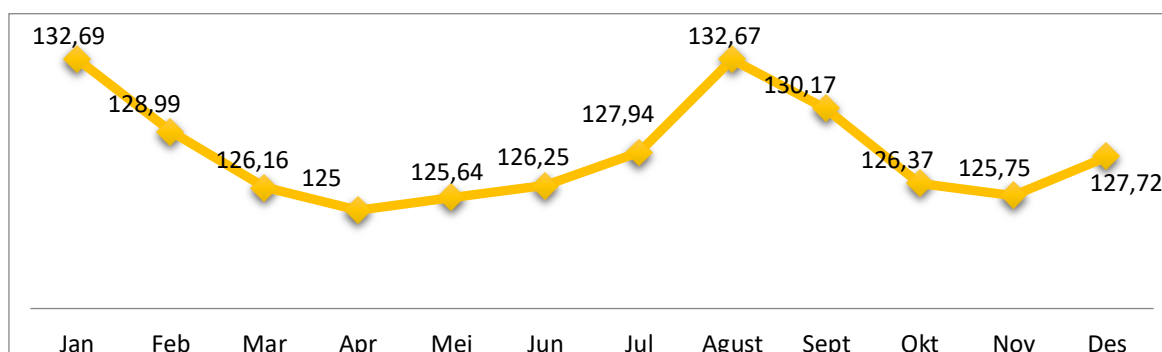
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini mencerminkan daya beli petani serta efektivitas kebijakan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan NTP sebesar 101,60. Jika dibandingkan dengan NTP tahun 2024 sebesar 123,73, target NTP tahun 2025 ditetapkan lebih rendah 3,40. Walaupun demikian, setiap tahunnya kondisi yang diharapkan sama-sama >100 (surplus). Pencapaian indikator NTP tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

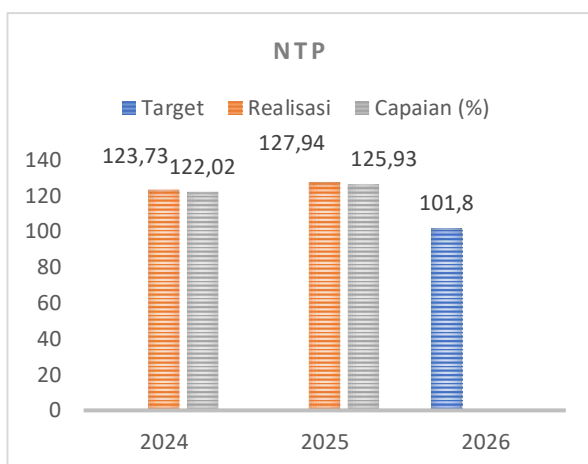


Realisasi indikator NTP tahun 2025 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik nomor 02/01/13.Th.XXIX yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 5 Januari 2026 tentang Perkembangan NTP Provinsi Sumatra Barat Desember 2025. NTP tahun 2025 dihitung dari nilai rata-rata NTP dari Januari – Desember 2025, seperti terlihat pada grafik 3.32.

Grafik 3. 32 Nilai Tukar Petani Januari s.d Desember 2025



Sumber data : BPS



Perhitungan capaian indikator NTP menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian sebesar 125,93 di tahun 2025 yang menunjukkan target indikator NTP di tahun 2025 tercapai melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar 3,91 poin. Dari aspek realisasi, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatra Barat tahun 2025 sebesar 125,93 mengalami peningkatan sebesar 2,2

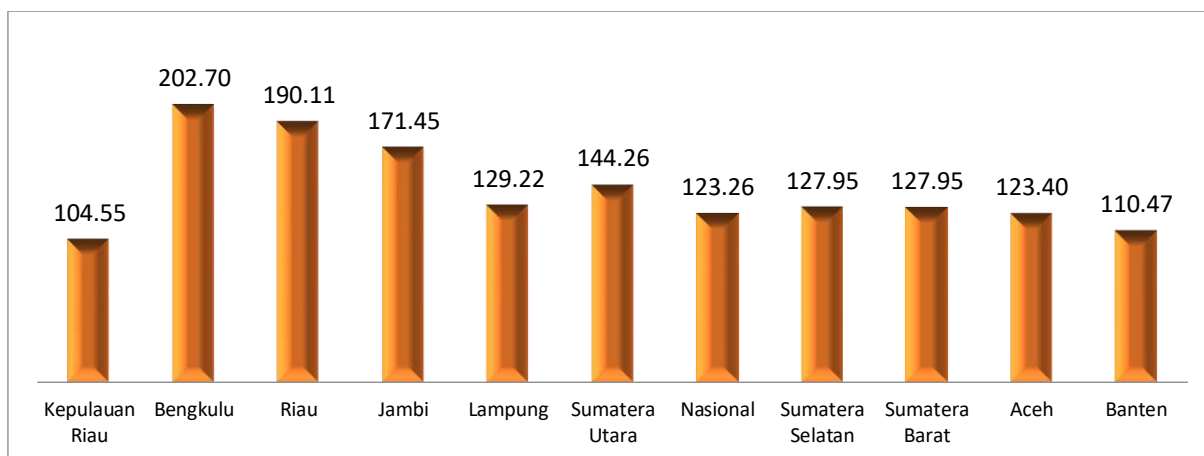
poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 123,73. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mendukung sektor pertanian.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 101,80, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 sebesar 127,94, telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 26,14 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari indikator NTP telah berada di atas proyeksi yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

Secara Nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatra Barat 2025 tercatat sebesar 127,95, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 123,26. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sumatra Barat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatra, Sumatra Barat berada pada peringkat ke-6, di bawah Bengkulu (202,70), Riau (190,11), Jambi (171,45), Sumatra Utara (144,26), dan Lampung (129,22). Sementara itu, NTP Sumatra Barat masih lebih tinggi dibandingkan Aceh (123,40), Banten (110,47), dan Kepulauan Riau (104,55). Perbandingan NTP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tergambar pada grafik 3.33.

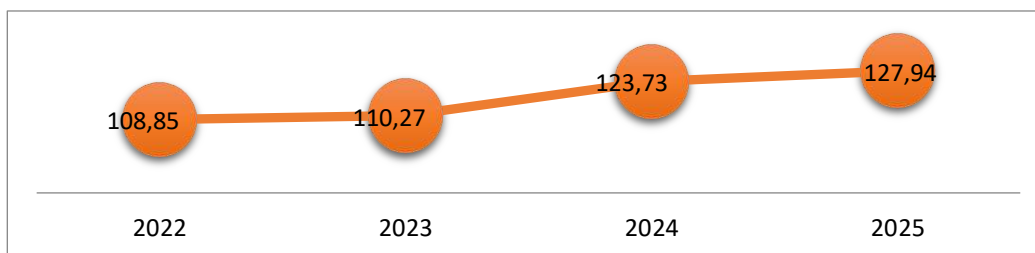


Grafik 3. 33 Perbandingan NTP Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3. 34 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2022-2025



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatra Barat tahun 2022–2025 secara keseluruhan, selama periode 2022–2025, NTP mengalami kenaikan sebesar 19,09 poin. NTP menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, NTP tercatat sebesar 108,85, kemudian meningkat menjadi 110,27 pada tahun 2023 atau naik sebesar 1,42 poin. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana NTP mencapai 123,73 atau meningkat 13,46 poin dibandingkan tahun 2023. Tren positif tersebut terus berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 127,94, yang berarti mengalami peningkatan 4,21 poin dibandingkan tahun 2024.

2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayarkan untuk input produksi. Indikator ini mencerminkan daya beli petani serta efektivitas usaha pertanian dalam mendukung kesejahteraan mereka. Jika NTUP lebih besar dari 100 maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut



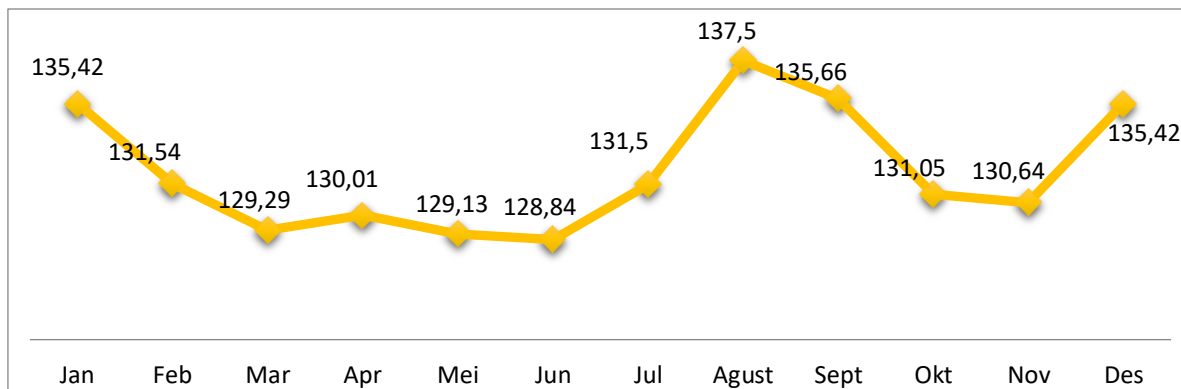
lebih baik dibandingkan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTUP lebih kecil dari 100 maka tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut menurun dibandingkan tahun dasar.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan NTUP pada tahun 2025 mencapai angka 105,03, lebih rendah 19,57 poin dari NTUP tahun 2024 (124,60). Pencapaian indikator NTUP disajikan sebagai berikut:

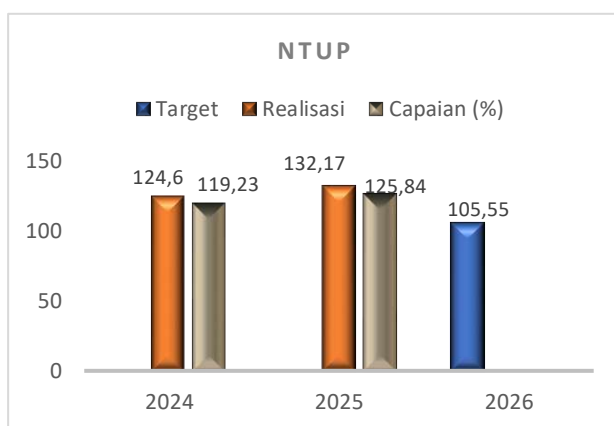


Realisasi indikator NTUP tahun 2025 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik nomor 02/01/13.Th.XXIX yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 5 Januari 2026 tentang Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatra Barat Desember 2025. NTUP tahun 2025 dihitung dari nilai rata-rata NTUP dari Januari–Desember 2025, seperti terlihat pada grafik 3.35.

Grafik 3. 35 Nilai Tukar Usaha Petani Januari s.d Desember 2025



Sumber data : BPS



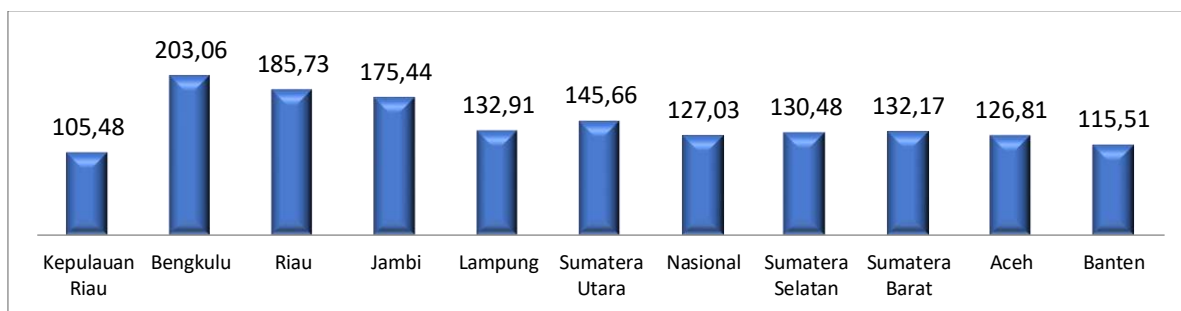
Perhitungan capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2025 sebesar 125,84% yang menunjukkan target NTUP di tahun 2025 tercapai melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar 119,23 persen, capaian 2025 meningkat sebesar 6,61 persen. Dari sisi

realisasi, NTUP Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 sebesar 132,17, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 124,60, sehingga terjadi peningkatan sebesar 7,57 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi usaha pertanian pada tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam RPJMD tahun 2026 sebesar 105,55, realisasi NTUP tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 26,62 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator NTUP telah berada jauh di atas target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Secara Nasional, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 tercatat sebesar 132,17, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 127,03 yang menunjukkan bahwa tingkat keuntungan usaha pertanian di Sumatra Barat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Sumatra, Sumatra Barat berada pada peringkat ke-6, di bawah Bengkulu (203,06), Riau (185,73), Jambi (175,44), Sumatra Utara (145,66), dan Sumatra Selatan (130,48), namun masih lebih tinggi dibandingkan Lampung (132,91), Aceh (126,81), Banten (115,51), dan Kepulauan Riau (105,48). Perbandingan NTUP Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.36.

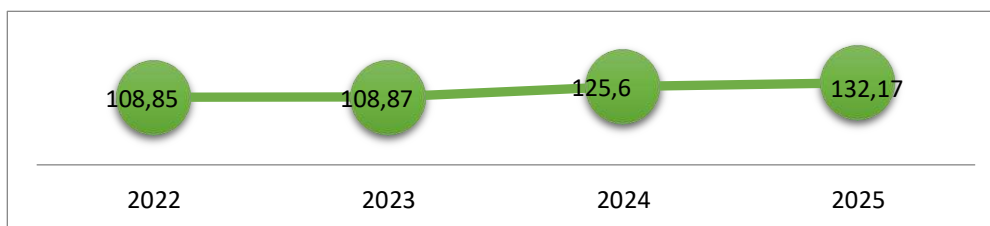
Grafik 3. 36 Perbandingan NTUP Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data empat tahun terakhir, secara akumulasi NTUP Sumatra Barat mengalami peningkatan sebesar 23,32 poin dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, NTUP tercatat sebesar 108,85, kemudian relatif stabil pada tahun 2023 dengan nilai 108,87 atau meningkat tipis sebesar 0,02 poin. Peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2024, di mana NTUP mencapai 125,60, atau meningkat 16,73 poin dibandingkan tahun 2023. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 132,17, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 6,57 poin dibandingkan tahun 2024. Perkembangan NTUP tahun 2022-2025 disajikan pada grafik 3.37.

Grafik 3. 37 Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani Tahun 2022-2025



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Berikut beberapa langkah yang diambil:

1. Melakukan program peningkatan produktivitas komoditas strategis dengan memperluas penggunaan benih unggul, memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan meningkatkan penerapan teknologi budidaya modern.
2. Meningkatkan peran fasilitas penyuluhan dan Sekolah Lapang untuk memperkuat kapasitas petani dalam mengelola input secara efisien. Intervensi ini bertujuan mengurangi inefficiency gap antara praktik budidaya aktual dan praktik budidaya optimal.
3. Menjaga stabilisasi harga dilakukan melalui koordinasi TPID, pemantauan harga pasar secara real-time, serta intervensi distribusi komoditas tertentu pada periode fluktuasi tinggi.
4. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, gapoktan, hingga korporasi petani dilakukan untuk mendorong konsolidasi produksi, pengadaan input kolektif, serta peningkatan posisi tawar dalam rantai nilai.
5. Penggunaan benih unggul berlabel, pengurangan penggunaan pestisida kimia secara berlebihan, dan optimalisasi pemupukan berimbang.
6. Peningkatan kualitas produk melalui penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengering, penyimpanan dingin, dan pengemasan sehingga harga jual di tingkat petani meningkat



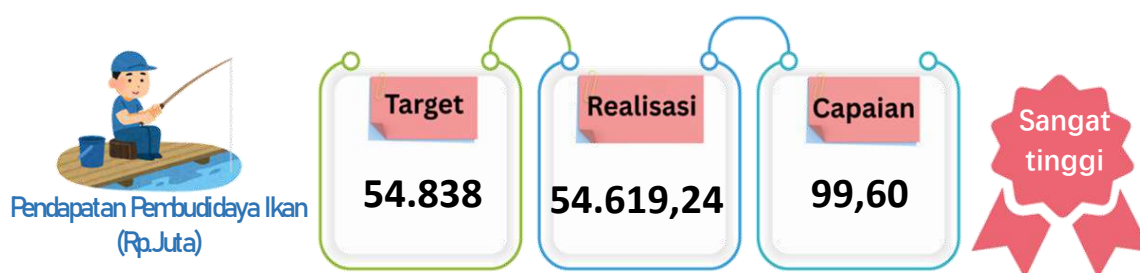
7. Modernisasi budidaya melalui mekanisasi pertanian, baik untuk pengolahan lahan, tanam, hingga panen, guna menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

Upaya lain, hambatan dan upaya ke depannya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) secara lebih teknis akan terlihat pada analisa indikator peningkatan petani perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

3. *Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)*

Indikator pendapatan pembudidaya ikan merupakan salah satu ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya sebagai bagian dari pelaku utama sektor pertanian yang kesejahteraannya menjadi fokus dalam pembangunan pertanian dan perikanan. Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan umumnya dipengaruhi oleh peningkatan produksi hasil budidaya, stabilitas serta kenaikan harga jual komoditas ikan di tingkat pembudidaya, dan efisiensi biaya produksi seperti pakan, benih, serta sarana budidaya lainnya. Dengan demikian, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan mencerminkan semakin baiknya kinerja subsektor perikanan budidaya dan secara langsung mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian”.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, target indikator Pendapatan Pembudidaya untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 54.838 (juta rupiah), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 lebih tinggi 0,16% (92,370 ribu rupiah). Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan tahun 2025 tergambar pada tabel berikut:



Pendapatan pembudidaya ikan Rp. 54.619,24Juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3. 17 Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2025

No	Jenis Usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	pendapatan (Rp.000)	Pendapatan/ org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	203.611,486	5.049.564.852,80	67.077	3.787.173.639,60	1.262.391.213,20	18.820,03
2	Kolam Air Deras	34.220,134	909.913.363	4.477	682.435.022,25	227.478.340,75	50.810,44
3	Jaring Apung Tawar	14.476,749	381.505.766	1.861	286.129.324,50	95.376.441,50	51.250,10
4	Tambak	5.184,613	351.314.461	438	263.485.845,75	87.828.615,25	200.521,95
5	Keramba	4.633,880	147.227.635	470	110.420.726,25	36.806.908,75	78.312,57
6	Sawah	1.052,800	30.425.920	1.551	22.819.440,00	7.606.480,00	4.904,24
7	Budidaya laut	184,450	29.106.210	670	21.829.657,50	7.276.552,50	10.860,53
8	Jaring Tancap Tawar	789,69	24.480.390	285	18.360.292,50	6.120.097,50	21.474,03
Jumlah		264.153,80	6.923.538.597,80	76.829	5.192.653.948	1.730.884.649	436.953,89
Pendapatan per jenis usaha tahun 2025							54.619,24
Pendapatan per org/bln tahun 2025							4.551,60

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3 - 4 kali dalam setahun. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi.

Data pendapatan pembudidaya ikan dan produksi budidaya tahun 2025 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kabupaten/Kota. Data yang telah divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dirilis pada pertengahan tahun 2026.

Perhitungan capaian indikator pendapatan pembudidaya ikan menggunakan metode pengukuran *kriteria pertama*. Tahun 2025 capaian kinerja tercatat sebesar 99,60%, artinya



realisasi tercapai sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 108,95%, capaian kinerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan 9,35 poin. Namun, dari sisi realisasi pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp54.619,24 juta, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp54.526,87 juta, atau naik

sekitar Rp92,37 juta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat capaian terhadap target menurun, secara nominal pendapatan pembudidaya ikan tetap mengalami peningkatan.

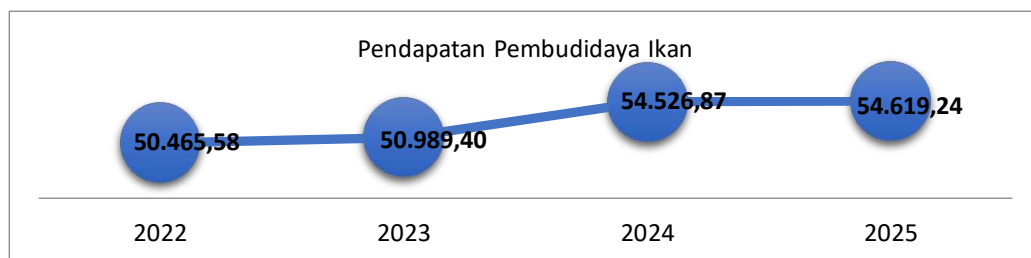


Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp53.096,00 juta, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sekitar Rp1.523,24 juta. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator pendapatan pembudidaya ikan secara substansial telah melebihi proyeksi jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi Pendapatan Pembudidaya Ikan di Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp54.619,24 juta masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp61.560 juta. Jika dibandingkan, pendapatan pembudidaya ikan di Sumatra Barat mencapai sekitar 88,56% dari angka nasional. Sedangkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatra seperti Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Utara, kita tidak dapat melakukan perbandingan karena tidak melakukan pengukuran terhadap pendapatan pembudidaya ikan.

Jika dilihat dari perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, Secara akumulatif, pendapatan pembudidaya ikan selama periode 2022–2025 meningkat sebesar Rp4.153,66 juta. Selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2022 pendapatan tercatat sebesar Rp50.465,58 juta, kemudian meningkat menjadi Rp50.989,40 juta pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp54.526,87 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp54.619,24 juta, meskipun kenaikannya relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2022-2025 disajikan pada grafik 3.38.

Grafik 3. 38 Pendapatan Pembudidaya Ikan Sumatra Barat Tahun 2022-2025 (dalam juta rupiah)



Sumber: Data diolah Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan di Sumatra Barat pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis, diantaranya adalah:

1. Memberikan bantuan benih, bantuan induk ikan unggul dan pakan kepada kelompok pembudidaya ikan sebagai upaya meningkatkan produksi dan hasil panen. Bantuan benih dan pakan yang diberikan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Benih ikan nila	385.000 ekor
Benih ikan mas	155.000 ekor
Benih ikan lele	243.770 ekor
Benih ikan gurami	181.380 ekor
Calon induk nila	436 Kg
Induk lele	350 Kg
Induk mas	250 Kg
Benur vaname	595.400 ekor
Pakan benih	166.304 Kg
Pakan induk	1.300 Kg
Pakan vaname	6.300 Kg

2. Memberikan bantuan sarana pembudidaya ikan antara lain KJA lobster 2 unit, Apartemen cacing sutra 1 unit, Kolam terpal bundar 33 unit dan Mesin pakan 4 unit
3. Meningkatkan akses pembudidaya ikan terhadap Sarana, Teknologi, dan Pasar. Pembudidaya ikan didorong untuk lebih mudah mengakses sarana produksi, teknologi budidaya yang lebih modern, serta pasar yang lebih luas guna meningkatkan daya saing usaha perikanan.
4. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan

Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selama tahun 2025 dalam upaya meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan:

1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.
2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
3. Keterbatasan induk berkualitas tinggi menjadi kendala dalam menghasilkan benih unggul, yang berdampak pada efisiensi dan hasil produksi budidaya ikan.
4. Kualitas SDM pembudidaya yang belum merata.

Untuk meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:





1. Menekan Biaya Pakan dengan mendorong penerapan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) melalui pembinaan pembuatan pakan ikan yang baik serta membangun pabrik pakan di Sumatra Barat guna menekan biaya produksi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan balai benih ikan nasional untuk penyediaan induk unggul.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya beserta kendala yang dihadapi
4. Pembinaan teknis atau temu lapang dengan para pembudidaya untuk meningkatkan produksi dengan hasil yang optimal serta sehat dan aman untuk dikonsumsi
5. Meningkatkan kompetensi Petugas Pembina budidaya dan pembudidaya ikan di Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis
6. Secara berkelanjutan memberikan Bantuan Benih dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan
7. Secara berkelanjutan menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan

4. Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan merupakan nilai penerimaan yang diperoleh nelayan dari kegiatan penangkapan ikan dalam suatu periode tertentu. Pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata rata per kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, indikator pendapatan nelayan untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 44,158 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.42.513,858, target tahun 2025 lebih tinggi 3,86% (Rp 1.644,14). Pencapaian pendapatan nelayan tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Realisasi pendapatan nelayan sebesar Rp.43,966.796 juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Data pendapatan nelayan dan produksi perikanan tangkap tahun 2025 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kab/Kota. Rilis data yang telah divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Bulan Maret sd April 2026.

Rincian pendapatan nelayan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tw	Produksi (Ton)	Harga Rata-rata per KG	Nilai Produksi (Ribu)	Biaya Produksi (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp)	Pendapatan Nelayan (Rp)	Jumlah Nelayan
I	56.132,57	28.850	1.599.778.245	479.933.474	1.119.844.772	615.914.624	503.930.147	46.650
II	58.839,59	29.100	1.712.232.069	513.669.621	1.198.562.448	659.209.347	539.353.102	46.650
III	64.525,81	29.000	1.871.248.490	561.374.547	1.309.873.943	785.924.366	523.949.577	46.650
IV	59.378,77	29.100	1.727.922.207	518.376.662	1.209.545.545	725.727.327	483.818.218	46.650
Jumlah 238.876,74				2.073.354.303	4.873.826.708	2.786.775.664	2.051.051.044	
Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)							2.051.051.044	
Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)							170.920.920	
Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)							2.786.775.664	
Pendapatan Pemilik Kapal per Bulan (Rp.000)							232.231.305	

*** Pendapatan Nelayan / org /tahun = 43.966.796**

Jumlah Pendapatan Nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Perhitungan capaian indikator pendapatan nelayan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 99,57%. Capaian ini menunjukkan bahwa target pendapatan nelayan pada tahun 2025 hampir sepenuhnya tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 100,17%, capaian tahun 2025 sedikit menurun sebesar 0,60 poin. Namun



demikian, dari sisi realisasi terjadi peningkatan, di mana pendapatan nelayan tahun 2025 sebesar Rp43.966.796 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.513.860, atau meningkat sekitar Rp 1.452,.936. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat capaian terhadap target sedikit menurun, secara nominal pendapatan nelayan di Sumatra Barat tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp44,158 juta, realisasi pendapatan nelayan pada tahun 2025 masih sedikit berada di bawah target tersebut dengan selisih sekitar Rp191,20 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pendapatan nelayan telah mendekati target akhir periode RPJMD, sehingga dengan tren peningkatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, target jangka menengah tersebut berpotensi untuk dapat dicapai.

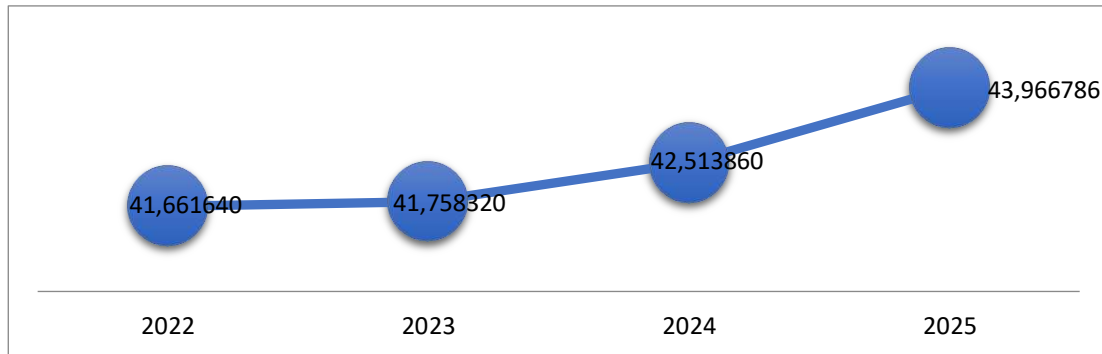
Realisasi Pendapatan Nelayan di Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp43.966.796 masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp53.032.596. Jika dibandingkan, pendapatan nelayan di Sumatra Barat mencapai sekitar 82,91 % dari angka nasional. Perbandingan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatra, kita tidak dapat melakukan perbandingan karena seperti Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Utara tidak melakukan pengukuran terhadap pendapatan nelayan.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2022-2025), Secara akumulatif pendapatan nelayan meningkat sebesar Rp2.305,16 juta. selama periode 2022-2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2022 pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp41,66164 juta, kemudian meningkat menjadi Rp41,75832 juta pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp42,51386 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp43,966876 juta. Meskipun peningkatan terjadi secara bertahap setiap



tahun, tren ini menggambarkan bahwa sektor perikanan tangkap di Sumatra Barat masih menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan

Grafik 3. 39 Pendapatan Nelayan Sumatra Barat Tahun 2022-2025 (dalam juta rupiah)



Sumber: Data diolah Dinas Kelautan dan Perikanan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana penangkapan ikan dengan memberikan bantuan 399 unit sarana perikanan tangkap dengan rincian sebagai berikut:

1	Jaring	52 unit
2	Mesin	142 unit
3	Fish box	201 unit
4	Perahu fiber	1 unit
5	Sarana penangkapan ikan di Danau Maninjau	3 Unit
2. Memberikan pelayanan perizinan kepada kapal-kapal perikanan berupa rekomendasi sehingga usaha penangkapan ikan dapat berjalan dengan lancar.
3. Memberikan edukasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan
4. Melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha nelayan berupa SeHAT, BPJS
5. Penyediaan sarana yang dibutuhkan nelayan di Pelabuhan Perikanan seperti tambat labuh, air bersih, es dan SPBUN

Hambatan yang Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.
2. Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.



3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya.
4. Proses perizinan yang masih tidak lancar dan terkesan rumit sehingga banyak nelayan terkena razia di laut

Upaya ke depan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

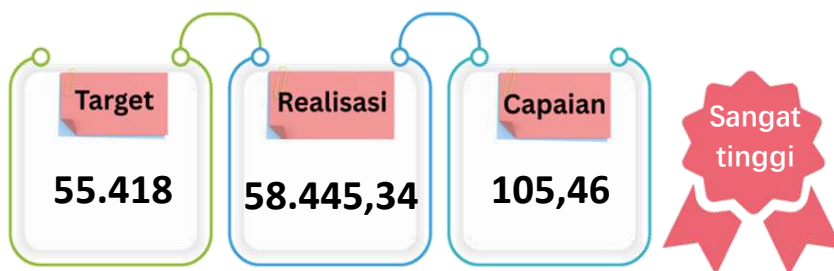
1. Tetap melaksanakan apa yang sudah di upayakan pada tahun sebelumnya seperti pemberian bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (SDI), dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Melaksanakan koordinasi antar Instansi terkait perizinan usaha perikanan (PPS Bungus, KSOP, Lantamal, PPW I, PPW II, PPW III , DPMPTSP).
4. Melaksanakan PKS dengan universitas dalam rangka peningkatan produksi dan upaya mengatasi permasalahan nelayan.
5. Melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha nelayan.
6. Mengupayakan proses perizinan yang lebih efektif bagi pelaku usaha perikanan.

5. Pendapatan Peternak

Pendapatan peternak merupakan nilai penerimaan yang diperoleh peternak dari kegiatan usaha peternakan dalam suatu periode tertentu. Pendapatan ini dihitung berdasarkan nilai produksi ternak yang dihasilkan, baik dari penjualan ternak hidup maupun produk turunan seperti daging, susu, atau telur, yang dikalikan dengan harga jual di tingkat peternak. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan indikator pendapatan peternak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis sektor agraris.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, target indikator Pendapatan Peternak untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 55.418 ribu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp.55.349 ribu), target tahun 2025 lebih tinggi 0,12%. Pencapaian pendapatan peternak tahun 2025 tergambar pada tabel berikut:



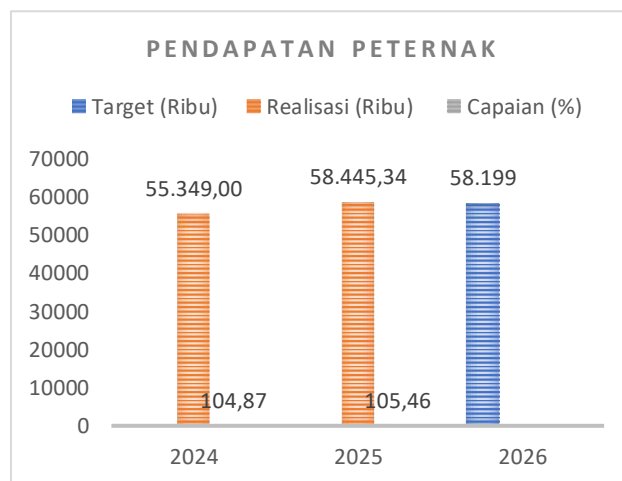


Pendapatan peternak sebesar Rp 58.445.340.- diperoleh berdasarkan penghitungan analisa usaha/pendapatan pada kelompok ternak di Sumatra Barat yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat. Adapun uraian penghitungan pendapatan peternak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah Ternak	Penerimaan (Rp/tahun)	Biaya Produksi (Rp/tahun)	Pendapatan (Rp/tahun)
1	Peternak Sapi	10-12 ekor	159.435.000	43.800.000	115.635.000
2	Peternak Ayam	500-1000 ekor	354.950.000	319.375.000	35.575.000
3	Peternak Itik	500-1000 ekor	418.925.000	341.275.000	77.650.000
4	Peternak Kambing	20-40 ekor	70.529.000	27.375.500	43.154.200
5	Peternak Puyuh	500-1000 ekor	66.750.000	46.537.500	20.212.500
Jumlah Rata-rata			267.647.300	194.590.625	58.445.340

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan peternak yang diperoleh bervariasi sesuai dengan komoditi usaha kelompok ternaknya. Perbedaan nilai pendapatan peternak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu jumlah ternak yang dimiliki, luas lahan dan biaya produksi seperti biaya pakan, biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain.

Perhitungan capaian indikator pendapatan peternak menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari aspek realisasi, pendapatan peternak di Sumatra Barat tahun 2025 mencapai Rp 58.445.340, meningkat sebesar Rp3.096.340 dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp 55.349.000. Dari segi capaian kinerja, realisasi pendapatan peternak tahun 2025 mencapai 105.46 %, artinya meningkat 0.59 poin dari tahun 2024 yang mencapai 104,87%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahun 2025, realisasi pendapatan peternak terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan.

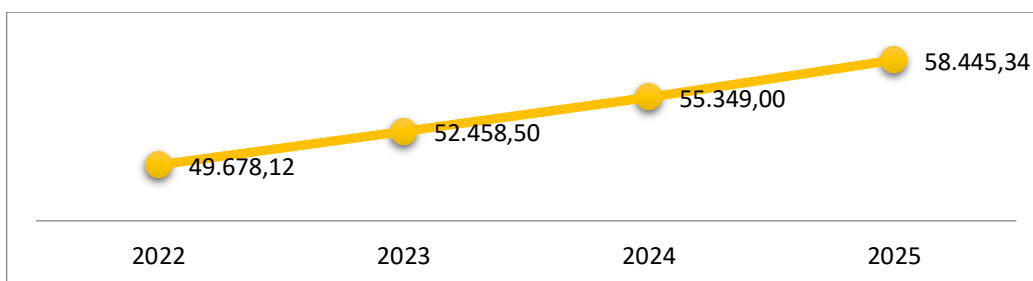


Realisasi pendapatan peternak pada tahun 2025 sebesar Rp 58,445.34 juta telah mencapai 100,42% dari target akhir RPJMD (2026) yang ditetapkan sebesar Rp58.199 ribu. Kondisi ini

menunjukkan bahwa indikator pendapatan peternak telah mencapai bahkan melampaui proyeksi target akhir periode RPJMD lebih awal.

Pendapatan peternak di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Secara akumulatif, pendapatan peternak dari tahun 2022 hingga 2025 meningkat sebesar Rp8.767,22 ribu. Pada tahun 2022 pendapatan peternak tercatat sebesar Rp49.678,12 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp52.458,50 ribu pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp55.349,00 ribu pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp58.445,34 ribu, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Perkembangan pendapatan peternak tahun 2022-2025 tergambar pada grafik 3.40.

Grafik 3. 40 Perkembangan Pendapatan Peternak dari Tahun 2022 s.d 2025 (ribu)



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumbar

Realisasi pendapatan peternak Sumbar Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena data Sensus Pertanian terakhir rilis pada tahun 2013, sehingga tidak relevan untuk dijadikan pembandingan.

Untuk meningkatkan pendapatan peternak di Sumatra Barat pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi telah mengupayakan berbagai langkah strategis. Beberapa upaya tersebut meliputi:

1. Peningkatan produksi peternakan dengan melaksanakan penyaluran bantuan ternak dan alat mesin peternakan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota yaitu: ayam KUB (6.000 ekor), Itik (4.000 ekor), Kambing (240 ekor), sapi (20 ekor), mesin tetas (16 unit) dan alat pencacah (4 unit).
2. Optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) untuk meningkatkan angka kelahiran ternak secara lebih efektif dan efisien melalui penyediaan nitrogen (N₂) cair sebanyak 40.000 liter, Plastik Sheath sebanyak 1.000 Pack dan Plastik Glove sebanyak 1.000 Pack yang didistribusikan pada 19 kabupaten dan kota serta Depo Provinsi (UPTD BPTSD Buah Sakato Payakumbuh).
3. Memberikan bimbingan teknis kepada peternak terkait pemeliharaan, pengembangan, serta penanganan kesehatan hewan melalui penerapan *Good Breeding Practice* (GBP) dan

Good Farming Practice (GFP) untuk meningkatkan kualitas ternak dan efisiensi usaha peternakan.

4. Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam produksi pakan ternak serta mengoptimalkan peran Bank Pakan di daerah guna memastikan ketersediaan pakan yang berkualitas dan terjangkau.
5. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan bagi peternak dalam pengolahan serta pemasaran hasil peternakan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar.
6. Promosi dan Pengembangan Produk Peternakan melalui kegiatan seperti Livestock Expo dan kontes ternak.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan peternak, terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi, antara lain:

1. Sebagian besar peternak masih menjalankan usaha peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan, sehingga kurang fokus dalam pengembangannya.
2. Kurangnya pemahaman tentang teknik pemeliharaan, manajemen usaha, serta keterampilan dalam mengelola ternak menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas peternakan.
3. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan kurangnya sarana produksi ternak menghambat pengembangan usaha peternakan yang lebih berdaya saing.
4. Serangan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Jembrana pada hewan ruminansia berdampak signifikan terhadap kesehatan ternak dan produktivitas peternakan.
5. Regulasi terkait pembatasan distribusi ternak sebagai langkah pengendalian penyakit berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok dan pemasaran hasil peternakan.

Upaya ke depannya untuk meningkatkan pendapatan peternak adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peternak untuk meningkatkan jumlah kepemilikan ternaknya dan memperbaiki sistem pemeliharaannya untuk lebih fokus pada usaha ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan kualitas pakan untuk memenuhi asupan gizi ternak yang bersumber dari bahan baku lokal.
3. Tetap melaksanakan penyuluhan secara berkelanjutan kepada peternak.
4. Memberikan dukungan melalui pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak perbankan berupa peminjaman modal kepada peternak untuk dapat mengembangkan skala usahanya serta menyelenggarakan program asuransi ternak.





6. Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha tani yang dilakukannya. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya, dengan kata lain pendapatan meliputi penerimaan total dan pendapatan bersih, pendapatan kotor/penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian akan berdampak pada daya beli petani, yang menunjukkan bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya.

Persentase peningkatan pendapatan petani menggambarkan perbandingan kenaikan pendapatan petani pada tahun sekarang (pendapatan petani tahun n) dengan pendapatan petani tahun sebelumnya (pendapatan petani tahun $n-1$), di mana pendapatan petani dapat dilihat dari nilai Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) yang bersumber dari publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026, peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5 persen. Penetapan target ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 18,67 persen. Penetapan tersebut mempertimbangkan bahwa indikator peningkatan pendapatan petani dihitung berdasarkan perubahan Indeks Nilai yang Diterima Petani (It) antar tahun yang cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti pergerakan harga komoditas pertanian, volume produksi, serta potensi bencana alam yang sering dihadapi Sumatra Barat. Pencapaian indikator kinerja pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura disajikan sebagai berikut:



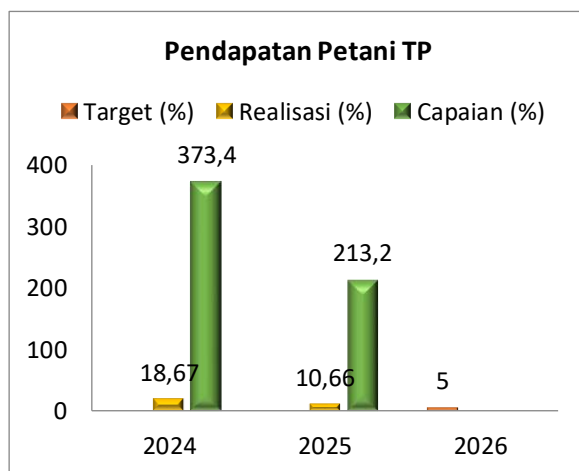
Persentase peningkatan pendapatan petani sebesar 10,66% dihitung berdasarkan nilai rata-rata peningkatan pendapatan petani per sub sektor, sedangkan nilai persentase peningkatan pendapatan dihitung dengan membanding selisih Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2025 dengan Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2024. Berdasarkan rilis Indeks Nilai

Yang Diterima Petani (It) oleh Badan Pusat Statistik tahun 2026, maka dapat dihitung persentase pendapatan petani sebagai berikut:

Subsektor	(It) 2024*	(It) 2025*	Peningkatan pendapatan (%)*
Pangan	111,42	118,51	-0,97
Hortikultura	126,92	124,32	26,67
Perkebunan	144,99	148,90	6,27
Rata-rata			10,66

Sumber : **, BPS (2026) dan *** Data diolah (2026)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Rata-rata peningkatan pendapatan petani pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,66%, yang dihitung berdasarkan perubahan Indeks Nilai yang Diterima Petani (It) antara tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing subsektor. Secara subsektoral, peningkatan tertinggi terjadi pada hortikultura sebesar 26,67%, diikuti perkebunan sebesar 6,27%, sedangkan tanaman pangan mengalami penurunan sebesar -0,97%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani tidak terjadi secara merata antar subsektor, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor hortikultura dan perkebunan.



Perhitungan capaian indikator pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari sisi capaian kinerja, Pendapatan Petani TP tahun 2025 sebesar 213,20%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 373,40%, namun masih berada pada kategori capaian yang sangat tinggi.

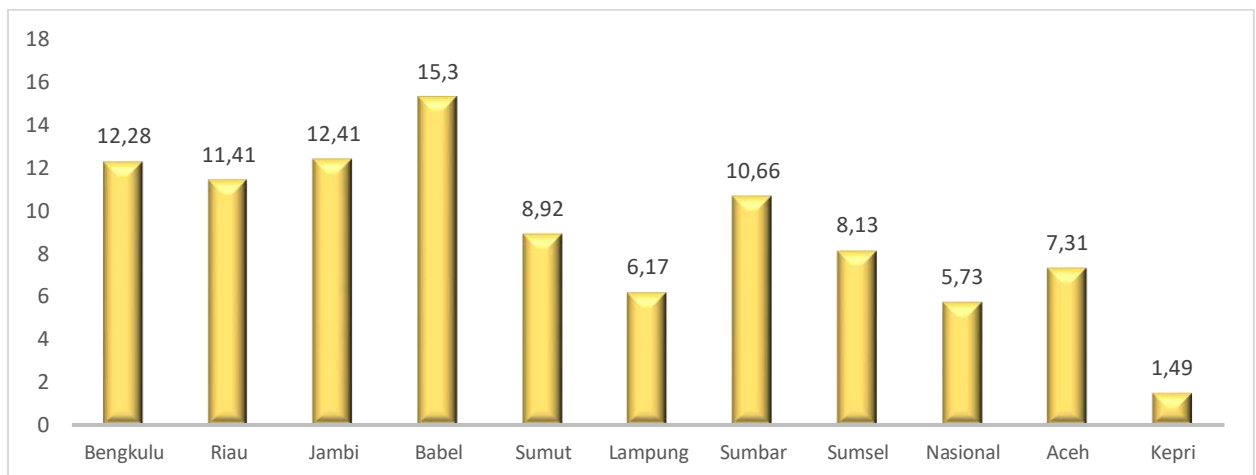
Dari sisi realisasi kinerja, pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,66%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 18,67%, sehingga terjadi penurunan sebesar 8,01 poin. jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 5,66 poin.

Jika dibandingkan angka nasional, peningkatan pendapatan petani di Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 tercatat sebesar 10,66%, berada 4,93 poin di atas rata-rata nasional sebesar 5,73%. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatra, Sumatra Barat berada pada peringkat ke-5, di bawah Kepulauan Bangka Belitung (15,30%), Jambi (12,41%), Bengkulu



(12,28%), dan Riau (11,41%). Sementara itu, capaian Sumatra Barat masih lebih tinggi dibandingkan Sumatra Utara (8,92%), Sumatra Selatan (8,13%), Aceh (7,31%), Lampung (6,17%), dan Kepulauan Riau (1,49 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan pendapatan petani di Sumatra Barat tergolong cukup baik secara regional dan nasional. Perbandingan Peningkatan Pendapatan Petani Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatra tahun 2025 tergambar pada grafik 3.41.

Grafik 3. 41 Perbandingan Peningkatan Pendapatan Petani Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatra tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Upaya yang telah dilakukan di tahun 2025 untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Peningkatan produktivitas melalui penyediaan benih unggul dan penguatan penerapan GAP.
2. Peningkatan nilai jual komoditas melalui pengembangan hilirisasi, pengolahan sederhana, pengemasan, dan penyimpanan modern.
3. Penguatan pemasaran melalui akses pasar modern, penjualan kolektif, dan kerja sama perdagangan antarwilayah.
4. Diversifikasi usaha tani, agar pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
5. Mitigasi risiko iklim, melalui penyesuaian kalender tanam, penyediaan varietas adaptif, dan perluasan asuransi usaha tani.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu seperti kekeringan, curah hujan tinggi, banjir, dan fluktuasi suhu menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman, menurunkan





- produksi serta kualitas hasil pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, dan pada akhirnya menekan pendapatan petani.
2. Petani masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sumber daya produksi seperti air irigasi yang memadai, lahan yang produktif, pupuk yang tersedia tepat waktu, serta benih atau bibit unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan meningkatnya biaya produksi.
 3. Pemanfaatan teknologi pertanian modern masih terbatas karena sebagian besar petani masih menggunakan metode budidaya konvensional, dengan tingkat mekanisasi yang rendah serta minimnya akses terhadap inovasi teknologi pertanian dan pengolahan pascapanen.
 4. Fluktuasi harga komoditas pertanian di tingkat petani yang dipengaruhi oleh informasi pasar yang tidak merata, ketergantungan pada pedagang pengumpul, serta perubahan kondisi ekonomi menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak stabil.
 5. Tingkat pendidikan dan kapasitas teknis petani yang masih terbatas menghambat adopsi teknologi pertanian modern, penerapan praktik budidaya yang efisien, serta kemampuan pengelolaan usaha tani, ditambah dengan rendahnya minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian.
 6. Kondisi infrastruktur pendukung pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, akses transportasi, serta fasilitas penyimpanan dan pascapanen yang belum optimal meningkatkan biaya distribusi dan mengurangi efisiensi pemasaran hasil pertanian.
 7. Sebagian besar petani masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan dan rendahnya literasi keuangan, sehingga pengembangan usaha tani dan peningkatan produksi berjalan lebih lambat.

Untuk peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura di masa yang akan datang, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penguatan Intervensi Berbasis Subsektor dan Komoditas Unggulan dengan memfokuskan program peningkatan produktivitas dan kualitas pada komoditas unggulan daerah (cabai, bawang, kopi, gambir, kelapa, dan sawit rakyat) dan mengembangkan pendekatan cluster komoditas berbasis wilayah produksi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi usaha tani.
2. Penguatan Hilirisasi dan Akses Pasar melalui penguatan program pasca panen, pengolahan hasil, dan pengemasan sederhana di tingkat petani atau kelompok tani, Mendorong kemitraan petani dengan off-taker, UMKM pengolah, koperasi, dan BUMD pangan dan



Pemanfaatan platform digital dan e-commerce pertanian untuk memperluas akses pasar dan memperpendek rantai distribusi.

3. Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi melalui Mekanisasi dan Sarana Produksi melalui perluasan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kebutuhan wilayah dan penyediaan dan pengawasan benih bermutu, pupuk, dan sarana produksi tepat waktu.
4. Penguatan Penyuluhan Pertanian yang Adaptif dan Digital. Penyuluhan pertanian perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada manajemen usaha dan adaptasi risiko.
5. Mitigasi Risiko Iklim dan Bencana Pertanian melalui Penguatan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, penerapan pola tanam adaptif, varietas tahan iklim ekstrem, dan asuransi usaha tani dan peningkatan kesiapsiagaan wilayah rawan banjir dan kekeringan.
6. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

Untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan), dilaksanakan 15 Program dengan 29 Kegiatan dan 62 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 126.418.713.861,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan). Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan) dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	29	62	126.418.713.861,00	113.453.596.258,00
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2	10	24.331.034.749,00	21.506.570.156,00
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	6	65.748.825.689,00	59.842.474.374,00
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	2	70.560.000,00	68.880.000,00
4	Program Penyuluhan Pertanian	1	4	1.290.274.920,00	1.230.204.920,00
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3	5	671.541.335,00	519.433.211,00

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
6	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	1	448.614.745,00	410.990.050,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3	4	7.151.355.724,00	6.852.263.585,00
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	4	5.707.290.858,00	5.011.620.498,00
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	2	452.204.850,00	444.697.050,00
10	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2	3	794.015.760,00	759.208.965,00
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4	7	13.075.485.652,00	10.631.752.817,00
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	3	667.696.392,00	627.234.253,00
13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	9	5.759.746.937,00	5.317.264.779,00
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	1	26.060.500,00	22.423.000,00
15	Program Penyuluhan Pertanian	1	1	224.005.750,00	208.578.600,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 126.418.713.861,00,- terealisasi sebesar Rp. 113.453.596.258,00,- atau 89,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 12.965.117.603,00,- (10,26%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang tercapai 128,27% dengan realisasi anggaran 89,74% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan

Penetapan sasaran “Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan” merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pangan yang mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada penguatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah secara komprehensif. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan berbagai indikator ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Dengan IKP, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kondisi ketahanan pangan di Sumatra Barat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pangan yang lebih efektif.

Nilai IKP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya berdasarkan data tiap indikator dari masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengukuran IKP berdasarkan pada sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan pembobotan berdasarkan *expert judgement*. Rincian indikator pengukuran IKP disajikan pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Indikator Pengukuran IKP

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075

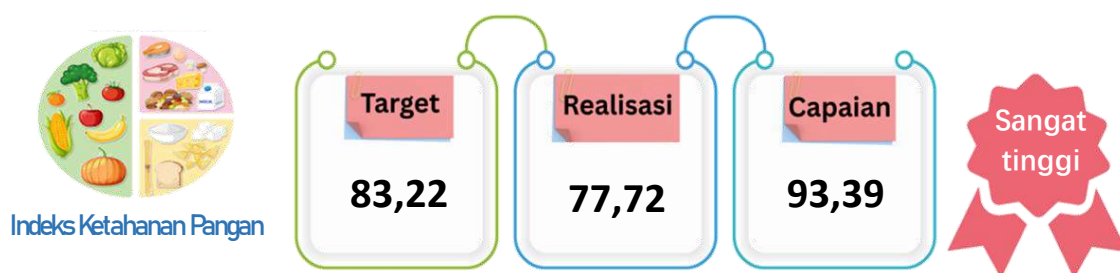
No	Indikator	Bobot
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Persentase balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Sumber: Laporan IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

Berdasarkan IKP yang diperoleh dapat diketahui tingkat kerentanan pangan suatu daerah dengan mengelompokkan IKP tersebut dalam 6 kelompok berikut ini:

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1 Sangat Rentan	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2 Rentan	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3 Agak Rentan	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4 Agak Tahan	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5 Tahan	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6 Sangat Tahan	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Dalam RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021–2026, target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,05. Namun demikian, dalam proses penetapan target kinerja tahunan dilakukan penyesuaian sehingga target tahun 2025 menjadi 83,22. Penyesuaian tersebut didasarkan pada capaian realisasi terakhir yang tersedia pada saat penyusunan perencanaan, yaitu realisasi tahun 2023 (sebagai data terakhir yang digunakan dalam penetapan target tahun 2025), mengingat pada saat itu data realisasi IKP tahun 2024 belum dirilis. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dapat dilihat sebagai berikut:



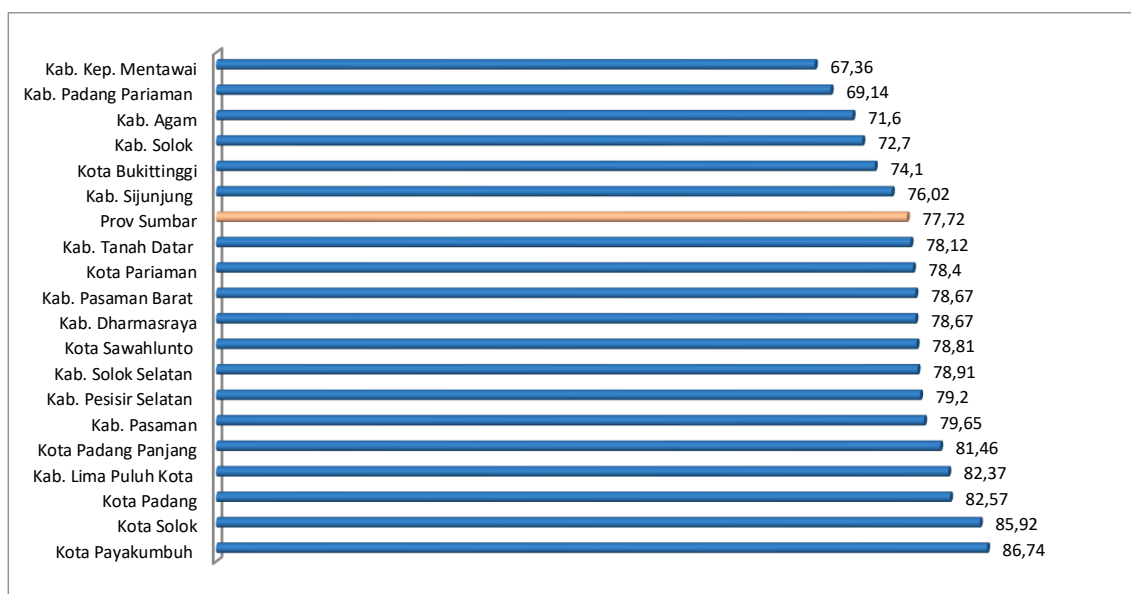
Berdasarkan publikasi *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025* oleh Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatra Barat tercatat sebesar 77,72 yang menunjukkan tingkat kerentanan pangan Sumatra Barat termasuk pada kelompok “sangat tahan”.

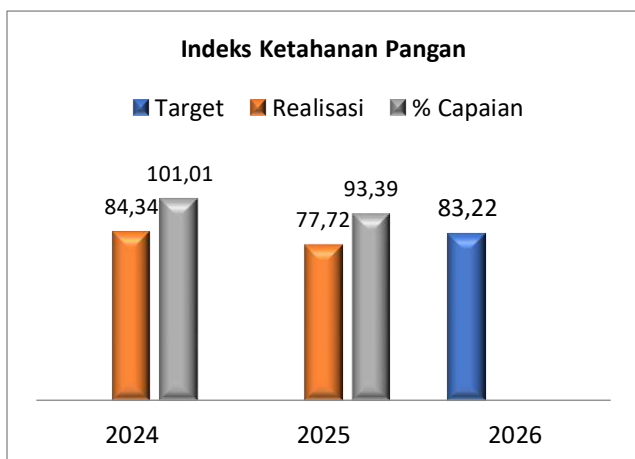


IKP 2025 dibentuk oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan pangan (70,07), keterjangkauan pangan (86,23), dan pemanfaatan pangan (77,00). Dari ketiga aspek tersebut, keterjangkauan pangan merupakan aspek dengan nilai paling tinggi, yang menunjukkan bahwa masyarakat relatif memiliki akses ekonomi dan fisik yang baik terhadap pangan, didukung oleh distribusi pangan dan daya beli yang cukup memadai.

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi merupakan dukungan dari IKP Kabupaten/Kota se Sumatra Barat. Jika dibandingkan dengan nilai IKP Kabupaten/Kota, posisi provinsi berada pada kelompok menengah di antara capaian kabupaten/kota di wilayahnya. Nilai IKP antar daerah menunjukkan variasi yang cukup beragam dengan rentang nilai antara 67,36 hingga 86,74, atau selisih sekitar 19,38 poin antara nilai tertinggi dan terendah. Nilai IKP tertinggi dicapai oleh Kota Payakumbuh sebesar 86,74 yang juga mendapat **peringkat tertinggi ke-2 Nasional**, diikuti Kota Solok sebesar 85,92 juga mendapat peringkat **tertinggi kelima nasional**, dan Kota Padang sebesar 82,57. Sementara itu, nilai IKP terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 67,36, diikuti Kabupaten Padang Pariaman sebesar 69,14, dan Kabupaten Agam sebesar 71,60. Nilai IKP 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat digambarkan seperti grafik 3.42

Grafik 3. 42 IKP 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025



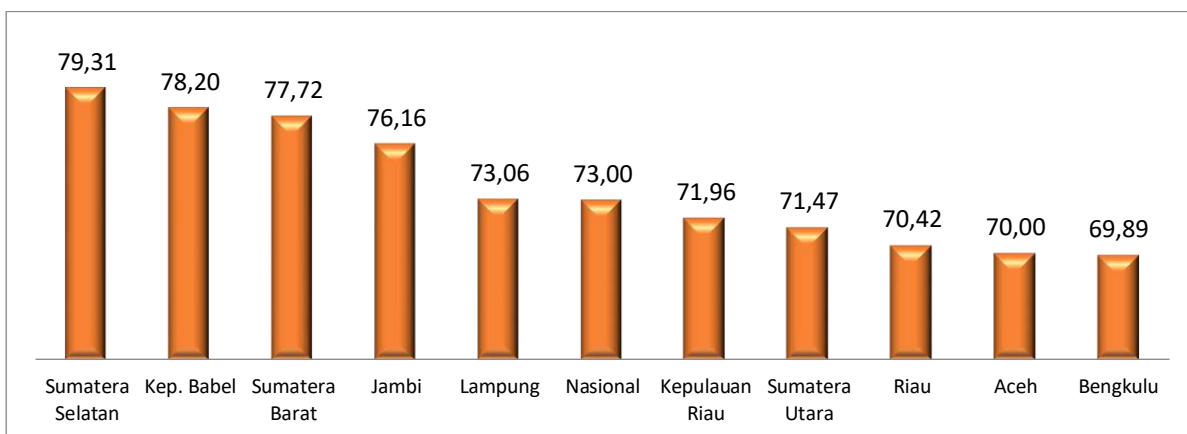


Perhitungan capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menggunakan metode pengukuran kriteria pertama menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebesar 93,39%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 101,01%, maka capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,62%. Dari sisi realisasi, nilai IKP Provinsi Sumatra Barat

pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,72, menurun 6,62 poin dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 84,34.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,22, maka realisasi IKP tahun 2025 masih memerlukan peningkatan sekitar 5,50 poin untuk mencapai target tersebut. Meskipun pada dua tahun sebelumnya nilai IKP Sumatra Barat telah mencapai bahkan melampaui target akhir RPJMD, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan secara lebih optimal dan konsisten agar nilai IKP tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dan dapat menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 3. 43 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra

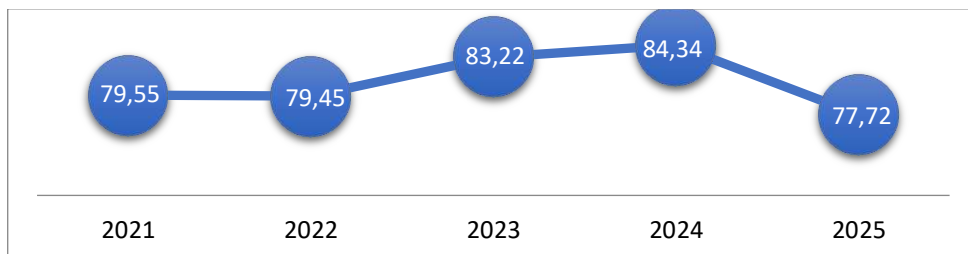


Sumber data: Badan Pangan Nasional (publikasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025)

Secara Nasional, IKP Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar 77,72, yang berada di atas nilai nasional sebesar 73,00 atau lebih tinggi 4,72 poin. Capaian tersebut menempatkan Sumatra Barat pada peringkat ke-7 dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, dalam lingkup regional Pulau Sumatra, nilai IKP Sumatra Barat berada pada peringkat ke-3, di bawah

Sumatra Selatan (79,31) dan Kepulauan Bangka Belitung (78,20). Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Sumatra Barat tergolong baik dan kompetitif, baik pada tingkat nasional maupun regional Sumatra.

Grafik 3. 44 Indeks Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatra Barat pada periode 2021–2025 menunjukkan penurunan sebesar 1,83 poin, dari 79,55 pada tahun 2021 menjadi 77,72 pada tahun 2025. Jika dilihat per tahun, nilai IKP pada 2021 sebesar 79,55 kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 79,45, selanjutnya meningkat cukup signifikan pada 2023 menjadi 83,22 dan kembali meningkat pada 2024 sebesar 84,34 yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada 2025 nilai IKP menurun menjadi 77,72, sehingga menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan pada beberapa tahun sebelumnya, kondisi ketahanan pangan masih mengalami fluktuasi yang perlu diantisipasi melalui upaya penguatan yang lebih konsisten agar tren peningkatan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Peningkatan Skor Indeks Ketahanan Pangan ditentukan oleh berhasil tidaknya dalam menangani dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan selama tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta lintas sektoral dalam melakukan intervensi kerawanan pangan sesuai dengan SK Gubernur Sumatra Barat Nomor 520-785-2024 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Keluarahan/Desa Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024.
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Sumatra Barat melalui kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumatra Barat, dan penyalurannya dilaksanakan berdasarkan kondisi kebencanaan yang terjadi di suatu wilayah dengan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatra Barat untuk pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Sumatra Barat. Pada tahun 2025, tambahan cadangan pangan Provinsi

adalah sebanyak 34.000 kg. Untuk penyaluran CPPD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025 adalah sebanyak 42.444 kg dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran tanggal 19 September 2025, untuk bencana kebakaran di Kota Payakumbuh, yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2025, disalurkan CPPD sebanyak 4.104 kg.
- b. Penyaluran tanggal 12 Desember 2025, untuk bencana kekeringan (puso) di Kabupaten Agam, yang terjadi sejak Juni 2025, disalurkan CPPD sebanyak 38.340 kg.
3. Gerakan Konsumsi Telur Bersama sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang dilaksanakan di 6 (enam) event provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi B2SA Goes to School (BGtS) pada 4 sekolah, yaitu SMAN 4 Sijunjung, MAN 2 Sijunjung, SMKN 5 Sijunjung dan SMKN 1 Kota Payakumbuh. Kegiatan BGtS ini dihadiri oleh sebanyak 150 orang yang terdiri dari siswa, guru, komite sekolah, camat, wali nagari, instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota, dinas kesehatan/puskesmas, dan TP PKK kabupaten/kota.
5. Pemberian bantuan kepada kelompok Tani/Wanita Tani agar masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sehingga bisa menghasilkan bahan pangan sebagai sumber protein hewani, sayur dan buah sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari. Pemberian bantuan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor: 521-485- 2024 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Penetapan Kelompok Tani/Wanita Tani Penerima Bantuan Ternak Unggas dan Bibit Tanaman Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2025. Rincian bantuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan barang kepada kelompok Tani/Wanita Tani pada 13 (tiga belas) kelompok di 6 (enam) kabupaten/kota di Sumatra Barat
 - b. Bantuan bibit sayuran berupa benih sayuran (kangkung) 83 sachet, cabe kriting hybrida 16 sachet, dan benih kacang panjang 50 bungkus kepada 6 Kelompok Tani/Wanita Tani.
 - c. Bantuan barang untuk hilirisasi pangan lokal kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal. Bantuan barang diberikan kepada 6 (enam) Kelompok Wanita Tani yang aktif melakukan usaha pengolahan pangan lokal minimal telah berjalan selama 1 (satu) tahun.
6. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan melalui pemantauan lapangan Pada tahun 2025, jumlah sampel uji sebanyak 315 sampel.
7. Menjaga stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis melalui Gerakan Pangan Murah dan Bazar Murah Melalui Mobil Keliling TTIC Sumbar setiap hari kerja selama 1 tahun



Hambatan dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Luas lahan produktif khususnya lahan basah yang setiap tahun mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan sehingga akan berdampak pada ketersediaan pangan.
2. Belum dimanfaatkannya hasil pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) oleh stakeholder terkait sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan intervensi daerah rawan pangan.
3. Masih ada kab/kota yang belum ada melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah dan membuat regulasi pengaturan cadangan pangan.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
5. Pemanfaatan pangan lokal di Provinsi Sumatra Barat masih dominan sebagai makanan pendamping, belum bisa sebagai substitusi pangan/makanan pengganti pokok berupa beras dan terigu.
6. Masih ditemukannya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa bahan pengawet benzoat pada bumbu giling, residu pestisida pada ikan kering, sayur dan buah.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah mutu dan keamanan pangan baik di tingkat Produsen maupun di tingkat konsumen

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat adalah:

1. Melaksanakan edukasi/sosialisasi Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) secara berkelanjutan ke masyarakat melalui Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Mendorong keterlibatan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan/nagari dalam kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini.
3. Pengembangan kualitas SDM pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan manajemen usaha, kewirusahaan dan strategi bisnis pengolahan pangan lokal.
4. Melaksanakan promosi hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok pada event pameran atau pada acara kedinasan.
5. Jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan stakeholder dan off taker terkait harus ditingkatkan untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan.
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik oleh instansi terkait di kabupaten/kota maupun di provinsi.



7. Meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen yang kuat disetiap jajaran terkait, mulai dari petugas terkait di provinsi, kabupaten/kota, petugas lapangan dan pelaku usaha untuk menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) agar produk yang dihasilkan tidak hanya aman di konsumsi, tetap juga meningkatkan nilai tambah.
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pengawasan pangan.
9. Meningkatkan peran petugas penyuluh pertanian di kabupaten/kota untuk memotivasi dan membina pelaku usaha/petani/Gapoktan dalam penerapan sistem manajemen mutu pangan segar asal tumbuhan.

Untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan, dilaksanakan 3 Program dengan 6 Kegiatan dan 25 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 2.751.032.444,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	6	25	2.751.032.444,00	2.585.483.857,00
1	Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	15	2.058.192.214,00	1.927.493.640,00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	4	321.400.000,00	310.948.177,00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	6	371.440.230,00	347.042.040,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.751.032.444,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.585.483.857,00,- atau 93,98%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 165.548.587,00,- (6,02%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan yang tercapai 93,39% dengan realisasi anggaran 93,98% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 48,52%.



Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan

Pendapatan Petani Hutan merupakan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai kegiatan usaha kehutanan, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, damar, rotan, dan tanaman obat, serta kegiatan agroforestri yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan komoditas pertanian. Besarnya pendapatan petani hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain produktivitas lahan, harga komoditas hasil hutan, akses pasar, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan petani hutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan juga meningkat sekaligus mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani hutan untuk mendukung pencapaian misi ke 3 RPJMD tahun 2021-2026.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan persentase peningkatan pendapatan petani hutan sebesar 5% dari pendapatan petani hutan tahun 2024. Pendapatan petani hutan tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.724.379,-/bulan, jika meningkat 5% dari angka tersebut maka target pendapatan petani hutan tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.860.598,- atau naik sebesar Rp 136.219,- per bulannya. Pencapaian sasaran “meningkatnya pendapatan petani hutan” diuraikan sebagai berikut:



Persentase peningkatan pendapatan petani hutan yang tercapai 15,81% diukur Berdasarkan survei yang dilakukan langsung oleh Dinas Kehutanan bulan November 2025 dan telah mendapat rekomendasi “Layak: dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat melalui surat Kepala BPS Provinsi Sumatra Barat Nomor B-1285/13000/OT.130/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial dengan Identitas Rekomendasi V-25.1300.002, diperoleh jumlah pendapatan petani hutan tahun 2025 yang diperoleh adalah sebesar Rp 3.155.005,- per bulan. Angka pendapatan ini naik sebesar Rp 430.626,- per bulan dari pendapatan petani hutan tahun 2024 atau sekitar 15,81%. Berikut formula perhitungannya :

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan} = \frac{37.860.060 - 32.692.547}{32.692.547} \times 100\% = 15,81\%$$

Keterangan:

Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2024 disetahunkan = Rp. 32.692.547

Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2025 disetahunkan = Rp. 37.860.060

Nilai peningkatan pendapatan petani hutan hasil survei tahun 2025 per Kesatuan Pengelola Hutan di wilayah Provinsi Sumatra Barat per bulan dapat dilihat sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025

No	UPTD KPH	Pendapatan per responden per bulan Tahun 2024 (Rp)	Pendapatan per responden per bulan Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Peningkatan Pendapatan Per bulan (Rp)	Peningkatan Pendapatan (%)
1	KPHL Limapuluh Kota	2.804.914	3.146.881	341.967	12,19
2	KPHP Pesisir Selatan	3.140.270	3.220.272	80.002	2,55
3	KPHL Pasaman Raya	2.437.526	2.711.077	273.551	11,22
4	KPHP Mentawai	2.592.484	2.802.404	209.920	8,10
5	KPHL Hulu Batang Hari	2.573.517	3.662.102	1.088.585	42,30
6	KPHL Solok	2.626.986	4.239.969	1.612.983	61,40
7	KPHL Sijunjung	2.714.257	3.071.989	357.732	13,18
8	KPHP Dharmasraya	2.601.497	2.855.574	254.077	9,77
9	KPHL Bukit Barisan	2.837.780	3.712.914	875.134	30,84
10	KPHL Agam Raya	2.632.981	3.126.870	493.889	18,76
	PROV	2.724.379	3.155.005	430.626	15,81

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat 2025, diolah

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan menggunakan metode pengukuran *kriteria pertama* menunjukkan bahwa capaian kinerja pada



tahun 2025 berada pada kategori sangat tinggi dengan capaian sebesar 316,20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja mengalami penurunan dari 349,00% menjadi 316,20%. Dari sisi realisasi, tahun 2025 sebesar 15,81%, lebih rendah dibandingkan

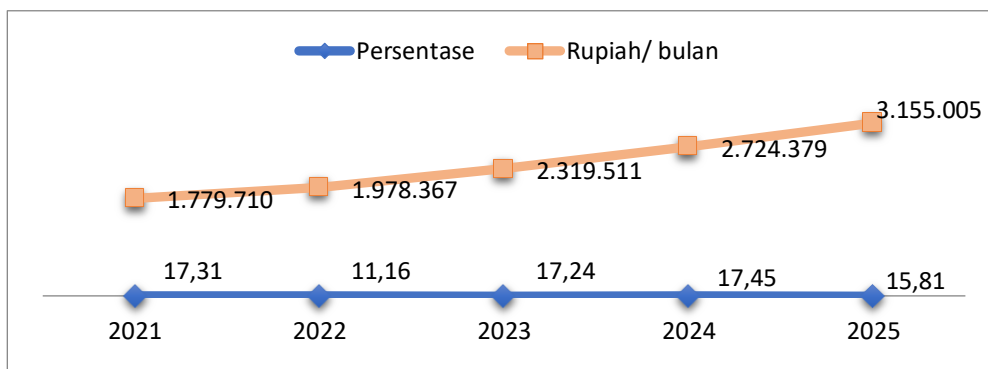


realisasi tahun 2024 yang mencapai 17,45% atau menurun 1,64 poin. Meskipun demikian, jika dilihat dari nilai absolut, peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun 2025 justru lebih besar yaitu Rp404.848 per bulannya dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp301.911 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan petani hutan tetap mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut secara signifikan, sehingga menggambarkan bahwa kinerja peningkatan pendapatan petani hutan telah berada jauh di atas target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan merupakan indikator yang dihitung berdasarkan survei dan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat pada wilayah kerja UPTD KPH. Indikator ini belum diukur secara nasional maupun dipublikasikan secara seragam antarprovinsi, sehingga tidak tersedia data pembandingan pada tingkat nasional atau daerah lain. Oleh karena itu, analisis capaian indikator lebih tepat dilakukan melalui perbandingan perkembangan kinerja antar tahun di Provinsi Sumatra Barat, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 3.45.

Grafik 3. 45 Perkembangan Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dari tahun 2021-2025



Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat

Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021–2025 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 peningkatan tercatat 17,31%, kemudian menurun menjadi 11,16% pada tahun 2022, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 17,24%, dan mencapai 17,45% pada tahun 2024, sebelum kembali menurun menjadi 15,81% pada tahun 2025. Dari sisi nominal, Pendapatan rata-rata petani hutan meningkat dari Rp1.779.710 per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp3.155.005 per bulan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani hutan yang didukung oleh pengembangan usaha kehutanan masyarakat serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Peningkatan pendapatan petani hutan didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat di tahun 2025, upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan terhadap anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebanyak 259 kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 609 kelompok.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS dan KTH melalui pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta sekolah lapang dengan narasumber berasal dari Perguruan Tinggi, Komunitas/Asosiasi Kelompok dan Anggota Kelompok Tani yang sudah sukses mengembangkan produk tersebut.
3. Memberikan bantuan alat ekonomi produktif, stup lebah madu dan sarana prasana ekowisata kepada kelompok PS dan KTH. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah memberikan stup lebah madu sebanyak 1.865 unit stup kepada 51 kelompok dan sarana ekowisata diberikan sebanyak 28 unit (Gazebo 2 unit, Drone 7 unit, tenda glamping dan kelengkapannya 31 unit, perahu karet dan kelengkapannya 14 unit, ATV 4 unit, Kamera Action 6 unit dan alat pendukung paralayang 1 unit) kepada 24 kelompok, serta Alat Ekonomi Produktif sebanyak 58 unit (Alat Pengurangan Kadar Air Madu, Alat Pendukung Budidaya Lebah Madu, Bentor, Mesin Penghancur Bahan Baku Pupuk Organik, Mesin Sealer, Freezer, Alat Pengolah Kopi Basah dan Alat Pengolah Pinang).
4. Fasilitasi kewirausahaan, pengembangan usaha, bimbingan teknis dan pelatihan serta sekolah lapang.
5. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan, monitoring serta evaluasi dan penilaian terhadap kelompok Perhutanan Sosial yang telah diberi izin sehingga akses kelola meningkat.
6. Pemberdayaan kelompok tani hutan yang sudah berhasil/sukses untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada anggota KPS dan KTH lainnya.
7. Peningkatan promosi produk KPS dan KTH melalui pelatihan fotografi produk dan potensi Perhutanan Sosial.





8. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan lebah madu trigona dan ekowisata dalam rangka peningkatan hilirisasi produk.
9. Gerakan Minum Madu Asli (Gemma) melalui Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Nomor 522.4/536/DISHUT-2022 tanggal 14 Februari 2022 mendorong tingkat konsumsi madu di Sumatra Barat.
10. Mengoptimalkan Millenial Enterpreneur bidang kehutanan pada KPS dan KTH dalam rangka mengembangkan usaha perhutanan sosial.
11. Meningkatkan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan berbagai unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup, OPD lain, kalangan akademisi, dunia usaha, legislatif dan lembaga swadaya masyarakat serta perorangan yang menaruh perhatian dalam pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatra Barat.

Meskipun capaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Tahun 2025 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan pendapatan petani hutan di Sumatra Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal.
2. Kemandirian kelompok dan konsistensi dalam mengembangkan usaha setelah bantuan diberikan masih belum optimal.
3. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
4. Kesulitan untuk offtaker produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH
5. Produk Perhutanan Sosial Sumatra Barat belum memiliki standari SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
6. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar instansi dalam peningkatan kualitas produk.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan :

1. Adanya kebijakan dari Kepala Daerah untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok PS dan KTH.
2. Meningkatnya kerjasama pentahelix dalam meningkatkan kualitas dan promosi produk guna mmenciptakan sinergi yang lebih kuat dalm mendukung keberlanjutan usaha dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu dan anggota kelompok.



4. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemandirian kelompok melalui diversifikasi usaha, pengembangan pasar dan pembentukan koperasi.
5. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan serta perbaikan secara berkelanjutan.
6. Optimalisasi anggaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan agar dapat terealisasi.

Untuk meningkatkan pendapatan petani hutan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 3 Program dengan 10 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 10.969.031.440,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3. 22 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	7	11	10.969.031.440,00	10.476.775.193,00
1	Program Pengelolaan Hutan	5	9	7.006.123.826,00	6.598.663.518,00
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	1	3.862.907.614,00	3.781.224.089,00
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	1	100.000.000,00	96.887.586,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.969.031.440,00,- terealisasi sebesar Rp. 10.476.775.193,00,- atau 95,51%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 492.256.247,00,- (4,49%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan yang tercapai 316,20% dengan realisasi anggaran 95,51% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Dalam rangka pencapaian misi “meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital” ditetapkan tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Analisis terhadap pencapaian tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 4.1 Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PDRB suatu daerah. Sektor industri tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah secara cepat, tetapi juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja serta mendorong aktivitas ekonomi pada sektor lain, termasuk sektor perdagangan. Di sisi lain, sektor perdagangan memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri karena produk yang dihasilkan oleh industri didistribusikan dan dipasarkan melalui aktivitas perdagangan. Pertumbuhan kedua sektor tersebut berpotensi memperluas kesempatan kerja, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sektor perdagangan mengalami perubahan menuju sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perubahan ini perlu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk UMKM di Sumatra Barat, sebagai sarana memperluas pemasaran produk sekaligus meningkatkan daya saing.

Sumatra Barat memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pengembangan sektor perdagangan dan sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah, sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terhadap perdagangan dan industri kecil/menengah sejalan dengan penetapan tujuan pada misi keempat RPJMD tahun 2021-2026 yaitu “mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang





tangguh dan berdaya saing”. Ketercapaian tujuan dilihat berdasarkan ketercapaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Pengukuran 2 indikator tersebut pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan tahun n. Pencapaian tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing tergambar sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,65	16,65	94,33
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	9,15	8,55	93,44
Rata-rata Capaian			93,89

Tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian 93,89% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun n. Target tahun 2025 indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebesar 17,35%. Target ini lebih tinggi 0,753% dibandingkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 (16,597%). Pencapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari

2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

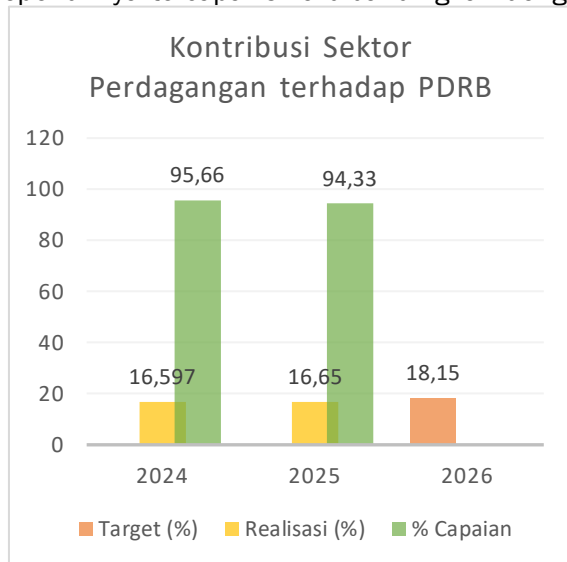
$$\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 58,63 triliun}}{\text{Rp. 352,19 triliun}} \times 100\% = 16,65\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 58,63 triliun

Nilai PDRB Sumatra Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 352,19 triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 94,33%, atau meningkat 0,31% dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Meskipun demikian, karena capaian kinerja masih di bawah 100%, target yang telah ditetapkan untuk indikator ini belum sepenuhnya tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kontribusi sektor perdagangan



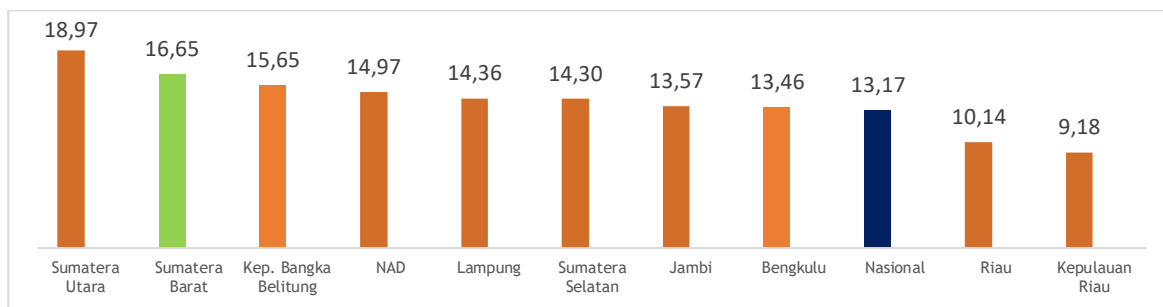
menunjukkan peningkatan 0,053 di tahun 2025.

Indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2026 ditargetkan mencapai 18,15%. Realisasi 16,65% di tahun 2025 menunjukkan pencapaian 91,74% dari target tahun 2026 (18,15%). Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan 1,5%. Pencapaian target indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2026

akan terus diupayakan dengan lebih optimal.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatra Barat berada di urutan ke dua dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan lebih tinggi 3,48% dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi dengan kontribusi sektor perdagangan paling tinggi adalah Sumatra Utara (18,97%) dan terendah berada pada Provinsi Kepulauan Riau (9,18%). Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.46.

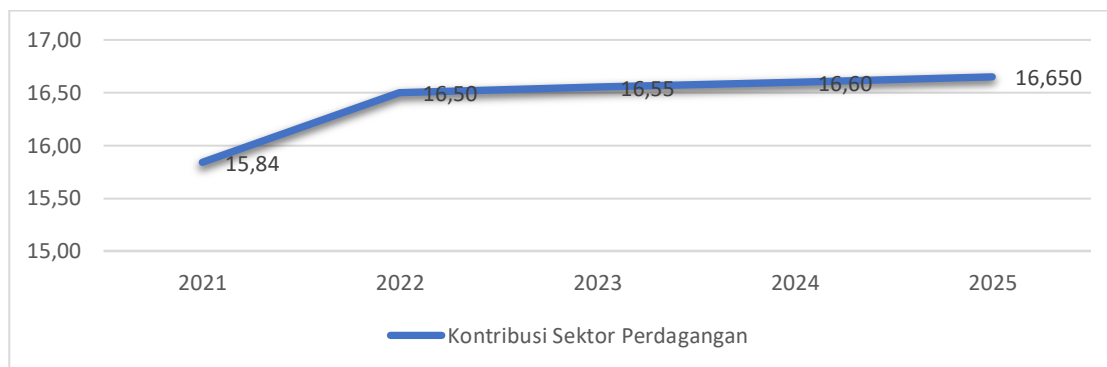
Grafik 3. 46 Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan dengan nilai yang berfluktuatif setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,66%, yang merupakan kenaikan terbesar dalam lima tahun terakhir. Secara kumulatif, peningkatan kontribusi sektor perdagangan selama periode tersebut mencapai 0,81%, dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0,2025%. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025 ditampilkan pada grafik 3.47.

Grafik 3. 47 Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan, selama tahun 2025 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar melalui
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon).

- b. Operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang juga bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri dengan:
 - a. melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatra Barat baik melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.
Pada tahun 2025 terdapat 4 pameran dan bazar dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 360 orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.338.182.000,-.
 - b. Memperkenalkan pelaku usaha juga dengan pemasaran secara online melalui e-commerce lewat Bimtek Marketing Digital dengan jumlah peserta sebanyak 349 orang.
3. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui:
 - a. Pengujian mutu produk komoditi Cassia, Biji Kopi, Minyak Pala, Minyak Sereh Wangi, Biji Kakao, Biji Pinang, Biji Jagung, Gambir, *Rubber* (Karet), dan Cengkeh (*Clove*)
 - b. Pemantauan mutu 7 produk potensial yakni biji jagung, biji kopi dan cassia, biji kakao dan biji pinang, gambir dan minyak sereh.
 - c. Kalibrasi alat ukur agar sesuai dengan standar nasional dan internasional, selama tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 1795 sertifikat untuk alat ukur kesehatan dan usaha industri.
4. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui:
 - a. Pengawasan label pada 4 produk yakni pakaian bayi, pakaian dalam, selimut, dan handuk pada 14 merek barang beredar di pasaran,
 - b. pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan) pada 3 produk yakni alas kaki (yang terbuat dari karet dan plastic), penghapus, dan crayon pada 16 merek barang beredar di pasaran.
 - c. Pengawasan barang wajib SNI dilakukan pada 4 produk yakni puzzle, boneka, mainan beroda, dan baby walker pada 15 merek barang beredar di pasaran yang ada di 19 kabupaten/kota.
 - d. Sosialisasi konsumen cerdas yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan diikuti oleh 336 orang peserta yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:

1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, beras, dan cabe merah.



2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatra Barat.

Untuk pengembangan sektor perdagangan ke depannya, Pemerintah secara konsisten akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatra Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, dan berpartisipasi pada even-even nasional.
3. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI Wajib dan uji sampel garam), peningkatan pelaku usaha dalam tertib niaga dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan minol untuk tingkat distributor dan bahan berbahaya serta pengawasan gas elpiji 3kg.
4. Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen melalui sosialisasi konsumen cerdas dan pelayanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
5. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
6. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.

2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

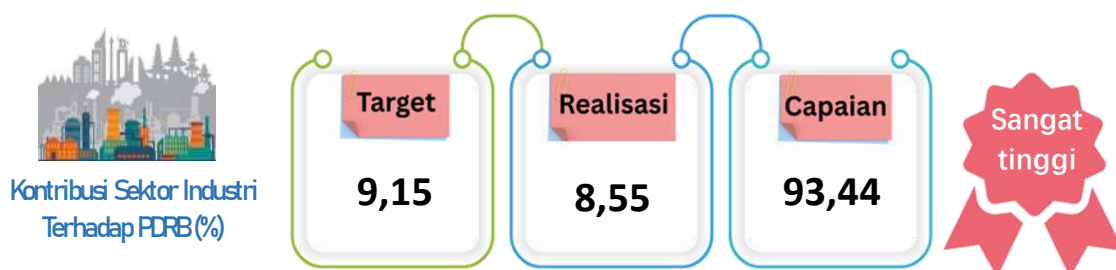
Sektor industri yang dibahas dalam konteks ini adalah industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam struktur perekonomian Provinsi Sumatra Barat. Provinsi ini memiliki potensi yang besar di bidang industri, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta sektor primer lainnya. Oleh karena itu, upaya hilirisasi perlu dilakukan guna meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi ketergantungan pada pemasaran bahan mentah.





Kebijakan pembinaan dan pengembangan sektor industri di Provinsi Sumatra Barat telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatra Barat (RPIP) untuk periode 2018–2038, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2018. Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n.

Pada tahun 2025 **kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan 9,15%** sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 (8,371%), target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi sebesar 0,779%. Pencapaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2025 tergambar sebagai berikut:

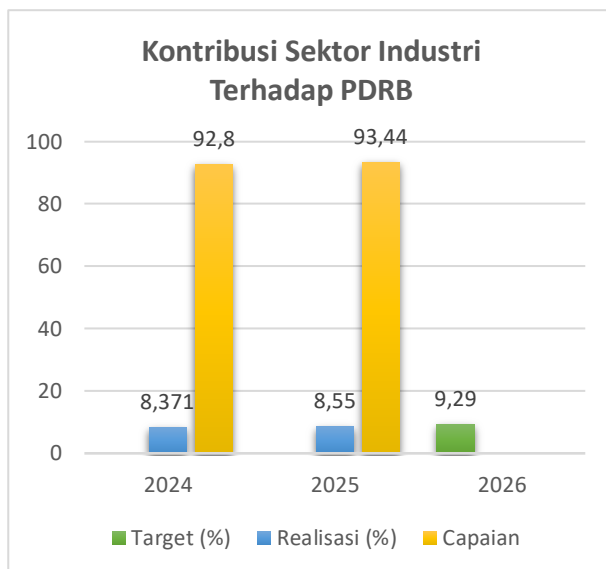


Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi sektor industri terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 30,11 triliun}}{\text{Rp. 352,19 triliun}} \times 100\% = 8,55\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 30,11 triliun
 Nilai PDRB Sumatra Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 352,19 triliun.

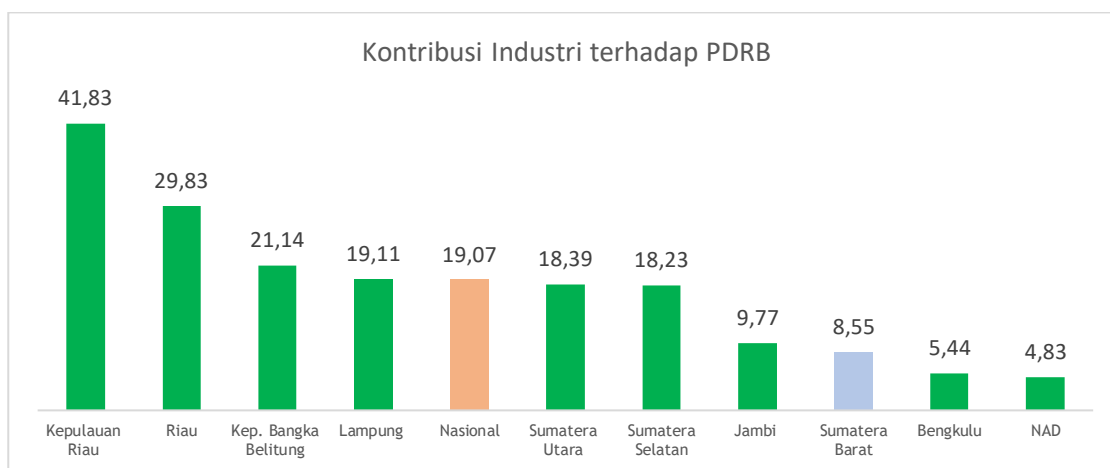


Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian indikator tercatat sebesar 93,44%, meningkat 0,64% dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Meskipun demikian, karena capaian masih berada di bawah 100%, target yang ditetapkan pada tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai. Sejalan dengan peningkatan capaian tersebut, kontribusi sektor industri juga mengalami

kenaikan. Pada tahun 2025, kontribusi sektor industri mencapai 8,55%, meningkat sebesar 0,179 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 8,371%

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatra Barat berada di urutan ke delapan dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan lebih rendah 10,52% dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi dengan kontribusi sektor industri paling tinggi adalah Kepulauan Riau (41,83%) dan terendah berada pada Provinsi Aceh (4,83%). Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.48.

Grafik 3. 48 Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



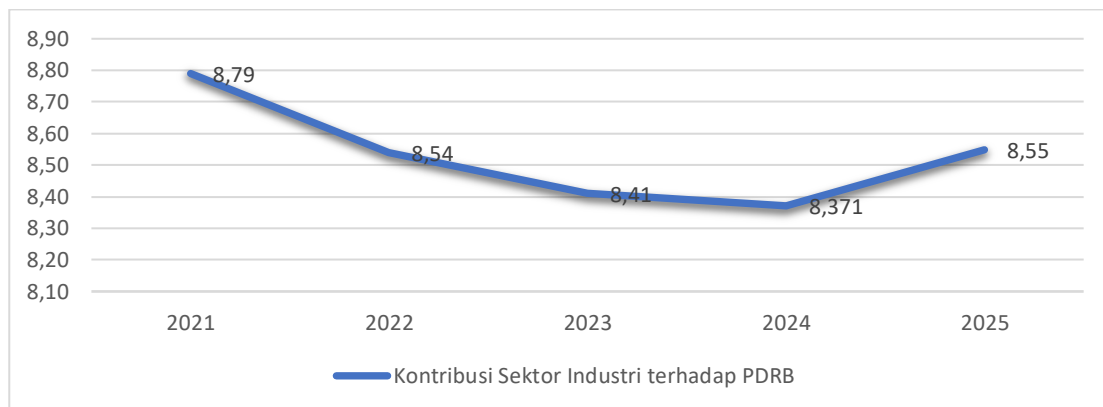
Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan mencapai 9,29% pada tahun 2026. Realisasi 8,55% di tahun 2025 menunjukkan pencapaian 92,03% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target 9,29% di tahun 2026 dibutuhkan peningkatan 0,74%.

Mempertimbangkan kenaikan yang tidak begitu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan terus mengupayakan untuk dapat mencapai target tersebut.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun 2021-2025 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Mengalami penurunan dari tahun 2022-2024 kemudian naik lagi di tahun 2025 ini. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025 ditampilkan pada grafik 3.49.

Grafik 3. 49 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2021-2025



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam mendukung pengembangan sektor industri, upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui Bimtek dan Pelatihan kepada 1.226 pelaku IKM, dengan rincian pelatihan dan bimtek sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Sulam dan Bordir
 - b. Pelatihan Menjahit dan Bantuan Alat
 - c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi IKM Menjahit
 - d. Pelatihan Pengembangan Desain Produk Fashion
 - e. Pelatihan Peningkatan Desain Produk Batik
 - f. Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan Olahan Kayu
 - g. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman
 - h. Pelatihan Kuliner
 - i. Pelatihan Pembuatan Keripik dan Bantuan Peralatan
 - j. Pelatihan Roasting Kopi
 - k. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin



2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
3. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur melalui pelatihan teknis dan pelatihan manajemen untuk 1.186 orang wirausaha baru. Pelatihan yang berkaitan dengan penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur adalah:
 - a. Pelatihan Wira Usaha Baru Olahan Makanan di Kota Padang
 - b. Pelatihan Bordir di Kab. Lima Puluh Kota
 - c. Pelatihan Menjahit di Kota Padang dan Kab. Lima Puluh Kota
 - d. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman di Kota Padang
 - e. Bimtek Makanan Kuliner di Kota Bukittinggi
 - f. Pelatihan Kuliner di Kota Padang
 - g. Pelatihan Roasting Kopi di Kab. Solok Selatan
 - h. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin di Kota Padang
4. Peningkatan kualitas produk IKM melalui pelatihan teknis peningkatan mutu produk dan Pelatihan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi produk pangan kepada 186 peserta.
5. Melakukan Pelatihan Diversifikasi Produk kepada 125 orang pelaku IKM. Pelatihan Diversifikasi yang dilakukan yaitu pelatihan diversifikasi produk dari kulit, dari resin, sabut kelapa.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah yang sudah dilatih yakni sebanyak 28 sentra yang terdiri dari sentra makanan dan minuman, sentra tenun, sentra jahit, sentra bordir, dan sentra logam mesin.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatra Barat.
8. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri dengan peserta 40 orang.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor industri adalah:

1. Masih terbatasnya kemampuan sebagian SDM pelaku IKM dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki, karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap



3. Belum semua sentra/kelompok usaha memiliki mesin produksi yang lengkap
4. Bencana alam banjir yang mengganggu produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pasok produksi industri.

Upaya yang akan dilakukan untuk pengembangan sektor industri di masa yang akan datang antara lain:

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk.
2. Tetap melaksanakan peningkatan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha.
3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
4. Melanjutkan peningkatan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, peningkatan penerapan standarisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM.
5. Tetap melakukan peningkatan kuantitas produk industri. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah yang telah dilatih.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatra Barat.
8. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri.
9. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan “mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing” diuraikan pada 6 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



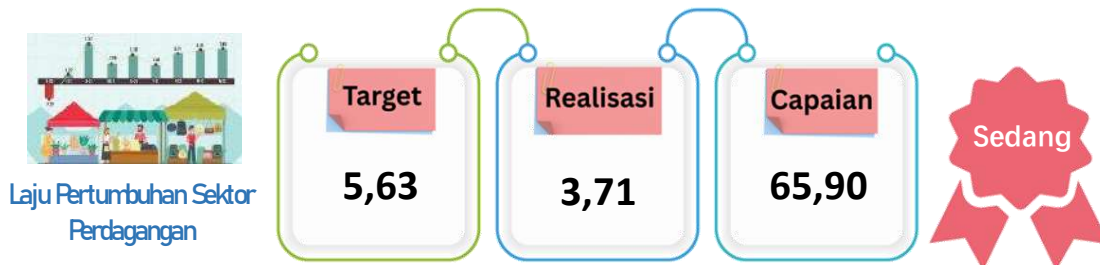


Sasaran 4.1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah. Aktivitas di sektor ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dan saling memperkuat dengan sektor-sektor lain, seperti sektor produksi yang mencakup pertanian, industri, dan pertambangan, serta sektor keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Di Provinsi Sumatra Barat, sektor perdagangan termasuk sektor andalan karena kontribusinya yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 1,01%. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2024 (4,81%) yang tercapai jauh lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMD, target tahun 2025 disesuaikan menjadi 5,63% pada dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran “Sumatra Barat sebagai Pusat Perdagangan” tergambar sebagai berikut:





Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 3,19% di tahun 2025 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan} = \frac{\text{Rp. 34.639,23 miliar} - \text{Rp. 33.399,70 miliar}}{\text{Rp. 33.399,70 miliar}} \times 100\% = 3,71\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2025 (ADHK) sebesar Rp. 34.639,23 miliar

Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 33.399,70 miliar

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan menggunakan *metode*



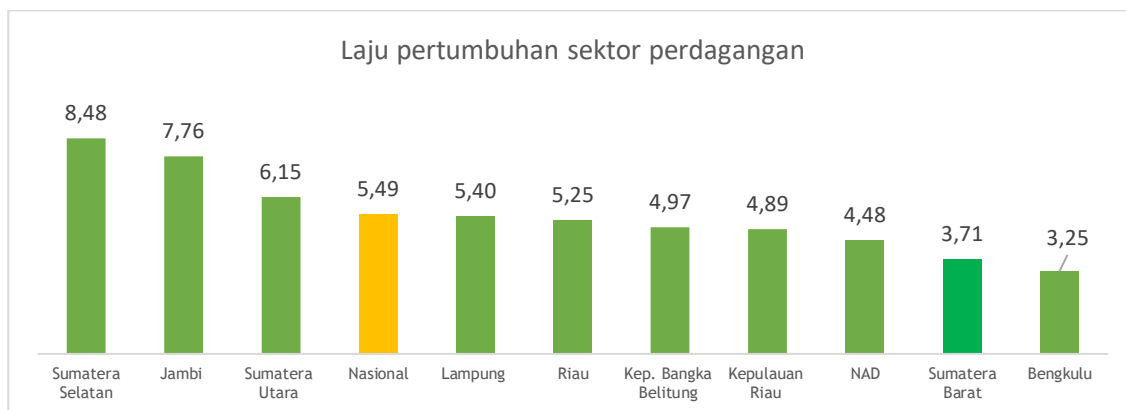
pengukuran kriteria pertama dengan capaian 65,9%. Capaian 65,9% menunjukkan target indikator ini belum tercapai. Meskipun secara persentase capaian belum optimal terhadap target yang disesuaikan, realisasi tahun 2025 tersebut sejatinya masih berada di atas target RPJMD awal sebesar 1,01% dan target tahun 2026 (1,02). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan tetap menunjukkan pertumbuhan positif, namun

mengalami perlambatan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatra Barat tahun 2025 berada di peringkat ke sembilan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra dan 1,78 lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan sektor perdagangan secara nasional. Sementara itu, perolehan laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Sumatra Selatan menempati posisi tertinggi di Pulau Sumatra. Perbandingan laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.50.



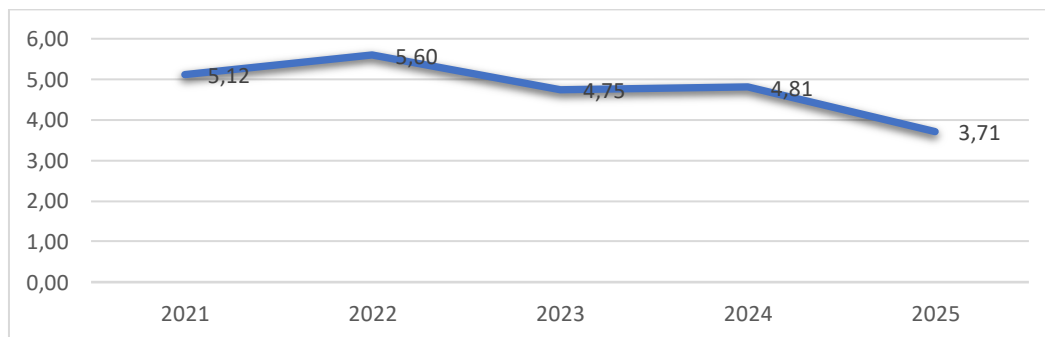
Grafik 3. 50 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan sektor perdagangan dari tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun dengan fluktuasi di beberapa tahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,6. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana laju pertumbuhan turun menjadi 3,19%. Capaian ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Perkembangan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2021-2025 ditampilkan pada grafik 3.51.

Grafik 3. 51 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan, selama tahun 2025 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar melalui
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon).

- b. Operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang juga bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri dengan:
 - a. melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatra Barat baik melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.
Pada tahun 2025 terdapat 4 pameran dan bazar dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 360 orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.338.182.000,-.
 - b. Memperkenalkan pelaku usaha juga dengan pemasaran secara online melalui e-commerce lewat Bimtek Marketing Digital dengan jumlah peserta sebanyak 349 orang.
3. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui:
 - a. Pengujian mutu produk komoditi Cassia, Biji Kopi, Minyak Pala, Minyak Sereh Wangi, Biji Kakao, Biji Pinang, Biji Jagung, Gambir, *Rubber* (Karet), dan Cengkeh (*Clove*)
 - b. Pemantauan mutu 7 produk potensial yakni biji jagung, biji kopi dan cassia, biji kakao dan biji pinang, gambir dan minyak sereh.
 - c. Kalibrasi alat ukur agar sesuai dengan standar nasional dan internasional, selama tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 1795 sertifikat untuk alat ukur kesehatan dan usaha industri.
4. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui:
 - a. Pengawasan label pada 4 produk yakni pakaian bayi, pakaian dalam, selimut, dan handuk pada 14 merek barang beredar di pasaran,
 - b. pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan) pada 3 produk yakni alas kaki (yang terbuat dari karet dan plastic), penghapus, dan crayon pada 16 merek barang beredar di pasaran.
 - c. Pengawasan barang wajib SNI dilakukan pada 4 produk yakni puzzle, boneka, mainan beroda, dan baby walker pada 15 merek barang beredar di pasaran yang ada di 19 kabupaten/kota.
 - d. Sosialisasi konsumen cerdas yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan diikuti oleh 336 orang peserta yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:

1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, beras, dan cabe merah.



2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatra Barat.

Untuk pengembangan sektor perdagangan ke depannya, Pemerintah secara konsisten akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatra Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, dan berpartisipasi pada even-even nasional.
3. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI Wajib dan uji sampel garam), peningkatan pelaku usaha dalam tertib niaga dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan minol untuk tingkat distributor dan bahan berbahaya serta pengawasan gas elpiji 3kg.
4. Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen melalui sosialisasi konsumen cerdas dan pelayanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
5. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
6. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.

Untuk mewujudkan Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan, dilaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan dan 7 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 3.455.112.649,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 24 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	5	7	3.455.112.649,00	3.114.757.756,00
1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3	5	1.638.682.649,00	1.616.572.240,00
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2	2	1.816.430.000,00	1.498.185.516,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.455.112.649,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.114.757.756,00,- atau 90,15%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 340.354.893,00,- (9,85%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan yang tercapai 56,66% dengan realisasi anggaran 90,15% ditemukan adanya inefisiensi.



Sasaran 4.1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sub sektor industri yang berfokus pada pengelolaan usaha berskala kecil hingga menengah. IKM mencakup berbagai jenis usaha seperti industri rumah tangga, kerajinan, makanan, tekstil, serta produk-produk lokal lainnya. Adapun yang menjadi karakteristik utama IKM adalah skala usaha relatif kecil dengan modal terbatas, mudah dibentuk oleh masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja, fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, dan berperan penting dalam pemerataan ekonomi, karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. IKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kreativitas, serta peningkatan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Sumatra Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Oleh karena itu, pengembangan IKM di Sumatra Barat ke depannya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi menciptakan nilai

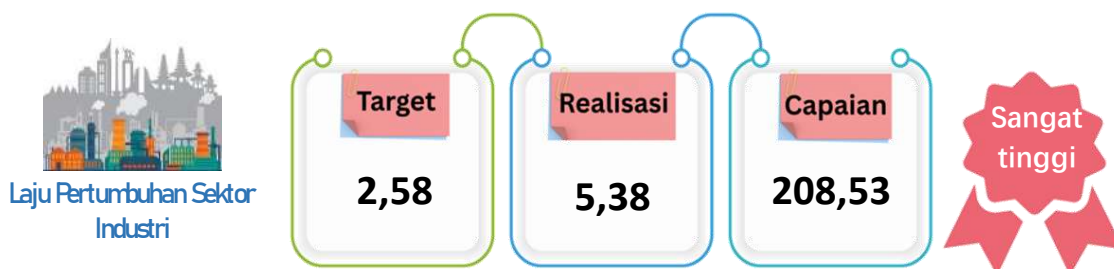




tambah pada produk unggulan daerah agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional dan mendorong peranan sektor industri sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat. Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatra Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Berdasarkan potensi yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan sasaran strategis berupa “Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah”. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan sektor perdagangan serta industri kecil dan menengah yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Mulai tahun 2024, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan melalui indikator laju pertumbuhan sektor industri, dengan pengukuran berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk tahun 2025, target laju pertumbuhan sektor industri ditetapkan sebesar 2,58%. Target indikator ini ditetapkan sama dengan realisasi tahun 2024. Pencapaian sasaran “Sumatra Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah” tergambar sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan informasi resmi yang tercantum dalam Berita Resmi Statistik No. 18/02/13/Th. XXIX tanggal 05 Februari 2026 mengenai Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dan Provinsi Sumatra Barat Dalam Angka Volumen 56,2026 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sektor Industri} = \frac{\text{Rp 18.856,05 miliar} - \text{Rp 17.894,04 miliar}}{\text{Rp 17.894,04 miliar}} \times 100\% = 5,38\%$$

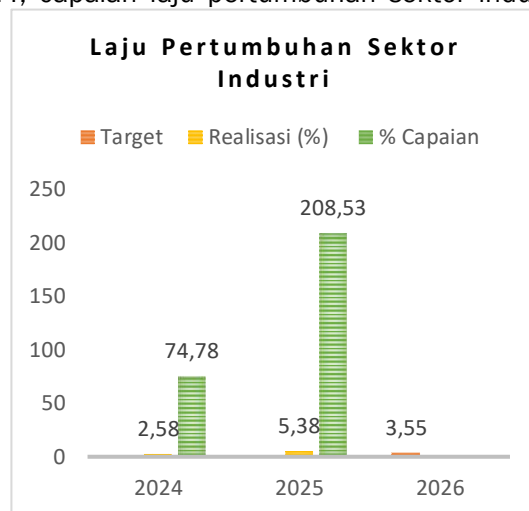
Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2025 (ADHK) sebesar Rp. 18.856,05 miliar

Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 17.894,04 miliar

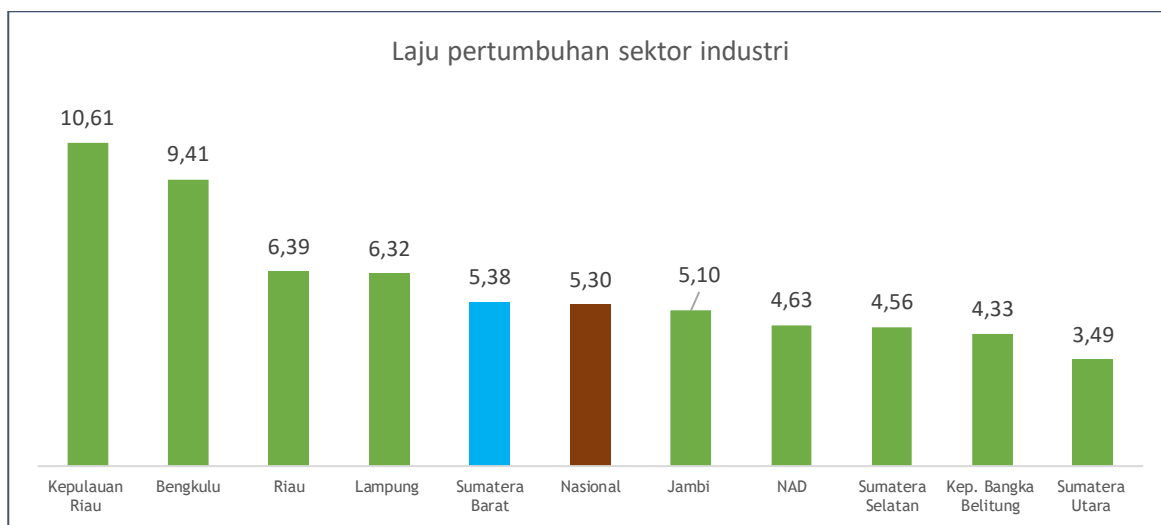
Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor industri menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2024, capaian laju pertumbuhan sektor industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kondisi tersebut, pada tahun 2025 laju pertumbuhan sektor industri tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, laju pertumbuhan sektor industri di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan tahun 2024.

Pada tahun 2026, indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 3,55%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2025, realisasi tersebut sebenarnya telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2025 telah berada di atas proyeksi target tahun berikutnya.



Laju pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat tahun 2025 berada di peringkat lima dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra dan lebih tinggi 0,20 dari rata-rata laju pertumbuhan sektor industri secara nasional. Laju pertumbuhan sektor industri tertinggi di Pulau Sumatra diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Riau (10,61%) diikuti oleh Provinsi Bengkulu (9,41%) dan Provinsi Riau (6,39%). Perbandingan laju pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.52.

Grafik 3. 52 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui Bimtek dan Pelatihan kepada 1.226 pelaku IKM, dengan rincian pelatihan dan bimtek sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Sulam dan Bordir
 - b. Pelatihan Menjahit dan Bantuan Alat
 - c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi IKM Menjahit
 - d. Pelatihan Pengembangan Desain Produk Fashion
 - e. Pelatihan Peningkatan Desain Produk Batik
 - f. Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan Olahan Kayu
 - g. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman
 - h. Pelatihan Kuliner
 - i. Pelatihan Pembuatan Keripik dan Bantuan Peralatan
 - j. Pelatihan Roasting Kopi
 - k. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin
2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
3. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur melalui pelatihan teknis dan pelatihan manajemen untuk 1.186 orang wirausaha baru. Pelatihan yang berkaitan dengan penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur adalah:
 - a. Pelatihan Wira Usaha Baru Olahan Makanan di Kota Padang
 - b. Pelatihan Bordir di Kab. Lima Puluh Kota
 - c. Pelatihan Menjahit di Kota Padang dan Kab. Lima Puluh Kota
 - d. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman di Kota Padang
 - e. Bimtek Makanan Kuliner di Kota Bukittinggi
 - f. Pelatihan Kuliner di Kota Padang
 - g. Pelatihan Roasting Kopi di Kab. Solok Selatan
 - h. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin di Kota Padang
4. Peningkatan kualitas produk IKM melalui pelatihan teknis peningkatan mutu produk dan Pelatihan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi produk pangan kepada 186 peserta.
5. Melakukan Pelatihan Diversifikasi Produk kepada 125 orang pelaku IKM. Pelatihan Diversifikasi yang dilakukan yaitu pelatihan diversifikasi produk dari kulit, dari resin, sabut kelapa.



6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah yang sudah dilatih yakni sebanyak 28 sentra yang terdiri dari sentra makanan dan minuman, sentra tenun, sentra jahit, sentra bordir, dan sentra logam mesin.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatra Barat.
8. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri dengan peserta 40 orang.

Sementara itu, masih ditemukan kendala berikut ini dalam pengembangan sektor industri adalah:

1. Masih terbatasnya kemampuan sebagian SDM pelaku IKM dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki, karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap
3. Belum semua sentra/kelompok usaha memiliki mesin produksi yang lengkap
4. Bencana alam banjir yang mengganggu produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pasok produksi industri.

Upaya kedepannya untuk pengembangan sektor industri di masa yang akan datang antara lain:

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk.
2. Tetap melaksanakan peningkatan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha.
3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
4. Melanjutkan peningkatan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, peningkatan penerapan standarisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM.
5. Tetap melakukan peningkatan kuantitas produk industri. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.



6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah yang telah dilatih.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatra Barat.
8. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri.
9. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah

Untuk mewujudkan Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, dilaksanakan 3 Program dengan 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 4.892.822.943,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 25 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	3	5	4.892.822.943,00	4.570.278.925,00
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	3	4.721.228.943,00	4.406.928.725,00
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	1	16.714.000,00	10.345.000,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	1	154.880.000,00	153.005.200,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.892.822.943,00,- terealisasi sebesar Rp. 4.570.278.925,00,- atau 93,41%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 322.544.018,00,-(6,59%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah yang tercapai 208,53% dengan realisasi anggaran 93,41% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Sasaran 4.1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera

Pelaku koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sejahtera merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesejahteraan pelaku koperasi dan UKM tercermin dari meningkatnya pendapatan usaha, stabilitas dan keberlanjutan usaha, serta kemampuan dalam mengakses permodalan, pasar, teknologi, dan pendampingan usaha. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera juga didukung oleh sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan kebijakan, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitas promosi produk menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing dan ketahanan usaha. Dengan pelaku koperasi dan UKM yang semakin kuat dan mandiri, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjadikan “terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera” sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan sub sektor koperasi dan persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil. Data pengukuran capaian indikator ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat. Capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.26:

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	13,60	0,55	4,04
Persentase pendapatan pada usaha mikro dan kecil	10,60	5,01	47,26
Rata-rata Capaian			25,65

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera sebesar 25,65% termasuk kategori keberhasilan **sangat rendah**. Evaluasi dan analisa indikator kinerja yang mengukur sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera adalah sebagai berikut:





a. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi

Laju pertumbuhan sub sektor koperasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan sub sektor koperasi dihitung berdasarkan data PDRB ADHK sektor koperasi. PDRB ADHK sektor koperasi ini dihitung berdasarkan dari volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam maupun dari sektor rill. Besaran volume usaha koperasi ini bisa menggambarkan aktivitas ekonomi koperasi. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi} = \frac{\text{PDRB adhk sub sektor koperasi tahun } n \times 100}{\text{PDRB adhk sub sektor koperasi tahun } (n - 1)} - 100$$

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, pada tahun 2025 target indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi ditetapkan sebesar 2,23. Target ini lebih rendah 11,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Mempertimbangkan kondisi tersebut, target tahun 2025 indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi ditetapkan menjadi 13,6 sama dengan realisasi tahun 2024. Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2024, adalah sebagai berikut:



Realisasi laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2024 sebesar 13,60 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi} = \frac{\text{Rp. 31.909.035.425,11} \times 100}{\text{Rp. 31.734.376.085,92}} - 100 = 0,55$$

Keterangan:

IHK 2024 = 106,90
 IHK 2025 = 107,66
 Konstanta USP = 0,260289
 Konstanta USR = 0,258897
 Volume USP Tahun 2024 (Rp) = 3.640.411.501.375,30,-
 Volume USP Tahun 2024 (Rp) = 943.934.070.555,58,-





Volume USR Tahun 2025* (Rp) = 955.877.070.755,06,-
Volume USP Tahun 2025* (Rp) = 3.686.471.323.393,94,-

PDRB adhk 2024 =

$$\frac{3.640.411.501.375,30 - (3.640.411.501.375,30 \times 0,260289)}{106,90} + \frac{943.934.070.555,58 - (943.934.070.555,58 \times 0,258897)}{106,90}$$

= Rp. 31.734.376.085,92

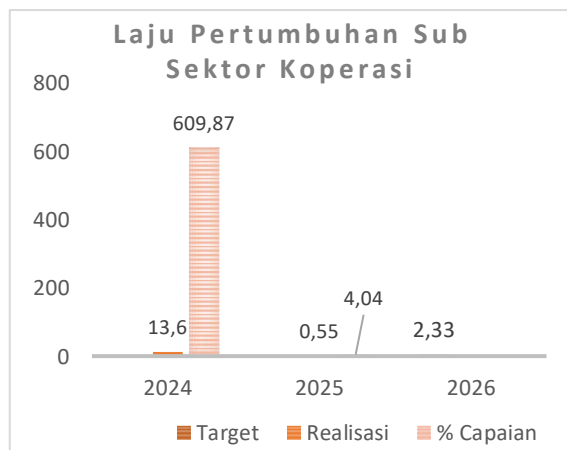
PDRB adhk 2025 =

$$\frac{3.686.471.323.393,94 - (3.686.471.323.393,94 \times 0,260289)}{107,66} + \frac{955.877.070.755,06 - (955.877.070.755,06 \times 0,258897)}{107,66}$$

= Rp. 31.909.035.425,11

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sub sektor koperasi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Berdasarkan hasil pengukuran, laju pertumbuhan sub sektor koperasi pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2026, indikator kinerja laju pertumbuhan sub sektor koperasi ditargetkan



mencapai 2,33%. Untuk memastikan target tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan penguatan program pembinaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen usaha koperasi, serta optimalisasi dukungan kebijakan dan fasilitasi permodalan. Dengan upaya yang lebih terarah dan terukur, diharapkan capaian indikator pada tahun 2026 dapat meningkat sesuai dengan target

yang telah ditetapkan.

Perkembangan laju pertumbuhan sub sektor koperasi dari tahun 2022-2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tercatat sebesar 5,04%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 5,58%, menunjukkan adanya perbaikan kinerja meskipun kenaikannya relatif kecil. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana laju pertumbuhan melonjak hingga 13,6%. Capaian 2024 merupakan capaian tertinggi selama rentang waktu 2022-2025. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat tajam hingga mencapai 0,55%. Penurunan drastis ini





menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akan menjadi perhatian ke depannya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kembali laju pertumbuhan sub sektor koperasi. Perkembangan laju pertumbuhan sub sektor koperasi dari tahun 2022-2025 digambarkan pada grafik 3.53.

Grafik 3. 53 Laju Pertumbuhan sub sektor koperasi tahun 2022-2025



Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi, dilakukan upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan koperasi dengan cara:

1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi Provinsi dan Koperasi Kabupaten/Kota agar koperasi aktif meningkat, koperasi melaksanakan RAT meningkat, koperasi memiliki legalitas usaha, serta penumbuhan koperasi baru. Selama tahun 2025 telah dilakukan pembinaan kelembagaan terhadap 30 koperasi, pembenahan koperasi tidak aktif dan pembinaan dan pendampingan 22 koperasi dalam pengurusan izin simpan pinjam
2. Peningkatan wawasan dan pola pikir pengurus koperasi sehingga mampu untuk bergerak di sektor riil dan mencari peluang usaha lainnya dan tidak hanya mengandalkan unit usaha simpan pinjam serta bagaimana meningkatkan branding dan promosi produk koperasi melalui Bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha koperasi dilakukan kepada 90 koperasi.
3. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi sehingga dapat memiliki daya saing di pasar konsumen melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, dilakukan kepada 33 koperasi
4. Pembinaan dan pendampingan langsung kepada koperasi di Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan usaha koperasi.
5. Memberikan Hibah untuk pengembangan usaha koperasi berupa uang dan sarana prasarana kepada koperasi dengan tujuan untuk mendukung operasional di koperasi serta pengembangan usaha. Koperasi yang mendapatkan hibah uang (Rp. 10.000.000,-) dan sarana prasarana (laptop dan printer) adalah Koperasi Konsumen Kopas Bundo Kandang.

6. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Kop) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang terlebih dahulu telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan pertanggung jawaban keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi melalui berbagai kegiatan pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat di akses secara digital.
8. Berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan program strategis Koperasi Merah Putih.

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi masih ditemukan hambatan, sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya SDM pengelola koperasi dalam mengelola koperasi baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha
2. Masih terbatasnya permodalan bagi koperasi terutama permodalan yang berasal dari anggota koperasi
3. Masih rendahnya kontribusi anggota dalam berpartisipasi untuk mengembangkan usaha koperasi
4. Pengelolaan koperasi yang masih kurang professional sehingga koperasi sulit untuk berkembang
5. Masih tingginya ketergantungan koperasi terhadap pemerintah sehingga koperasi sulit maju dan bersaing

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi, kedepannya akan dilaksanakan upaya berikut ini:

1. Memberikan pendampingan kepada koperasi dalam melaksanakan RAT melalui tenaga penyuluh koperasi lapangan
2. Meningkatkan tatakelola koperasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan
3. Memberikan pendampingan kepada koperasi dalam pengelolaan keuangan secara professional
4. Melibatkan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi agar usaha koperasi berkembang dengan baik
5. Memberikan fasilitasi kepada koperasi untuk mengakses permodalan kepada perbankan dan non perbankan seperti LPDB KUMKM.





6. Meningkatkan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi melalui penilaian Kesehatan koperasi.
7. Membentuk klinik UMKM Minang Bangkit untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM yang tergabung dalam koperasi untuk bangkit kembali setelah bencana.

6. Presentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil

Pendapatan usaha mikro dan kecil merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu usaha dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen. Peningkatan pendapatan dan keuntungan UMKM akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

Dengan demikian, persentase peningkatan pendapatan UMKM dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Data untuk mengukur persentase peningkatan pendapatan UMKM diperoleh dari *Online Data System* (ODS) yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Lingkup objek dalam penghitungan indikator hanya meliputi usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara usaha menengah dan usaha besar tidak termasuk dalam objek penentu untuk penghitungan indikator sasaran kinerja dengan pertimbangan bahwa usaha menengah dan besar adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2025 sebesar 4,5%. Target ini lebih rendah 6,1% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 10,60%. Mempertimbangkan kondisi tersebut, target tahun 2025 disesuaikan menjadi 10,60 sama dengan realisasi tahun 2024. Pencapaian indikator persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja sebesar 5,01% ini diukur berdasarkan data pendapatan usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdata dalam *Online Data System (ODS)* Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil} = \frac{13.422.981.000 - 12.782.089.833}{12.782.089.833} \times 100\% = 5,01\%$$

Keterangan:

Pendapatan UMK tahun 2024= Rp 12.782.089.833,-

Pendapatan UMK tahun 2025= Rp 13.422.981.000,-

Realisasi pendapatan pada usaha mikro dan kecil tahun 2025 sebesar Rp. 13.422.981.000,- merupakan akumulasi dari pendapatan usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota, sebanyak 14 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2025 dan 5 Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Kenaikan/penurunan pendapatan UMK ini, salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan/penurunan jumlah UMK di tahun 2025. Sementara itu, untuk jumlah UMK di tahun 2025 menjadi 2.335 meningkat 600 UMKM dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan UMKM terbanyak terjadi di Kota Padang. Gambaran pendapatan pada usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel 3.27.

Tabel 3. 27 Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025

No	Kab/Kota	Jml UMKM 2024	Pendapatan 2024	Jml UMKM 2025	Pendapatan 2025
1	Kabupaten Agam	140	637.686.000	364	1.960.861.000
2	Kabupaten Dharmasraya	1	4.000.000	11	156.253.000
3	Kabupaten Mentawai	6	19.750.000	4	48.000.000
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	20	62.725.000	5	20.000.000
5	Kabupaten Padang Pariaman	161	611.460.000	1	2.000.000
6	Kabupaten Pasaman	10	165.850.000	7	77.500.000
7	Kabupaten Pasaman Barat	2	9.775.000	19	171.725.000
8	Kabupaten Pesisir Selatan	2	2.100.000	2	9.523.000
9	Kabupaten Sijunjung	5	11.700.000	5	20.000.000
10	Kabupaten Solok	13	26.450.000	11	334.500.000
11	Kabupaten Solok Selatan	706	8.718.546.333	42	211.780.000
12	Kabupaten Tanah Datar	106	394.530.000	133	412.188.000
13	Kota Bukittinggi	17	62.850.000	288	2.100.278.000
14	Kota Padang	296	1.022.125.000	1.405	7.540.073.000
15	Kota Padang Panjang	107	551.660.000	12	83.950.000
16	Kota Pariaman	122	390.382.000	8	65.500.000
17	Kota Payakumbuh	9	53.500.000	6	110.750.000
18	Kota Sawahlunto	4	7.200.000	5	52.850.000
19	Kota Solok	8	29.800.000	7	45.250.000
Jumlah		1.735	12.782.089.833	2.335	13.422.981.000

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Berbeda dengan tahun 2024 yang



menunjukkan capaian melampaui target, pada tahun 2025 indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil di tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 5,2%. Sementara itu, peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil di tahun 2025 baru mencapai 5,01 atau 96,35%

dari target tahun 2026 (5,2%). Untuk mencapai target tersebut akan diupayakan untuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan

Upaya meningkatkan pendapatan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi *millenial entrepreneur* untuk memberikan motivasi bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya untuk 1.240 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
2. Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi oleh konsultan PLUT KUMKM pada 570 orang peserta *millenial entrepreneur*.
3. Melaksanakan fasilitasi Bimtek PLUT (Pluzzy Academy) kepada 8 komunitas dengan peserta 400 orang untuk meningkatkan kemasan produk, membranding produk, foto produk dan cara memasarkan produk melalui *Market Place*, Media Digitalisasi, FaceBook, Instagram, Whatsapp dan lain-lain.
4. Fasilitasi pemberian sertifikasi halal dan merk bagi UMKM
5. Fasilitasi akses permodalan perbankan dan akses pembiayaan non perbankan. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengalokasikan anggaran belanja subsidi bunga melalui Program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan). Alokasi anggaran subsidi SIMAMAK ini sebesar Rp. 1.125.000.000 dan terealisasi Rp. 1.124.442.040 (99,95%) dan fasilitasi subsidi bunga.
6. Memberikan Pelatihan Penumbuhan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha
7. Melakukan promosi melalui pembuatan video produk unggulan UMKM Kota Payakumbuh. Dalam pembuatan Video ini produk UMKM yang dipromosikan adalah UMK Kota Payakumbuh yang bergerak pada bidang usaha kuliner, kerajinan dan fashion.
8. Memfasilitasi terjalinnya kemitraan pada 310 UMKM

9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM melalui berbagai kegiatan Bimtek, pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat diakses secara digital kepada 270 peserta

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan UMKM antara lain

1. Terbatasnya SDM KUKM dalam pengelolaan usaha secara professional dan kompeten
2. Terbatasnya inovasi UMKM dalam pengembangan produk usaha
3. Terbatasnya SDM KUMKM dalam pemasaran produk secara digital

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk meningkatkan pendapatan UMKM antara lain:

1. Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui bimtek dan pelatihan peningkatan kualitas produk
2. Meningkatkan pemasaran produk UMKM melalui bazar, pameran baik dalam negeri maupun luar negeri
3. Memberikan pendampingan kepada UMKM oleh konsultan PLUT KUMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk
4. Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dan merk baik melalui Lembaga pemerintah maupun pihak swasta
5. Memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan kemasan produk melalui layanan rumah kemasan yang ada di PLUT KUMKM
6. Memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan baik melalui perbankan maupun non perbankan

Untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera dilaksanakan 4 Program dengan 4 Kegiatan dan 9 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 9.103.040.700,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 28 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan Ukm Yang Sejahtera	4	9	9.103.040.700,00	8.252.825.277,00
1	Program Pemberdayaan dan Perindungan Koperasi	1	2	1.612.058.500,00	1.331.317.085,00
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1	4	4.471.442.000,00	4.026.659.650,00
3	Program Pengembangan UMKM	1	2	2.652.192.200,00	2.530.321.602,00
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	1	367.348.000,00	364.526.940,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.103.040.700,00,- terealisasi sebesar Rp. 8.252.825.277,00,- atau 90,66%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 850.215.423,00,- (9,34%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera yang tercapai 25,65% dengan realisasi anggaran 90,66% mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pencapaian sasaran.



Sasaran 4.1.4 **Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor**

Entrepreneur atau wirausahawan adalah seseorang yang mampu mengidentifikasi peluang usaha, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi melalui produk atau jasa. Seorang entrepreneur tidak hanya sekadar menjalankan bisnis, tetapi juga inovatif, kreatif, dan proaktif dalam menghadapi tantangan pasar. Entrepreneur menjadi motor penggerak ekonomi karena melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko, mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di Sumatra Barat, kewirausahaan berkembang pesat berkat budaya masyarakat yang kreatif dan memiliki jiwa dagang yang tinggi. Karakter Minangkabau yang terbiasa merantau

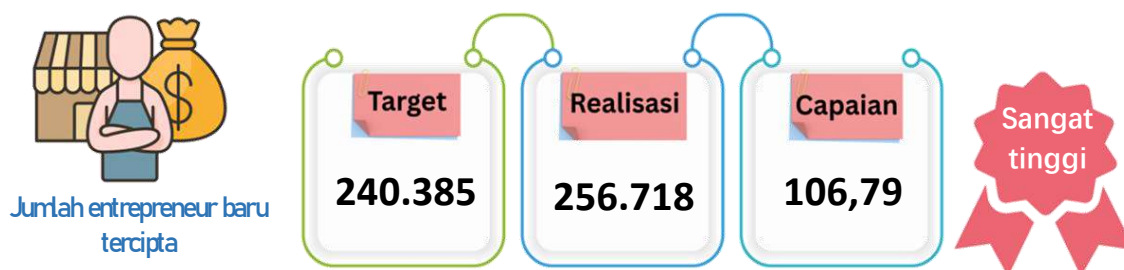


mendorong lahirnya wirausahawan baru di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif. Keberadaan entrepreneur ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pada RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran terciptanya 100 Ribu *entrepreneur* dari berbagai sektor. Sasaran ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yaitu “Mencetak 100 ribu *millenial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif”. Program unggulan tersebut diharapkan akan menjadi pilar penggerak kewirausahaan di Sumatra Barat dengan target kondisi akhir terdapat peningkatan sebanyak 100.070 wirausaha baru.

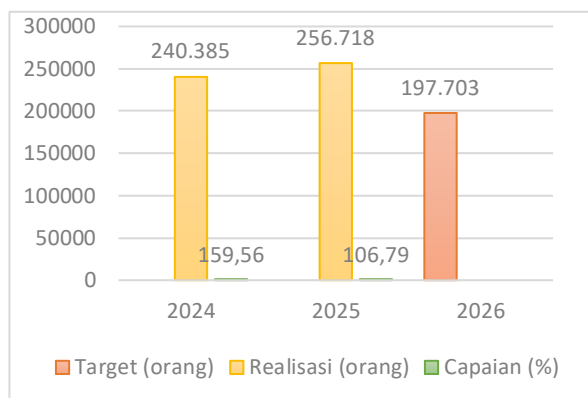
Sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah *entrepreneur* baru tercipta. Pengukuran *entrepreneur* didasarkan pada *entrepreneur* yang telah menerima pendidikan kewirausahaan dan atau sudah memulai usaha. Terdapat tiga kelompok yang akan menjadi sasaran dalam *kewirusahaan Sumatra Barat antara lain*: pencari kerja, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, tahun 2025 indikator jumlah *entrepreneur* baru tercipta pada tahun 2025 ditargetkan 173.711 orang. Akan tetapi, realisasi tahun 2024 tercapai 240.385 orang atau lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2025 dalam RPJMD. Mempertimbangkan hal tersebut, target tahun 2025 ditetapkan 240.385 sama dengan realisasi tahun 2024. Pencapaian sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi indikator ini diukur berdasarkan data wirausaha dihimpun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatra Barat.

Perhitungan capaian indikator jumlah entrepreneur baru yang tercipta dilakukan



menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator jumlah entrepreneur baru tercipta baik tahun 2024 atau 2025 sama-sama tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan jumlah entrepreneur baru tercipta sebanyak 16.333 orang di tahun 2025.

Sama halnya dengan tahun 2024, capaian indikator ini di tahun 2025 juga sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 197.703 wirausaha. Ketercapaian indikator ini merupakan hasil kolaborasi dari 15 Perangkat Daerah di Provinsi Sumatra Barat. OPD tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial.

Selama tahun 2025, upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan 100.000 *entrepreneur* antara lain:

1. Sosialisasi *millenial entrepreneur* untuk memberikan motivasi bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya untuk 1.240 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
2. Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi oleh konsultan PLUT KUMKM pada 570 orang peserta *millenial entrepreneur*.
3. Memberikan Pelatihan Penumbuhan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha
4. Fasilitasi akses permodalan terhadap UMKM, Pengusaha pemula dan pelaku UMKM

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 100.000 *entrepreneur* antara lain:

1. Masih terbatasnya akses permodalan untuk membuka usaha.
2. Keterbatasan penguasaan teknologi yang dapat menjadi pendukung.
3. Terbatasnya SDM KUMKM dalam pengelolaan usaha secara professional dan kompeten
4. Terbatasnya inovasi UMKM dalam pengembangan produk usaha

5. Terbatasnya SDM KUMKM dalam pemasaran produk secara digital

Untuk mencapai 100.000 *entrepreneur*, ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan baik melalui perbankan maupun non perbankan
2. Konsisten menanamkan jiwa *entrepreneur* sejak dini kepada siswa di sekolah.
3. Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui bimtek dan pelatihan peningkatan kualitas produk
4. Meningkatkan pemasaran produk UMKM melalui bazar, pameran baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Memberikan pendampingan kepada UMKM oleh konsultan PLUT KUMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk
6. Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dan merk baik melalui Lembaga pemerintah maupun pihak swasta
7. Memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan kemasan produk melalui layanan rumah kemasan yang ada di PLUT KUMKM

Untuk menciptakan 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor, dilaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 3.475.646.750,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 29 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	2	5	3.475.646.750,00	3.371.711.516,00
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	5	3.475.646.750,00	3.371.711.516,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.475.646.750,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.371.711.516,00,- atau 97,01%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 103.935.234,00,- (2,99%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor yang tercapai 106,79% dengan realisasi anggaran 97,01% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 74,45%.



Sasaran 4.1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 beserta perubahannya (PP Nomor 49 Tahun 2011), investasi didefinisikan sebagai penempatan dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Sementara itu, menurut Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, investasi mencakup berbagai jenis, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di Sumatra Barat. Selain menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, investasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah dengan menetapkan target pertumbuhan investasi sebagai salah satu sasaran utama dalam RPJMD Tahun 2021–2026. Pencapaian sasaran ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, potensi sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan tenaga kerja, serta sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Semua faktor ini bertujuan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di wilayah Sumatra Barat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase peningkatan investasi di Provinsi. Pengukuran dilakukan berdasarkan data Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat. Nilai realisasi ini mencakup seluruh investasi asing maupun domestik yang telah direalisasikan di daerah, sehingga memberikan gambaran nyata kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target indikator persentase peningkatan investasi di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 10,50%. Target peningkatan investasi tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun



sebelumnya. Hal ini dikarenakan, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator ini. Pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dapat dilihat sebagai berikut:



Persentase peningkatan investasi di Provinsi yang terealisasi sebesar 20,94% diukur berdasarkan nilai realisasi investasi PMA sebesar US\$ 121.525,34 ribu atau setara dengan **Rp. 2.056.405.420.412,-** dan nilai realisasi PMDN sebesar **Rp. 17.004.387.202.261,-** sehingga total nilai realisasi investasi (PMA + PMDN) adalah sebesar **Rp. 19.060.792.622.673,-**. Adapun perhitungan pertumbuhan investasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan investasi di Provinsi} = \frac{19.060.792.622.673 - 15.760.564.694.480}{15.760.564.694.480} \times 100\% = 20,94\%$$

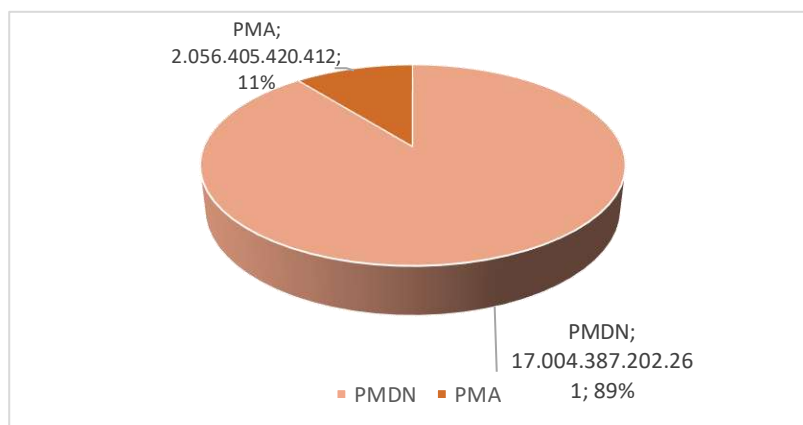
Keterangan:

Realisasi investasi tahun 2025= Rp. 19.060.792.622.673,-

Realisasi investasi tahun 2024= Rp. 15.760.564.694.480,-

Dari total nilai investasi Rp. 19.060.792.622.673,- di tahun 2025, PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi penyumbang investasi terbesar di Sumatra Barat pada tahun 2025, dengan proporsi 89%. Nilai tersebut sudah termasuk investasi dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kondisi ini menunjukkan bahwa investor domestik memegang peranan penting dalam menggerakkan

perekonomian daerah. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 11 persen terhadap total investasi. Proporsi yang relatif lebih kecil ini mengindikasikan bahwa Sumatra Barat



belum sepenuhnya menjadi tujuan utama investor asing. Secara keseluruhan, PMDN menjadi tulang punggung investasi di Sumatra Barat, dengan dukungan signifikan dari UMK. Sementara



itu, PMA masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis guna menarik lebih banyak investasi asing, sebagai upaya diversifikasi sumber investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan investasi Provinsi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2024 maupun 2025, realisasi peningkatan investasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024, persentase peningkatan investasi mengalami penurunan sebesar 13,22%. Meskipun terjadi perlambatan dari sisi persentase pertumbuhan, secara nominal nilai investasi tahun



2025 tetap menunjukkan kinerja positif, dengan kenaikan sebesar Rp3.300.227.928.193 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan investasi tetap berlangsung, meskipun dengan laju yang lebih lambat.

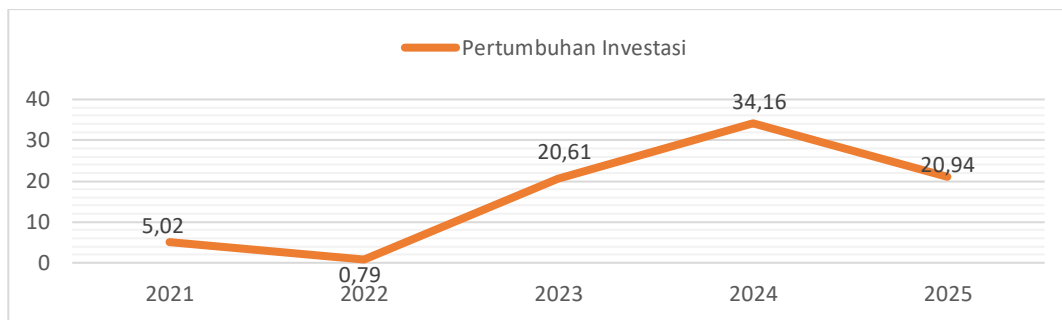
Jika dibandingkan dengan tahun terakhir RPJMD (2026), persentase peningkatan investasi ditargetkan

sebesar 11,50%. Target ini lebih rendah 9,44% dibandingkan realisasi tahun 2025, sehingga secara proyeksi capaian tahun 2025 telah melampaui target akhir periode perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja investasi daerah berada pada jalur yang positif, dan untuk stabilitas pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya akan dilakukan strategi lanjutan yang lebih baik.

Pertumbuhan investasi Sumatra Barat tahun 2021–2025 menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi sebesar 34,16% terjadi di tahun 2024. Angka ini lebih tinggi 13,55% dibandingkan pertumbuhan tahun 2023. Lonjakan ini mengindikasikan adanya akselerasi investasi yang kuat, baik dari sisi realisasi proyek maupun peningkatan kepercayaan investor. Sebaliknya, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 0,79%, mencerminkan perlambatan yang cukup signifikan pada periode tersebut. Kondisi yang sama terjadi di tahun 2025, dimana pertumbuhan investasi tercatat juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024, meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan investasi daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan investasi di Sumatra Barat tahun 2021-2025 disajikan pada grafik 3.54.



Grafik 3. 54 Pertumbuhan Investasi Sumatra Barat tahun 2021-2025



Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatra Barat

Berdasarkan realisasi PMDN, Provinsi Sumatra Barat menempati peringkat ke-23 dari 38 provinsi secara nasional, dengan total realisasi investasi sebesar Rp17.004.387.202.261. Di tingkat regional Sumatra, Sumatra Barat berada pada peringkat ke-9 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra. Sementara itu, untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Provinsi Sumatra Barat menempati peringkat ke-25 secara nasional dengan capaian sebesar US\$121.525,34 ribu. Pada lingkup regional Sumatra, Sumatra Barat berada di peringkat ke-6 dari 10 provinsi.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa posisi Sumatra Barat dalam peta investasi nasional dan regional masih berada pada kelompok menengah, sehingga terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, baik PMDN maupun PMA.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan investasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan serta merancang produk hukum turunannya. Dengan terbitnya peraturan ini diharapkan semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan termasuk layanan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Optimalisasi penggunaan Single Sign On (SSO) sebagai media elektronik untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Mekanisme ini diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
3. Peningkatan fungsi koordinasi dengan daerah dilakukan melalui konsolidasi data realisasi penanaman modal untuk membahas target per wilayah, perkembangan subsistem



- pengawasan, pencapaian realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan aparat;
4. Peningkatan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membangun ekosistem industri yang saling bersinergi serta berkolaborasi antara industri besar dan UMKM;
 5. Meningkatkan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan melalui sistem OSS;
 6. Mengeksekusi realisasi investasi besar dengan mengawal proyek-proyek strategis serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor;
 7. Optimalisasi proses pemantauan melalui LKPM Online serta penguatan proses sanksi bagi pelaku usaha yang tidak tertib;
 8. Melakukan pengembangan-pengembangan system informasi, yaitu SIPOPEI (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) dan SIMITRA (Sistem Informasi Kemitraan Usaha).
 9. Promosi baik offline maupun online untuk menarik minat investor
 10. Penyediaan data dan informasi tentang potensi investasi dalam berbagai sektor

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan nilai realisasi investasi di Sumatra Barat, diantaranya adalah:

1. Belum adanya dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan berusaha dalam bentuk revisi RTRW dan RDTR nya;
2. Belum tersedianya kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatra Barat;
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS RBA dan LKPM;
4. Belum *clear and cleanny* tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan di Sumatra Barat pada umumnya tanah ulayat;
5. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya;
6. Dukungan infrastruktur ke lokasi yang masih belum memadai serta aksesibilitas yang sulit dijangkau;

Sumatra Barat harus menjadi daerah yang ramah bagi investor, dengan birokrasi yang efisien, kepastian hukum yang jelas, serta dukungan infrastruktur yang memadai. serta satukan langkah antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperluas peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh



Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan arah Investasi dan menyiapkan kebijakan terkait investasi
2. Melaksanakan Sosialisasi dalam hal penyelenggaraan kemudahan Perizinan Berusaha terhadap OPD dan Pelaku Usaha
3. Melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap OPD teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal
5. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi /Pengawasan Ke lapangan/ perusahaan dalam hal meneliht kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal
6. Merancang kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatra barat.
7. Membuat pemetaan terhadap target investasi
8. Melakukan rekonsiliasi data potensi dan peluang investasi setiap periodik bersama stakeholder terkait
9. Menyelenggarakan forum komunikasi pelaku usaha daerah untuk mempertemukan antarpelaku usaha dalam suatu acara.

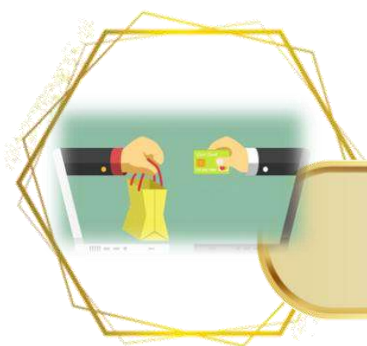
Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, dilaksanakan 5 Program dengan 5 Kegiatan dan 11 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar Rp. 606.181.906,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5	11	606.181.906,00	556.600.671,00
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	2	44.327.600,00	38.211.400,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	1	2	89.729.450,00	59.148.795,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	3	287.978.356,00	278.397.136,00
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	3	174.572.000,00	171.427.340,00

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	9.574.500,00	9.416.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 606.181.906,00,- terealisasi sebesar Rp. 556.600.671,00,- atau 91,82%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 49.581.235,00,- (8,18%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi yang tercapai 199,43% dengan realisasi anggaran 91,82% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Sasaran 4.1.6 **Meningkatnya peran ekonomi digital**

Ekonomi digital merupakan wujud transformasi aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fondasi utama. Perkembangan internet, perangkat pintar, serta inovasi berbasis data telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, bekerja, dan menjalankan usaha. Kini, kegiatan jual beli tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Dengan strategi yang tepat, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ekonomi digital memainkan peran yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Di Sumatra Barat, Dengan karakter masyarakat yang kuat dalam sektor perdagangan, UMKM, dan perantauan, transformasi digital menjadi peluang besar untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal hingga ke tingkat nasional dan global. Dengan potensi sumber daya manusia yang kuat, budaya kewirausahaan yang tinggi, serta dukungan teknologi yang terus berkembang, ekonomi digital berpeluang menjadi motor penggerak baru bagi kemajuan Sumatra Barat di era modern

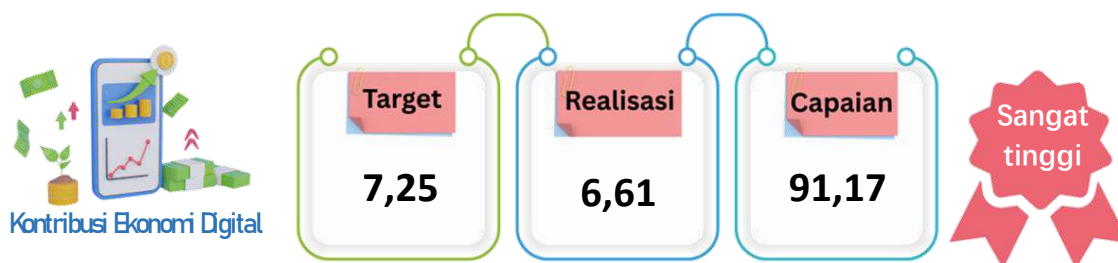
Agar dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “meningkatnya peran ekonomi digital” sebagai salah satu sasaran yang harus





dicapai untuk mendukung terwujudnya misi 4 RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator kinerja kontribusi ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital yang dimaksud di sini adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh sektor informasi dan komunikasi. Perhitungan realisasi indikator ini berdasarkan pada data BPS terkait PDRB sektor informasi dan komunikasi.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator kontribusi ekonomi digital pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7,25%. Target tersebut lebih tinggi 0,58% dibandingkan dengan capaian kontribusi ekonomi digital pada tahun 2024. Pencapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Realisasi kontribusi ekonomi digital tahun 2025 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

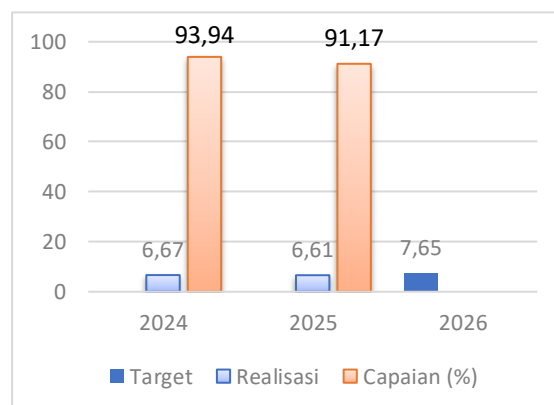
$$\text{Kontribusi ekonomi digital} = \frac{\text{Rp. 23,29 Triliun}}{\text{Rp. 352,19 Triliun}} \times 100\% = 6,61$$

Keterangan:

PDRB sektor informasi dan komunikasi= Rp. 23,29 Triliun

PDRB Sumatra Barat= Rp. 352,19 Triliun

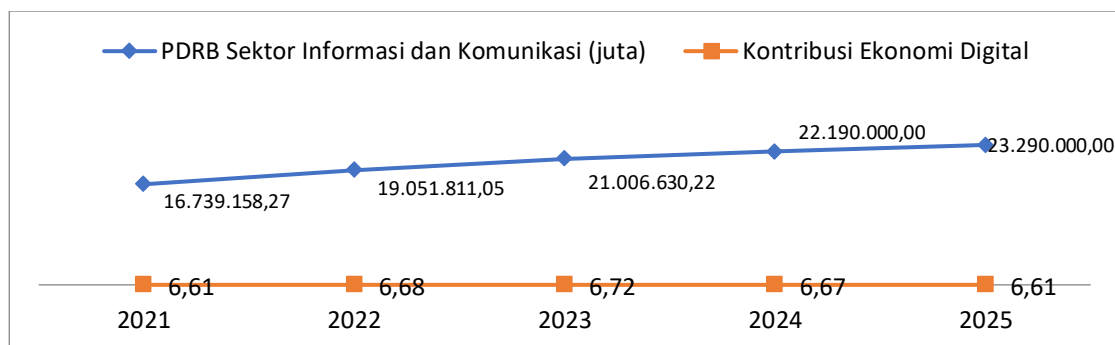
Perhitungan capaian kontribusi ekonomi digital menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, Capaian indikator kontribusi ekonomi digital tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2025 terjadi penurunan kontribusi ekonomi digital sebesar 0,06 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), target indikator kontribusi ekonomi digital ditetapkan 7,65. Target ini lebih tinggi 1,04 dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Dengan mempertimbangkan kondisi capaian yang mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, diperlukan upaya yang lebih optimal dan terarah untuk mendorong peningkatan kontribusi ekonomi digital.

PDRB Provinsi Sumatra Barat atas dasar harga berlaku pada lapangan usaha sektor informasi dan komunikasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Secara kumulatif, terjadi kenaikan sebesar Rp6.639.963,42 juta dalam kurun waktu tersebut. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar Rp2.312.652,78 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini menjadi yang terbesar sepanjang periode 2021 – 2025. Perkembangan kontribusi ekonomi digital digambarkan pada grafik 3.55.

Grafik 3. 55 Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam meningkatkan peran ekonomi digital telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis *Digital Marketing* kepada 8 Komunitas (400 orang pelaku usaha) untuk meningkatkan kemampuan kemasan produk, membranding produk, foto produk dan cara memasarkan produk melalui Market Place, Media Digitalisasi, FaceBook, Instagram, Whatsapp dan kemampuan public speaking yang baik agar produk dianggap layak untuk dipasarkan secara Offline maupun Online.
2. Pembuatan Video promosi produk UMKM Kota Payakumbuh yang bergerak pada bidang usaha kuliner, kerajinan dan fashion
3. Memberikan pemahaman kepada UMKM terkait digitalisasi dan pengelolaan produk UMKM (70 orang peserta), digital marketing bagi wirausaha (150 orang)
4. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan media sosial dari UMKM yang dibina.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penerapan kegiatan ekonomi digital adalah:

1. Masih terbatasnya keterampilan dan pengetahuan SDM UMKM dalam pemasaran produk secara digital
2. Kemampuan digitalisasi beberapa pelaku UMKM yang berusia lanjut dan sarana yang digunakan oleh UMKM yang belum mendukung kualitas dokumentasi produk yang akan dijual.
3. Pemanfaatan teknologi digital yang terbatas bagi UMKM di daerah dikarenakan infrastruktur pada daerah dan akses internet yang terbatas.
4. Biaya untuk mengimplementasikan teknologi digital dan infrastruktur yang diperlukan masih terlalu tinggi bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.

Upaya ke depan untuk mendukung peningkatan peran ekonomi digital antara lain:

1. Memperbanyak kerja sama dengan para pelaku usaha digital/ *e-commerce*
2. Melibatkan *content creator* untuk mempromosikan produk UMKM.
3. Mendorong para mitra untuk berkolaborasi dengan UMKM melalui digitalisasi.
4. Secara berkelanjutan meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui *e-commerce*.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi digital melekat pada program/kegiatan yang mendukung sasaran Sumatra Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera dan terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor.





Misi 5 **Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata**

Dalam rangka pencapaian misi 5 “meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan” telah ditetapkan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat dapat didorong oleh optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah, salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah.

Pada sektor pariwisata, pengembangannya diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan religi, yang didukung oleh perbaikan aksesibilitas, amenities, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, penguatan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital, menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Seiring dengan itu, sektor ekonomi kreatif dikembangkan sebagai penguat ekosistem pariwisata sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kualitas dan inovasi produk, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar. Sinergi antara pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar melalui pengembangan produk kreatif lokal, kuliner khas daerah, seni pertunjukan, dan industri berbasis budaya.

Melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi, Provinsi Sumatra Barat diharapkan mampu meningkatkan kontribusi kedua sektor tersebut terhadap Produk





Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang kondusif guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi tujuan yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengukuran indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tercapai 16,85%. Akan tetapi, dikarenakan adanya perbaikan formula dalam menghitung target dan realisasi, sejak tahun 2023 target indikator ini telah disesuaikan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, target tahun 2025 indikator pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditetapkan menjadi 4,43% atau lebih tinggi 0,2% dari tahun 2024. Pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tergambar sebagai berikut:



Tahun 2025, persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terealisasi 4,36% diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian indikator sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat dan indikator sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif} = \frac{1,37 + 7,34}{2} = 4,36$$

Keterangan:

Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman = 1,37

Persentase kontribusi ekraf pada PDRB= 7,34

Perhitungan capaian indikator persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 dan 2025 relatif mendekati target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 0,13% di tahun 2025.

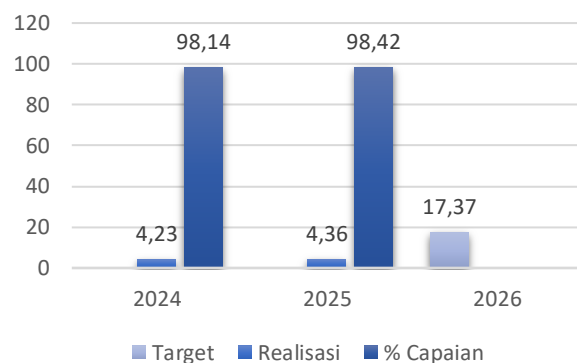
Indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2026 ditargetkan 17,37%. Hingga tahun

2025, capaian indikator ini baru mencapai 25,10% dari target tahun 2026 sehingga masih diperlukan peningkatan sebesar 13,01%. Agar dapat mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya yang optimal melalui penguatan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif secara konsisten dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya yang dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan event pariwisata yang berskala regional, nasional maupun internasional oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan *Famtrip* dengan Brunei Darussalam dan beberapa *influencer* tingkat regional, nasional dan internasional (Singapura).
- Bertambahnya jalur penerbangan domestik dan internasional ke Sumatra Barat.
- Memberikan 64 (enam puluh empat) rekomendasi perizinan usaha pariwisata.

Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif



- e. Mendukung pengembangan DTWU dalam bentuk Penyusunan Pra Design dan Guideliness Kota Tua Padang serta pengadaan Booth Ekraf di Kawasan Kota Tua Padang.
- f. Membuat video promosi untuk media sosial.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata melalui berbagai pelatihan.
- h. Mendorong produktivitas pelaku ekonomi kreatif melalui keterlibatan dalam berbagai event dan pameran.
- i. Menyusun *Roadmap Nagari Creative* dalam Bidang Pengembangan Ekraf.
- j. Membuat database digital ekonomi kreatif sub sektor Kriya, Fashion dan Kuliner.
- k. Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui workshop dan pelatihan.

Hambatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain:

1. Belum meratanya sebaran akomodasi di Kabupaten/Kota, sehingga tingkat hunian akomodasi terpusat pada Kabupaten/Kota tertentu saja.
2. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas;
3. Belum tertatanya DTW sebagai destinasi yang representatif;
4. Amenitas DTW yang masih terbatas (sarana prasarana di daerah DTW);
5. Posisi geografis Provinsi Sumatra Barat yang berada pada wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor;
6. Keterbatasan investasi di sektor pariwisata;
7. Pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu;
8. Kualitas SDM pariwisata yang masih rendah.
9. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatra Barat.
10. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada event dan pameran.
11. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
12. Kurang terjalannya komunikasi dengan *hexahelix* (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait, untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/ atau pelaksanaan promosi bersama.
2. Mendorong pertumbuhan usaha akomodasi (khususnya non Bintang) dan makan minum di Sumatra Barat melalui kemudahan dalam pemberian rekomendasi izin usaha.



3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimtek dan sertifikasi kompetensi dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
4. Mendorong peran CSR atau TJSLP dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitas destinasi dan desa wisata.
5. Mengembangkan konsep *safety destination* untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam berwisata khususnya pada DTW yang rawan terkena bencana.
6. Pemutakhiran data dan pengembangan instrumen pendataan pelaku ekonomi kreatif.
7. Fasilitas pelaku ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas.
8. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif.
9. Fasilitas pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.
10. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk forum/komunitas kreatif.
11. Menjalin kerjasama dengan *hexahelix* dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tercapai melalui pencapaian 2 sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 5.1.1 **Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat**

Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatra Barat. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Sumatra Barat terlihat dari peningkatan pendapatan daerah serta perputaran ekonomi lokal. Aktivitas wisata mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung seperti perhotelan, transportasi, restoran, usaha kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga jasa pemandu wisata.

Secara keseluruhan, pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Sumatra Barat melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan pengelolaan

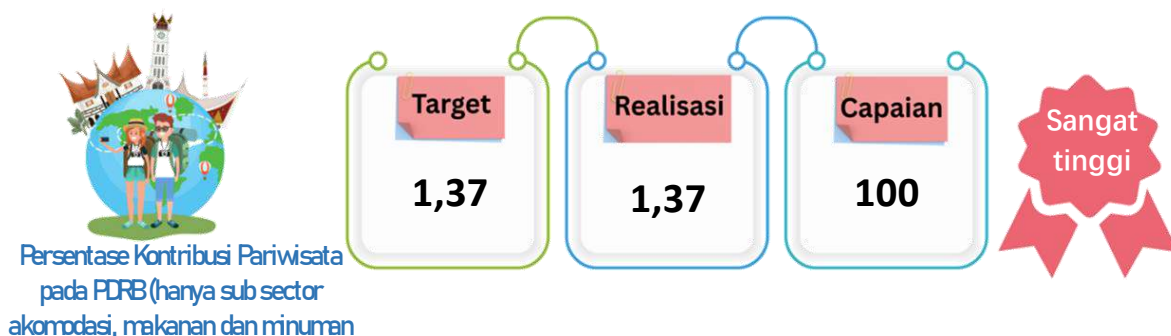




yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat setempat, sektor pariwisata berpotensi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat yang ketercapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang dibatasi pada sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 1,26%. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2024 serta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target, dilakukan penyesuaian target tahun 2025. Target kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **1,37 persen**, atau sama dengan realisasi tahun 2024. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2025 sebesar 1,37% diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui BRS Nomor 12/02/13/Th.XXIX tanggal 5 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB} = \frac{\text{Rp. 4,82 Triliun}}{\text{Rp. 352,19 Triliun}} \times 100\% = 1,37$$

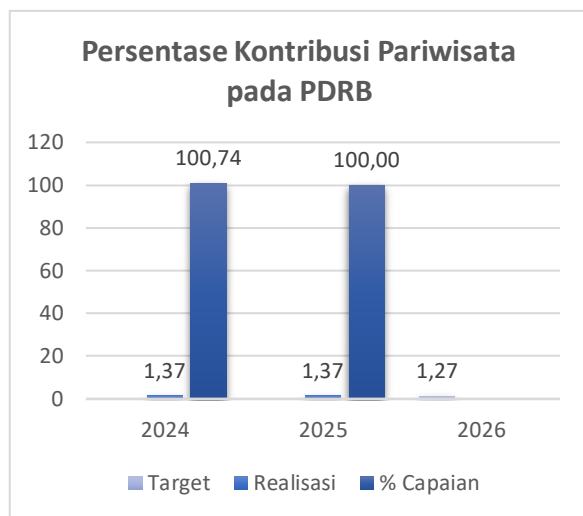
Keterangan:

PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum = Rp. 4,82 Triliun

PDRB Tahun 2025 = Rp. 352,19 Triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi pariwisata pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tercapai. Meskipun persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB tahun 2025 tercatat sama dengan tahun 2024, namun secara absolut PDRB sub sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 tercapai lebih tinggi Rp. 0,25 Triliun dibandingkan dengan tahun 2024.



Indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 1,27 persen. Namun, dikarenakan capaian indikator ini sejak tahun 2023 telah melampaui target tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyesuaikan kembali target indikator untuk periode 2024–2026 agar selaras dengan capaian kinerja yang realistis.

Kontribusi pariwisata pada PDRB Provinsi Sumatra Barat yang dilihat dari penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari 1,27% pada tahun 2021 menjadi 1,37 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024–2025 kontribusi tersebut cenderung stagnan di angka 1,37%, yang mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong penguatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Peningkatan 0,08% di tahun 2022 menjadi peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Perkembangan Kontribusi pariwisata pada PDRB Provinsi Sumatra Barat dari tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.56.

Grafik 3. 56 Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2021-2025



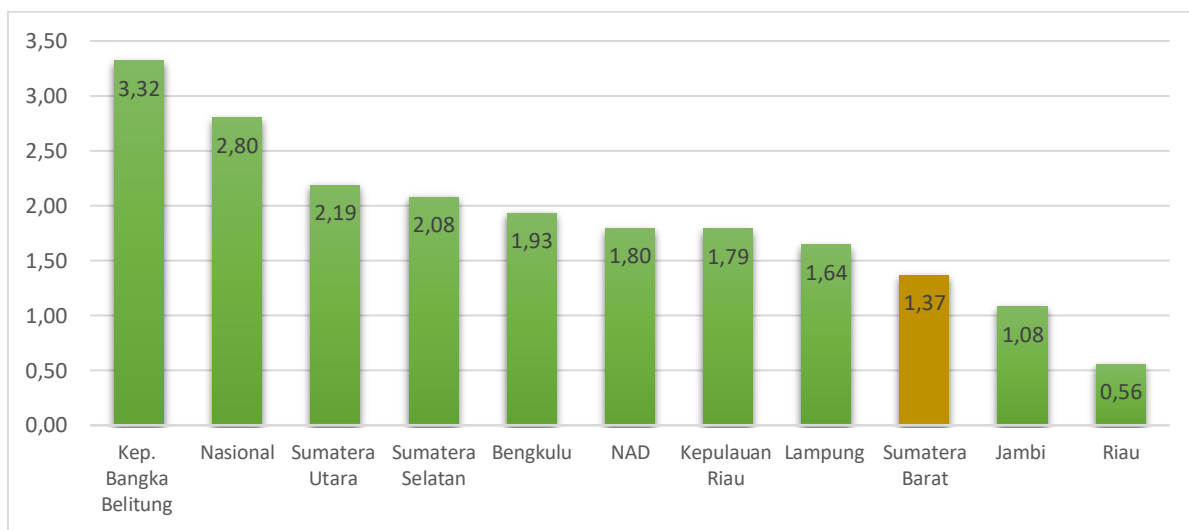
Sumber data: Sumatra Barat dalam Angka Tahun 2025 (BPS Sumbar)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,37%, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,80%. Dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatra, capaian Sumatra Barat lebih rendah dari Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Jambi dan Riau. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Sumatra Barat telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun masih memiliki ruang yang



cukup besar untuk ditingkatkan agar dapat mendekati rata-rata nasional maupun provinsi dengan kinerja pariwisata yang lebih kuat. Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.57.

Grafik 3. 57 Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2025



Sumber : Data BPS "Pertumbuhan Ekonomi" Provinsi se Sumatra yang Diolah

Peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat didukung oleh upaya berikut ini:

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatra Barat, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
2. Melaksanakan event pariwisata baik yang berskala regional, nasional maupun internasional oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Even pariwisata yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah:
 - a. Pasar Imlek di Padang;
 - b. Cap Go Meh di Padang;
 - c. Dukungan Event Rang Solok Baralek Gadang di Kota Solok;
 - d. Dukungan Event Festival 5 Danau di Kab. Solok;
 - e. Dukungan Event SISCa di Sawahlunto;
 - f. Dukungan Event SIMFest di Sawahlunto;
 - g. Dukungan Event Serak Gulo di Padang
 - h. Festival Kota Tua di Padang;
 - i. *World Islamic Entrepreneur Summit 2025* di Padang;



- j. Jambore Pokdarwis di Padang
3. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan *Famtrip* dengan Brunei Darussalam dan beberapa *influencer* tingkat regional, nasional dan internasional (Singapura).
4. Bertambahnya jalur penerbangan domestik dan internasional ke Sumatra Barat;
5. Memberikan 64 (enam puluh empat) rekomendasi perizinan usaha pariwisata.
6. Mendukung pengembangan DTWU dalam bentuk Penyusunan Pra Design dan *Guidelines* Kota Tua Padang serta pengadaan *Booth Ekraf* di Kawasan Kota Tua Padang.
7. Membuat video promosi untuk media sosial.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata melalui berbagai pelatihan.

Peningkatan kontribusi pariwisata dalam menunjang perekonomian Sumatra Barat masih terkendala pada hal berikut ini:

1. Belum meratanya sebaran akomodasi di Kabupaten/Kota, sehingga tingkat hunian akomodasi terpusat pada Kabupaten/Kota tertentu saja.
2. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas.
3. Belum tertatanya DTW sebagai destinasi yang representatif.
4. Amenitas DTW yang masih terbatas (sarana prasarana di daerah DTW).
5. Posisi geografis Provinsi Sumatra Barat yang berada pada wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
6. Keterbatasan investasi di sektor pariwisata.
7. Pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu.
8. Kualitas SDM pariwisata yang masih rendah.

Untuk ke depannya, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mendukung pencapaian sasaran kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholders terkait untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/atau pelaksanaan promosi bersama.
2. Mendorong pertumbuhan usaha akomodasi (khususnya non Bintang) dan makan minum di Sumatra Barat melalui kemudahan dalam pemberian rekomendasi izin usaha.
3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimtek dan sertifikasi kompetensi dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
4. Mendorong peran CSR atau TJSPL dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitas destinasi dan desa wisata.
5. Mengembangkan konsep *safety destination* untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam berwisata khususnya pada DTW yang rawan terkena bencana.



Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat, dilaksanakan 2 Program dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 7.052.514.000,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 31 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatra Barat	2	5	7.052.514.000,00	4.773.308.395,00
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	3	1.751.361.000,00	1.691.137.735,00
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	2	5.301.153.000,00	3.082.170.660,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.052.514.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 4.773.308.395,00 atau 67,68%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.279.205.605,00,- (32,32%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat yang tercapai 100% dengan realisasi anggaran 67,68% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Sasaran 5.1.2 **Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam** **Perekonomian Sumatera Barat**

Ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan ide sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan identitas dan budaya lokal. Bagi Provinsi Sumatera Barat, ekonomi kreatif memiliki potensi strategis karena didukung oleh kekayaan budaya, tradisi, seni, kuliner, serta kreativitas masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.

Secara yuridis, pengembangan ekonomi kreatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Undang-undang tersebut juga menempatkan ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga diperkuat melalui berbagai kebijakan turunan, termasuk peraturan presiden dan peraturan menteri yang mengatur arah pembangunan, rencana induk, serta pengelompokan subsektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan kebijakan tersebut, ekonomi kreatif mencakup sejumlah subsektor yang meliputi antara lain kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, seni rupa, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, film, animasi dan video, fotografi, musik, aplikasi, pengembangan permainan (game), penerbitan, periklanan, televisi dan radio. Sub sektor-sub sektor ini menjadi ruang utama bagi penciptaan nilai tambah ekonomi, pengembangan usaha berbasis kreativitas, serta penguatan keterkaitan dengan sektor lain, khususnya pariwisata.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 6,18%. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2024 (7,09%) serta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target, dilakukan penyesuaian target tahun 2025. Target





persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7,5%, atau 0,41 lebih tinggi dari realisasi tahun 2024. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat tahun 2025 dapat dilihat pada sebagai berikut:



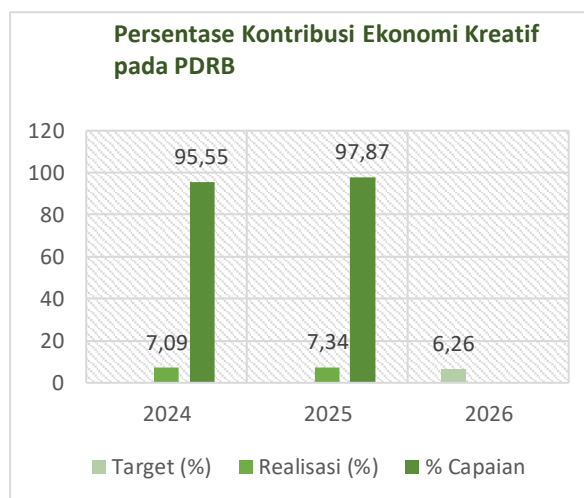
Realisasi indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2025 sebesar 7,34% diukur berdasarkan data nilai sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi Sumatra Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Provinsi Sumatra Barat dalam Angka 2026. Rincian distribusi PDRB ADHB sektor industri pengolahan yang dihitung ke dalam data nilai produksi ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

No	Lapangan Usaha	2025
Industri Pengolahan		7,34
1	Industri makanan dan minuman	4,45
2	Industri tekstil dan pakaian	1,97
3	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01
4	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00
5	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00
6	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0,84
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,06
9	Industri furniture	0,01

Sumber data: Provinsi Sumatra Barat Dalam angka 2026

Perhitungan capaian indikator kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian tahun 2024 dan 2025 relatif mendekati target yang ditetapkan. Walaupun belum mencapai target, persentase kontribusi ekonomi kreatif pada tahun 2025 mengalami peningkatan 0,25% dari tahun 2024. Hal ini didukung oleh peningkatan 0,07% pada industri makanan dan minuman, 0,01% pada Industri tekstil dan pakaian

Indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2026 di targetkan sebesar 6,26%. Realisasi indikator ini di tahun 2025 tercapai 1,08% melebihi target tahun 2026.



Untuk selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan penguatan berkelanjutan agar kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah tetap terjaga.

Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Sumatra Barat yang diukur dari 9 lapangan usaha pada sektor industri pengolahan menunjukkan kondisi berfluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan pada industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian. Sementara itu, Industri karet, barang dari karet dan plastik mengalami penurunan. Perkembangan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 3.32.

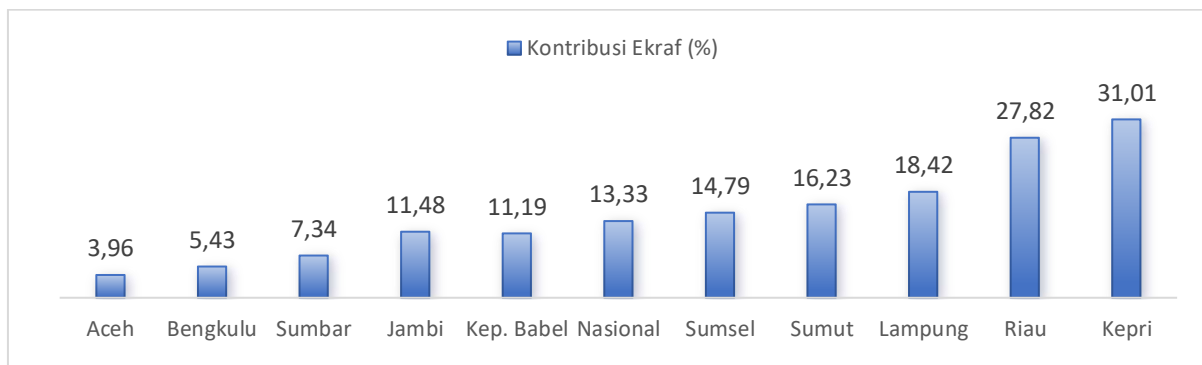
Tabel 3. 32 Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Industri Pengolahan		7,15	7,37	7,26	7,09	7,34
1	Industri makanan dan minuman	4,28	4,22	4,13	4,18	4,45
2	Industri tekstil dan pakaian	1,91	1,88	1,98	1,96	1,97
3	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1,09	1,07	0,96	0,87	0,84
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
9	Industri furniture	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber data: Sumatra Barat dalam Angka Tahun 2026 (BPS Sumbar)

Pada tahun 2025, Kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB pada struktur PDRB Sumatra Barat sebesar 7,34%, lebih rendah 5,99% dibandingkan dengan persentase kontribusi ekonomi kreatif dari sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia sebesar 13,33%. Dari provinsi yang ada di pulau Sumatra, persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Sumatra Barat berada pada urutan 8 (delapan) di atas Provinsi Bengkulu dan Aceh. Sedangkan persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tertinggi terdapat pada provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 31,01% yang jauh melampaui angka nasional.

Grafik 3. 58 Perbandingan Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong produktivitas pelaku ekonomi kreatif melalui keterlibatan dalam berbagai even dan pameran. Even ekonomi kreatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain :
 - a) Ramadhan *Runway* 2025 di Padang;
 - b) Festival Kuliner Paliko di Kab. Lima Puluh Kota;
 - c) Festival Silek Padusi di Kab. Pessel;
 - d) Festival Batik di Sawahlunto;
 - e) Pasa Ekraf di Kab. Dharmasraya;
 - f) Festival Ekraf di Padang;
 - g) Keikutsertaan pada Indonesia Fashion Week di Jakarta.
2. Menyusun *Roadmap Nagari Creative* dalam Bidang Pengembangan Ekraf;
3. Membuat database digital ekonomi kreatif sub sektor Kriya, Fashion dan Kuliner;
4. Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui workshop dan pelatihan.

Hambatan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ini pada PDRB diantaranya adalah:

1. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatra Barat.
2. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada even dan pameran.
3. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
4. Kurang terjalinnnya komunikasi dengan hexahelix (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ini pada PDRB adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data dan pengembangan instrument pendataan pelaku ekonomi kreatif.
2. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas.
3. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif.
4. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.
5. Mendorong Kabupaten/ Kota untuk membentuk forum/ komunitas kreatif.
6. Menjalin kerjasama dengan hexahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat, dilaksanakan 2 Program dengan 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 3.046.624.464,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatra Barat	4	5	3.046.624.464,00	2.978.881.627,00
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2	3	1.666.992.464,00	1.623.823.627,00

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	2	1.379.632.000,00	1.355.058.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.046.624.464,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.978.881.627,00,- atau 97,78%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 67.742.837,00,- (2,22%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat yang tercapai 97,87% dengan realisasi anggaran 97,78% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 50,23%.

Misi 6 **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**

Dalam rangka pencapaian misi 6 “meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan” ditetapkan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 6.1 Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata

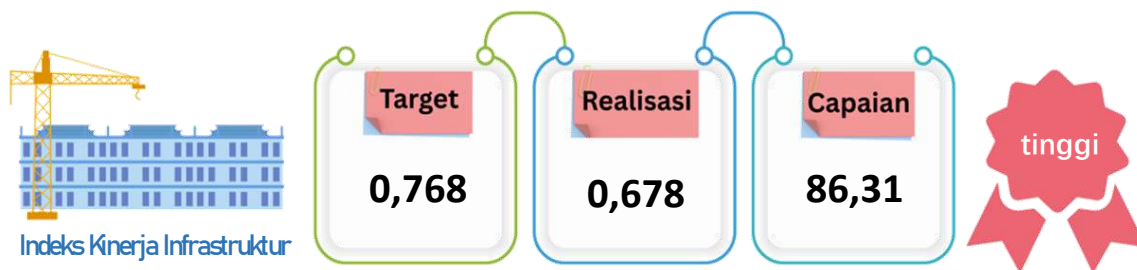
Perwujudan infrastruktur yang andal dan merata merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk kawasan pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan, wilayah pesisir, serta daerah rawan bencana, pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek tata ruang. Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumatra Barat.



Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bermaksud melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, terukur dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatra Barat dibagi menjadi enam garis besar yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi dan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Untuk mengetahui ketercapaian terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata digunakan indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur. Melalui indikator ini dapat diperoleh informasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Barat. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat daerah terkait.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indeks kinerja infrastruktur pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,786. Target tersebut meningkat sebesar 0,123 dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Pencapaian tujuan “terwujudnya infrastruktur handal dan merata” di tahun 2025 tergambar sebagai berikut:



Realisasi Indeks kinerja infrastruktur 0,678 diperoleh berdasarkan rata-rata dari pencapaian 5 sasaran (11 indikator kinerja) yang mendukung pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks kinerja infrastruktur} = \frac{7462}{11} = 0,678$$

Keterangan:

Rasio konektifitas = 0,693

Kemantapan jalan = 71,10%

Indeks Ketahanan Daerah= 0,58

IKLH = 80,12%

Akses Air Minum = 87,26%

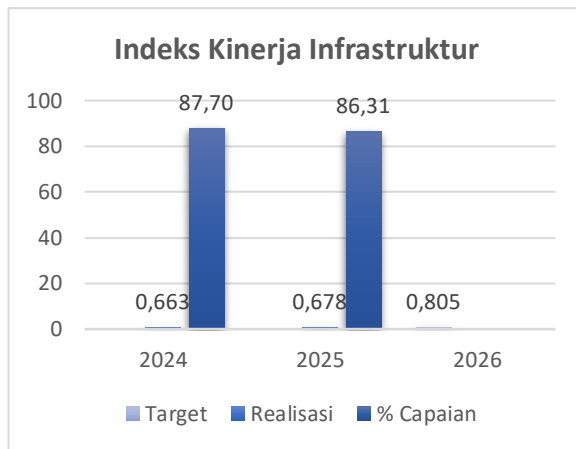
Akses Sanitasi Layak = 74,79%

Persentase bangunan strategis terbangun= 16,67%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi = 70,92%



Persentase Volume tampungan sumber-sumber air= 59,40%
 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 69,16%
 Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW = 89,70%



Perhitungan capaian indikator indeks kinerja infrastruktur menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator ini pada tahun 2024 dan 2025 relatif mendekati target yang ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan indeks kinerja infrastruktur sebesar 0,015 di tahun 2025 dan penurunan

capaian kinerja sebesar 1,39%.

Indeks kinerja infrastruktur tahun 2026 ditargetkan 0,805%. Sampai tahun 2025, indikator ini baru mencapai 84.22% dari target tahun 2026. Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan lebih mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan infrastruktur yang handal dan merata merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk mencapai 5 sasaran pendukung. Upaya tersebut secara terinci diuraikan pada masing-masing sasaran. Begitupun dengan hambatan dan upaya di masa yang akan datang juga diuraikan pada masing-masing sasaran pendukung.

Pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata didukung melalui pencapaian 5 sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, 2) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, 3) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, 4) meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, 5) meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:





Sasaran 6.1.1 **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi**

Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, tetapi juga pada keterpaduan antarjenis infrastruktur, antarwilayah, serta keterkaitannya dengan pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Infrastruktur yang terintegrasi adalah pembangunan fisik atau pun non fisik yang menghubungkan titik-titik simpul transportasi atau titik moda transportasi seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan atau bandar udara yang berfungsi sebagai tempat perpindahan moda. Namun dalam peningkatan infrastruktur simpul transportasi juga harus diiringi dengan pembangunan non fisik seperti pengaktifan dan penambahan jalur trayek angkutan darat dan laut yang menghubungkan dengan simpul transportasi. Pembangunan fisik dan non fisik yang menerapkan integrasi antar moda akan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna moda transportasi umum khususnya di Provinsi Sumatra Barat.

Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi perlu ditingkatkan untuk memastikan keterhubungan antarwilayah berjalan efektif, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, mendukung efisiensi ekonomi, meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Sumatra Barat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang keberhasilannya diukur berdasarkan pencapaian 2 indikator kinerja yaitu rasio konektivitas dan persentase kemandirian jalan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.34:





Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Rasio Konektivitas	0,691	0,693	100,29
Kemantapan Jalan	71	71,10	100,14
Rata-rata capaian			100,22

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian **100,22%** termasuk kategori keberhasilan **“sangat tinggi”**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas

Pada bidang transportasi, infrastruktur mencakup berbagai simpul transportasi seperti terminal, bandara, pelabuhan, stasiun serta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter, dermaga penyeberangan, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang terintegrasi di bidang transportasi dapat diartikan bahwa untuk semua simpul-simpul transportasi tersebut dapat saling terhubung secara fisik, operasional, dan sistem informasi, sehingga memudahkan perpindahan orang dan distribusi barang secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Agar infrastruktur transportasi tersebut terintegrasi diperlukan integrasi sarana antar simpul transportasi (Penyediaan Sarana Angkutan Antar Simpul Transportasi) berupa adanya angkutan umum yang dapat menghubungkan antar simpul transportasi. Angkutan umum yang melayani antar simpul Sumatra Barat terdiri dari:

- a. Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)
Adanya bus AKDP yang menghubungkan Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe B lainnya di Kabupaten/Kota di Sumatra Barat.
- b. Angkutan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan)
Adanya angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan antar Kabupaten/Kota.

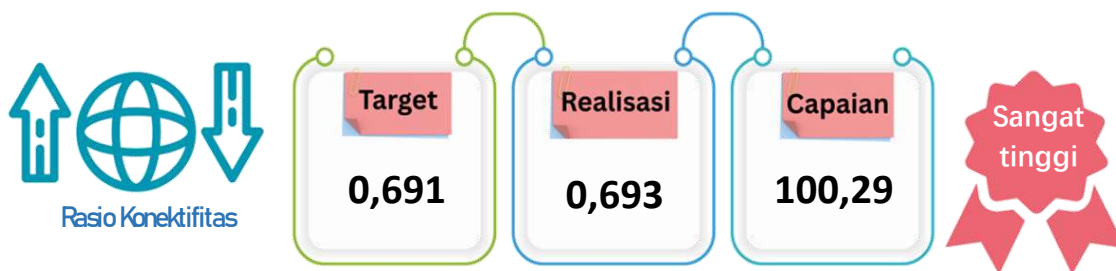
Rasio konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah terlayani oleh moda transportasi (darat dan laut) serta tingkat keterhubungan antar wilayah, kawasan, dan simpul transportasi. Peran rasio konektivitas dengan infrastruktur terintegrasi yaitu apabila rasio konektivitas semakin bagus, maka dapat diartikan infrastruktur (simpul transportasi, berupa: terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) sudah terintegrasi dengan baik. Beberapa variabel yang mempengaruhi rasio konektivitas Sumatra Barat yaitu angkutan





jalan, dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target rasio konektivitas pada tahun 2025 ditetapkan 0,691. Target ini lebih tinggi 0,009 dibandingkan dengan rasio konektivitas tahun 2024. Target 0,691 menunjukkan 69,1% wilayah di Sumatra Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Pencapaian indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur tergambar sebagai berikut:



Rasio konektivitas 0,693 menunjukkan sebanyak 69,3% wilayah di Sumatra Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Realisasi indikator kinerja rasio konektivitas diukur berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat dengan formula perhitungan mengacu pada Permendagri 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

Rasio konektivitas Provinsi	=	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
	=	(0,776 x 70) + (0,5 x 30)
	=	54,32 + 15
	=	69,3% atau 0,693

Keterangan:

IK 1 (Angkutan Jalan)	=	$\frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd Provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut}}$
	=	$\frac{142 \times 1}{183}$
	=	0,776

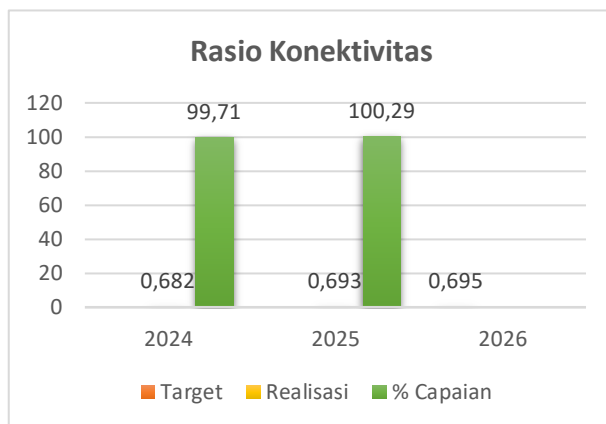
IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)	=	$\frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tsb x bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut}}$
	=	$\frac{4 \times 0,5}{4}$
	=	0,5

- Bobot Trayek**
- a Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
 - b Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
 - c Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Bobot angkutan laut dan penyeberangan = 30

Bobot angkutan jalan = 70

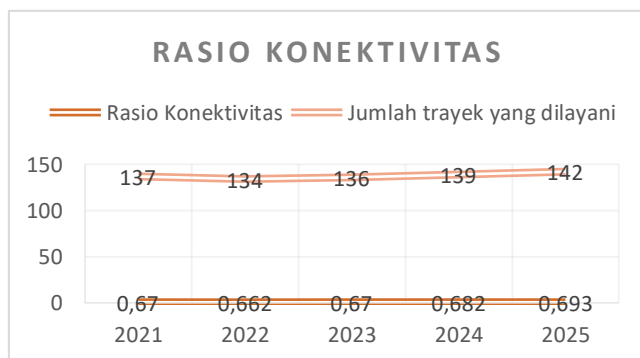
Perhitungan capaian indikator kinerja rasio konektivitas menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Untuk tahun 2025, rasio konektivitas tercapai melebihi target yang ditetapkan, meningkat 0,011 dari rasio konektivitas di tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah trayek yang dilayani yaitu menjadi 142 trayek pada tahun 2025 atau meningkat 3 trayek dari tahun sebelumnya.



Rasio konektivitas pada tahun 2026 ditargetkan 0,695. Dengan capaian rasio konektivitas tahun 2025 sebesar 0,693, pencapaian ini telah mencapai 99,71% dari target 0,695 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk

mencapai target tersebut, dibutuhkan peningkatan 0,002, yang dinilai realistis dan optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui penguatan layanan transportasi dan pengembangan trayek secara konsisten.

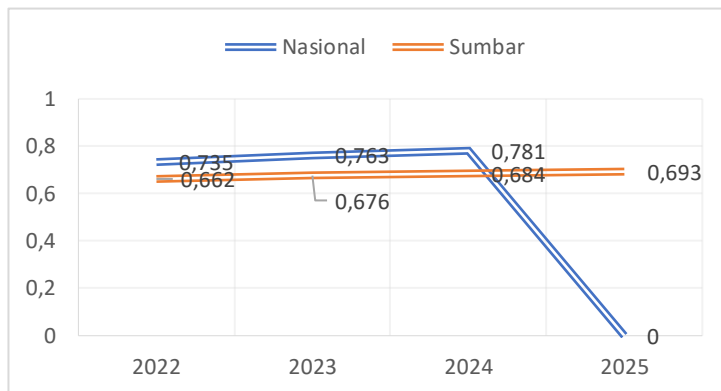
Rasio konektivitas dari tahun 2021-2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, terjadi penurunan 0,008 di tahun 2022 dan kembali meningkat mulai tahun 2023-2025. Peningkatan



rasio konektivitas di tahun 2023-2025 sejalan dengan peningkatan jumlah trayek yang dilayani. Sampai tahun 2025 sebanyak 69,3% wilayah di Sumatra Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut dengan jumlah trayek yang dilayani sebanyak 142 trayek.

Untuk tahun 2025, rasio konektivitas Provinsi Sumatra Barat tidak dapat dibandingkan dengan nasional, karena rasio konektivitas nasional belum dirilis. Sementara itu, dari tahun 2022-2024

tercatat .rasio konektivitas Provinsi Sumatra Barat tercapai di bawah rasio konektivitas Nasional. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan rumus perhitungan rasio konektivitas



Sumber data: Kementerian Perhubungan

Nasional dan Pemerintah Daerah. Kementerian Perhubungan yang menghitung rasio konektivitas nasional memiliki rumus sendiri sementara Pemerintah Daerah menggunakan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020.

Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui upaya berikut ini:

1. Peningkatan prasarana perhubungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemasangan rambu lalu lintas ukuran 60 x 60 sebanyak 64 buah serta 2 buah rambu RPPJ pada ruas jalan provinsi P.78 Koto Mambang – Balingka (Malalak).
 - b. Pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan provinsi P.068 Padang Sawah – Kumpulan.
 - c. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ). RIJLLAJ menghasilkan arahan pengembangan jaringan jalan provinsi, penguatan peran angkutan umum, serta penetapan simpul-simpul transportasi antarwilayah.
 - d. Pembukaan lintasan baru Kayu Tanam – Duku – Padang pada tanggal 1 Januari 2026.
2. Adanya inovasi pelayanan “Klinik Saiyo Sakato” untuk mempercepat proses perizinan angkutan umum, mempermudah akses informasi dan konsultasi bagi pelaku usaha transportasi, serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengawasan dan pembinaan sektor transportasi.
3. Meningkatkan kualitas angkutan umum dengan melaksanakan pemeriksaan kendaraan secara berkala di terminal dan di jalan, bekerja sama dengan instansi terkait.
4. Mendukung peningkatan akses transportasi di daerah terpencil melalui pengawasan dan pembinaan layanan Angkutan Perintis, baik angkutan darat (DAMRI), angkutan laut perintis, maupun angkutan penyeberangan.
5. Melaksanakan pelayanan perizinan angkutan umum sesuai dengan kewenangan provinsi, antara lain penerbitan Surat Keputusan (SK) trayek, penerbitan dan perpanjangan Kartu Pengawasan (KP), serta persetujuan penambahan armada.

6. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi perizinan secara aktif dengan mendatangi perusahaan angkutan yang belum melengkapi perizinan, memberikan pendampingan, serta membantu proses pengurusan perizinan agar seluruh angkutan umum dapat beroperasi secara tertib dan sesuai ketentuan.
7. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) untuk memudahkan pelaksanaan manajemen perizinan angkutan di Provinsi Sumatra Barat
8. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi usulan trayek angkutan perintis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
9. Melaksanakan pengawasan operasional terminal guna memastikan pelayanan berjalan dengan tertib dan optimal.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah antara lain:

1. Masih terdapat trayek angkutan yang telah ditetapkan namun tidak dilayani secara rutin oleh operator transportasi. Kondisi ini menyebabkan keterhubungan antarwilayah pada lintasan tertentu belum berjalan optimal.
2. Masih banyak perusahaan angkutan umum yang belum melengkapi persyaratan perizinan sesuai ketentuan, sehingga tidak memiliki izin operasional yang sah. Hal ini berdampak pada keterbatasan pengendalian, pembinaan, dan penataan layanan angkutan umum.
3. Terdapat angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga data operasional angkutan menjadi tidak akurat. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam memastikan apakah suatu lintasan trayek masih aktif dilayani, serta berdampak pada perhitungan indikator konektivitas, khususnya rasio jumlah lintasan trayek yang beroperasi.
4. Masih kurangnya ketersediaan angkutan kota dan angkutan perdesaan sebagai pengumpan dari dan ke terminal menyebabkan akses lanjutan menuju tujuan akhir penumpang belum optimal.
5. Pengawasan terhadap operasional angkutan umum belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap frekuensi pengawasan di lapangan, penegakan kepatuhan operator, serta kualitas layanan angkutan secara keseluruhan.
6. Luas wilayah, kondisi topografi, serta adanya wilayah terpencil dan kepulauan di Provinsi Sumatra Barat menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan angkutan yang merata dan berkelanjutan.
7. Pada beberapa lintasan, trayek dengan volume penumpang rendah, minat operator untuk beroperasi masih terbatas karena pertimbangan keekonomian usaha.



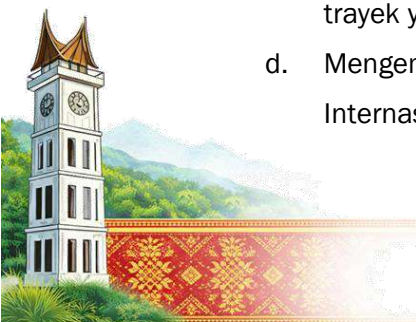
Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Layanan Angkutan

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum agar mengisi kembali trayek-trayek yang saat ini belum dilayani oleh operator, guna menjaga keterhubungan antarwilayah.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap angkutan AKDP, AJDP, dan angkutan umum lainnya melalui pengawasan langsung ke perusahaan angkutan, serta memberikan teguran kepada operator yang tidak memperpanjang Kartu Pengawasan (KP) maupun izin trayek.
- c. Melaksanakan pengawasan terpadu (razia) terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP, izin trayek, maupun angkutan yang tidak laik jalan, guna menjamin keselamatan dan kepastian layanan.
- d. Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait dalam rangka penertiban angkutan tidak resmi (travel liar) yang beroperasi dan menurunkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota untuk membangkitkan kembali angkutan kota dan angkutan pedesaan sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang mendukung kinerja angkutan AKDP dan AKAP.
- f. Melakukan evaluasi dan optimalisasi trayek angkutan umum agar sesuai dengan kebutuhan pergerakan masyarakat dan perkembangan wilayah.
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terminal tipe B, baik melalui pelatihan internal maupun kerja sama dengan pihak eksternal, guna meningkatkan kualitas pelayanan terminal.

2. Pengembangan Program Strategis dan Inovasi Konektivitas

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) sebagai acuan pengembangan konektivitas antarwilayah secara terarah dan berkelanjutan.
- b. Menyediakan subsidi angkutan perintis untuk membuka akses transportasi pada wilayah yang belum terlayani secara memadai.
- c. Menerapkan layanan angkutan AKDP dengan skema Buy The Service (BTS) pada trayek-trayek yang sepi penumpang atau belum dilayani operator.
- d. Mengembangkan integrasi antar dan intermoda transportasi di kawasan Bandara Internasional Minangkabau guna mempermudah pergerakan penumpang.



- e. Mengembangkan konsep terminal terpadu berbasis mix use, sehingga terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi.
- f. Mengembangkan angkutan umum massal, misalnya Trans Paliko (Payakumbuh – Lima Puluh Kota) sebagai layanan transportasi berbasis subsidi pada kawasan aglomerasi.
- g. Mendorong inovasi INKA PESTA (Integrasi Kereta Api Penunjang Pariwisata) melalui integrasi layanan kereta api dengan moda shuttle bus pariwisata di Stasiun Simpang Haru – Kawasan Wisata dan Stasiun Kayu Tanam – Kawasan wisata – Terminal Bukit Surungan Padang Panjang.

2. Persentase Kemantapan Jalan

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyebutkan jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi jalan dan pemeliharaan jalan. Dalam penyelenggaraan jalan wajib melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala guna mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan. Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan baik dan sedang dengan jenis kerusakan dalam kondisi baik (retak, tambalan dan lubang) dan sedang (retak, tambalan, alur, lubang) dengan persentase luasan kerusakan 0-12% untuk kondisi baik. Persentase kemantapan jalan merupakan indikator untuk mengukur kualitas layanan suatu ruas jalan. Secara sederhana, kemantapan jalan menunjukkan sejauh mana sebuah jalan siap dan layak digunakan untuk melayani arus lalu lintas secara aman dan nyaman

Untuk menjaga kemantapan jalan yang dilakukan adalah melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar kemantapan jalan selalu terjaga, namun untuk meningkatkan kemantapan jalan harus dilakukan pembangunan jalan. Berdasarkan SK Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan status jalan menurut fungsi dan status sebagai jalan Provinsi adalah sepanjang 1690.50 Km.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target persentase kemantapan jalan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 81%. Namun, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan kondisi penganggaran tahun 2025, target persentase kemantapan jalan disesuaikan menjadi 71% atau lebih rendah 10% dibandingkan target yang tercantum dalam RPJMD. Pencapaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan tergambar sebagai berikut:





Kemantapan Jalan



Realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan sebesar 71,10% diperoleh berdasarkan hasil survei IRMS terhadap 1.690,50 Km jalan provinsi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun 2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kemantapan Jalan} = \frac{1.202,01 \text{ Km}}{1690,5 \text{ Km}} \times 100\% = 71,10\%$$

Keterangan:

Jumlah total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang tahun 2025= 1.202,01 Km

Total panjang jalan sesuai SK Jalan Provinsi= 1690,5 Km

Rincian kondisi jalan kewenangan Provinsi disajikan pada tabel 3.35.



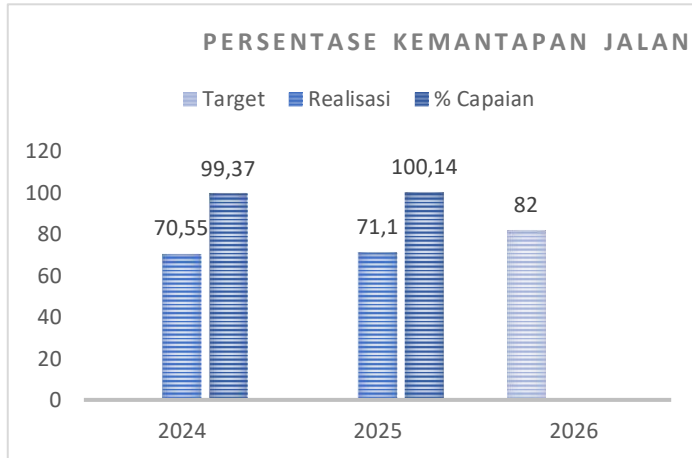
Tabel 3. 35 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025

Balai Name/ Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
		1,690,50	49,18	0,00	1,306,76	0,00	980,45	221,57	121,89	32,04	1,202,01	153,93	71,10%	9,1%
007	Simancung - Tanjung Ampalu	10,62	0,15	0,00	10,47	0,00	6,17	3,75	0,70	0,00	9,92	0,70	93,4%	6,6%
008	Tanjung Ampalu - Sinjunjung	20,00	0,50	0,00	19,50	0,00	13,90	4,90	1,20	0,00	18,80	1,20	94,0%	6,0%
010	Simp, Sikabau - Simp, Koto Baru	29,00	0,16	0,00	28,84	0,00	18,80	5,40	3,10	1,70	24,20	4,80	83,4%	16,6%
011	Simp, Koto Baru - Tj, Simalidu	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	6,10	3,70	1,60	0,50	9,80	2,10	82,4%	17,6%
012	Simp, Koto Baru - Junction	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	4,50	0,50	0,40	0,00	5,00	0,40	92,6%	7,4%
018	Inderapura - Muara Sakai	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	6,60	0,40	0,30	0,00	7,00	0,30	95,9%	4,1%
025	Manggopoh - Padang Luar	69,43	0,00	0,00	69,43	0,00	42,53	15,20	11,50	0,20	57,73	11,70	83,1%	16,9%
028	Sicincin - Kurai Taji	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	8,94	5,00	2,40	0,10	13,94	2,50	84,8%	15,2%
031	Panti - Simpang Empat	74,23	0,00	0,00	74,23	0,00	47,83	16,90	9,50	0,00	64,73	9,50	87,2%	12,8%
033.1	Simpang Empat - Sasak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	12,10	7,30	0,60	0,00	19,40	0,60	97,0%	3,0%
033.2	Sasak - Maligi	21,20	3,00	0,00	4,65	0,00	3,45	1,50	0,30	2,40	4,95	2,70	64,7%	35,3%
034	Air Balam - Air Bangis	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	12,50	0,10	0,00	0,00	12,60	0,00	100,0%	0,0%
035	Kubu Kerambil - Bts, Batusangkar (Simp, Kiambang)	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	6,60	8,40	3,50	0,00	15,00	3,50	81,1%	18,9%
036	Baso - Bts, Batusangkar (Balai Selasa)	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	13,90	6,50	7,30	0,80	20,40	8,10	71,6%	28,4%
037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	5,50	2,80	2,00	0,10	8,30	2,10	79,8%	20,2%
038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	29,60	2,33	0,00	27,27	0,00	19,57	7,61	2,42	0,00	27,18	2,42	91,8%	8,2%
039	Guguk Cino - Sitangkai	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	4,10	6,30	4,00	0,30	10,40	4,30	70,7%	29,3%
040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	5,60	6,40	5,40	0,10	12,00	5,50	68,6%	31,4%
044	Bts, Kota Payakumbuh - Sitangkai	44,00	2,87	0,00	41,13	0,00	28,97	7,30	4,10	3,63	36,27	7,73	82,4%	17,6%
054	Junction - Abai Siat (Bts, Jambi)	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	12,40	0,20	0,00	0,00	12,60	0,00	100,0%	0,0%
055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	2,90	1,30	0,20	0,00	4,20	0,20	95,5%	4,5%
056.1	Simp, Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	2,00	0,00	18,00	0,00	14,90	4,10	1,00	0,00	19,00	1,00	95,0%	5,0%

Balai Name/ Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	7,30	6,70	3,00	0,00	14,00	3,00	82,4%	17,6%
056.3	Abai Sangir - Sei, Dareh	73,65	0,40	0,00	26,45	0,00	18,75	4,30	3,30	0,50	23,05	3,80	85,8%	14,2%
068	Padang Sawah - Kumpulan	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	29,50	4,10	2,90	0,00	33,60	2,90	92,1%	7,9%
069.1	Bts, Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	42,75	0,00	0,00	42,64	0,00	36,87	4,18	1,30	0,30	41,04	1,60	96,2%	3,8%
069.2	Sp, Pua Data - Sp, Sei Dadok - Museum PDRI	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	1,87	0,80	1,50	1,00	2,67	2,50	51,6%	48,4%
070	Batu Sangkar - Ombilin	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	6,90	2,50	7,30	0,30	9,40	7,60	55,3%	44,7%
071	Solok - Alahan Panjang	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	33,30	8,90	4,50	0,10	42,20	4,60	90,2%	9,8%
072	Lubuk Basung - Sungai Limau	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	23,90	3,70	0,90	0,10	27,60	1,00	96,5%	3,5%
073	Pasar Baru - Alahan Panjang	44,95	0,00	0,00	44,95	0,00	42,55	0,80	1,40	0,20	43,35	1,60	96,4%	3,6%
075	Simp, Duku (Ketaping) - Pariaman	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,10	0,40	0,00	0,00	22,50	0,00	100,0%	0,0%
076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	5,41	0,00	54,09	0,00	52,47	4,82	1,23	0,98	57,29	2,21	96,3%	3,7%
078	Simp, Koto Mambang - Balingka	39,40	0,30	0,00	39,10	0,00	33,40	1,00	0,30	4,70	34,40	5,00	87,3%	12,7%
079	Simp, Baso - Piladang	10,50	0,47	0,00	10,02	0,00	7,45	1,80	1,25	0,00	9,25	1,25	88,1%	11,9%
080	Matur - Palembang	20,70	0,25	0,00	20,45	0,00	13,68	4,20	2,32	0,50	17,88	2,82	86,4%	13,6%
081	Palembayan - Palupuh (Simp, Patai)	13,30	0,10	0,00	13,20	0,00	12,00	0,80	0,50	0,00	12,80	0,50	96,2%	3,8%
082.1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	94,00	1,45	0,00	18,15	0,00	9,80	5,80	4,00	0,00	15,60	4,00	79,6%	20,4%
082.2	Simp, Sikundua - Garabak	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
083.1	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	43,20	0,10	0,80	0,00	43,30	0,80	98,2%	1,8%
083.2	Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0,52	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	100,0%	0,0%
083.3	Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,90	0,20	0,00	0,00	1,10	0,00	100,0%	0,0%
084	Jalan Lingkar Selatan - Bts, Payakumbuh	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	2,58	3,70	1,70	0,00	6,28	1,70	78,7%	21,3%
085	Balai Panjang - Sp, Pdg Karambia - Tj, Bungo (TPA)	5,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	1,40	0,50	0,10	4,40	0,60	88,0%	12,0%
086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	29,30	3,36	0,00	13,10	0,00	11,65	3,10	1,30	0,40	14,75	1,70	89,7%	10,3%
087	Duku - Sicincin	20,58	0,00	0,00	2,90	0,00	2,70	0,20	0,00	0,00	2,90	0,00	100,0%	0,0%

Balai Name/ Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
088	Padang Koto Gadang - Palembayan	31,00	0,20	0,00	30,80	0,00	25,40	3,50	2,00	0,10	28,90	2,10	93,2%	6,8%
090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	25,00	2,03	0,00	16,94	0,00	11,27	4,78	1,94	0,99	16,05	2,93	84,6%	15,4%
091	Smp, Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14,65	0,03	0,00	9,16	0,00	4,70	2,49	1,50	0,50	7,19	2,00	78,2%	21,8%
092	Simp, Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	30,40	2,30	0,10	0,00	32,70	0,10	99,7%	0,3%
093	Singkarak - Arian - Tj, Balit - Padang Ganting	38,75	1,09	0,00	37,10	0,00	27,75	7,60	2,10	0,74	35,35	2,84	92,6%	7,4%
094	Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	3,61	1,30	0,70	0,00	4,91	0,70	87,5%	12,5%
095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	27,20	5,30	0,50	0,00	32,50	0,50	98,5%	1,5%
096	Lb Sikaping (Simp, Daliak) - Talu (Simp, Gantiang)	33,00	0,95	0,00	23,69	0,00	23,54	1,00	0,10	0,00	24,54	0,10	99,6%	0,4%
097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	0,15	0,00	34,73	0,00	34,58	0,20	0,10	0,00	34,78	0,10	99,7%	0,3%
098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	11,70	0,10	0,20	0,00	11,80	0,20	98,3%	1,7%
099	Purus - Bandara International Minangkabau	16,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	100,0%	0,0%
100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,0%	0,0%
101	Simp, Tanjung Air - Muaro Sei, Lolo - Gelugur	47,00	0,40	0,00	33,20	0,00	22,07	1,60	2,53	7,40	23,67	9,93	70,4%	29,6%
102	Rawang - Talawi	12,90	2,19	0,00	8,26	0,00	7,41	1,79	0,50	0,75	9,20	1,25	88,0%	12,0%
103	Simp Sp II - Kantor Camat	5,10	4,12	0,00	0,00	0,00	3,22	0,10	0,80	0,00	3,32	0,80	80,6%	19,4%
104	Kantor Camat - Berkat	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	100,0%	0,0%
105	Bonjol - Suliki	20,80	0,80	0,00	2,20	0,00	0,50	1,00	0,90	0,60	1,50	1,50	50,0%	50,0%
106	Unggan - Pamusian - Tapi Selo	26,06	3,88	0,00	11,91	0,00	7,49	4,95	2,60	0,75	12,44	3,35	78,8%	21,2%
107	Tiku - Sasak	90,00	2,20	0,00	25,50	0,00	18,20	4,50	3,80	1,20	22,70	5,00	81,9%	18,1%
		1,690,50	49,18	0,00	1,306,76	0,00	980,45	221,57	121,89	32,04	1,202,01	153,93	71,1%	9,1%

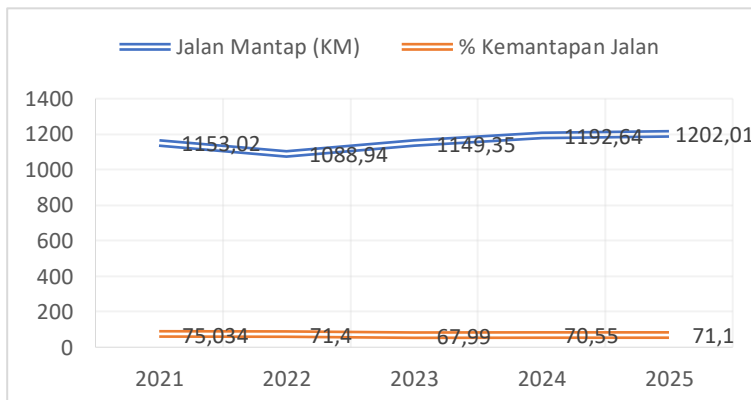
Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Persentase kemantapan jalan di tahun 2025 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian yang >100%. Jika dibandingkan



dengan tahun 2024, terjadi peningkatan panjang jalan dengan kondisi mantap sepanjang 9,37 Km menjadi 1.202,01 Km atau 71,10% di tahun 2025.

Pada tahun 2026, Persentase kemantapan jalan ditargetkan tercapai 82%. Namun, di tahun

2025 persentase kemantapan jalan baru sebesar 71,10% menunjukkan pencapaian 86,71% dari target tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan panjang jalan dengan kondisi mantap ke depannya.



Kemantapan jalan Provinsi Sumatra Barat pada periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 64,08 Km. Selanjutnya, pada tahun 2023-2025 kondisi

kemantapan jalan kembali mengalami peningkatan dengan besaran kenaikan yang bervariasi setiap tahunnya. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap tertinggi terjadi di tahun 2023. Sejalan dengan perubahan panjang jalan dalam kondisi mantap tersebut, persentase kemantapan jalan Provinsi Sumatra Barat juga menunjukkan pola fluktuatif selama periode tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2025 untuk meningkatkan kemantapan jalan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Membangun Jalan sepanjang 6,52 Km yang terbagi kedalam 7 ruas Jalan yaitu:

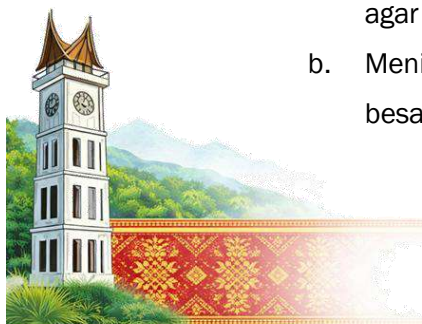
- a) Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)
- b) Ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)
- c) Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076)
- d) Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)
- e) Ruas Sasak – Maligi (P.033.2)
- f) Ruas Purus - BIM (P.099)
- g) Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
- 2) Melakukan Rekonstruksi Jalan 8,94 Km di 8 ruas jalan yaitu:
 - a) Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)
 - b) Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056)
 - c) Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)
 - d) Ruas Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo – Gelugur (P.101)
 - e) Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)
 - f) Ruas Jalan Sijunjung - Tanah Badantung (P.055)
 - g) Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)
 - h) Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) .
- 3) Melakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1690,5 Km.
- 4) Melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 9,38 Km dalam 18 Ruas Jalan Provinsi.
- b. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait dan Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan dan penanganan jalan.
- c. Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN)

Dalam meningkatkan kemantapan jalan Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatra menghadapi beberapa kendala/hambatan berikut:

1. Keterbatasan Anggaran yang di Alokasikan untuk meningkatkan Kemantapan Jalan
2. Daerah Sumatra Barat yang merupakan daerah rawan bencana yang terjadi tiap tahun di lokasi Ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi
3. Belum tersedianya rencana pembangunan jalan dan utilitas secara terintegrasi.

Untuk meningkatkan kemantapan jalan, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sumber Pendanaan Non-APBD (DAK, dana Inpres, dana APBN) melalui:
 - a. Secara proaktif mengusulkan ruas-ruas strategis (pendukung ekonomi/wisata) agar pembangunannya dibiayai oleh APBN melalui instruksi presiden.
 - b. Meningkatkan kualitas usulan teknis agar mendapatkan porsi DAK yang lebih besar dari pemerintah pusat.





- c. Menjajaki pelibatan swasta untuk pembangunan infrastruktur di kawasan industri atau pelabuhan.
2. Mengusulkan pengalihan status jalan provinsi yang memiliki beban lalu lintas sangat tinggi dan fungsi strategis nasional (seperti jalur logistik lintas provinsi) menjadi Jalan Nasional, agar beban pemeliharaannya diambil alih oleh APBN

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dilaksanakan 5 Program dengan 13 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 244.730.092.172,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 36 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	13	18	244.730.092.172,00	229.413.697.054,00
1	Program Penyelenggaraan Jalan			241.464.868.800,00	226.262.725.564,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8	12	1.742.471.372,00	1.628.334.490,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3	3	3.172.000,00	3.104.000,00
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	2	2.880.000,00	2.833.000,00
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	1	1.516.700.000,00	1.516.700.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 244.730.092.172,00,- terealisasi sebesar Rp. 229.413.697.054,00,- atau 93,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.316.395.118,00,- (6,26%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang tercapai 100,22% dengan realisasi anggaran 93,74% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 66,20%.

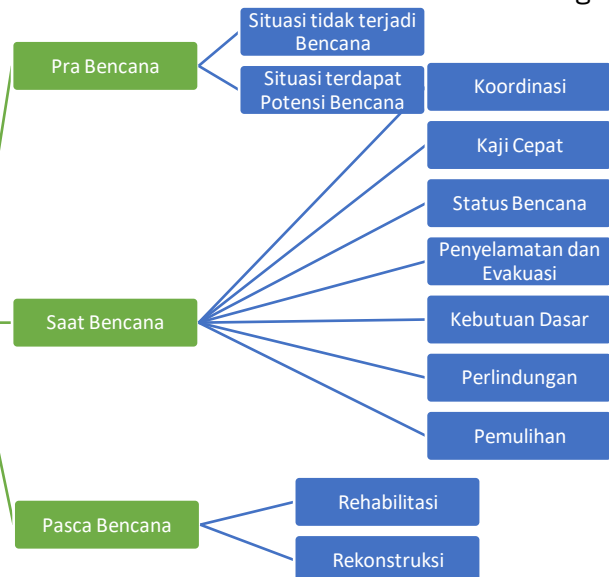




Sasaran 6.1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Provinsi Sumatra Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung api. Kondisi geografis yang berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik serta karakteristik topografi yang didominasi oleh pegunungan dan daerah aliran sungai

meningkatkan potensi terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan serangkaian kegiatan untuk tanggap terhadap



bencana melalui prosedur yang cepat, tepat dan efisien. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana sendiri menjadi bagian pada tahap pra bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” sebagai sasaran yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah



administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengukuran IKD mengacu pada 71 Indikator terbitan BNPB tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Perda Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 5 Tahun 2007 RPJMD, Renstra, Renja
		2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Perda SOTK Perda OPD Notulen Rapat, PKS (Sekretaris) penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota
		3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	SK PRB Notulen Rapat Notulen Rapat ADRT Forum PRB
		4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	SOP Draft SOP Pusdalops DIBI (Laporan), Laporan PUSDALOPS (Perkejadian) Foto Informasi Swasta (BUMN)
		5 Peraturan Daerah tentang RPB	Draft RPB Draft Pergub Perda APBDP 2016 - 2020 Notulen Rapat Pembahasan KRB, Undangan Rapat
		6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Perda RTRW Perda RTRW Perda RTRW UU Tataruang no 26 tahun 2007 dan perda RTRW NO. 13 tahun 2012, PP 21 tahun 2021
		7 BPBD	Perda No.9 tahun 2009 SOTK BPBD Sumbar Data Pegawai, Aset dan Anggaran (DPA) SK Tanggap Darurat
		8 Forum PRB	SK Forum PRB SK Forum PRB ADRT, Struktur Organisasi Forum PRB DPA terkait Forum PRB
		9 Komitmen DPRD terhadap PRB	Risalah Rapat DPRD Komisi IV DPA, Matriks Renja Rapat Kerja Mitra Komisi IV (Risalah) Usulan POKIR (Daftar POKIR)
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana Peta Rawan Bencana Draft Dokumen PRB Dokumen KRB (Kajian Risiko)

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Bencana) Laporan Kejadian Bencana, KRB (Kajian Risiko Bencana) Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) Draft RPB, KRB Draft RPB
		12	Peta Kapasitas dan kajiannya Dokumen KRB, Laporan Kejadian Bencana Peta Kajian Risiko Bencana Draft RPB dan KRB RPB dan KRB
		13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Draft RPB Undangan Rapat Pembahasan, Laporan Kegiatan Draft Pergub RPB Renja OPD
		14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Screenshoot , Foto, Baliho, SOP EWS Buku DIBI Draft/Dokumen RPB Dokumen KRB, RPB
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya Undangan KSB Seluruh Kabupaten/Kota, (Daftar hadir) Daftar hadir, Foto Dokumentasi Foto Dokumentasi (COVID-19), SCB Foto Dokumentasi (SCB)
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Perka Perka Perka Dokumentasi (Apel Siaga)
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis SOP Dokumentasi SOP Daftar Laporan
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional Laporan DIBI/Pusdalops Laporan Foro Pelatihan Laporan LKPj
		19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB Sertifikat pelatihan TRC Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Sertifikat TOT
		20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan MOU Kabupaten/Kota MOU Kabupaten/Kota
		21	Kajian kebutuhan peralatan dan
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana		



No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
		22 logistik kebencanaan Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD Provinsi Sumbar
		23 Penyimpanan/pegudang Logistik PB	Foto gudang logistik SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BPBD Provinsi Sumbar Perka Manajemen Gudang dan Perka No. 13 th 2008 SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	BPBD Provinsi Sumbar
		26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Dinas Pangan Renkon RPB Dokumen Renkon
		27 Penataan ruang berbasis PRB	
		28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	SOTK Prov. Sumbar SIMTARU
		29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Surat Edaran Gubernur dan Nota kesepakatan
		30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	Dokumentasi Dokumen HOSDIP Dokumen HOSDIP Sertifikat
		31 Desa Tangguh Bencana	SPAB Dokumentasi Destana Dokumentasi Destana
		32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	SE Gub (Bio Pori) SE Gub (Bio Pori), Dokumentasi (DLH)
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	33 Perlindungan daerah tangkapan air	Peraturan No. 17 tahun 2019 Dokumentasi (Embung dan Pengendalian Banjir)
		34 Restorasi sungai	Peraturan No. 17 tahun 2019, Perda tentang RPPLH SUMBAR Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi dan Luasan Lahan
		35 Penguatan lereng	Permen PU no 4 tahun 2015 (Satuan Wilayah Sungai) Dokumentasi Sebelum dan Sesudah Dokumentasi (Sebelum Penguatan dan Setelah) Dokumentasi (Sebelum dan Sesudah)
		36 Penegakan hukum	
		37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Dokumentasi Komunitas Peduli Sungai, aksi susur sungai

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			Kegiatan OP (Pergub SOTK) DPA Dokumentasi Kegiatan
		38 Pemantauan berkala hulu sungai	Renja Perda DAS Forum DAS
		39 Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	Perda no 6 tahun 2011
		40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Dokumentasi DKP dan PSDA (Sea Wall) UU no 17 tahun 2019
		41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	DPA Dinas PU dan PSDA UU no 17 tahun 2019 Dokumentasi Kegiatan
		42 Restorasi lahan gambut	
		43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pembuatan hutan rakyat pada lahan kritis (DPA/Renja) Permen P.105-2018 P.2. Tentang tatacara pelaksanaan kegiatan pendukung pembinaan RHL DPA Dinas Kehutanan Berita Acara pemeriksaan RHL
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44 Rencana Kontijensi Gempa bumi	Dokumen Renkon Lembar pengesahan Dokumen Renkon Dokumen Renkon
		45 Rencana Kontijensi Tsunami	DPA Tahun 2018 Dokumentasi kegiatan Daftar nama peserta simulasi
		46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	DPA Dokumentasi simulasi pelatihan Daftar nama masyarakat yang ikut simulasi (Dokumentasi)
		47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Peta Rencana Evakuasi dan TES Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan
		48 Rencana kontijensi banjir	Dokumen Renkon Banjir SOP Tanggap Darurat Laporan Simulasi
		49 Sistem peringatan dini bencana banjir	DPA 2016
		50 Rencana kontijensi tanah longsor	
		51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	
		52 Rencana Kontijensi karkahut	
		53 Sistem peringatan dini bencana karlahut	
		54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi	Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
		55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Dokumen renkon gunung api Dokumentasi EWS Dokumentasi simulasi uji coba
		56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	Dokumentasi simulasi uji coba rambu-rambu evakuasi Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
		57 Rencana kontijensi kekeringan	
		58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan	
		59 Rencana kontijensi banjir bandang	
		60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
		61 Penentuan Status Tanggap Darurat	Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012
		62 Penerapan sistem komando operasi darurat	Perka SKPDB Perka SKPDB Laporan simulasi
		63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	SOP Tanggap Darurat SOP Tanggap Darurat
		64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Sertifikat pelatihan Perka SKPDB
		65 Perbaikan Darurat	SOP Tanggap Darurat Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012 Dokumentasi masa tanggap darurat
		66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	SKPDB
		67 Penghentian status Tanggap Darurat	SKPDB
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	
		69 Pemulihan infrastruktur penting	
		70 Perbaikan rumah penduduk	Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Dokumentasi Kegiatan (Foto)
		71 Pemulihan masyarakat Penghidupan	

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, target IKD pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,65. Target tersebut lebih tinggi 0,07 dibandingkan IKD pada tahun 2024. Pencapaian sasaran “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” adalah sebagai berikut:



Sama dengan tahun 2024, realisasi IKD 0,58 merupakan IKD Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan oleh BNPB di tahun 2023. Penggunaan IKD 2023 dikarenakan pada tahun 2025 BNPB hanya merilis nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk level Provinsi dan IRB dan IKD untuk Kabupaten/Kota. Realisasi 0,58 diukur berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2023 terhadap pemenuhan data 71 indikator yang ditetapkan BNPB yang dibagi lagi menjadi 7 prioritas yang masing-masing prioritas memiliki kriteria penilaian berbeda. Total dari penilaian tujuh prioritas inilah yang akan menjadi nilai dari IKD. Rincian perhitungan IKD dapat dilihat pada tabel 3.38.

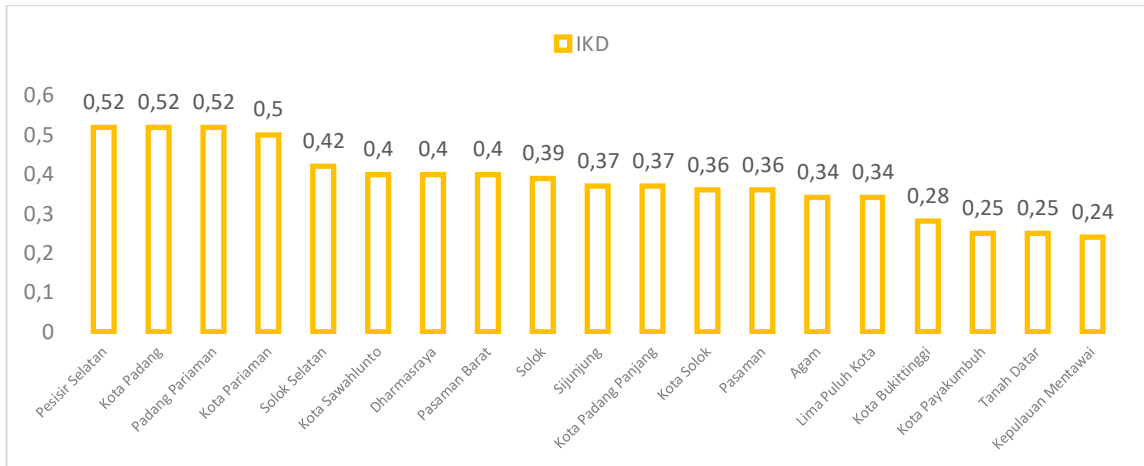
Tabel 3. 38 Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	0,58	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,88		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,5		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,2		

IKD kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat masih bervariasi dan cenderung berada pada kategori rendah hingga sedang. Nilai IKD tertinggi tercatat pada Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman, masing-masing sebesar 0,52, yang mencerminkan tingkat ketahanan daerah relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, nilai IKD terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai (0,24), Tanah Datar (0,25) dan Kota Payakumbuh (0,25). Rendahnya nilai IKD pada wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan masih terbatasnya kapasitas ketahanan daerah, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih intensif. Nilai IKD Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.59.

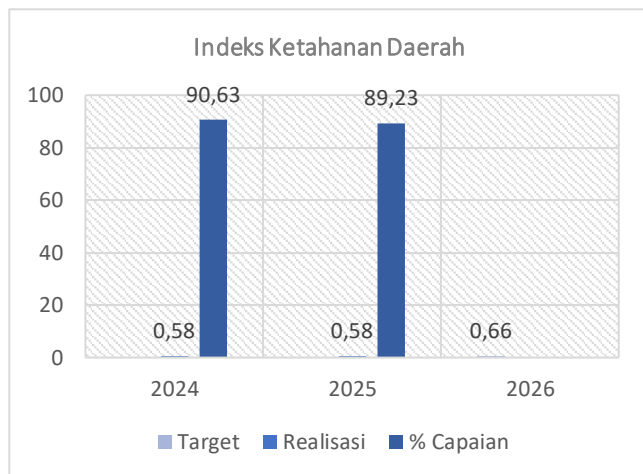


Grafik 3. 59 IKD Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: BNPB

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks ketahanan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian IKD belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengukuran IKD tahun 2025 masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya.



Indeks ketahanan daerah yang tercapai 0,58 menunjukkan pencapaian 87,87% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Mengingat indikator kinerja ini tidak dilakukan pengukuran dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi akan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap indikator tersebut agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk 660 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penguatan Kelembagaan dalam hal pendataan kebencanaan yang diikuti oleh Pusdalops PB sebanyak 120 orang
 - b. Relawan Kebencanaan Daerah yang berasal dari perwakilan pemuda, Kelompok Siaga Bencana, Tim Pengurus Desa Tangguh Bencana dan Perangkat Nagari/Aparatur Nagari dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota



- Padang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
2. Pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang dan Kota Padang.
 3. Melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi gunung api Marapi dengan melibatkan stakeholder OPD Provinsi Sumatra Barat, BPBD Kabupaten/Kota, Relawan, KSB dan NGO yang berkaitan dengan peringatan dini dan bencana Erupsi Gunung Api Marapi di lingkungan Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang berpotensi terdampak.
 4. Menyusun dokumen rencana kontingensi Sumatra Barat yaitu Rencana Kontingensi Tsunami dan Erupsi Gunungapi Marapi.
 5. Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatra Barat.
 6. Penyediaan 5 unit Sirine Tsunami (EWS) Inklusi di 5 lokasi di 3 Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat yaitu:
 - a. Kantor Walinagari Pasar Baru Kecamatan Bayang
 - b. Kantor Walinagari Lakitan Kecamatan Lakitan
 - c. MTsn Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kec. Balingka
 - d. Mesjid Nurur Sa'adah Jorong Katiagan Kec. Kinali
 - e. SDN 24 Muaro Putuih Nagari Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara
 7. Koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain upaya yang dilakukan, dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi pada beberapa wilayah terpencil, sistem komunikasi dan pelaporan dari lapangan ke Pusdalops kurang efektif dan jaringan internet atau elekomunikasi rusak akibat bencana, atau memang belum tersedia di daerah tersebut.
2. Kurangnya kapasitas aparatur yang terlatih dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Koordinasi antar instansi belum sepenuhnya berjalan optimal

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, ke depannya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun jaringan komunikasi alternatif di daerah terpencil untuk memaksimalkan informasi sesuai kebutuhan
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana





3. Membentuk pusdalops PB pada semua Kabupaten/Kota.
4. Penguatan peran komando dan kendali BPBD

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dilaksanakan 2 Program dengan 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar Rp. 7.453.984.942,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 39 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5	15	7.453.984.942,00	4.113.615.431,00
1	Program Penanggulangan Bencana	4	10	5.684.387.776,00	3.880.482.007,00
2	Program Penanganan Bencana	1	5	1.769.597.166,00	233.133.424,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.453.984.942,00,- terealisasi sebesar Rp. 4.113.615.431,00,- atau 55,19%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.340.369.511,00,- (44,81%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tercapai 89,23% dengan realisasi anggaran 55,19% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





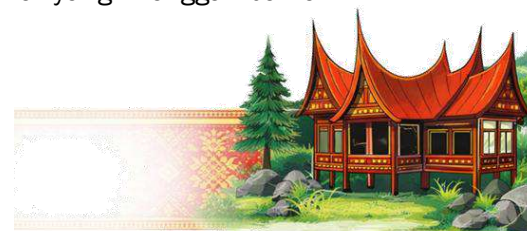
Sasaran 6.1.3 **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas diarahkan pada terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Lingkungan hidup yang berkualitas tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta keseimbangan ekosistem. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang saling terkait dan tidak terpisahkan dari aktivitas pembangunan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus memperhatikan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestariannya dapat terjaga bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas digunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKL adalah adalah nilai yang menggambarkan





kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. IKAL adalah adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada tahun 2025 ini, KLH merubah regulasi untuk menghitung IKLH dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 (perbedaan menghitung komponen IKLH yaitu IKA dan IKU).

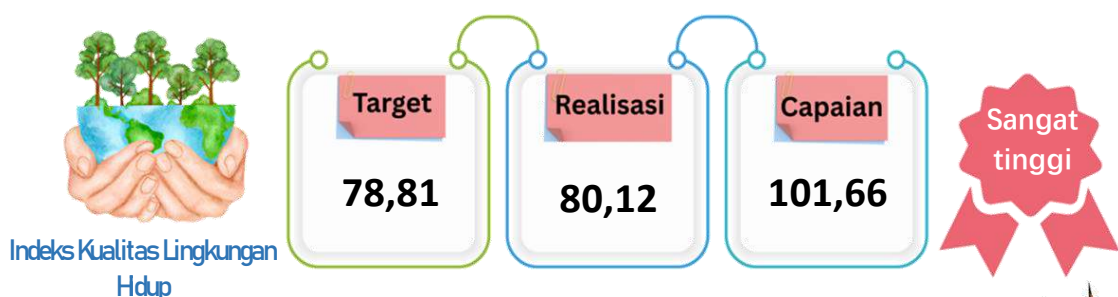
Perhitungan IKLH ditetapkan sesuai dengan Permen LHK Nomor 14 tahun 2025, yaitu dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IKLH = (0,340 \text{ IKA}) + (0,428 \text{ IKU}) + (0,133 \text{ IKL}) + (0,099 \text{ IKAL})$$

Perhitungan IKLH mulai tahun 2025 bersumber dari aplikasi IKLH melalui tautan <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/login/>. Setiap instansi yang membidangi lingkungan hidup baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menunjuk operator untuk mengentrikan data-data pendukung IKLH. Operator provinsi akan melakukan validasi data yang diinput oleh Kabupaten/Kota sebelum divalidasi oleh P3E dan KLHK. Data-data yang digunakan untuk menghitung komponen IKLH khususnya untuk Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan akumulasi data hasil pemantauan kualitas air sungai oleh Kabupaten/Kota, provinsi dan KLHK sedangkan untuk data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berasal dari data pemantauan provinsi dan KLHK.

Data yang diunggah oleh provinsi akan dilakukan validasi oleh P3E dan KLHK. Dari hasil validasi data tersebut akan diterbitkan IKLH sementara. Dimana pada IKLH sementara tersebut Kabupaten/Kota dan Provinsi diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila terdapat perbaikan data sebelum ditetapkan IKLH final baik Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator kinerja IKLH pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 78,81. Target tersebut meningkat 4,05 poin dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2024. Pencapaian sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas digambarkan sebagai berikut:





Realisasi IKLH sebesar 80,12 diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui aplikasi <https://sitata.kemenlh.go.id/iklh/login>. Formula perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,340 \text{ IKA}) + (0,428 \text{ IKU}) + (0,133 \text{ IKL}) + (0,099 \text{ IKAL}) \\ &= (0,340 \times 73,85) + (0,428 \times 84,01) + (0,133 \times 80,04) + (0,099 \times 84,97) \\ &= 80,12 \end{aligned}$$

Keterangan=

Indeks Kualitas Air (IKA) = 73,85

Indeks Kualitas Udara (IKU)= 84,01

Indeks Kualitas Lahan (IKL)= 80,04

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)= 84,97

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.40 perolehan IKLH Sumatra Barat tahun 2025 sebesar 80,12 termasuk kategori “**Sedang**”.

Tabel 3. 40 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq x < 85$
3	Buruk	$0 \leq x < 60$

Sumber: PermenLH/BPLH No. 14 Tahun 2025

Berdasarkan data IKLH kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat, secara umum kondisi kualitas lingkungan hidup berada pada kategori **sedang**. Dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 18 Kabupaten/Kota berada dalam kategori sedang, sementara hanya satu yang masuk kategori buruk, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai IKLH 49,71. Kabupaten Pesisir Selatan mencatatkan nilai IKLH tertinggi sebesar 83,05, diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan (82,64), Kabupaten Solok (82,32), Kabupaten Pasaman (81,61), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (81,24). Meskipun nilai kelima daerah tersebut tergolong tinggi, seluruhnya masih berada dalam kategori sedang. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota memiliki nilai IKLH relatif lebih rendah, meskipun masih dalam kategori sedang, seperti Kota Bukittinggi (68,36), Kota Payakumbuh (70,67), dan Kota Pariaman (72,07). Gambaran IKLH Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 3.41.

Tabel 3. 41 IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025

No	Kab/kota	IKLH	Kategori
1	Kabupaten Pesisir Selatan	83,05	Sedang
2	Kabupaten Solok Selatan	82,64	Sedang
3	Kabupaten Solok	82,32	Sedang
4	Kabupaten Pasaman	81,61	Sedang
5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	81,24	Sedang
6	Kota Padang	80,86	Sedang
7	Provinsi Sumbar	80,12	Sedang



No	Kab/kota	IKLH	Kategori
8	Kabupaten Agam	78,96	Sedang
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	78,91	Sedang
10	Kabupaten Tanah Datar	78,41	Sedang
11	Kota Padang Panjang	77,7	Sedang
12	Kabupaten Padang Pariaman	77,55	Sedang
13	Kabupaten Sijunjung	77,4	Sedang
14	Kota Sawah Lunto	76,93	Sedang
15	Kota Solok	73,58	Sedang
16	Kabupaten Dharmasraya	72,89	Sedang
17	Kota Pariaman	72,07	Sedang
18	Kota Payakumbuh	70,67	Sedang
19	Kota Bukittinggi	68,36	Sedang
20	Kabupaten Pasaman Barat	49,71	Buruk

Sumber : Aplikasi IKLH KLH 2025

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen pengukur IKLH:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada tahun 2025, perolehan nilai IKA tidak lagi mempedomani status mutu air, namun berpedoman kepada Q-nilai dan faktor pembobot masing-masing parameter dalam menentukan nilai IKA pada masing-masing titik pantau kualitas air (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025).

$$\text{IKA titik pantau} = \sum_{i=1}^n W_i I_i$$

Keterangan:

W : Faktor pembobot

I : Sub-indeks (Q-Nilai)

Tabel 3. 42 Kategori Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq x < 85$
3	Buruk	$0 \leq x < 60$

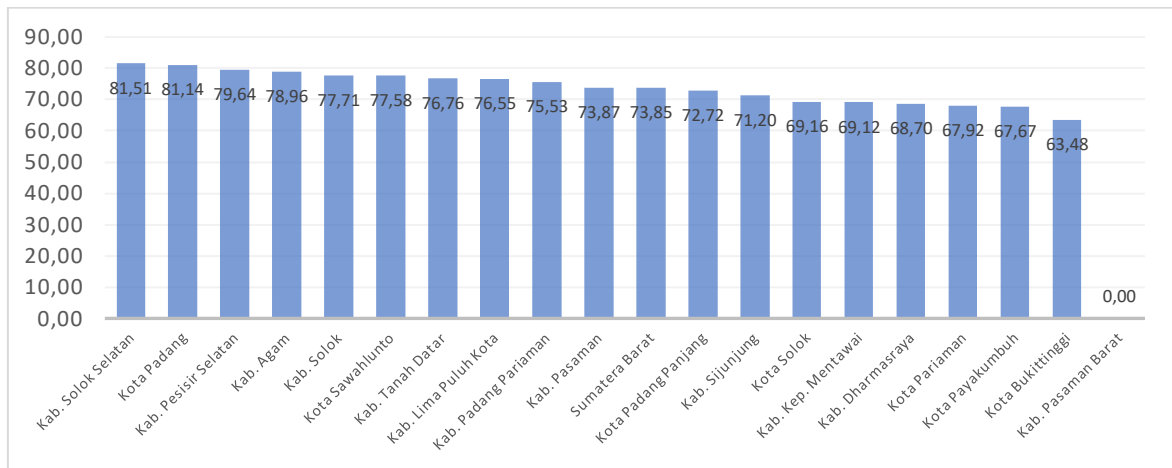
Sumber: PermenLH/BPLH No. 14 Tahun 2025

Untuk mengetahui status mutu air, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengentrikan ke dalam aplikasi KLHK hasil pemantauan yang dilakukan terhadap lima sungai. Pemantauan ini dilakukan pada dua periode selama setahun. Adapun lima sungai yang di pantau tahun 2025 yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sinamar.

IKA Provinsi Sumatra Barat sebesar 73,85 (kategori sedang), berada pada peringkat 16 dari 38 provinsi se Indonesia. Dalam hal peringkat, nilai IKA Provinsi Sumatra Barat tahun 2025

ini mengalami peningkatan peringkat dibandingkan tahun 2024 (peringkat 27). Sebaran IKA pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat berada pada kategori sedang. IKA tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Solok Selatan (81,51), Kota Padang (81,14) dan Kabupaten Pesisir Selatan (79,64). Terdapat 10 Kabupaten/kota yang memperoleh IKA lebih tinggi dari IKA di tingkat Provinsi. IKA Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tahun 2025 tergambar pada grafik 3.60.

Grafik 3. 60 IKA Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2025.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU pada tahun 2025 dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$ sebagai komponen perhitungannya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (IINA - 0,01) \right)$$

$$IINA = \frac{(\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2.5})}{3}$$

Catatan:

Nilai baku mutu udara ambien tahunan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yaitu untuk $\text{NO}_2 = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $\text{SO}_2 = 45 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan $\text{PM}_{2.5} = 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Nilai IKU diperoleh berdasarkan hasil:

- Pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas dominan berupa: (1) padat transportasi (jalan utama yang lalu lintas nya padat), (2) kawasan Industri (bukan industrinya), (3) Pemukiman padat

penduduk, dan (4) perkantoran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah, maka pelaksanaan pemantauan udara ambien metode *passive sampler* dilakukan 2 (dua) tahap yang mewakili kondisi setahun yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama, di mana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu minimal selama 14 (empat belas) hari.

- b. Khusus untuk Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, selain pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* juga dilakukan pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontinue dengan alat berupa satu unit *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data setiap 30 menit setiap harinya. Alat ini ditempatkan di halaman Kantor Gubernur Sumatra Barat untuk Kota Padang dan di area Kawasan Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit malintang
- c. Kebutuhan data minimal dari pemantauan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah adalah sebanyak 65% data harian setahun (238 hari pemantauan).

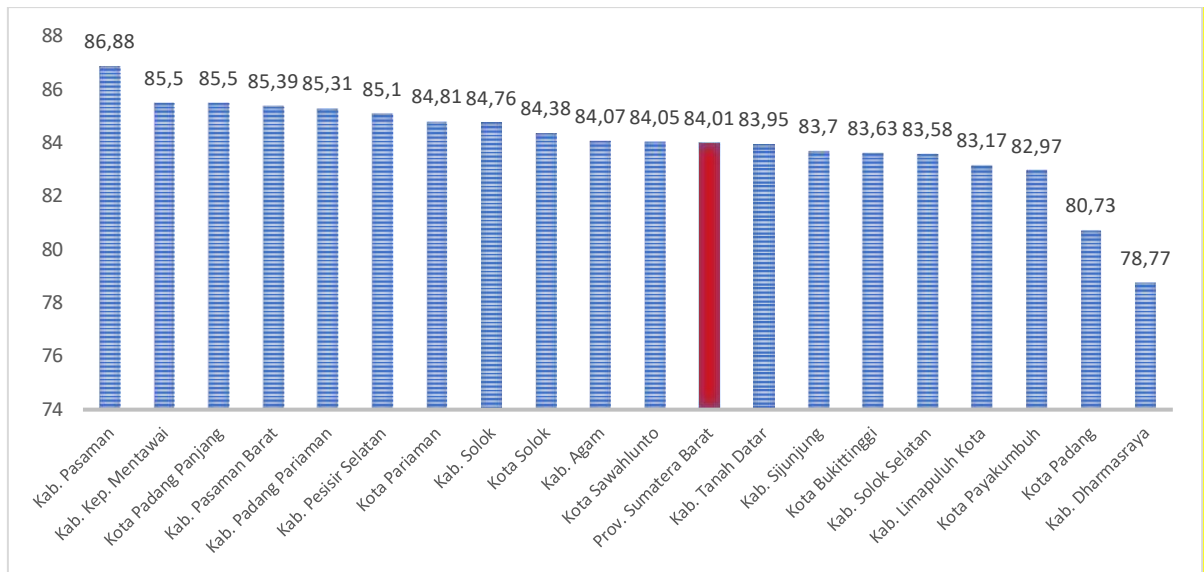
IKU Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 tercapai 84,01 (kategori sedang) berada pada peringkat 20 dari 38 provinsi se Indonesia. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2024, dimana tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat berada pada peringkat 23 dari 38 provinsi se Indonesia.

Sebaran IKU pada 19 Kabupaten/Kota menunjukkan kondisi yang relatif baik. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat, 6 Kabupaten/Kota memperoleh IKU dengan kategori sangat baik dan 13 kabupaten/kota lainnya berada pada kategori sedang. IKU tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Pasaman (86,88) dan terendah diperoleh oleh Kota Dharmasraya (78,77). Secara keseluruhan, capaian IKU ini mencerminkan kondisi kualitas udara yang cukup baik di sebagian besar wilayah Sumatra Barat. IKU Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tahun 2025 tergambar pada grafik 3.61.





Grafik 3. 61 IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2025

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL adalah nilai yang menggambarkan tutupan lahan yang mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas tutupan lahan, seperti lahan terbuka menjadi pertanian lahan kering campur atau hutan mangrove sekunder menjadi tambak. Untuk dapat menghitung IKL, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai IKTL dan IKEG.

- IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari vegetasi hutan dan non-hutan. Mulai tahun 2021, KLHK telah melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan. Rumus pendekatan dalam menghitung nilai IKTL ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian di sempurnakan melalui Permen LHK nomor 27 tahun 2021 seperti yang di sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KLHK pada bulan Maret 2021 sebagai berikut:

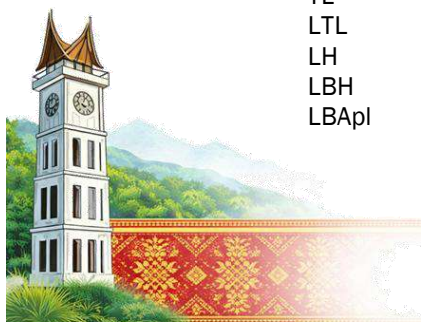
$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

Dimana:

$$TL = \frac{LTL}{LW} = \frac{LH + ((LBH + LBApl + LRTH) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$$

Keterangan:

- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
- TL = Tutupan Lahan;
- LTL = Luas Tutupan Lahan
- LH = Luas tutupan Hutan;
- LBH = Luas tutupan Belukar didalam kawasan Hutan;
- LBApl = Luas tutupan Belukar didalam kawasan areal pemanfaatan lain





LRTH = Luas Ruang Terbuka Hijau seperti hutan kota, kebun raya, arboretum, taman keanekaragaman hayati, taman kota (diluar Tutupan Hutan dan Tutupan Belukar);
 Larh = Luas areal rehabilitasi hutan;
 LW = Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagi wilayah yang memiliki lahan gambut ditambahkan komponen Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) sebagai faktor pengurang sehingga menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

dimana,

LTL = Luas Tutupan Lahan
 LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi
 DKK = Dampak kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut
 $= \sum W \text{ dampak kanal} + w \text{ dampak terbakar}$
 $\sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$

Keterangan

DKK = Luas Tutupan Lahan
 W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut
 W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut
 W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut
 W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut

Dalam menentukan Luas Tutupan Lahan (LTH), maka data utama yang dibutuhkan:

1. Data Tutupan Hutan.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman, belukar rawa, belukar, perkebunan/kebun, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, rawa, savanna, sawah, transmigrasi, bandara/pelabuhan, tambak, tubuh air, lahan terbuka, pemukiman, pertambangan,

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

RTH mencakup luas pada hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, jalur hijau, sempadan badan air, kebun raya, taman kehati, taman hutan raya, taman rekreasi, kebun binatang, arboretum, daerah penyangga, hutan adat, hutan rakyat, kawasan lindung geologi, kawasan lindung/areal konservasi

3. Rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil mengalami revegetasi termasuk hasil revegetasi dari kegiatan reklamasi tambang





- b. IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

$$\text{IKEG} = w1 \cdot \text{KNL} + w2 \cdot \text{BKR} + w3 \cdot \text{TL} + w4 \cdot \text{TMAT} + w5 \cdot \text{EPK}$$

Keterangan:

KNL : Luas terdampak Kanal

BKR : Luas areal bekas kebakaran

TL : Luas Tutupan Lahan

TMAT : Luas sebaran tinggi muka air tanah

EPK : Luas tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa

w1-w5 : bobot

Tabel 3. 43 Kategori Indeks Kualitas Lahan

No	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq x < 85$
3	Buruk	$0 \leq x < 60$

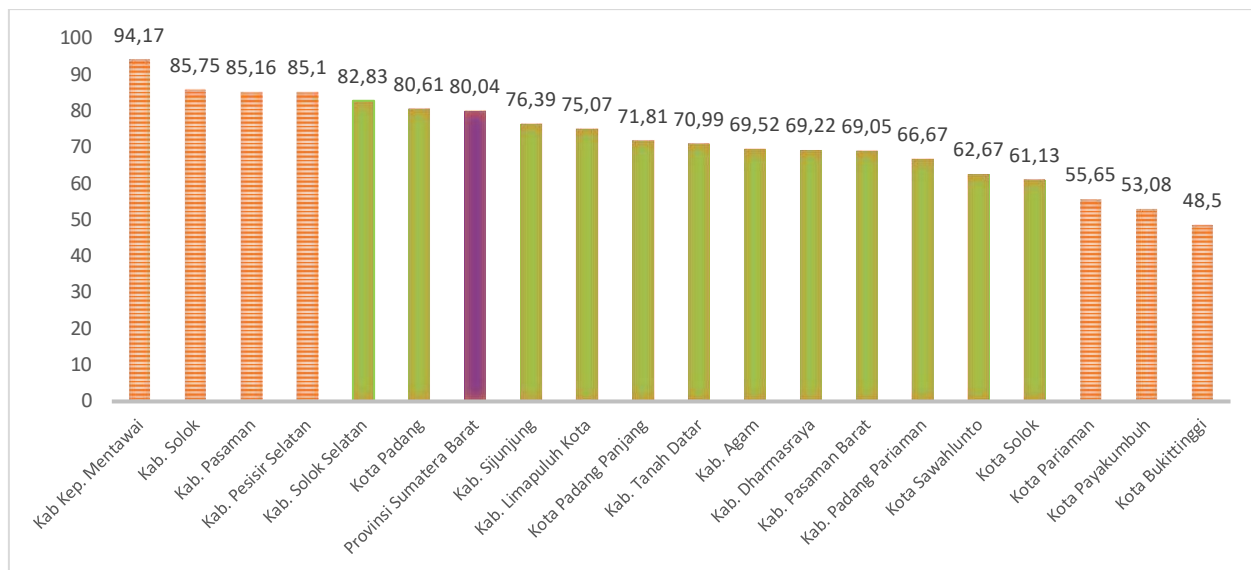
Sumber: PermenLH/BPLH No. 14 Tahun 2025

Dari pengolahan data citra satelit *Landsat* dan data pendukung yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota untuk Provinsi Sumatra Barat pada menu Indeks Kualitas Lahan diperoleh IKL Provinsi Sumatra Barat sebesar 80,04 (kategori sedang), meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya mencapai angka 66,53 (kategori sedang). Hal ini berkaitan dengan perubahan ketentuan pengkategorian nilai IKLH beserta indeks pembentuknya dari 5 (lima) kategori menjadi 3 (tiga) kategori sesuai PermenLH/Ka. BPLH No. 14 Tahun 2025. Angka 80,04 ini membawa Provinsi Sumatra Barat berada pada peringkat 12 untuk nilai IKL dari 38 provinsi se-Indonesia (naik satu peringkat dari tahun sebelumnya).

Sebaran IKL pada 19 Kabupaten/Kota berada pada predikat “Baik, Sedang dan Buruk”. Sebanyak 4 kabupaten/kota memperoleh predikat baik, 12 kabupaten/kota memperoleh predikat sedang dan 3 kabupaten/kota berpredikat buruk. Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai tertinggi (94,17) dengan predikat **sangat baik** dan terendah diperoleh oleh Kota Bukittinggi (48,5) dengan predikat buruk. Gambaran IKL Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tergambar pada 3.62.



Grafik 3. 62 IKL Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2024

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKAL menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL

No	Parameter	Sumber
1	Padatan Tersuspensi	Berbagai Sumber
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan Industri
3	Minyak dan Lemak	
4	Amonia Total (N-NH3)	Domestik dan
5	Orto-Fosfat (PO4-P)	Pertanian

Sumber: Permen LH No. 14 Tahun 2025.

IKAL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

dimana,

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i ;

W_i = bobot parameter kualitas air ke i ;

n = jumlah parameter kualitas air.



Tabel 3. 45 Kategori Indeks Kualitas Air Laut

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

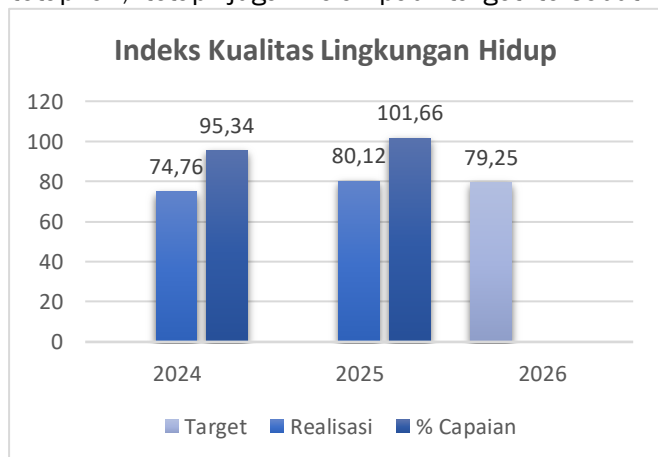
Sumber: Permen LH No. 14 Tahun 2025

Untuk mendapatkan nilai IKAL dibutuhkan data-data pemantauan kualitas air laut. Pemantauan kualitas air laut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi melalui DLH Sumatra Barat dan dinas LH Kabupaten/Kota yang memiliki laut. Semua data tersebut di rangkum dalam IKAL Sumatra Barat.

- KLHK melakukan pemantauan kualitas air laut di 6 kabupaten/kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Pesisir Selatan) dengan sebaran 22 titik sampel.
- Provinsi Sumatra Barat melalui DLH Sumbang melakukan pemantauan pada 4 kabupaten/kota (Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Pesisir Selatan) dengan sebaran 12 titik pantau.
- Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan adalah Kab. Agam dan Kota Padang dengan masing-masing pemantauan tiga titik. Namun pemantauan yang dilakukan Kab. Agam dan Kota Padang tidak diinput pada aplikasi IKLH karena tidak menjadi kewajiban dalam penilaian/perhitungan IKLH oleh Kabupaten/Kota.
- Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKAL Provinsi Sumatra Barat sebesar 84,97 (kategori sedang), berada pada peringkat 15 dari 38 provinsi se-Indonesia.

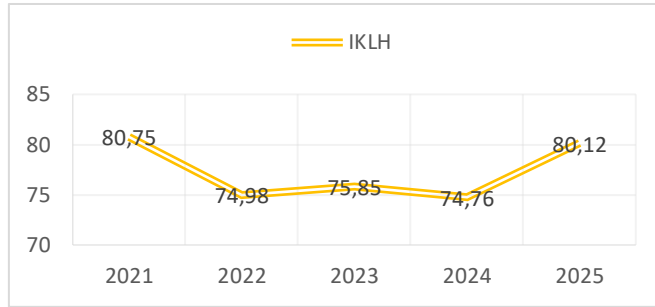
Perhitungan capaian indikator kinerja IKLH menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Berbeda dengan tahun 2024, pada tahun 2025 ini capaian indikator IKLH tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target tersebut.

Secara kuantitatif, nilai IKLH tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **5,36 poin** dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan perhitungan untuk komponen IKLH (IKA dan IKU) tapi juga menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Sumatra Barat.



Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan IKLH sebesar 79,25. Namun, capaian IKLH tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatra Barat mengalami percepatan yang positif dan berada di atas proyeksi perencanaan

Perkembangan IKLH Provinsi Sumatra Barat dari tahun 2021-2025 menunjukkan kondisi dan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2021, nilai IKLH sebesar **80,75**, kemudian turun signifikan

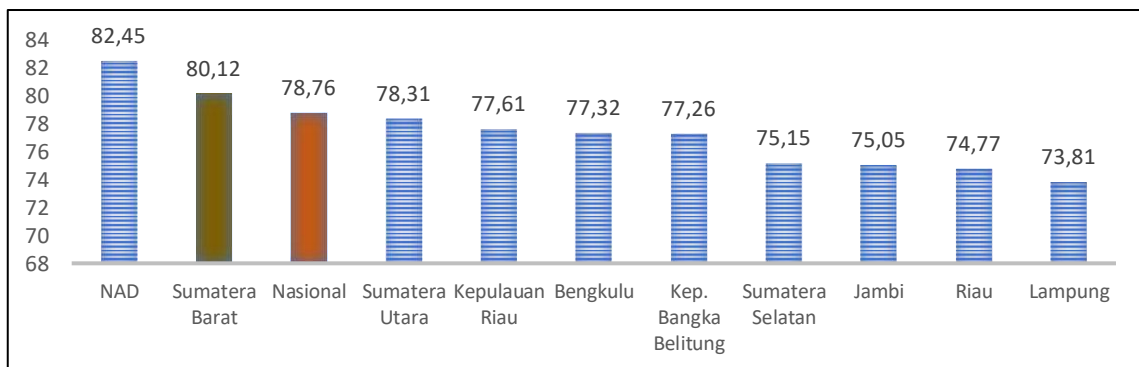


pada 2022 menjadi 74,98. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 75,85, namun kembali sedikit menurun pada 2024 menjadi 74,76. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan capaian 80,12, yang melampaui capaian tahun

sebelumnya. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan komponen IKLH (IKA dan IKU), tetapi juga mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Sumatra Barat.

Provinsi Sumatra Barat memperoleh nilai IKLH sebesar 80,12, berada di bawah Provinsi Aceh (NAD) yang memperoleh nilai tertinggi sebesar 82,45, namun masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 78,76. Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatra, capaian Sumatra Barat tergolong relatif baik. IKLH Sumatra Barat lebih tinggi dibandingkan Sumatra Utara (78,31), Kepulauan Riau (77,61), Bengkulu (77,32), Kepulauan Bangka Belitung (77,26), Sumatera Selatan (75,15), Jambi (75,05), Riau (74,77), dan Lampung (73,81). Perbandingan IKLH Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2024 disajikan pada grafik 3.63.

Grafik 3. 63 Perbandingan IKLH Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2025



Sumber data : KLHK, 2025



Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, selama tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap persetujuan teknis terkait:
 - a. pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas air sungai sebagai badan air penerima.
 - b. pemenuhan baku mutu emisi dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan evaluasi dokumen agar substansi dapat memenuhi Permen LHK 5 Tahun 2021.
2. Mengurangi sampah pada sumber dengan cara pembentukan bank sampah, sosialisasi konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) juga pengomposan kepada masyarakat di sekitar sungai dan budidaya maggot.
3. Memfasilitasi pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan insidental terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
4. Melakukan pengawasan terhadap:
 - a. usaha dan/atau kegiatan baik pengawasan aktif melalui verifikasi lapangan maupun pengawasan pasif, dimana salah satu aspek yang dilakukan pengawasan adalah pengelolaan air limbah dan pemantauannya.
 - b. pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan sumber emisi.
5. Memberikan sanksi administratif dari hasil pengawasan aktif maupun pengawasan insidental (fasilitasi pengaduan lingkungan) sesuai kewenangan atau memberikan rekomendasi sanksi apabila merupakan kewenangan kab/kota.
6. Memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pemantauan sumber emisi tidak bergerak maupun hasil uji emisinya melebihi baku mutu.
7. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dengan rincian sebagai berikut
 - a. membangun penguatan tebing sehingga potensi gerusan air sungai terhadap tebing sungai yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS dapat diminimalisir.
 - b. melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meminimalisir air *run off* hujan yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS.
 - c. Pengendalian Organisme Pengganti Tumbuhan Ramah Lingkungan dan Pertanian Ramah Lingkungan sehingga dapat meminimalisir potensi Total Fosfat sebagai P dan





- Nitrat sebagai N. Kegiatan ini telah dilakukan beberapa tahun belakang dan tetap dipertahankan hingga saat ini, dan masa yang akan datang.
- d. Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diharapkan dapat meminimalisir konsentrasi parameter BOD, COD, DO dan Fecal Coliform. Kegiatan ini merupakan upaya untuk merubah perilaku agar membiasakan menggunakan jamban dan tidak buang air di sungai.
 - e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH melalui BPDAS Agam-Kuantan, BPDAS Indragiri-Rokan serta pemulihan lahan akses terbuka yang difasilitasi oleh PT. Semen Padang melalui program CSR-nya yang dilakukan di kawasan/area perusahaan PT. Semen Padang.
 - f. pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota dalam melakukan uji emisi.
8. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
 9. Melakukan bersih-bersih pantai;
 10. Partisipasi Bulan Cinta Laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hambatan/kendala dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Koordinasi antar OPD dan Pemerintah Pusat dalam penanganan kualitas air sungai belum optimal.
2. Pemulihan sungai membutuhkan waktu dan biaya yang besar.
3. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan limbah ke sungai masih menjadi tantangan.
4. Sarana, prasarana, dan jangkauan layanan pengelolaan sampah masih terbatas, serta belum tersedia IPAL komunal untuk limbah domestik.
5. Penambangan ilegal di sungai masih marak dan didukung faktor ekonomi, sementara penambangan berizin tetap berpotensi menekan daya dukung lingkungan.
6. Kebakaran hutan dan lahan turut memengaruhi kualitas udara.
7. Belum ada program pengendalian udara ambien (seperti EKUP) dan regulasi pembatasan kendaraan bermotor.
8. Penegakan hukum terhadap pembakaran sampah dan pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha belum optimal.
9. Laju pembukaan lahan tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi dan reklamasi, terutama pada bekas tambang ilegal





Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, maka upaya yang akan dilakukan ke depannya adalah:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka mewujudkan pertanian ramah lingkungan melalui program beras organik dan dalam rangka perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
2. Melakukan upaya yang bersinergi dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatra) sesuai dengan kewenangan.
3. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk:
 - a. membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.
 - b. meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
 - c. membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO_2 , SO_2 , $\text{PM}_{2.5}$.
 - d. melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup. .
 - e. meningkatkan layanan persampahan dan memiliki alat pembakar sampah yang ramah lingkungan dengan terlebih dahulu memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
 - f. Meningkatkan kegiatan penghijau
 - g. pembuatan arboretum, taman Kehati, Ruang Terbuka Hijau.
 - h. melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Persetujuan Teknis serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Ikut serta upaya penertiban kegiatan penambangan ilegal di sungai dengan melibatkan stakeholder terkait.
5. Melakukan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui:





- a. Memperbanyak upaya pengolahan sampah, budidaya maggot untuk mengurangi sampah dari sumbernya melalui pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat atau sumber anggaran yang lain.
 - b. Melakukan penilaian dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan evaluasi dokumen agar substansi dapat memenuhi Permen LHK 5 Tahun 2021 sehingga dapat dipastikan bahwa IPAL dapat bekerja optimal sehingga dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat salah satunya terkait dengan pengendalian pencemaran air.
 - d. Memberikan sanksi administratif berupa denda pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah maupun hasil uji air limbah pada titik penaaatan melebihi baku mutu.
 - e. Melakukan Pengerukan dan pengangkutan sedimen sampah secara periodik sekali setahun ataupun sekali dua/tiga tahun.
 - f. Penguatan bantaran/tebing sungai baik secara alami maupun buatan
 - g. Pemulihan terhadap *catchment area* (daerah tangkapan air) dengan peningkatan tutupan vegetasi.
6. Melakukan upaya pemulihan lahan akses terbuka melalui sumber pendanaan di luar APBD karena keterbatasan anggaran.
 7. Melakukan upaya pencegahan kerusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan (masyarakat, perangkat adat) untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri;

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dilaksanakan 10 Program dengan 11 Kegiatan dan 26 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 9.808.009.013,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 46 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	11	26	9.808.009.013,00	9.334.512.877,00
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	2	8.235.000,00	8.200.000,00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	6	1.115.613.922,00	1.048.844.870,00
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	2	124.073.600,00	118.898.226,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	3	30.114.000,00	25.038.000,00
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	3	834.647.000,00	762.949.250,00
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	1	13.965.000,00	13.910.000,00
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			24.525.000,00	14.188.000,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	1	4	3.381.526.473,00	3.339.960.542,00
9	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1	1	666.524.000,00	658.161.800,00
10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	4	3.608.785.018,00	3.344.362.189,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.808.009.013,00,- terealisasi sebesar Rp. 9.334.512.877,00,- atau 95,17%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 473.496.136,00,- (4,83%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang tercapai 101,66% dengan realisasi anggaran 95,17% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 66,22%.



Sasaran 6.1.4 **Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian**

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis, dan sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur pelayanan dasar mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, jaringan jalan, drainase, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur ini menjadi fondasi utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis seperti perkantoran pemerintahan, fasilitas layanan publik, pusat kegiatan ekonomi, serta sarana penunjang kebencanaan dan keselamatan merupakan bagian integral dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Bangunan strategis yang direncanakan dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas administratif dan sosial, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang efektif, aman, dan representatif.

Di sektor pertanian, infrastruktur berperan dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sangat menentukan keberhasilan usaha pertanian. Infrastruktur pertanian yang memadai akan memperlancar distribusi hasil panen, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar. Dengan demikian, sinergi antara pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis, dan pertanian menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan sasaran “meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Sasaran ini diukur oleh enam indikator kinerja yang perhitungannya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perangkat Daerah terkait infrastruktur. Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel 3.47.





Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Akses Air Minum (%)	88	87,26	99,16
Akses Sanitasi Layak (%)	88	74,59	84,76
Persentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11	16,67	150,05
Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,79	70,92	100,18
Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,4	59,40	100
Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38	69,16	101,14
Rata-rata Capaian			105,88

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian tercapai 105,88% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

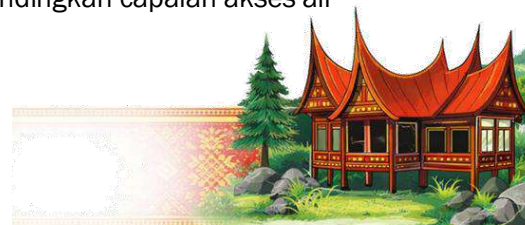
Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian sebagai berikut:

1. Akses Air Minum

Akses air minum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan keterjangkauan layanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Pencapaian indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan layanan air minum yang aman dan berkelanjutan.

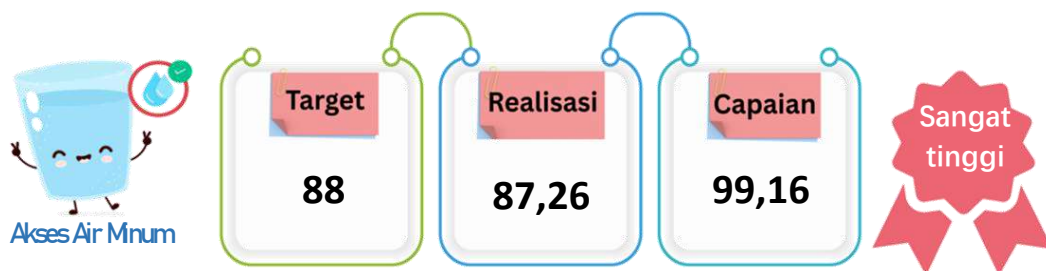
Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Sejak tahun 2019, rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, target akses air minum layak tahun 2025 ditetapkan sebesar 88%. Penetapan target ini mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Target tahun 2025 tersebut lebih tinggi 1,15% dibandingkan capaian akses air





minum layak pada tahun 2024 yang sebesar 86,85%. Pencapaian indikator akses air minum layak adalah sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja akses air minum layak diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2025.

Perhitungan capaian indikator akses air minum layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian Akses air minum layak belum mencapai target



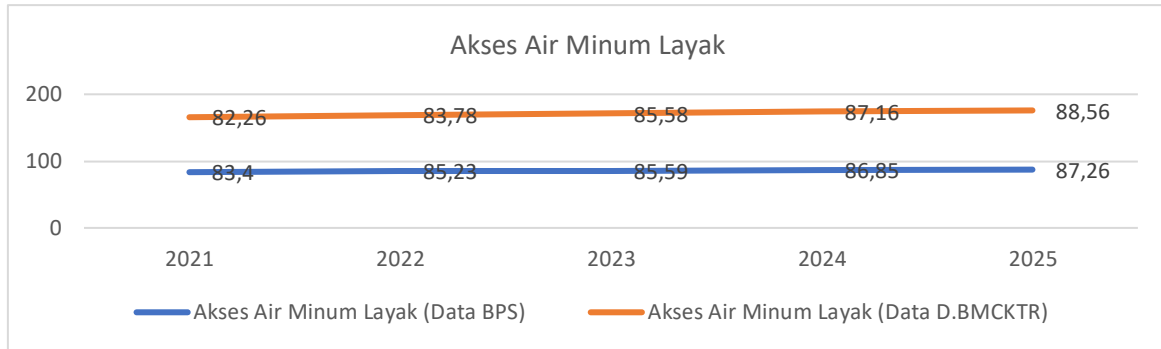
yang telah ditetapkan. Namun demikian, secara kuantitatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan akses air minum sebesar 0,41% di tahun 2025.

Target Akses air minum layak di tahun 2026 berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebesar 90%. Artinya, 90% rumah tangga

yang ada di Provinsi Sumatra Barat sudah bisa mengakses air minum yang layak. Realisasi akses air minum layak di tahun 2025 yang tercapai 87,26%, menunjukkan pencapaian 96,96% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Dibutuhkan kenaikan 2,74% dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Akses air minum layak Sumatra Barat dari tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten berdasarkan kedua sumber data baik data BPS maupun data Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui dinas terkait. Perbedaan perhitungan antara kedua sumber tersebut relatif tidak signifikan, dengan selisih maksimal sebesar 1,45 poin. Perkembangan akses air minum layak tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik 3.64.

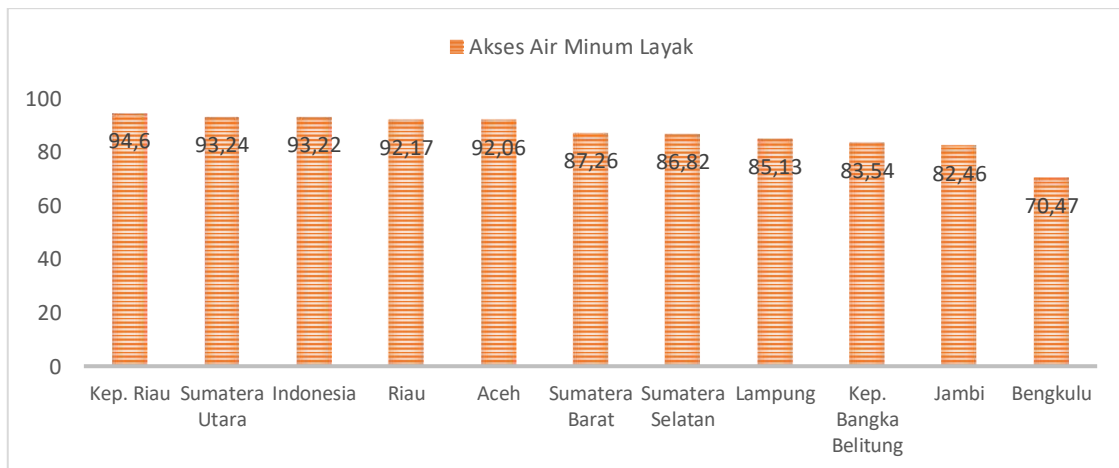
Grafik 3. 64 Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2025



Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR

Secara Nasional, dari 38 Provinsi di Indonesia, akses air minum layak Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 menempati peringkat ke 24 sama seperti tahun sebelumnya. Capaian tersebut masih lebih rendah 5,96 poin dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Barat berada pada peringkat ke-5. Akses air minum layak tertinggi di Pulau Sumatra dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau (94,6%) diikuti Provinsi Sumatra Utara (93,24%) dan Provinsi Riau (92,17%). Rincian akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.65.

Grafik 3. 65 Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra tahun 2025



Sumber data: BPS

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses air minum layak di tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam penjaminan kualitas data Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Melakukan money terhadap pelaksanaan kegiatan SPM dan Pamsimas



3. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kegiatan SPM dan optimalisasi program melalui bimbingan teknis (bimtek) dan workshop.
4. Melaksanakan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan capaian SPM dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas.
5. Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan dokumen perencanaan (*Readiness Criteria*) melalui kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi.
6. Melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dalam rangka peningkatan akses air minum di kabupaten/kota.

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses air minum layak antara lain:

1. Untuk peningkatan akses air minum layak butuh konsistensi dan waktu pelaksanaan yang lama (5-10 th).
2. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (*long term construction*)
4. Adanya konflik sosial yang sangat tinggi antar Kabupaten/Kota.
5. Kemampuan fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatra Barat sangat lemah.
6. Rendahnya kepedulian dan komitmen eksekutif dan legislatif terhadap pemenuhan akses air minum layak.

Untuk ke depannya, dalam mendukung peningkatan akses air minum layak akan dilakukan beberapa hal berikut ini:

1. Memilih Kabupaten/Kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM menjadi *pilot project*.
2. Advokasi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
3. Mengoptimalkan akses minum layak yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

2. Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam target *Universal Access National*. Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah





tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terhadap pemenuhan sanitasi/akses sanitasi layak. Indikator akses sanitasi layak digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menurunkan risiko pencemaran lingkungan, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Akses sanitasi layak diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target akses sanitasi layak tahun 2025 ditetapkan sebesar 88%. Penetapan target tersebut mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Target indikator akses sanitasi layak tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi 15,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 72,82%. Pencapaian indikator akses sanitasi layak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

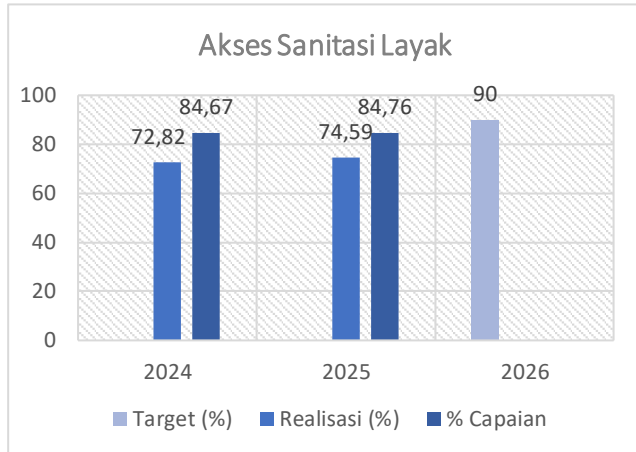


Realisasi indikator akses sanitasi layak tahun 2025 sebesar 74,59% diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2025.



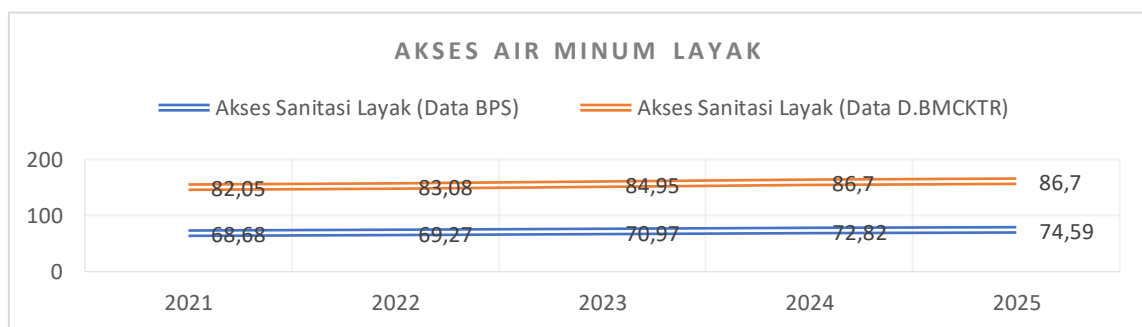
Perhitungan capaian indikator akses sanitasi layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian akses sanitasi layak belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai capaian yang masih di bawah 100%. Walaupun demikian, terdapat peningkatan akses sanitasi layak pada tahun 2025 sebesar 1,77% dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Pada tahun 2026, di targetkan sebanyak 90% rumah tangga di Provinsi Sumatra Barat telah memiliki akses sanitasi yang layak. Realisasi akses sanitasi layak di tahun 2025 sebesar 74,59% menunjukkan ketercapaian 82,88% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026, akan dilakukan upaya yang lebih optimal dan terarah melalui penguatan program, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.



Perkembangan capaian akses air minum layak di Provinsi Sumatra Barat menunjukkan tren peningkatan yang berfluktuasi setiap tahunnya, baik berdasarkan data dari BPS ataupun data dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui dinas terkait. Walaupun demikian, terdapat perbedaan angka capaian yang cukup signifikan antara data BPS dan data Dinas BMCKTR setiap tahunnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metodologi penghitungan, definisi operasional, cakupan responden, maupun sumber basis data yang digunakan. Peningkatan capaian tertinggi sebesar 1,77% terjadi pada tahun 2025, dengan rata-rata peningkatan selama 5 tahun terakhir mencapai 1,48%. Perkembangan akses sanitasi layak tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.66.

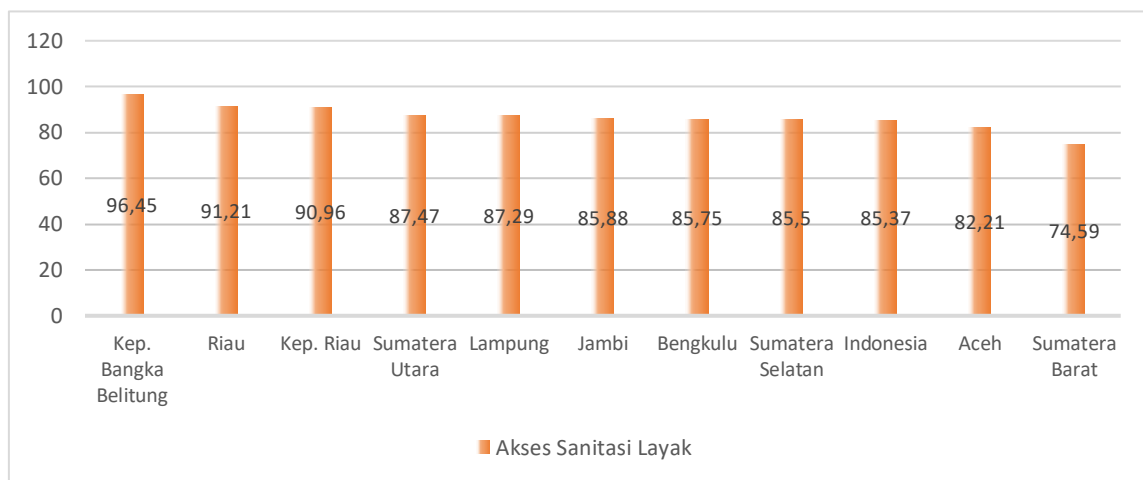
Grafik 3. 66 Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2021-2025



Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR

Secara Nasional, dari 38 Provinsi di Indonesia, akses sanitasi layak Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 menempati peringkat ke 35. Capaian tersebut masih lebih rendah 10,78 poin dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Barat berada pada peringkat terakhir. Akses sanitasi layak tertinggi di Pulau Sumatra dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (96,45%) diikuti Provinsi Riau (91,21%) dan Provinsi Kepulauan Riau (90,96%). Rincian akses sanitasi layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.67.

Grafik 3. 67 Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra tahun 2025



Sumber data: BPS

Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melakukan upaya peningkatan akses sanitasi layak. Upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan pendampingan ke kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran dokumen SSK.
2. Melakukan monev terkait kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
3. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait kegiatan sanitasi melalui bimtek atau workshop.
4. Memberikan advokasi kepada kabupaten/kota agar melakukan pemutakhiran dokumen SSK untuk kab/kota yang masa berlaku dokumen SSK telah berakhir

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses sanitasi layak antara lain:

1. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.



2. Pelaksanaan kegiatan terkait sanitasi layak banyak dilaksanakan di kabupaten/kota sementara di tingkat provinsi lebih kepada pembinaan.
3. Sumber pembiayaan dari APBN lebih kepada operasional, rehab, optimalisasi IPLT eksisting.
4. Keterbatasan anggaran dan kecilnya rasio anggaran kabupaten/kota untuk program sanitasi.

Upaya ke depannya untuk mendukung peningkatan akses sanitasi layak adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sanitasi Kabupaten/Kota.
2. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kegiatan sanitasi.
3. Advokasi kepada tim anggaran legislatif pada Pemerintah kabupaten/kota tentang program strategi sanitasi
4. Mengoptimalkan akses sanitasi yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

3. Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Bangunan strategis mencakup fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Indikator persentase bangunan strategis terbangun digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan bangunan strategis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan ada 18 bangunan strategis yaitu:

No	Bangunan Gedung	No	Bangunan Gedung
1	Gedung Budaya (Lanjutan)	10	Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis
2	Gedung Perkimtan	11	Shelter MTS Darul Hikmah
3	Limbah B3	12	Shelter Maligi
4	Gedung MUI	13	Shelter Tanjung Mutiara
5	Gedung Inspektorat	14	TTIC Pasaman Barat
6	Gedung PPIPTK	15	Main Stadium (Lanjutan)
7	Shelter Sasak	16	Amphitheater Puncak Paku
8	Shelter SLBN 2 Padang	17	Amphitheater Pagaruyung
9	Shelter Sikabalu	18	Shelter Linggarjati

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, bangunan strategis yang terbangun tahun 2025 ditargetkan 83,33%. Akan tetapi, dikarenakan cara penetapan target indikator tersebut kurang tepat, mulai tahun 2022 target indikator tersebut dilakukan perhitungan kembali.



Untuk tahun 2025, bangunan strategis yang terbangun ditargetkan 11,11% (2 bangunan strategis) atau sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Pencapaian indikator persentase bangunan strategis terbangun adalah sebagai berikut:



Realisasi sebesar 16,67% di tahun 2025 diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{persentase bangunan strategis terbangun} = \frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$$

Keterangan

Jumlah bangunan strategis yang terbangun sampai tahun 2024= 3 bangunan

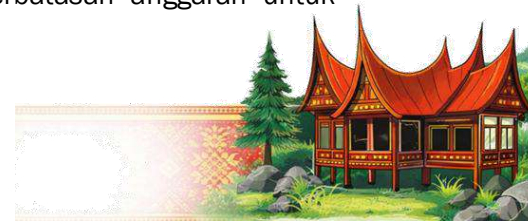
Total jumlah bangunan strategis= 18 bangunan

Realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menyelesaikan pembangunan gedung MUI. Sehingga sampai akhir tahun 2025 bangunan strategis yang terbangun ada 3 yaitu shelter linggarjati (2022) dan Shelter Maligi (2024) dan gedung MUI (2025).



Perhitungan capaian indikator persentase bangunan strategis terbangun menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Pada tahun 2025, capaian indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh tambahan satu bangunan strategis yang berhasil dibangun selama tahun 2025, yaitu gedung MUI.

Indikator persentase bangunan strategis terbangun pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan tercapai 100%. Artinya, di tahun 2026 ditargetkan 18 gedung strategis Provinsi Sumatra Barat telah selesai dibangun. Namun, mengingat realisasi pada tahun 2025 baru mencapai 16,67% dari target tahun 2026 serta adanya keterbatasan anggaran untuk





pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatra Barat telah melakukan penyesuaian kembali terhadap target indikator kinerja ini sejak tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk pembangunan bangunan strategis di tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan.
2. Menyiapkan dokumen perencanaan bangunan gedung (DED, Dokling, dan FS).
3. Menyediakan lokasi lahan untuk pembangunan gedung strategis tersebut.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan/direncanakan.

Banyak kendala yang dihadapi untuk membangun bangunan strategis. Kendala tersebut antara lain:

1. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan 18 bangunan strategis.
2. Penganggaran yang diperoleh tidak dalam kondisi 100% (dibangun bertahap) sehingga belum mampu menyelesaikan 100% pembangunan pada satu tahun penganggaran.
3. Kegiatan/pekerjaan yang dianggarkan di DPA kurang sesuai dengan rencana penganggaran Penyelesaian.
4. Rasio kemampuan *fiscal* daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Sumbar.

Untuk tahun yang akan datang, dalam membangun bangunan strategis akan dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penganggaran bangun gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap.
- b. Meningkatkan monitoring dan pendampingan oleh provinsi ke kab./kota
- c. Menyiapkan *masterplan* dan dokumen perencanaan seluruh kawasan strategis
- d. Mencari alternatif sumber pembiayaan kerjasama dengan badan usaha atau pihak swasta yang dikerjasamakan.



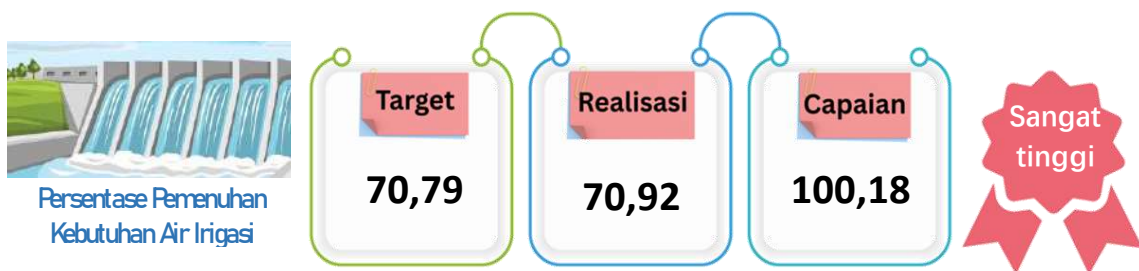


4. *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi*

Sejak tahun 2021, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indikator ini menggambarkan tingkat kinerja suatu sistem irigasi pada daerah irigasi tertentu. IKSI merupakan suatu indeks atau nilai yang diperoleh melalui penelusuran jaringan dan evaluasi kinerja sistem irigasi dengan pembobotan: 1). Prasarana fisik: 45%, 2). Produktivitas tanaman: 15%, 3). Sarana penunjang: 10%, 4). Organisasi personalia: 15%, 5). Dokumentasi: 5% dan 6). Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A): 10%.

Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan skala penilaian sebagai berikut: kinerja sangat baik (80 – 100), Kinerja Baik (70-79), kinerja kurang dan perlu perhatian (55-69) dan kinerja jelek dan perlu perhatian (< 55). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal pertanian 65.007 Ha. Sampai dengan periode akhir tahun 2020 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 49.759,48 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014).

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, target indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 75,04%. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang tercapai 69,68% maka target tahun 2025 disesuaikan menjadi 70,79. Target tahun 2025 tersebut lebih tinggi 0,81 dibandingkan realisasi tahun 2024 namun lebih rendah 4,25 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi capaian eksisting serta kemampuan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pencapaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air adalah sebagai berikut:





Realisasi IKSI tahun 2025 sebesar 70,92% diperoleh berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Perolehan IKSI 70,92% menunjukkan kinerja sistem irigasi **“kinerja baik”**. Berdasarkan 6 komponen penilaian IKSI sebanyak 3 komponen mengalami peningkatan dan sisanya tetap. Adapun yang mengalami peningkatan yaitu komponen prasarana fisik, organisasi personalia dan perkumpulan petani pemakai air. Rincian hasil penilaian IKSI tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)
1	Prasarana fisik	45	32,77	33,69
2	Produktivitas tanaman	15	9,62	9,62
3	Sarana penunjang	10	6,68	6,68
4	Organisasi personalia	15	11,58	11,59
5	Dokumentasi	5	4,24	4,24
6	Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A)	10	5,09	5,10
Jumlah		100	69,98	70,92

Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.48.



Tabel 3. 48 Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

No	Nomeklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3 A/IP3A (10%)	Jumlah (100%)
1	D.I Bandar Gadang	1.525	1.153,00	40,76	13,00	6,00	11,01	4,25	3,55	78,57
2	D.I Bintungan	1.017	574,99	45,34	13,00	6,00	11,01	4,25	3,86	83,46
3	D.I Muaro Danau	1.371	1.236,37	33,44	10,00	6,00	11,01	4,25	1,82	66,52
4	D.I Paneh Gadang	1.007	504,16	40,52	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	78,63
5	D.I Bandar Sapan Kayu Manang	1.160	564,22	31,58	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	69,69
6	D.I Bandar Pamujan	190	252,53	26,86	14,88	7,65	11,29	4,25	6,22	71,15
7	D.I Bandar Panjang Selayo	128	200,43	34,81	13,00	7,38	10,94	4,25	6,02	76,40
8	D.I Bandar Lembang	750	705,90	45,14	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	83,25
9	D.I Bandar Halim	657	791,74	43,92	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	82,03
10	D.I Pompa VII	98	46,71	29,37	13,00	6,00	11,01	4,25	1,82	65,45
11	D.I Sungai Samek	1.158	105,58	32,77	7,00	7,90	12,37	4,25	8,52	72,81
12	D.I Amping Parak	2.363	490,89	48,61	7,00	7,85	12,07	4,25	7,79	87,57
13	D.I Batang Bayang	1.362	1.041,42	36,81	10,32	6,00	11,01	4,25	8,37	76,76
14	D.I Batang Surantih	1.864	1.268,15	37,52	9,18	8,46	11,01	4,25	7,83	78,25
15	D.I Koto Kandis	2.357	1.797,43	20,13	10,29	8,43	12,61	4,25	8,31	64,03
16	D.I Koto Salapan	1.998	757,77	40,56	11,56	8,50	12,76	4,25	8,32	85,95
17	D.I Lubuak Sariak	1.300	255,90	29,94	7,00	6,00	11,01	4,25	8,21	66,41
18	D.I Lubuak Kubang	1.896	34,76	20,00	7,00	6,00	11,01	4,25	6,02	54,28
19	D.I Malepang	1.813	142,73	30,25	7,00	7,10	11,01	4,25	8,31	67,92
20	D.I Talang Kemuning Jaya	1.930	905,60	35,72	7,00	6,00	11,01	4,25	8,29	72,27
21	D.I Pekonina	1.250	462,76	29,69	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	61,80
22	D.I Bandar Sawah Padang	1.000	390,92	39,63	7,00	6,00	11,01	4,25	1,82	69,71
23	D.I Batang Suliti	1.450	1.036,60	40,98	9,65	6,00	11,01	4,25	3,85	75,74
24	D.I Batang Bangko	1.603	692,39	33,45	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	65,56
25	D.I Bandar Sungai Aro	2.739	1.014,81	36,60	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	68,71



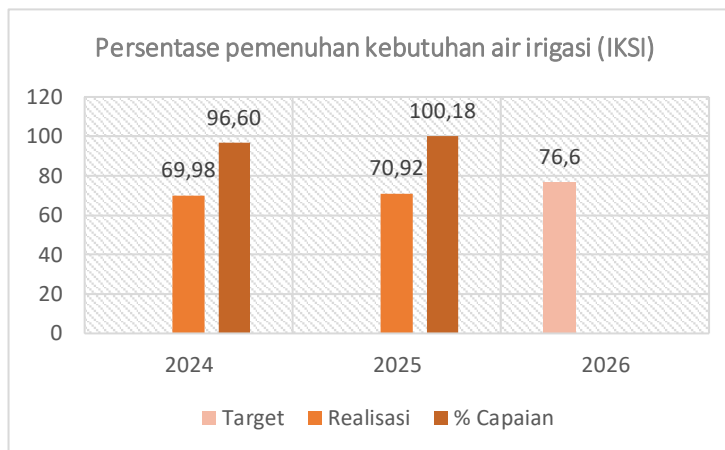
No	Nomeklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3 A/IP3A (10%)	Jumlah (100%)
26	D.I Lubuk Gobing	1.250	104,25	29,33	7,00	8,75	12,51	4,25	4,42	66,26
27	D.I Kapar Ampu	2.250	323,88	43,39	7,00	8,50	12,61	4,25	7,49	83,24
28	D.I Rimbo Tampurung	1.200	503,77	33,95	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	66,06
29	D.I Bt. Partupangan	1.200	630,16	26,93	7,09	8,70	12,66	4,25	3,02	62,65
30	D.I Batang Tingkarang	2.326	1.024,13	44,07	7,00	8,50	12,61	4,25	8,00	84,43
31	D.I Baramban III Lurah	1.164	943,00	32,00	10,94	6,00	11,01	4,25	3,86	68,06
32	D.I Bdr. Kubu Banda	675	461,00	44,01	9,22	6,00	11,01	4,25	3,56	78,05
33	D.I Bdr. Garegeh	98	77,00	28,15	10,61	7,65	11,78	4,25	7,02	69,46
34	D.I Bdr. Pulau	66	92,00	23,63	18,82	7,80	11,01	4,25	6,22	71,73
35	D.I Bdr. Rakik	97	42,00	35,25	7,00	6,40	11,01	4,25	3,55	67,46
36	D.I Bdr. Batu Hampa	100	46,00	34,88	7,00	6,40	11,01	4,25	3,55	67,09
37	D.I Bdr. Durian	200	120,00	35,71	8,10	6,40	11,01	4,25	3,56	69,03
38	D.I Batang Sianok	1.285	596,00	31,83	7,00	6,40	13,31	4,25	6,12	68,91
39	D.I Batang Gumarang	1.778	763,00	29,69	7,00	6,00	12,31	4,25	3,55	62,80
40	D.I Bandar Sangkir Geragahan	1.031	496,00	34,46	7,00	6,00	11,61	4,25	5,02	68,34
41	D.I Bandar Batang Dareh	1.128	248,00	39,22	7,00	6,00	12,61	4,25	3,55	72,63
42	D.I Batang Lampasi	2.180	1.277,00	50,00	7,91	8,28	12,58	4,25	8,07	91,09
43	D.I Batang Tabik	1.007	717,00	39,53	9,61	8,50	12,76	4,25	7,50	82,15
44	D.I Batang Agam	633	414,00	35,64	8,83	8,50	12,61	4,25	7,64	77,47
45	D.I Sei. Dareh	617	227,00	35,58	6,00	8,50	12,76	4,25	6,42	73,51
46	D.I Batang Talawi	200	175,00	30,05	11,81	6,93	10,64	4,25	8,22	71,91
47	D.I Gunung Nago	2.087	1.522,21	34,70	9,85	6,00	12,31	4,25	4,53	71,64
48	D.I Koto Tuo	1.004	670,63	35,62	9,02	6,00	12,31	4,25	3,56	70,76
49	D.I Sicaung	1.285	446,10	37,91	6,00	6,00	12,31	4,25	3,56	70,03
50	D.I Ladang Laweh	1.140	805,76	37,82	9,54	6,00	12,31	4,25	3,55	73,47
51	D.I Sawah Aru	172	120,67	24,74	13,76	7,42	11,63	3,88	6,23	67,66



No	Nomeklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3 A/IP3A (10%)	Jumlah (100%)
52	D.I Gadang Sini Air	54	17,10	30,34	7,00	6,00	12,31	4,25	3,55	63,45
53	D.I Bandar Ipuh	70	35,39	25,07	7,00	6,00	11,31	4,25	3,55	57,18
54	D.I Bdr. Sibaragung	600	748,00	30,73	7,00	6,00	11,01	4,25	6,02	65,01
55	D.I Bandar Galo Gandang	1.112	465,98	37,38	7,00	6,00	12,31	4,25	5,03	71,97
56	D.I Bdr. Gadang Darek	138	86,00	15,52	8,41	6,00	11,01	4,25	3,55	48,74
57	D.I Bdr. Rupik	42	38,00	32,95	12,21	6,00	11,01	4,25	3,56	69,99
58	D.I Bdr. Jambu	33	16,00	16,64	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	53,45
59	D.I Bdr. Sigando	56	43,00	32,96	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	69,77
60	D.I Bdr. Muka Air	56	37,00	26,00	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	62,81
61	D.I Bdr. Bulaan Dalam	140	35,00	22,95	12,00	7,18	11,03	4,25	6,22	63,63
62	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	352	171,00	31,14	12,00	6,00	11,01	4,25	6,22	70,62
63	D.I Batang Parika	339	163,00	32,83	12,00	6,00	11,01	4,25	3,56	69,65
64	D.I Batang Selo	1.275	1.492,00	31,52	13,50	6,00	12,31	4,25	3,55	71,13
65	D.I Bdr. Sangki II	581,00	581,00	31,30	14,12	6,00	13,31	4,25	4,55	73,53
TOTAL		65.007,00	33.201,78	33,69	9,62	6,68	11,59	4,24	5,10	70,92

Perhitungan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian IKSI berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai IKSI di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,94. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sistem irigasi baik pada komponen prasarana fisik, organisasi personalia dan perkumpulan petani pemakai air.

Pada tahun 2026, indikator IKSI ditargetkan 76,6%. Capaian IKSI pada tahun 2025 sebesar 70,92 menunjukkan bahwa realisasi tersebut telah mencapai 91,36% dari target tahun 2026 (76,6%). Untuk memenuhi target tahun 2026, masih diperlukan



peningkatan sebesar 5,68 poin dari kondisi tahun 2025. Dengan dukungan program peningkatan prasarana fisik, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, target tersebut optimis dapat dicapai.

Dalam meningkatkan kinerja sistem irigasi, telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 5.736,22 meter (1.379,63 ha) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2025

No.	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Realisasi	
		Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)
1	D.I Bandar Gadang	√		57,10	15,74
2	D.I Bintungan		√	41,25	23,53
3	D.I Muaro Danau		√	95,30	11,50
4	D.I Bandar Pamujan		√	123,44	22,05
5	D.I Bandar Panjang Selayo	√		12,75	20,88
6	D.I Bandar Lembang		√	66,40	17,79
7	D.I Batang Bayang		√	77,70	20,15
8	D.I Batang Surantih		√	81,00	11,93
9	D.I Lubuak Sariak		√	83,80	13,69
10	D.I Pekonina		√	82,82	26,10
11	D.I Bandar Sawah Padang		√	123,70	2,92
12	D.I Batang Suliti	√		103,42	33,17
13	D.I Batang Bangko		√	25,00	24,62
14	D.I Baramban III Lurah	√		103,00	11,15
15	D.I Bdr. Kubu Banda	√		53,00	8,99
16	D.I Ladang Laweh		√	113,00	18,50
17	D.I Bandar Galo Gandang	√		151,00	22,28
18	D.I Bdr. Gadang Darek		√	283,90	4,22

No.	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Realisasi	
		Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)
19	D.I Bdr. Bulaan Dalam		√	164,83	1,61
20	D.I Batang Parika		√	307,00	10,16
21	D.I Batang Selo	√		115,00	14,58
22	D.I Bandar Sangkir Geragahan		√	111,00	20,00
23	D.I Bandar Sapan Kayu Manang	√		107,12	22,30
24	D.I Bandar Halim		√	341,00	15,00
25	D.I Sungai Samek		√	79,60	19,80
26	D.I Batang Tabik	√		256,00	56,00
27	D.I Sicaung		√	200,00	76,00
28	D.I. Bdr. Lawas Sirukam	√		21,50	13,00
29	D.I. Bdr Ubo		√	77,50	20,60
30	D.I Bdr. Muka Air		√	140,00	15,00
31	D.I Bdr. Jambu		√	151,00	10,00
32	D.I Bdr. Rupik	√		227,00	42,00
33	D.I Sicaung (Lanjutan)		√	89,00	32,00
34	D.I Gunung Nago		√	110,00	43,00
35	D.I Batang Agam		√	50,00	200,00
36	D.I Rimbo Tampurung		√	50,00	15,00
37	D.I Batang Selo (Lanjutan)	√		86,00	150,00
38	D.I Kapar Ampu		√	112,00	24,00
39	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	√		35,00	45,00
40	D.I Baramban III Lurah		√	400,00	56,00
41	D.I Ladang Laweh (Lanjutan)		√	75,00	25,00
42	D.I Batang Suliti (Lanjutan)	√		185,20	32,10
43	D.I Batang Bayang (Lanjutan)		√	141,30	29,30
44	D.I Lubuak Sariak (lanjutan)		√	70,50	15,20
45	D.I Bandar Batang Lembang (Lanjutan)		√	28,65	18,40
46	D.I Bandar Gadang (Lanjutan)		√	26,70	21,50
47	D.I Batang Surantih (Lanjutan)		√	52,50	14,20
48	D.I Muaro Danau (Lanjutan)		√	248,24	13,70
Total				5.736,22	1.379,63

- Operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi UPTD Balai SDABK Wilayah Utara 160 km dan Jaringan irigasi UPTD Balai SDABK Wilayah selatan 119 Km.
- Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi sebanyak 80 unit.
- Melakukan pemberdayaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. (P3A/GP3A).

Di samping berbagai upaya yang telah dilakukan, masih terdapat hambatan/kendala dalam peningkatan kinerja sistem irigasi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah batalnya beberapa kegiatan yang telah direncanakan akibat adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

Peningkatan kinerja irigasi ke depannya diharapkan dapat dicapai melalui upaya berikut ini:

- Peningkatan pengawasan pada daerah jaringan irigasi sehingga penggunaan air pada jaringan irigasi tepat peruntukannya.
- Penyusunan regulasi untuk penetapan sempadan jaringan irigasi dan sempadan sungai pada WS Kewenangan Provinsi.



3. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan pada daerah irigasi dan wilayah sungai kewenangan provinsi.
5. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi Perangkat Daerah yang terkait dengan pemanfaatan irigasi lahan pertanian.

5. *Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air*

Tampungan air kewenangan Provinsi adalah embung. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan artifisial yang berfungsi untuk menampung air hujan, limpasan (runoff), atau sumber air lain dalam volume kecil, lebih kecil dari waduk, guna mendukung pertanian, memenuhi kebutuhan domestik, ternak, dan irigasi selama musim kemarau, seringkali di daerah rawan kekeringan atau lahan tadah hujan. Volume tampungan sumber-sumber air terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan pembangunan infrastruktur sumber air. Volume potensi tampungan ini didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan sumber daya air (mata air, anak sungai) yang terdapat pada suatu wilayah. Target volume tampungan yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 587.467 m³.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, target indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 58,28%. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang tercapai 59,4% maka target tahun 2025 disesuaikan menjadi 59,4. Target tahun 2025 tersebut lebih tinggi 1,12 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan sama dengan realisasi tahun 2024. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi capaian eksisting serta kemampuan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pencapaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air adalah sebagai berikut:





Realisasi persentase volume tampungan sumber-sumber air yang tercapai 59,40% diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase volume tampungan sumber-sumber air} = \frac{348.946,55 \text{ m}^3}{587.467 \text{ m}^3} \times 100\% = 59,40\%$$

Keterangan:

Volume tampungan sumber-sumber air (m³) = 348.946,55

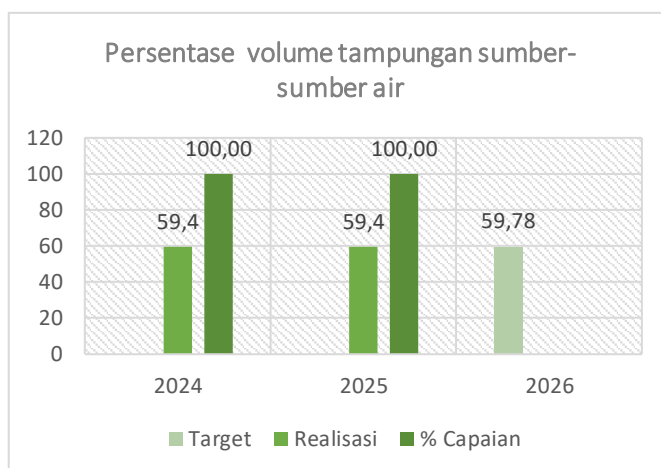
Volume potensi tampungan sumber-sumber air (m³) = 587.467

Perhitungan capaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, persentase volume tampungan sumber-sumber air tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2024 dan 2025 menunjukkan nilai yang sama karena tidak terdapat pembangunan embung pada tahun 2025, sehingga tidak terjadi penambahan volume tampungan. Secara absolut, volume tampungan sumber-sumber air pada tahun 2025 tercatat sebesar 348.946,55 m.

Untuk tahun 2026, persentase volume tampungan sumber-sumber air di targetkan mencapai 59,78%. Adapun realisasi tahun 2025 yang tercapai 59,40% menunjukkan pencapaian 99,36% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026).

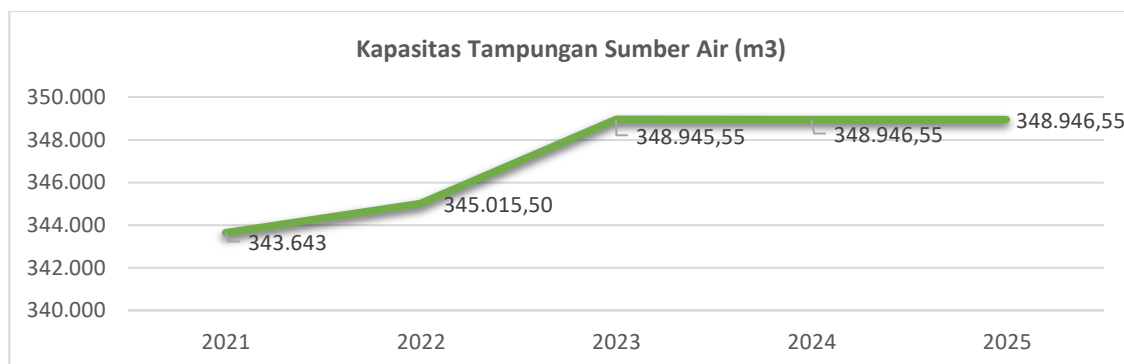
Mempertimbangkan kondisi pencapaian indikator ini yang sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, Provinsi Sumatra Barat akan berusaha memprioritaskan alokasi anggaran guna memastikan target tersebut dapat tercapai secara optimal.

Volume tampungan sumber-sumber air dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan sebesar 5.302,55 m³ dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 1325,64 m³. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023, sebesar 3.930,05 m³ yang merupakan capaian terbesar dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat penambahan kapasitas tampungan sumber air karena tidak dilaksanakannya pembangunan embung pada kedua tahun tersebut. Secara rinci perkembangan volume tampungan sumber-sumber air tersebut dapat dilihat pada grafik 3.68.





Grafik 3. 68 Volume Tampungan Sumber-Sumber Air Tahun 2021-2025



Sumber data: DSDA dan BK

Pada tahun 2025, Sumatra Barat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan guna menjaga kapasitas tampung sumber-sumber air yang telah ada, tanpa melakukan penambahan kapasitas daya tampung baru. Pencapaian indikator kinerja ini sangat bergantung pada dukungan penganggaran, sehingga keterbatasan anggaran pada tahun 2025 menjadi salah satu kendala dalam pembangunan embung yang berdampak pada belum optimalnya peningkatan volume daya tampung air.

Ke depan, peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air akan diupayakan melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait dukungan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan embung, serta dengan memprioritaskan alokasi anggaran guna mendukung pencapaian kinerja utama Kepala Daerah secara lebih optimal.

6. Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memfokuskan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada kawasan wilayah sungai dan pantai kewenangan Provinsi. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatra Barat adalah Wilayah Sungai Silaut – Tarusan (7.052,15 km²) dan Wilayah Sungai Masang – Pasaman (5.668,3375 km²). Total luas kawasan terdampak daya rusak air yang akan ditangani selama periode RPJMD 2016-2020 dan berlanjut pada periode 2021-2026 adalah 3.130 Ha. Total luas kawasan terdampak tersebut didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatra Barat, dimana total luas kawasan tersebut terdiri atas kawasan pemukiman yang terdampak di sepanjang sungai (3000 Ha) dan kawasan pemukiman terdampak sepanjang pantai (130 Ha) sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.50 dan 3.51.

Tabel 3. 50 Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatra Barat

No	Nama Wilayah Sungai/ Lokasi	Satuan	Target Penanganan
A	WS Masang Pasaman	ha	1.115,34
1	Labuhan	ha	15,39
2	Bt Dareh	ha	329,47
3	Dagang	ha	96,21
4	Padang Tinggi	ha	26,47
5	Maringging	ha	26,89
6	Bukit Melintang	ha	36,43
7	Pulau Pinang	ha	58,69
8	Simpang Tigo Koto Baru	ha	25,36
9	Kenagarian Aur Kuning	ha	39,34
10	Tanjung Pangkal	ha	36,56
11	Bancah Talang	ha	34,69
12	Kenagarian Aia Gadang	ha	135,44
13	Sudirman	ha	64,04
14	Sinurut	ha	8,50
15	Air Hangat	ha	23,37
16	Enam Koto	ha	38,24
17	Koto Sawah	ha	87,22
18	Sjanih	ha	7,54
19	Ujung Gading	ha	25,50
B	WS Silaut Tarusan	ha	1.884,67
1	Kampung Dalam	ha	8,60
2	Sungai Gemuruh	ha	41,78
3	S.Gemuruh (Tanjung Batang Kapas)	ha	86,36
4	S.Gemuruh (Air Batu)	ha	56,15
5	Punggasan Utara	ha	349,94
6	Palangai (Tanjung Paku)	ha	31,83
7	Palangai (Padang Laban)	ha	7,93
8	Nagari Kambang (Dataran Marantih)	ha	12,89
9	Nagari Kambang (Koto Rawang)	ha	4,62
10	Nagari Kambang (Talang Luar)	ha	14,53
11	Nagari Kambang (Lubuk Sarik)	ha	4,36
12	Batang Kapas	ha	409,43
13	Painan Timur (Kampung Luar, Sago, Bungo Pasang)	ha	365,28
14	Pasar Baru	ha	259,04
15	Koto Marapak	ha	166,12
16	Gurun Panjang	ha	65,81
	Jumlah Total	ha	3.000,00



Tabel 3. 51 Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatra Barat

No	Nama Wilayah Sungai/ Lokasi	Satuan	Target Penanganan
A	WS Masang Pasaman	ha	121,66
	Jorong Rantau Panjang	ha	121,66
B	WS Silaut Tarusan	ha	8,34
	Bungus	ha	8,34
Jumlah Total		ha	130,00

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,79%. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang tercapai 68,22% maka target tahun 2025 disesuaikan menjadi 68,38. Target tahun 2025 tersebut ditetapkan lebih tinggi 0,16 dari realisasi tahun 2024 dan lebih rendah 3,41 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air adalah sebagai berikut:



Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air yang tercapai 69,16 diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatra Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air} = \frac{2.164,73 \text{ Ha}}{3.130 \text{ Ha}} \times 100\% = 69,16\%$$

Keterangan:

Luas kawasan teramankan

= 2.164,73 Ha

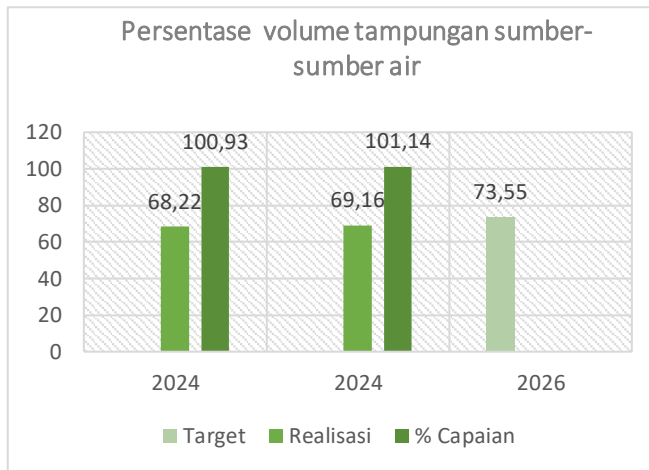
Luas kawasan terdampak

= 3.130 Ha



Perhitungan capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi dan capaian indikator kinerja ini di tahun 2025 tercapai lebih tinggi 0,94%. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2024 sebesar 29,32 Ha.

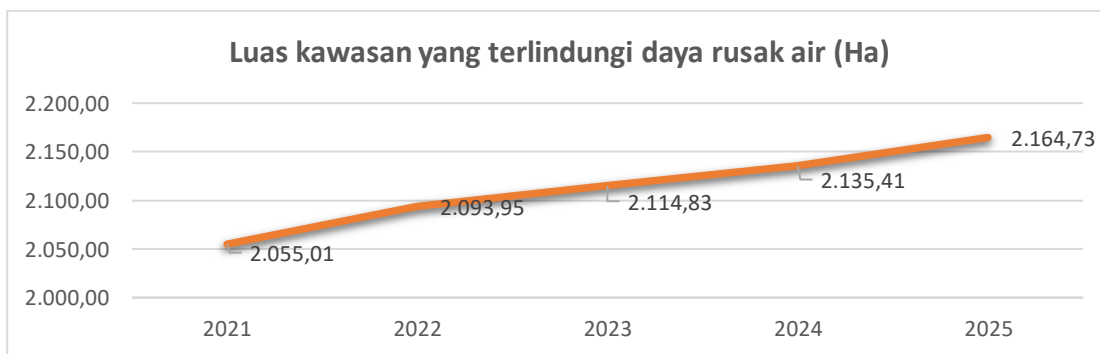
Pada tahun 2026, indikator Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak ditargetkan 73,55%. Realisasi



indikator ini di tahun 2025 sebesar 69,16% menunjukkan pencapaian 94,03% dari target tahun 2026 (73,55%). Butuh kenaikan 4,39% untuk mencapai target tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi pencapaian indikator yang sangat terkait dengan ketersediaan anggaran dan peningkatan di tahun 2024 hanya 0,94%, Provinsi Sumatra Barat akan memprioritaskan upaya pencapaian indikator kinerja ini sehingga target tahun 2026 dapat tercapai.

Selama lima tahun terakhir (2021–2025), luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air mengalami peningkatan sebesar 109,72 hektare, dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 27,43 hektare. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 38,94 hektare, sementara kenaikan terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 20,58 hektare. Secara rinci, perkembangan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dapat dilihat pada grafik 3.69.

Grafik 3. 69 Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2021-2025



Sumber data: DSDA dan BK

Untuk meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari banjir, di tahun 2024 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 72 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 2.003,87 meter. Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2025 digambarkan pada tabel 3.52.

Tabel 3. 52 Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2025

No	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kawasan Terlindungi (Ha)
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang Air Dingin Kota Padang	0,30
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang Tarok Kota Padang	0,22
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Pingai Lapau Kapeh Kabupaten Agam	0,24
4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batahan Kabupaten Pasaman Barat	0,27
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batu Barong Kabupaten Padang Pariaman	0,27
6	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Sani Kabupaten Pesisir Selatan	0,33
7	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang	0,50
8	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Binuang Kabupaten Padang Pariaman	0,28
9	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Galapung Kabupaten Padang Pariaman	0,27
10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapas Lubuk Nyiur Kabupaten Pesisir Selatan	0,19
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lampasi Kota Payakumbuh	0,14
12	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Landir Kabupaten Pasaman	0,26
13	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Landu Kabupaten Pasaman	0,24
14	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lapau Munggu Kota Padang	0,17
15	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Maek Kabupaten Lima Puluh Kota	0,29
16	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Malakutan Kota Sawahlunto	0,15
17	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Malampah Kabupaten Pasaman	0,45
18	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Merdeka Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat	0,26
19	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nangin Kabupaten Pasaman Barat	0,22
20	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Padang Kubu Kabupaten Pasaman	0,34
21	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan	0,75
22	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Patimah Kabupaten Pasaman	1,45
23	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sawah	0,11

No	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kawasan Terlindungi (Ha)
	Tambang Kota Sawahlunto	
24	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sikabau Kabupaten Pasaman Barat	0,18
25	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Silungkang Oso Kota Sawahlunto	0,12
26	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota	0,30
27	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sulawat Kabupaten Padang Pariaman	0,20
28	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Pisang Kota Padang	0,18
29	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya	0,48
30	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Talago Gunung Kota Sawahlunto	0,12
31	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kota Padang	0,12
32	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tian Kabupaten Pasaman Barat	0,28
33	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tipo Kabupaten Pasaman Barat	0,28
34	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ulumantu Minang Saiyo Kabupaten Solok	0,31
35	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ulu Suliti Kabupaten Solok Selatan	0,24
36	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lubuak Sarik Kabupaten Pesisir Selatan	0,21
37	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih Kota Padang	0,53
38	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar Kabupaten Pasaman Barat	0,24
39	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tanjung Pangka Kabupaten Pasaman Barat	0,24
40	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pasaman Barat	0,27
41	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Situak Kabupaten Pasaman Barat	0,24
42	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tengah Kabupaten Pasaman Barat	0,42
43	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Toman Kabupaten Pasaman Barat	0,27
44	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Jambak Kabupaten Pesisir Selatan	0,43
45	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Balai Lamo Lubuk Nyiur Kabupaten Pesisir Selatan	0,24
46	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Banda Sungkai Kabupaten Pesisir Selatan	0,17
47	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pasar Cubadak Kabupaten Pasaman	0,47
48	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Biluan Kabupaten Pasaman Barat	0,30
49	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nareh Kabupaten Padang Pariaman	0,35
50	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ganggo Mudiak Kabupaten Pasaman	0,25
51	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Subangek	0,15

No	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kawasan Terlindungi (Ha)
	Kota Padang	
52	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Situang Kabupaten Pasaman Barat	0,28
53	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Jantan Kabupaten Pasaman	2,30
54	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pincuran Baliak Kabupaten Tanah Datar	0,46
55	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan	0,07
56	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pauh Kota Padang	0,26
57	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pia Kota Padang	0,15
58	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batak Kabupaten Pasaman	0,65
59	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sllaping Kabupaten Pasaman Barat	0,30
60	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman	0,32
61	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan	0,24
62	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Agam Kabupaten Agam	1,08
63	Normalisasi dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Mangor Kota Pariaman	0,30
64	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang (Lanjutan)	0,35
65	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Godang Tonah Kabupaten Lima Puluh Kota	0,44
66	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Luruhi Kurao Pagang Kota Padang	1,00
67	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota (Lanjutan)	0,14
68	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota	0,24
69	Normalisasi dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Tigo Nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan	0,60
70	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Onge Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan	0,26
71	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Barat Kabupaten Pesisir Selatan	0,14
72	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapur Kecil Kabupaten Lima Puluh Kota	0,08

b. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai sebanyak 3 unit dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Bungus Kota Padang
- 2) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Muaro Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- 3) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat

- c. Operasi dan Pemeliharaan Sungai sepanjang 26,365 km
- d. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 56 m
- e. Pembangunan Kanal Banjir sepanjang 150 m
- f. Peningkatan *Check Dam* sepanjang 5 m
- g. Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam* 4 unit
- h. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 11 unit
- i. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 7,92 km

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan luas kawasan yang terlindungi adalah tingginya curah hujan pada akhir tahun sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan material galian-c karena sumber *quarry* yang terbatas.

Ke depannya akan diupayakan hal berikut ini untuk mendukung peningkatan kawasan yang terlindungi:

- a. Peningkatan pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dipercepat.
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik
- c. Peningkatan fungsi kelembagaan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi.
- d. Memprioritaskan kegiatan terkait pembangunan infrastruktur.

Untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, dilaksanakan 8 Program dengan 14 Kegiatan dan 62 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 139.261.462.343,69,. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 53 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	14	62	139.261.462.343,69	125.453.738.633,00
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	4	679.938.248,00	606.070.018,00
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	2	1.712.654.800,00	1.659.745.323,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	2	677.149.125,00	601.838.386,00
4	Program Penataan Bangunan Gedung	1	5	39.164.362.561,00	37.964.174.734,00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	30	91.548.837.032,69	79.916.447.951,00
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	12	846.360.470,00	762.419.115,00
7	Program Pengembangan Perumahan	3	3	560.394.990,00	240.226.425,00
8	Program Kawasan Permukiman	2	4	4.071.765.117,00	3.702.816.681,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 139.261.462.343,69,- terealisasi sebesar Rp. 125.453.738.633,00,- atau 90,09%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.807.723.710,69,- (9,91%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian yang tercapai 105,88 % dengan realisasi anggaran 90,09% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 89,49%.



Sasaran 6.1.5 **Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan**

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Melalui pemanfaatan ruang yang terencana dan terkendali, penataan ruang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Penataan ruang yang berkelanjutan sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara efektif dan efisien, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang melalui perencanaan yang seimbang antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatra Barat berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045.

Untuk penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjadikan peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi. Mulai tahun 2024, perhitungan indikator ini dengan membandingkan antara luas kawasan (Ha) yang sesuai pemanfaatan ruangnya dengan RTRW Provinsi dengan luas rencana pola ruang (Ha) RTRW Provinsi dikali 100. Adapun data yang digunakan dalam menghitung persentase kesesuaian yaitu peta penggunaan lahan Provinsi Sumbar tahun 2024 dengan peta rencana pola ruang RTRW Provinsi Sumbar tahun 2012-2032. Metode analisis yang digunakan untuk menghitung persentase kesesuaian yaitu metode *overlay* peta dengan aplikasi GIS.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 89%. Namun, realisasi pada tahun 2024 telah mencapai 89,53% atau lebih tinggi 0,53% dari target tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMD. Mempertimbangkan capaian tersebut, Pemerintah



Provinsi Sumatra Barat melakukan penyesuaian target tahun 2025 menjadi 89,70% atau lebih tinggi 0,17% dibandingkan capaian tahun 2024. Pencapaian sasaran “meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan” tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:



Realisasi indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

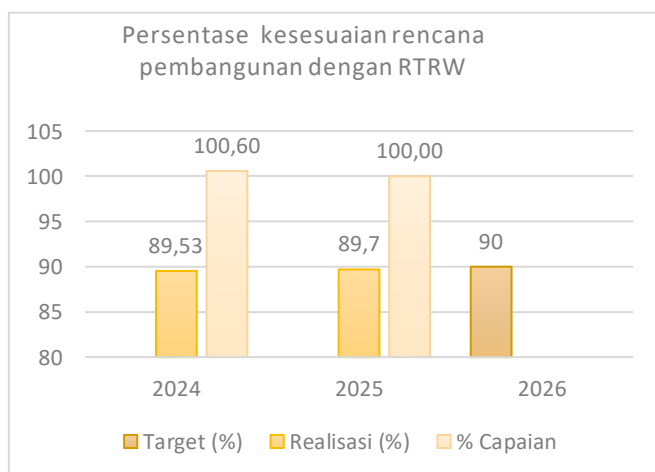
$$\text{Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW} = \frac{3.745.962,60}{4.176.101} \times 100\% = 89,70\%$$

Keterangan:

Luas Kawasan yang sesuai pemanfaatannya 2025 = 3.745.962,60 ha

Luas rencana pola ruang RTRW Provinsi= 4.176.101

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan kawasan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang tahun 2025 sebesar 7.136,6 Ha. Meskipun demikian, dari total luas rencana pola ruang RTRW Provinsi terdapat kawasan seluas 430.138,40 Ha atau 10,30% pemanfaatan ruangnya belum sesuai sehingga tetap diperlukan upaya pengendalian dan penataan ruang yang lebih konsisten.



Pada tahun 2026 indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW ditargetkan 90%. Realisasi indikator ini di tahun 2025 yang tercapai 89,70% menunjukkan

pencapaian 99,66% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Mempertimbangan hal ini, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengupayakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten melalui upaya berikut ini:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045.
2. Penyusunan dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota.
3. Sinkronisasi dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dengan Renstra OPD dan RKPD OPD.

Penyelenggaraan penataan ruang di Sumatra Barat masih terkendala pada kewenangan pemerintah provinsi dalam menerbitkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hanya pada kawasan yang merupakan lintas administratif Kabupaten/Kota sehingga data yang diperoleh belum optimal serta keterlambatan atau ketidakharmonisan produk hukum tata ruang dan sektor terkait

Untuk ke depannya, agar penyelenggaraan penataan ruang lebih baik akan dilakukan upaya berikut ini:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan mengedukasi masyarakat dalam ketaatan terhadap tata ruang.
2. Penyusunan dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota
3. Sinkronisasi dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dengan Renstra OPD dan RKPD OPD

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, dilaksanakan 6 Program dengan 9 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 886.809.261,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 54 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	9	18	886.809.261,00	826.146.320,00
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4	12	873.389.261,00	812.852.320,00
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	1	4.270.000,00	4.245.000,00
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	2	3.050.000,00	3.020.000,00
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	1	3.050.000,00	3.029.000,00
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	1	1.525.000,00	1.500.000,00
6	Program Penetapan Tanah Ulayat	1	1	1.525.000,00	1.500.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 886.809.261,00,- terealisasi sebesar Rp. 826.146.320,00,- atau 93,16%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 60.662.941,00,- (6,84%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan yang tercapai 100% dengan realisasi anggaran 93,16% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 67,10%.



Misi 7

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Dalam rangka pencapaian misi 7 “mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas” ditetapkan tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 7.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani

Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Birokrasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). *Prinsip-good governance* hanya dapat dicapai melalui birokrasi yang berintegritas tinggi, profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia layanan kepada masyarakat, birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan publik serta tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, birokrasi harus dikelola secara profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas, diperlukan perubahan yang besar dan mendasar terhadap paradigma dan tata kelola pemerintahan yang dikenal sebagai Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan akuntabilitas kinerja. Melalui reformasi birokrasi, birokrasi diharapkan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif.

Untuk mengukur ketercapaian terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani”digunakan indikator indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Mengacu pada Permenpan Nomor 9 tahun 2023, terdapat 7 kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan - 24 - jdih.menpan.go.id No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%), kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber data: Permenpan No 9 Tahun 2023

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Indeks reformasi birokrasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,00. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi yang tercapai di tahun 2024 yaitu sebesar 86,85. Oleh karena itu, target indeks

reformasi birokrasi tahun 2025 disesuaikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 menjadi 87,00 atau meningkat 0,15 poin dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2024. Pencapaian tujuan “terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani” dengan indikator indeks reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2025 diukur berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB melalui portal RB pada tanggal 26 Februari 2025 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	2023	2024
a	RB General	77,15	78,04
b	RB Tematik	9,33	11,28
Nilai Hasil Evaluasi		86,48	89,32
Predikat		A	A

Indeks reformasi birokrasi dengan predikat A menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Berdasarkan indeks RB tahun 2025 diketahui bahwa implementasi RB pada 19 Kabupaten/Kota menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Hal ini terlihat dari bertambahnya 4 daerah yang memperoleh predikat A di tahun 2025. Walaupun masih ada daerah yang mengalami penurunan predikat di tahun 2025 tetapi tidak ada Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat CC. Indeks RB tertinggi masih diperoleh oleh Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk lebih rinci, indeks reformasi birokrasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat disajikan pada tabel 3.56.

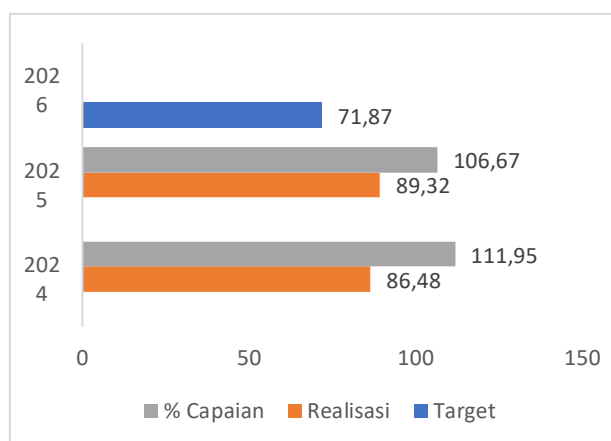
Tabel 3. 56 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2024 dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2025*		2024	
		Indeks RB	Kategori	Indeks RB	Kategori
1	Kota Padang	87,31	A	85,26	A
2	Kota Payakumbuh	84,02	A	83,47	A
3	Kota Solok	81,58	A	83,17	A
4	Kabupaten Pesisir Selatan	80,49	A	79,11	BB
5	Kab. Padang Pariaman	77,43	BB	78,38	BB

No	Kabupaten/Kota	2025*		2024	
		Indeks RB	Kategori	Indeks RB	Kategori
6	Kota Padang Panjang	80,89	A	77,66	BB
7	Kab, Sijunjung	68,21	B	77,26	BB
8	Kabupaten Tanah Datar	79,74	BB	77,23	BB
9	Kab, Dharmasraya	83,73	A	76,64	BB
10	Kabupaten Agam	81,20	A	75,84	BB
11	Kabupaten Solok	72,18	BB	75,08	BB
12	Kota Sawahlunto	79,29	BB	74,78	BB
13	Kab, Pasaman Barat	67,3	B	72,78	BB
14	Kab, Pasaman	66,53	B	72,14	BB
15	Kota Bukit Tinggi	69,13	B	71,99	BB
16	Kab, Solok Selatan	74,65	BB	70,92	BB
17	Kab, Lima Puluh Kota	72,89	BB	70,81	BB
18	Kota Pariaman	76,11	BB	69,52	B
19	Kab, Kepulauan Mentawai	60,64	B	60,46	B

Ket: *Nilai sementara

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, pada tahun 2025 capaian



Indeks RB telah melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 2,84 poin pada tahun 2025.

Target indeks reformasi birokrasi tahun 2026 yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah 71,87, Sementara itu, pencapaian Indeks RB di tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026. Walaupun

telah melampaui target tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan selalu melakukan penguatan untuk implementasi RB di daerah.

Untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, selama tahun 2025 telah dilaksanakan upaya berikut ini:

1. Mereplikasi aplikasi Sibekisar Jawa Timur untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Aplikasi ini dinamakan aplikasi Sirandai, dimana pada aplikasi ini Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan 19 Indikator Kinerja terkait dengan tata kelola di Perangkat Daerah.
2. Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah pengampu dalam menyusun rencana aksi RB General, rencana aksi 5 Tema RB Tematik (penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus

penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri) serta rencana aksi 4 Tema baru RB tematik sesuai SE Menpan No 6/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan RB Masa Transisi (mendorong hilirisasi, mendukung ketahanan pangan, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan).

3. Meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap SE Menpan No 6/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan RB Masa Transisi melalui sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi pengampu implementasi RB General dan Tematik.
4. Melakukan asistensi penyusunan rencana aksi 4 tema baru RB Tematik dengan Provinsi Jawa Barat.
5. Pembangunan aplikasi sumbar berAkhlak untuk meningkatkan internalisasi budaya kerja BerAkhlak pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatra Barat.

Beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi adalah:

1. Rendahnya penguatan kepemimpinan dalam mendorong dampak substantif reformasi birokrasi.
Meskipun rencana aksi telah dilaksanakan secara administratif, komitmen pimpinan dalam mengawal Reformasi Birokrasi sebagai agenda strategis belum optimal. Akibatnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku organisasi dan peningkatan kualitas tata kelola secara nyata.
2. Terbatasnya kepemilikan bersama (*ownership*) antar opd
Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan bersama Pemerintah Provinsi, melainkan masih dipersepsikan sebagai kewajiban administratif atau agenda unit tertentu. Kondisi ini menyebabkan implementasi Reformasi Birokrasi cenderung berhenti pada pemenuhan dokumen dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik kerja sehari-hari OPD.
3. Belum optimalnya kolaborasi substantif lintas perangkat daerah
Koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih bersifat teknis dan administratif, belum mengarah pada kolaborasi substantif untuk menyelesaikan masalah lintas sektor. Hal ini membatasi kemampuan Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Upaya yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran kepemimpinan dalam reformasi birokrasi.



Penguatan Peran pimpinan dilakukan melalui peningkatan keterlibatan pimpinan OPD dalam pengendalian Reformasi Birokrasi melalui rapat evaluasi berkala yang dipimpin langsung oleh pimpinan, menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu agenda strategis pimpinan, yang tercermin dalam target kinerja pimpinan OPD dan mendorong pimpinan OPD berperan sebagai *role model* dalam penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi.

2. Mengarahkan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada hasil dan dampak (outcome). Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan indikator rencana aksi dengan memasukkan indikator yang bersifat output final dan mengintegrasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan program prioritas OPD agar pelaksanaannya tidak berdiri sendiri.
3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi yang menekankan manfaat langsung bagi kinerja OPD dan pelayanan publik, mengintegrasikan indikator Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan dan pengukuran kinerja masing-masing OPD dan memperluas pelibatan OPD dalam perumusan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sumbar berAkhlak untuk meningkatkan Internalisasi budaya kerja berAKhlak pada Perangkat Daerah.
5. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakinah untuk penguatan implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Pencapaian tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani didukung melalui pencapaian 3 sasaran. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:



Tata kelola birokrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Melalui tata kelola yang baik, aparatur pemerintah didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal yang berdampak langsung kepada masyarakat. Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi salah satu kondisi yang harus diwujudkan agar Pemerintah memiliki tata kelola yang baik (*good governance*).



Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel diukur menggunakan 4 indikator yaitu tingkat keberhasilan dalam penilaian SAKIP, Nilai EPPD, opini laporan keuangan serta sebesar apa kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. Pencapaian sasaran “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel diuraikan pada tabel 3.57.

Tabel 3. 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (79)	BB (78,85)	99,81
Nilai EPPD	3,0040	2,9585	98,49
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,75	44,42	109,01
Rata-rata capaian			101,83

Sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian **101,83%** termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

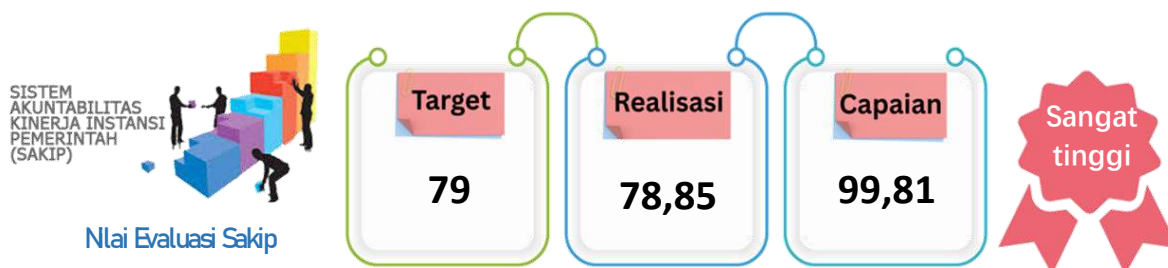
1. Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai evaluasi SAKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, serta mempertanggungjawabkan kinerja secara sistematis dan terintegrasi. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja.

Dalam mengimplementasikan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra

Barat dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat. Implementasi SAKIP berperan sebagai instrumen pengendalian internal yang mendorong birokrasi untuk bekerja berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang terukur yang berdampak pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Merujuk pada PermenPAN No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60- 70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan target Nilai evaluasi SAKIP sebesar BB (79,00) di tahun 2025. Target 79,00 menunjukkan peningkatan 0,02 dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP di tahun 2024 (78,98). Pencapaian indikator nilai evaluasi SAKIP tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Nilai evaluasi SAKIP 78,85 dengan predikat BB diukur berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor:B/221/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,29
2	Pengukuran Kinerja	30	21,91
3	Pelaporan Kinerja	15	12,82
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal	25	18,20
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

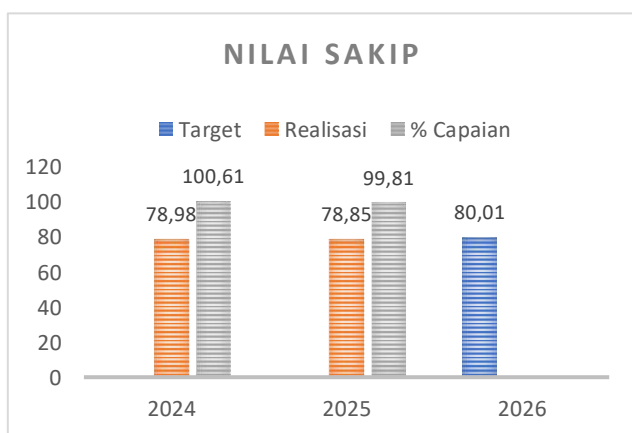
Dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP 78,85 berarti Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih bertahan pada peringkat BB (sangat baik). Nilai evaluasi SAKIP dengan Predikat BB menunjukkan implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dari 4 komponen penilaian terdapat 2 komponen yang mengalami penurunan yaitu komponen perencanaan kinerja (turun 0,17) dan pengukuran kinerja (turun 0,04).

Implementasi SAKIP pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi. Dari total 19 Kabupaten/Kota, terdapat 3 kota dan 1 kabupaten yang memperoleh predikat BB, sementara 15 Kabupaten/Kota lainnya meraih predikat B. Berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP, Kota Padang memperoleh nilai tertinggi, yaitu 78,84, diikuti oleh Kota Payakumbuh dengan nilai 76,31, serta Kota Bukittinggi dengan nilai 71,49. Adapun Kota Pariaman kembali memperoleh predikat B, sementara itu Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan nilai di tahun 2025 ini. Meskipun demikian, kabupaten tersebut tetap mempertahankan predikat B. Secara rinci nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel 3.58.

Tabel 3. 58 Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat tahun 2024 dan 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	2025	2024
1	Kota Padang	78,84	78,68
2	Kota Payakumbuh	76,31	76,01
3	Kota Bukittinggi	71,49	71,43
4	Kab Pesisir Selatan	69,19	68,94
5	Kab Padang Pariaman	71,54	71,05
6	Kota Solok	68,89	68,59
7	Kab Solok	68,74	68,58
8	Kab Tanah Datar	67,77	67,6
9	Kab Agam	67,45	67,11
10	Kab Kep Mentawai	66,50	65,8
11	Kab Pasaman	63,55	63,1
12	Kab Darmasraya	67,42	67,24
13	Kab Sijunjung	66,58	65,99
14	Kota Padang Panjang	65,06	64,22
15	Kota Sawahlunto	64,44	64
16	Kab Pasaman Barat	63,52	63,01
17	Kab 50 Kota	62,09	62,16
18	Kota Pariaman	61,56	57,43
19	Kab Solok Selatan	61,57	61,3

Sumber data: LHE Kabupaten/Kota 2024 dan 2025



Perhitungan capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Berbeda dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini di tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, nilai SAKIP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan capaian tahun 2024. Hal ini

sebagai dampak dari penurunan pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

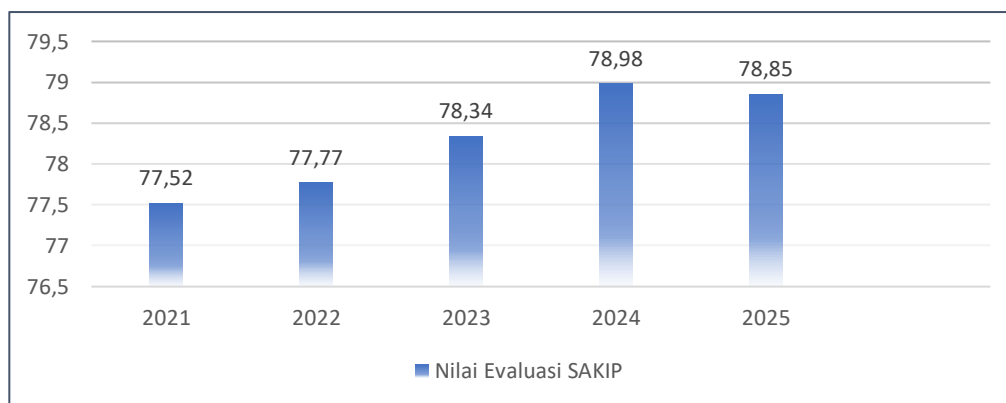


Namun secara predikat, Sumatra Barat masih bertahan pada peringkat BB. Tahun 2025 merupakan tahun ke 11 Provinsi Sumatra Barat memperoleh predikat BB.

Pada tahun 2026, nilai evaluasi SAKIP ditargetkan 80,01. Agar target tahun 2026 dapat dicapai, perlu peningkatan nilai 1,16 poin. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan berupaya lebih optimal dalam penguatan akuntabilitas kinerja kedepannya.

Mengacu pada nilai evaluasi SAKIP, peningkatan implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Terjadi peningkatan dari tahun 2021-2024 dengan kenaikan berfluktuatif setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 0,64 dan terendah di tahun 2022 yaitu sebesar 0,25. Namun, mengalami penurunan di tahun 2025. Penyajian nilai evaluasi SAKIP tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.70.

Grafik 3. 70 Nilai evaluasi SAKIP tahun 2021-2025



Sumber data: Kementerian PAN RB

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, menunjukkan 1 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat AA, 5 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat A dan 13 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Pada tahun 2025, terjadi penambahan 2 pemerintah provinsi yang naik ke predikat BB (Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat termasuk dalam 13 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Provinsi yang memperoleh predikat AA adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan predikat A adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi dengan predikat BB adalah Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selalu mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Adapun upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, memastikan dokumen SAKIP tahun 2025 sudah sesuai dengan yang seharusnya dengan cara:
 - a. Penyampaian Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Nomor 000.8.6.3/014/ED/GSB-2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025. Surat Edaran ini berisikan sistematika dan format dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan reviu dan verifikasi target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah agar target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.
 - c. Pembahasan Penyempurnaan Rencana Aksi dan Verifikasi Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025 yang diikuti oleh 21 Perangkat Daerah Penanggung Jawab.
 - d. Melakukan Pembinaan Kepada OPD dalam hal menyusun Dokumen SAKIP dan dalam pengisian Aplikasi e-SAKIP dan Aplikasi SAKIP Menpan Reviu.
 - e. Melakukan verifikasi dokumen SAKIP yang sudah dientrikan pada <https://esr.menpan.go.id/>
 - f. Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dan Penyempurnaan Pohon Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Bappeda dan Inspektorat Daerah.
2. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD dilakukan secara berkala (pertriwulan) dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target.
3. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat video edukasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah <https://youtu.be/OKRnR5Htyto?si=go43CcLW6Knm-lgd>
 - b. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD.
 - c. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap draft Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.



4. Pembangunan Aplikasi SAKINAH yang mengakomodir dokumen SAKIP sampai level individu yang diintegrasikan dengan aplikasi simpeg, simbangda dan emadani.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatra Barat antara lain:

1. Belum seluruh Pimpinan OPD memahami peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam implementasi SAKIP di OPDnya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat dalam implementasi SAKIP di OPDnya masing-masing.
2. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti secara optimal rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah.
3. Tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, sehingga perbaikan yang dilakukan belum memberikan dampak optimal.
4. Koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam implementasi SAKIP masih belum optimal, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja lintas sektor.
5. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja.
6. Pemanfaatan aplikasi SAKIP dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat belum optimal.

Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatra Barat ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dari Bappeda, Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di daerah.
2. Kolaborasi antar perangkat daerah perlu ditingkatkan agar implementasi SAKIP berjalan lebih baik
3. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
4. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
5. Konsistensi pelaksanaan reviu dokumen SAKIP dan mengoptimalkan peran dari Bappeda, Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi dalam pendampingan terhadap Perangkat Daerah.



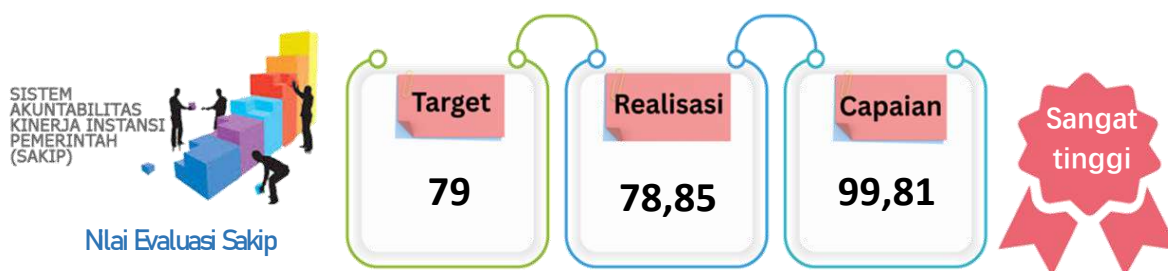


2. Nilai EPPD

Penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) masing-masing Pemerintah Daerah. Nilai EPPD merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemerintahan daerah

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatra Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun n. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 2) penghitungan capaian kinerja makro; 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026, nilai EPPD tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,0040. Target tahun 2025, ditetapkan lebih tinggi 0,001 dari target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai EPPD tahun 2025 ditargetkan lebih tinggi 0,2707. Pencapaian indikator nilai EPPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Nilai EPPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat 2,9585 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7- 2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024. Dengan nilai EPPD 2,9585 berarti status kinerja termasuk kategori *sedang* sebagaimana disajikan pada tabel 3.59.

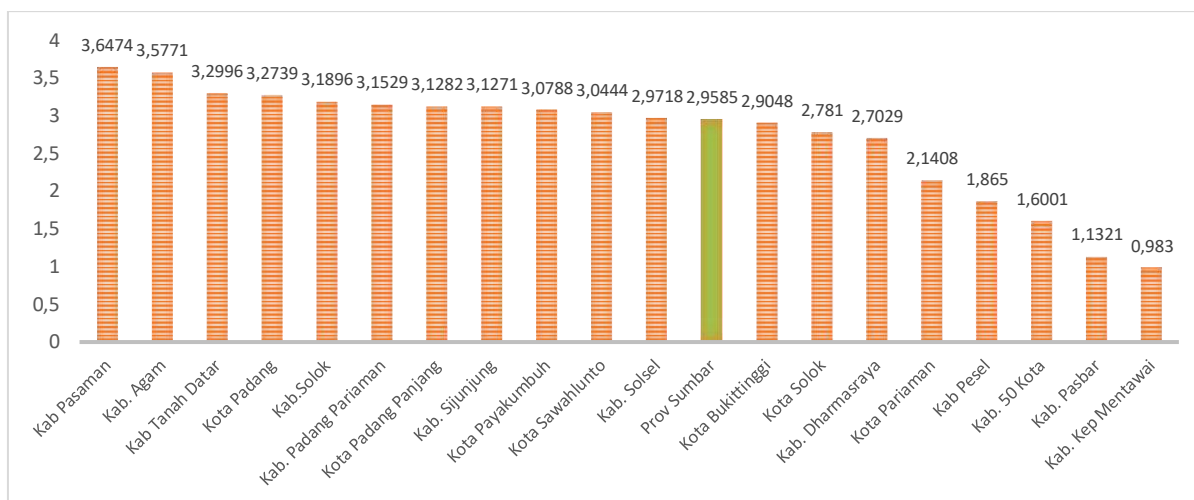


Tabel 3. 59 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Status kinerja Kabupaten/Kota di Sumatra Barat pada tahun 2025 berada pada *rentang* sangat rendah hingga tinggi. Kabupaten Pasaman menempati peringkat tertinggi dengan status kinerja tinggi, diikuti oleh Kabupaten Agam. Sebanyak 12 Kabupaten/Kota dengan status kinerja sedang sejalan dengan status kinerja Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Kabupaten 50 Kota, Kab Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai berada pada kategori sangat rendah. Sebaran nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatra Barat berdasarkan nilai EPPD yang dikeluarkan di tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.71.

Grafik 3. 71 Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatra Barat

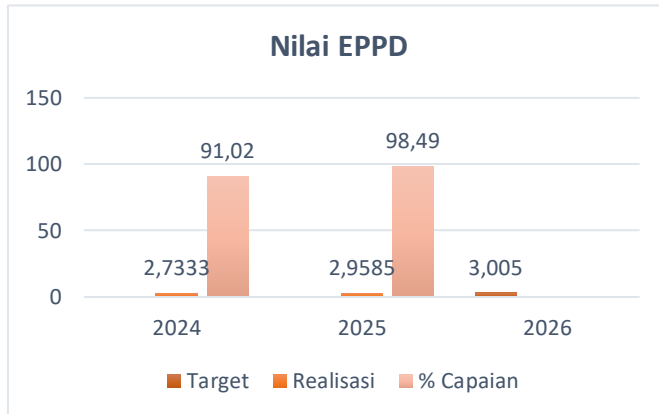


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai EPPD menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025, Nilai EPPD mengalami peningkatan sebesar 0,2252 dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, baik 2024 ataupun 2025, capaian nilai EPPD

belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2024-2025 yang masih di bawah 100%.

Nilai EPPD Sumatra Barat sebesar 2,9585 atau mencapai 98,45% dari target 3,0050 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membutuhkan kenaikan 0,465 agar target tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan

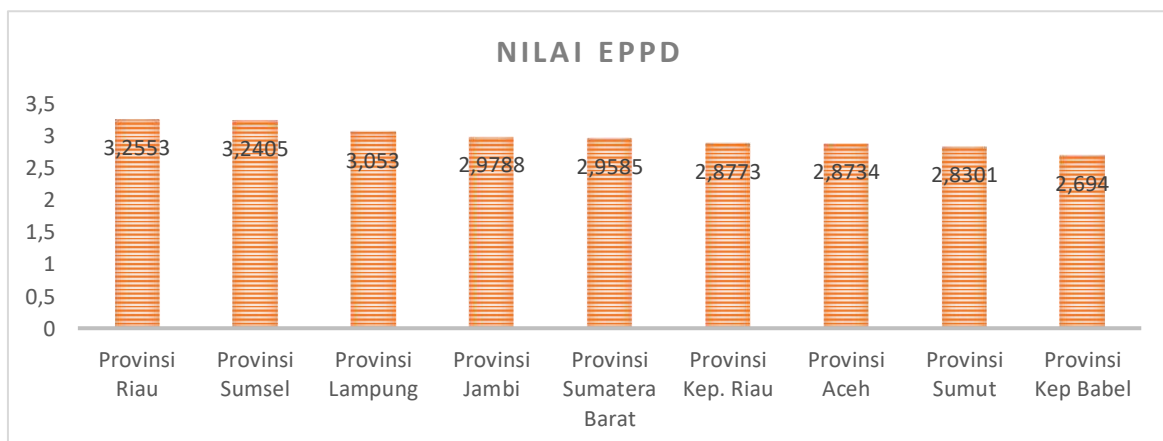


tren peningkatan nilai EPPD pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berupaya secara optimal agar target tahun 2026 dapat tercapai.

Secara nasional, Provinsi Sumatra Barat menempati peringkat ke-16 dari 33 provinsi yang dievaluasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025. Peringkat tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 9 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tingkat regional, dari 9 provinsi di Pulau Sumatra yang dinilai, Provinsi Sumatra Barat berada pada peringkat ke-5. Adapun nilai EPPD tertinggi di Pulau Sumatra diraih oleh Provinsi Riau. Perbandingan Nilai EPPD Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.72.

Grafik 3. 72 Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra



Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dalam hal meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selama tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi terpadu antar instansi vertikal dan perangkat daerah untuk memastikan program strategis provinsi berjalan selaras di tingkat kabupaten/kota.



2. Melakukan koordinasi penyelesaian batas daerah serta memfasilitasi kerja sama antar-kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah guna meningkatkan pelayanan publik.
3. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah terkait implementasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan pemerintahan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Terlepas dari upaya tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hambatan/kendala tersebut antara lain:

1. Kesenjangan kapasitas SDM, dimana terdapat variasi kompetensi aparatur di berbagai OPD dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat yang dinamis.
2. Masih adanya ego sektoral dalam pengelolaan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga sinkronisasi kebijakan sering kali terhambat oleh perbedaan basis data dan integrasi informasi antar dinas sering kali menemui kendala.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran yang harus dibagi ke berbagai sektor prioritas.
4. Perubahan regulasi dari tingkat kementerian/pusat yang sangat dinamis memerlukan waktu adaptasi yang intensif bagi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan sumber daya tambahan bagi aparatur daerah untuk melakukan penyesuaian teknis.

Langkah strategis yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depannya adalah:

1. Mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi untuk mempercepat pelayanan administrasi dan pengambilan keputusan.
2. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), dengan meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat.
3. Mengoptimalkan peran Biro Pemerintahan dan Otda sebagai pendamping teknis bagi OPD dalam menyelesaikan permasalahan administrasi pemerintahan.
4. Membangun komunikasi yang lebih intensif dengan kementerian terkait untuk memastikan program nasional terserap dengan baik di Sumatra Barat.



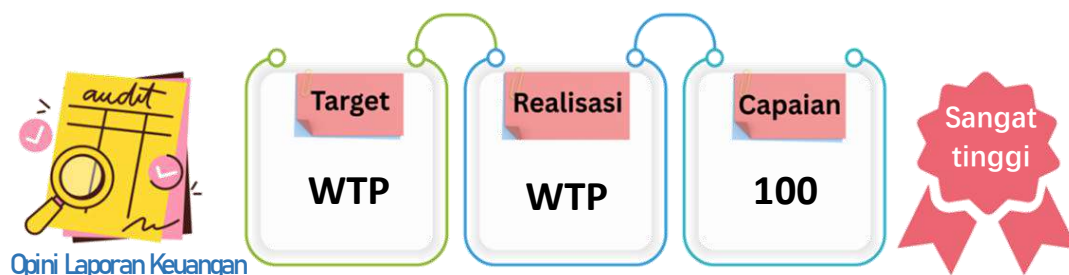


5. Mendorong untuk menciptakan inovasi tata kelola yang dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

3. *Opini Laporan Keuangan*

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah dari opini laporan keuangan. Opini terhadap laporan keuangan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan tahun n-1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*). Dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah ada beberapa kriteria yang menjadi acuan oleh BPK yaitu: 1). kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga menargetkan perolehan opini laporan keuangan WTP pada tahun 2025. Opini WTP merupakan apresiasi tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pencapaian indikator opini laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Realisasi opini laporan keuangan WTP diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024 Nomor: 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

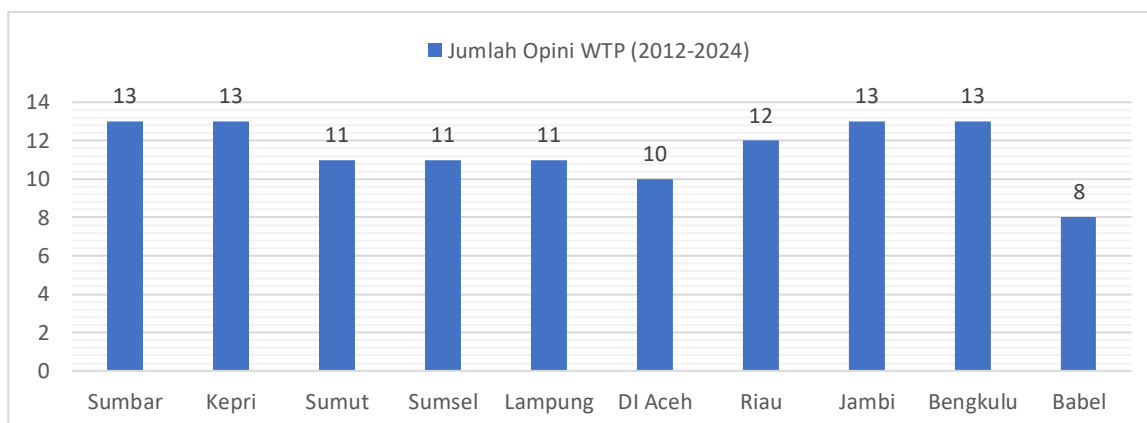


Provinsi Sumatra Barat tahun 2024. Perolehan opini WTP di tahun 2025 merupakan perolehan ke 13 kali secara berturut-turut.

Perhitungan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100% yang menunjukkan realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perolehan opini laporan keuangan WTP di tahun 2025 merupakan perolehan ke 13 kali bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Untuk selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan dapat mempertahankan opini WTP, target ini optimis dapat dicapai.

Pada regional Sumatra, Provinsi Sumatra Barat termasuk dalam 4 Provinsi yang memperoleh Opini WTP ke 13 kali untuk untuk LKPD 2012-LKPD 2024. Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Perolehan opini WTP Provinsi di regional Sumatra secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.73.

Grafik 3. 73 Jumlah Opini WTP (2012-2024)



Sumber data : bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi/aplikasi dengan K/L terkait.
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan.



4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan secara terus menerus, melalui bimtek/sosialisasi keuangan dan aset daerah.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan:
 - a. menjaga validasi data/angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan utang.
 - b. meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.
7. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas serta lengkap kepada auditor dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan pengelolaan keuangan yang terjadi sebagai dampak kebijakan dari pemerintah pusat.
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
11. Berupaya untuk mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
12. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Itjen dan APIP.

Hambatan yang dihadapi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara lain:

1. Banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi yang terjadi.
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan daerah tentang tata kelola keuangan yang baik sehingga masih terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.



3. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Masih banyak terjadi permasalahan dalam penggunaan SIPD-RI baik dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi sedikit terhambat.
5. Belum tersosialisasinya peraturan dan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat secara keseluruhan kepada pengelola keuangan di daerah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Upaya di masa yang akan datang dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- a. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD di lingkup Pemprov Sumbar serta pihak-pihak terkait dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih dan akuntabel.
- b. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan aplikasi SIPD di Kemendagri untuk peningkatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat dipercaya guna peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Mendorong penyederhanaan peraturan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas.
- e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- f. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua OPD.

4. *Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah*

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam pendapatan daerah adalah PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber terbesar dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Dari keempat sumber PAD tersebut, sektor Pajak Daerah masih menjadi andalan daerah dan menjadi penyumbang utama terhadap PAD, dimana pajak daerah terdiri dari:





1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Minyak
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Menurut PMK Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Sumatra Barat berada pada kelompok daerah **kapasitas fiskal rendah dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,535 menempati peringkat ke-22 dari 38 provinsi se Indonesia**. Dengan kapasitas fiskal yang rendah berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lemah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya tidak cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja pemerintah sehingga dibutuhkan berbagai upaya agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam hal pengelolaan keuangan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya dan berpengaruh pada tata kelola pemerintah yang lebih baik. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai salah satu ukuran tercapainya peningkatan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi penerimaan/pendapatan daerah.

Dalam RPJMD tahun 2021-2026, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan 40,75%. Penetapan target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di RPJMD mengacu pada potensi pendapatan Provinsi Sumatra Barat. Jika dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2024 yang mencapai 45,31%, maka target tahun 2025 lebih rendah 4,56%. Pencapaian indikator Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:



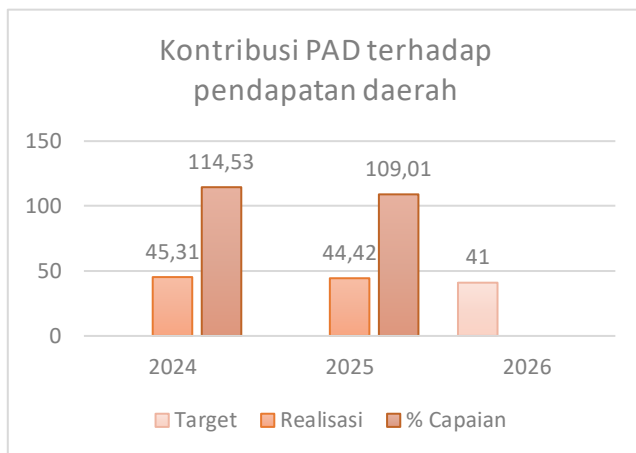
Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari aplikasi SIPD RI dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah} = \frac{\text{Rp. 2.752.690.753.329,92}}{\text{Rp. 6.196.761.525.955,92}} \times 100\% = 44,42\%$$

Keterangan:

PAD = Rp. 2.752.690.753.329,92

Pendapatan = Rp. 6.196.761.525.955,92



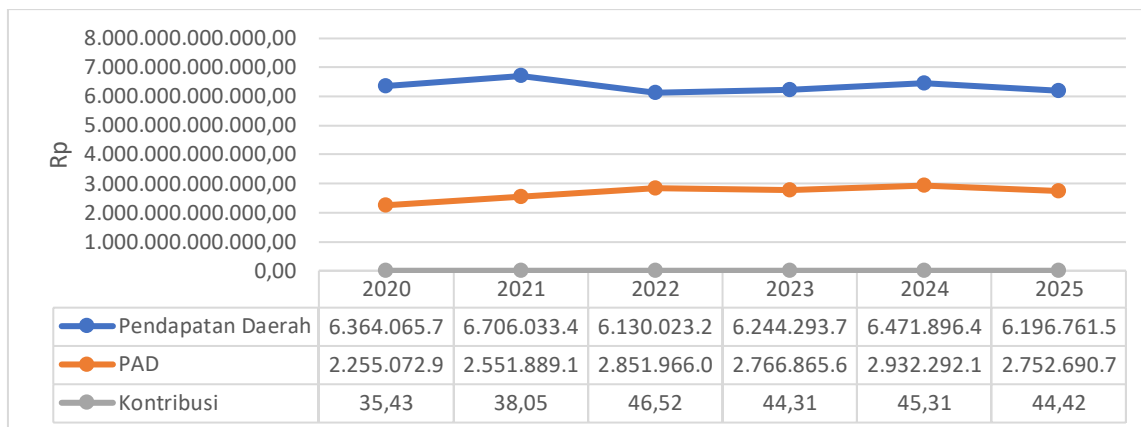
Perhitungan capaian indikator kinerja kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator ini di tahun 2024 dan 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2024, secara absolut nilai

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **0,89%**. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya nilai PAD pada tahun 2025, yaitu sebesar **Rp179.601.423.367,75**.

Pada tahun 2026, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 41%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 44,42%. Mengingat indikator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pada tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimistis target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2026 dapat tercapai.

Perkembangan PAD Provinsi Sumatra Barat selama periode 2020-2025 menunjukkan nilai yang berfluktuatif. PAD mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Selanjutnya, PAD kembali meningkat pada tahun 2024 sebelum kembali menurun pada tahun 2025. Kenaikan PAD tertinggi selama periode 2020-2025 terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp300.076.851.582,71. Secara rinci, gambaran PAD dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik 3.74.

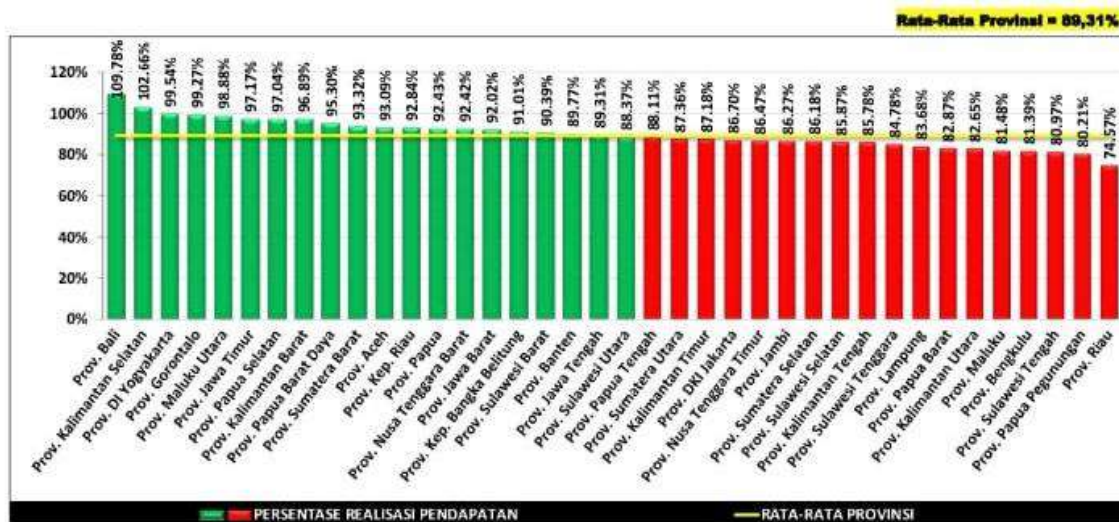
Grafik 3. 74 Gambaran PAD Provinsi Sumatra Barat dari tahun 2020-2025



Sumber data: Bapenda Sumbar

Berdasarkan data persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun 2025 yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Provinsi Sumatra Barat menempati urutan ke 10 dari 38 provinsi se Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.75.

Grafik 3. 75 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2025



Sumber Data : Laporan 38 Pemrov untuk LRA per 23 Desember 2025 (Data Dialeh), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2025

14

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatra Barat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berhasil mengumpulkan pendapatan sesuai target atau mendekati target yang ditetapkan. Namun dengan rasio kapasitas fiskal yang rendah, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan yang dikumpulkan dengan beban kewajiban atau pengeluaran yang harus ditanggung. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Beban pengeluaran yang tinggi. Meskipun pendapatan yang masuk banyak, pengeluaran pemerintah provinsi (untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain) juga sangat tinggi.
2. Ketergantungan pada dana transfer. Pada APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 postur pendapatan transfer mencapai 54,54% dari seluruh total pendapatan daerah.

Dalam meningkatkan penerimaan PAD, selama tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah
2. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah untuk memudahkan pembayaran dan mencegah hilangnya potensi penerimaan pendapatan daerah
3. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan fasilitas publik agar menghasilkan pendapatan.
4. Kerja sama dengan pihak swasta melalui sewa atau investasi bersama.
5. Mendorong BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar lebih produktif dan kompetitif.
6. Melatih aparatur pajak dan retribusi agar lebih profesional.
7. Meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas dengan melibatkan *stakeholder* terkait (kepolisian, kejaksaan dan aparat hukum lainnya)
8. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada para wajib pajak dan retribusi daerah
9. Memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku usaha yang taat pajak.
10. Membangun system pembayaran berbasis teknologi informasi

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra dalam meningkatkan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD masih didominasi oleh pajak daerah.
2. Pendataan objek pajak masih belum optimal
3. Mekanisme pemungutan masih belum optimal
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Ke depannya, akan dilakukan upaya berikut untuk meningkatkan pendapatan daerah:

1. Optimalisasi PAD melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah
2. Optimalisasi pengembangan database dan penerapan digitalisasi layanan pajak daerah.
3. Optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data yang akurat, mudah diakses, dan ramah bagi masyarakat.



4. Peningkatan profesional ASN Bapenda Provinsi Sumatra Barat dalam pemanfaatan teknologi digital yang mendukung pelayanan publik.
5. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

Untuk mewujudkan kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, dilaksanakan 12 Program dengan 37 Kegiatan dan 148 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 4.584.969.037.714,52,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 60 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	37	148	4.584.969.037.714,52	4.363.741.859.645,04
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	25	933.027.133.368,49	930.296.614.491,00
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	9	880.347.000,00	786.857.873,00
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	10	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	9	2.826.274.624,00	2.642.530.911,00
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	6	507.327.000,00	455.019.471,00
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	3	766.461.262,00	748.050.050,00
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	16	626.656.990,00	569.695.825,00
8	Program Penataan Organisasi	2	8	198.836.725,00	177.196.500,00
9	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	9	327.636.984,00	311.986.184,00
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	9	335.425.000,00	307.270.500,00
11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2	6	184.520.000,00	130.330.000,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	38	3.642.600.539.481,03	3.425.102.140.000,04

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.584.969.037.714,52,- terealisasi sebesar Rp. 4.363.741.859.645,04,- atau 95,17%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 221.227.178.069,48,- (4,83%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kualitas tatakelola



birokrasi yang bersih dan akuntabel yang tercapai 101,83 % dengan realisasi anggaran 95,17% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 66,64%.



Sasaran 7.1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus mampu meningkatkan kapabilitas birokrasi. Kapabilitas birokrasi ditandai oleh sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang kapabel mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara tepat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengelola sumber daya negara secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk menciptakan birokrasi yang kapabel, birokrasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan adaptif, memiliki pemimpin yang kuat dan visioner, memiliki aparatur yang profesional, memiliki akuntabilitas dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Meningkatkan kapabilitas birokrasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan 2 indikator kinerja yaitu Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks SPBE	3,85	3,85	100
Indeks Profesionalitas ASN	80,81	83,67	103,54
Rata-rata capaian			101,77

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi 101,77% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Penjelasan masing-masing



indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu, penerapan SPBE secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi SPBE memberikan peluang untuk mendorong pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan publik, serta menekan penyalahgunaan kewenangan melalui sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

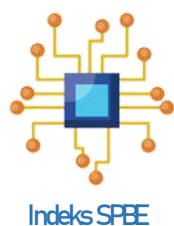
Untuk mengukur keberhasilan implementasi SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Indeks SPBE sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman MenPANRB

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nomor 3 Tahun 2024, penilaian Indeks SPBE dilakukan terhadap 47 indikator tingkat kematangan yang mencakup empat domain, yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE, dengan skala indeks 0–5.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target Indeks SPBE tahun 2025 telah ditetapkan 3,50. Akan tetapi, realisasi Indeks SPBE pada tahun 2024 telah mencapai 3,85 atau 0,35 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPMJD. Oleh karena itu, target indeks SPBE tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,85 sama dengan realisasi tahun 2024. Pencapaian indikator Indeks SPBE tahun 2025 disajikan sebagai berikut:





Untuk tahun 2025, dikarenakan indeks SPBE melebihi target tahun terakhir RPJMD, evaluator Kementerian PAN dan RB tidak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Sehingga, realisasi indeks SPBE sebesar 3,85 di tahun 2025 masih didasarkan pada

No	Domain	Indeks
1	Domain Kebijakan internal SPBE	3,7
2	Domain tata kelola SPBE	3,80
3	Domain Layanan SPBE	4,26
4	Domain Manajemen SPBE	2,91

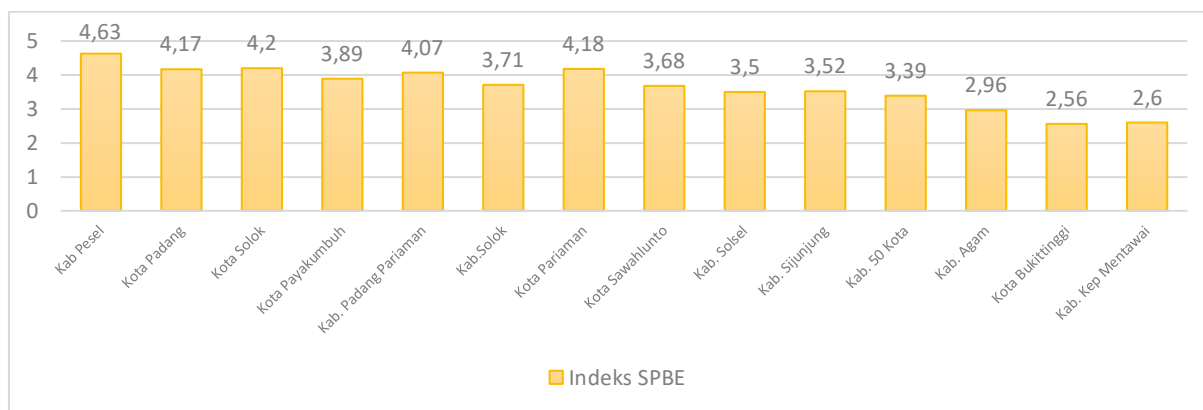
Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024

hasil evaluasi Kementerian PAN & RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663

Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024.

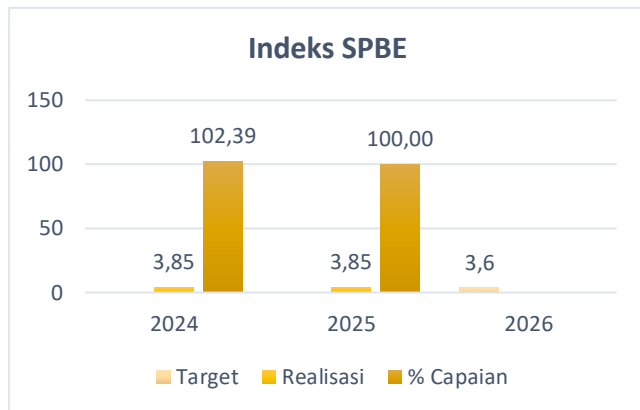
Evaluasi dan pemantauan indeks SPBE di tahun 2025 tidak dilakukan terhadap 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Evaluasi hanya dilaksanakan pada 14 Kabupaten/Kota dengan sebaran Indeks SPBE berada pada *rentang* predikat “Cukup – Memuaskan”. Indeks SPBE tertinggi diraih oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,63 diikuti oleh Pemerintah Kota Solok dengan predikat “memuaskan”. Sementara itu, nilai indeks SPBE terendah dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar 2,56 dengan predikat “cukup”. Selain itu, Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman tercapat lebih tinggi dibandingkan Indeks SPBE Provinsi Sumatra Barat. Gambaran Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatra Barat disajikan pada grafik 3.76.

Grafik 3. 76 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2025



Sumber data: Masing-masing Kabupaten/Kota, 2025

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks SPBE menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2025 sebesar 100%. Indeks SPBE tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan masih menggunakan realisasi yang sama.

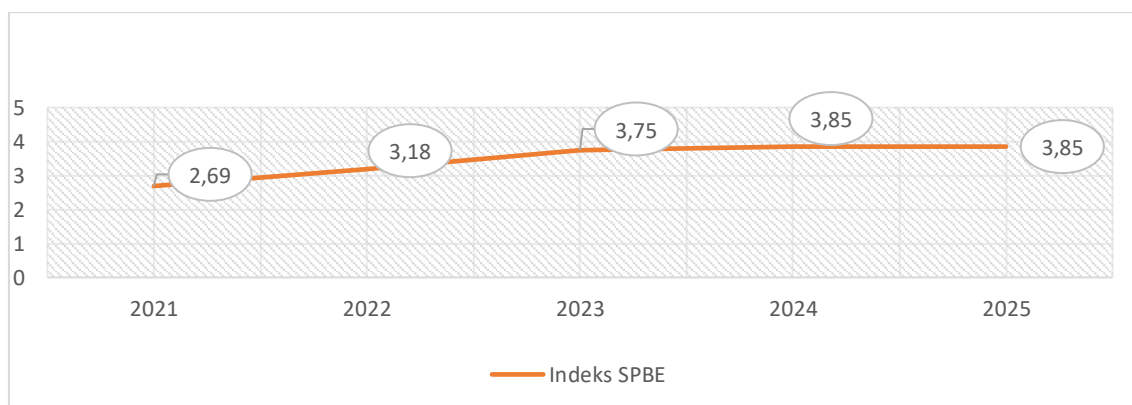


Sejak tahun 2023, realisasi Indeks SPBE telah tercapai melebihi target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Berdasarkan kondisi ini, mulai tahun 2025 Kementerian PAN dan RB tidak melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE di Provinsi Sumatra Barat tetapi nantinya akan melakukan penilaian pemerintah digital.

Secara Nasional, dari 37 Provinsi se Indonesia, hanya 24 Provinsi (64,86%) yang dinilai implementasi SPBEnya di tahun 2025. Dari 24 Provinsi tersebut 7 berasal dari regional Sumatra yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Sumatra Utara.

Indeks SPBE Sumatra Barat dari tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Kenaikan sebesar 0,57 di tahun 2023 masih menjadi peningkatan tertinggi dalam rentang waktu 2020-2025. Perkembangan Indeks SPBE Sumatra Barat tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.77.

Grafik 3. 77 Indeks SPBE Sumatra Barat tahun 2021-2025



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024

Selama tahun 2025, upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu:
 1. Melakukan revisi Perda No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan SPBE menyesuaikan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 2. Menyesuaikan Pergub No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 3. Menyusun Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi dengan terbitnya Pergub No. 37 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
 4. Menyusun dan menetapkan pedoman pengendalian keamanan informasi dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 555-453-2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 555-997-2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Komputer Provinsi Sumatra Barat.
 5. Menyusun dan menetapkan pedoman manajemen keamanan informasi dalam bentuk Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Manajemen Kemanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- c. Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan data antar instansi pemerintah (pusat/daerah)
- d. Melakukan Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan OPD.
- e. Menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah di OPD lingkup Pemprov Sumbar.
- f. Memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk beberapa aplikasi yang dimanfaatkan di OPD
- g. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam memanfaatkan aplikasi berbagi pakai

Adapun yang menjadi kendala/hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain:

1. Belum optimalnya peran tim koordinasi SPBE
2. Masih banyak manajemen SPBE yang belum memiliki pedoman pelaksanaan, sehingga pelaksanaan saat ini tanpa mengacu pada pedoman yang ditetapkan. Seperti pelaksanaan manajemen aset TIK, belum mempunyai pedoman yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK yang menjadi penilaian indikator manajemen aset TIK.



3. Belum dimanfaatkannya arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE.

Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ke depannya antara lain:

- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait Pengelolaan SPBE.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan SPBE.
- c. Menyusun kebijakan internal yang merupakan turunan dari Perda SPBE/Pemerintah Digital
- d. Melakukan kegiatan rapat koordinasi secara berkala untuk menyusun program kerja Tim Koordinasi SPBE yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan SPBE dan evaluasi pelaksanaan program kerja
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan SPLP untuk integrasi aplikasi
- f. Melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi untuk mendukung percepatan transformasi digital
- g. Mengoptimalkan penggunaan arsitektur SPBE dan Peta SPBE sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE
- h. Melakukan reviu dan mendokumentasikan pembaruan layanan berdasarkan hasil reviu untuk peningkatan kualitas layanan.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Profesionalitas ASN tercermin dari kompetensi, integritas, etika kerja, serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN yang profesional mampu bekerja berdasarkan keahlian, bersikap netral, disiplin, dan bertanggung jawab, serta terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan publik.

Untuk mengetahui tingkat profesionalisme/profesionalitas ASN digunakan indikator indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan





Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana pengukuran menggunakan indikator data (individu) pegawai, sebagai berikut yaitu:

- Kualifikasi:** mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formasi PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Data yang digunakan adalah data pendidikan formal dengan indikator pendidikan formal terakhir. Bobot penghitungan: 25%
- Kompetensi:** mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Data yang digunakan adalah data pengembangan kompetensi, dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi (misal: diklat PIM/struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/*workshop*). Bobot penghitungan: 40%
- Kinerja:** mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang digunakan adalah data hasil penilaian kinerja, dengan indikator hasil penilaian kinerja (nilai sasaran kinerja pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Bobot penghitungan: 30%
- Disiplin:** mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan indikator, data/informasi hukuman disiplin (seperti: tidak pernah terkena hukuman disiplin, pernah terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Bobot penghitungan: 5%

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi (poin 91-100), kategori tinggi (poin 81-90), kategori sedang (poin 71-80), kategori rendah (poin 61-70), kategori sangat rendah (poin ≤ 60).

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021–2026, target IP ASN Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,00. Namun, realisasi capaian IP ASN Tahun 2024 mencapai 80,81 atau telah melampaui target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, target IP ASN Tahun 2025 disesuaikan dan ditetapkan sebesar 80,81, sama dengan capaian tahun 2024. Pencapaian indikator IP ASN tahun 2024 disajikan sebagai berikut:





Realisasi IP ASN 83,67 diukur berdasarkan listing nilai IP ASN Instansi Wilayah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru per 12 Desember 2025. Dengan IP ASN 83,67 menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Sumatra Barat berada di kategori tinggi. Pengukuran IP ASN tahun 2025 dilakukan terhadap 17.814 sampel (PNS dan PPPK). Jumlah sampel tahun 2025 lebih tinggi 1.144 orang dibandingkan sampel tahun 2024. Sama dengan tahun 2024, dari 4 komponen yang membangun IP ASN, komponen kompetensi menunjukkan

No	Indikator Pengukuran	Bobot (%)	Nilai 2025	Nilai 2024
1	Kualifikasi	25	20,78	21,63
2	Kompetensi	40	31,76	29,29
3	Kinerja	30	26,15	24,88
4	Kedisiplinan	5	5	5

Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional

peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2025. Dengan IP ASN 80,81 menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Sumatra Barat berada di kategori sedang.

Sebaran tingkat profesionalitas ASN di 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat berada pada kategori “rendah – tinggi”. Terdapat 10 Kabupaten/Kota memperoleh Tingkat profesionalitas kategori **tinggi**, 8 Pemerintah Daerah Kategori Tingkat profesionalitas **sedang** dan kategori rendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62 IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatra Barat Tahun 2025

No	Nama Instansi	Jumlah ASN	Rata-rata IP ASN	Kategori
1	Pemerintah Kota Pariaman	2.374	83,47	Tinggi
2	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.804	82,78	Tinggi
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	4.140	82,54	Tinggi
4	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	6.604	82,53	Tinggi
5	Pemerintah Kota Padang	7.118	81,89	Tinggi
6	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.967	81,58	Tinggi
7	Pemerintah Kab. Pasaman	4.303	81,15	Tinggi
8	Pemerintah Kota Solok	1.930	80,96	Tinggi
9	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.292	80,82	Tinggi
10	Pemerintah Kab. Solok	4.624	80,17	Tinggi
11	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.870	79,46	Sedang
12	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	6.476	79,15	Sedang
13	Pemerintah Kab. Agam	5.924	79,06	Sedang
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.516	78,80	Sedang
15	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	5.602	78,74	Sedang
16	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	6.399	78,34	Sedang
17	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.912	77,69	Sedang

No	Nama Instansi	Jumlah ASN	Rata-rata IP ASN	Kategori
18	Pemerintah Kota Sawahlunto	2.238	76,53	Sedang
19	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.698	71,09	Rendah
Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional				

Perhitungan capaian indikator kinerja IP ASN menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2025 capaian IP ASN sebesar 103,54% menunjukkan bahwa target IP ASN tahun 2025 telah berhasil dicapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, IP ASN di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,86 poin.



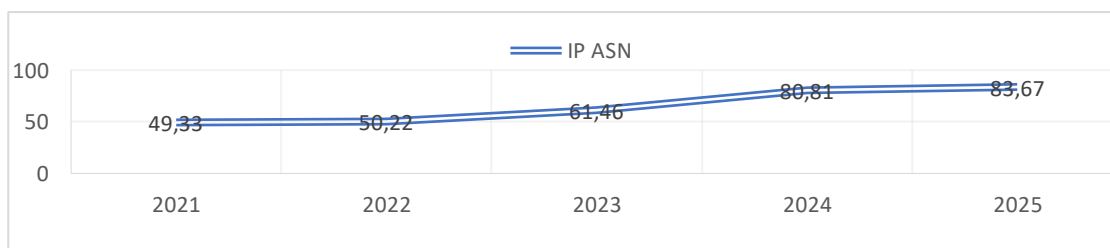
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026 ditargetkan sebesar 82,00.

Sementara itu, capaian IP ASN Tahun 2025 mencapai 83,67, yang menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2026. Capaian tersebut mencerminkan kinerja positif dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dan keberlanjutan peningkatan profesionalitas ASN melalui penguatan manajemen ASN dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

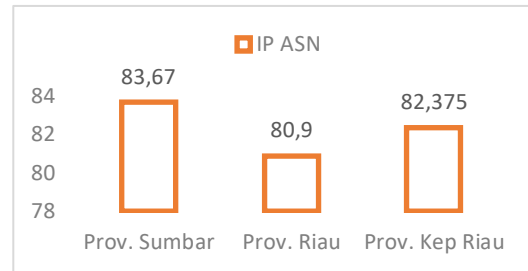
IP ASN Sumatra Barat Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 8,585%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 19,35. Peningkatan IP ASN dari tahun ke tahun mencerminkan konsistensi Provinsi Sumatra Barat dalam melakukan perbaikan kualitas manajemen ASN, khususnya dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, serta menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pengembangan ASN yang telah dilaksanakan.

Perkembangan IP ASN Sumatra Barat tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik 3.78.

Grafik 3. 78 IP ASN Sumatra Barat tahun 2021-2025



Jika dibandingkan dengan 2 Provinsi lain yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, IP ASN Provinsi Sumatra Barat menempati urutan pertama tertinggi yang diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualifikasi pendidikan ASN melalui:
 - a. fasilitasi dan pengendalian peningkatan jenjang pendidikan formal yang selaras dengan kebutuhan jabatan.
 - b. memastikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diduduki sebagai bagian dari penataan dan pengembangan karier ASN secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kompetensi ASN dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai program pengembangan kompetensi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural secara blended learning, *daring* dan klasikal.
3. Mengoptimalkan penerapan sistem manajemen kinerja ASN yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur, relevan dengan tujuan organisasi, serta selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik dan objektif, serta hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan karier, pemberian penghargaan, dan pembinaan ASN.
5. Penegakan disiplin dilakukan secara konsisten dan berkeadilan melalui pembinaan preventif, pengawasan melekat, serta pemberian sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
6. Mendorong internalisasi nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, sehingga disiplin ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja organisasi

Adapun kendala dalam peningkatan profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat diantaranya:

1. Masih terdapat ASN yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar jabatan, serta adanya kesenjangan kompetensi antar perangkat daerah dan wilayah

2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terbatas.
Keterbatasan anggaran, kuota diklat, serta belum optimalnya pemanfaatan metode pembelajaran berbasis digital (*e-learning, coaching, mentoring*) menyebabkan pengembangan kompetensi belum merata dan berkelanjutan.
3. Sistem manajemen talenta belum berjalan optimal
4. Pemetaan potensi dan kinerja ASN sebagai dasar pengembangan karier, mutasi, dan promosi jabatan belum sepenuhnya berbasis merit sistem.

Upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN ke depannya antara lain:

1. Mendorong peningkatan kesesuaian kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diduduki melalui:
 - a. penataan dan pemetaan jabatan berbasis kebutuhan organisasi melalui fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan formal ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penguatan kebijakan penempatan ASN berbasis latar belakang pendidikan.
 - c. optimalisasi data kualifikasi ASN dalam sistem informasi kepegawaian sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang berbasis kebutuhan jabatan dan hasil pemetaan kompetensi.
3. Penguatan sistem manajemen kinerja ASN yang selaras antara kinerja individu dan kinerja organisasi.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan disiplin secara preventif dan korektif, termasuk penerapan sistem absensi elektronik yang terintegrasi serta penegakan hukuman disiplin secara konsisten dan berkeadilan.
5. Penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional melalui keteladanan pimpinan menjadi faktor penting dalam menjaga disiplin ASN secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi, dilaksanakan 11 Program dengan 27 Kegiatan dan 91 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 20.270.317.391,25,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 63 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	27	91	20.270.317.391,25	18.644.846.812,00
1	Program Kepegawaian Daerah	4	22	1.950.362.501,00	1.792.518.242,00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	8	3.118.256.700,00	2.799.837.810,00
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	7	5.023.368.851,00	4.572.044.594,00
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	8	8.338.931.719,25	7.961.713.340,00
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	5	73.539.000,00	63.419.000,00
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	5	48.340.000,00	26.850.000,00
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2	6	347.277.000,00	230.898.000,00
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	3	10	182.574.000,00	167.236.429,00
9	Program Pengelolaan Arsip	3	11	56.773.700,00	56.355.337,00
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2	2	9.800.000,00	9.800.000,00
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	7	1.121.093.920,00	964.174.060,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 20.270.317.391,25,- terealisasi sebesar Rp. 18.644.846.812,00,- atau 91,98%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.625.470.579,25,- (8,02%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi yang tercapai 102,99% dengan realisasi anggaran 101,77% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 74,47%.



Sasaran 7.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan pelayanan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). IPKP merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, mencakup aspek prosedur, waktu layanan, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan.

Indikator indeks persepsi kualitas pelayanan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Pertanyaan survei mengacu pada indikator yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan 14/2017) mengenai Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi:





- Ketersediaan Informasi:** Menilai sejauh mana informasi terkait pelayanan publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Kemudahan Proses Pelayanan:** Mengukur seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dan menyelesaikan proses pelayanan, termasuk kelengkapan dokumen yang diperlukan.
- Waktu Pelayanan:** Menilai kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Kesesuaian Pelayanan dengan Kebutuhan:** Menentukan sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kesopanan dan Profesionalisme:** Mengukur tingkat kesopanan, etika, dan profesionalisme pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penanganan Pengaduan:** Menilai efektivitas dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan.
- Pemahaman Masyarakat:** Mengukur sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan proses dari pelayanan yang diberikan.
- Keamanan dan Keamanan Pelayanan:** Menilai faktor keamanan dan kenyamanan selama masyarakat menggunakan atau menerima pelayanan.
- Partisipasi Masyarakat:** Menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan yang diterima.
- Ketepatan Waktu Pelayanan:** Mengukur sejauh mana pelayanan diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Transparansi:** Menilai tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator target indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2025 adalah sebesar 88. Target ini lebih rendah 0,45 poin dibandingkan dengan indeks persepsi kualitas pelayanan yang terealisasi di tahun 2024. Pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik” tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:



Realisasi indeks persepsi kualitas pelayanan publik 85,57 diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada 52 penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada aplikasi SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat). Dengan rata-rata indeks persepsi kualitas pelayanan 85,57 berarti rata-rata kualitas pelayanan termasuk kategori **“baik”**. Rincian hasil survei survei kepuasan masyarakat tahun 2025 diuraikan pada tabel 3.64.

Tabel 3. 64 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	Sangat Baik
2	Biro Umum	94,75	Sangat Baik
3	DP3AP2KB	93,75	Sangat Baik
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92	Sangat Baik
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	92	Sangat Baik
6	RSUD Pariaman	92,25	Sangat Baik
7	Biro Administrasi Pimpinan	90,75	Sangat Baik
8	Sekretariat DPRD	91	Sangat Baik
9	Biro Organisasi	90	Sangat Baik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,5	Sangat Baik
11	RSJ Prof. HB Saanin	89,75	Sangat Baik
12	Balitbang	89,25	Sangat Baik
13	Bappeda	87,75	Baik
14	Dinas Kesehatan	88	Baik
15	Disperkimtan	88	Baik
16	DSDA dan Bina Konstruksi	87,75	Baik
17	Biro Hukum	86,5	Baik
18	BPSDM	87	Baik
19	Badan Penghubung	87	Baik
20	BPKAD	86,75	Baik
21	DBMCKTR	86,5	Baik
22	UPTD RS Paru Sumbar	86,75	Baik
23	Dinas Sosial	86,25	Baik
24	Disnakeswan	86,25	Baik
25	Diskominfotik	85,5	Baik
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	84,75	Baik
27	RSUD Mohammad Natsir	84,75	Baik
28	Biro Perekonomian	84	Baik
29	Badan Kepegawaian Daerah	83,75	Baik
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83,75	Baik
31	Dinas Pariwisata	84	Baik
32	Satpol PP	83,5	Baik
33	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	84	Baik
34	Biro Kesejahteraan Rakyat	82,75	Baik
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	83	Baik
36	Dinas Lingkungan Hidup	82,5	Baik
37	Dinas Pangan	83	Baik
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	82,25	Baik
39	Biro Administrasi Pembangunan	81,75	Baik
40	Inspektorat	82	Baik
41	Dinas Pendidikan	82	Baik
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81,5	Baik
43	Dinas Perhubungan	82,25	Baik
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82	Baik
45	Dinas Kebudayaan	81,75	Baik

46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	81,5	Baik
47	Dinas Pemuda dan Olahraga	82,25	Baik
48	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	82	Baik
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,25	Baik
50	Dinas Kehutanan	81,25	Baik
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80	Baik
52	Badan Pendapatan Daerah	69	Kurang Baik
Rata-rata		85,57	

Sumber data: Aplikasi Sepakat

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Sama dengan tahun sebelumnya, dengan capaian 97,24% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, indeks persepsi kualitas pelayanan menunjukkan penurunan sebanyak 2,14 poin di tahun 2025. Penurunan capaian indikator ini disebabkan oleh penerapan aplikasi SEPAKAT dalam proses pengukuran kualitas pelayanan, yang berdampak pada perubahan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data persepsi pengguna layanan. Penggunaan aplikasi ini meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian, namun pada saat yang sama juga mendorong responden untuk memberikan penilaian yang lebih kritis dan faktual terhadap kualitas pelayanan yang diterima, sehingga memengaruhi hasil indeks secara keseluruhan

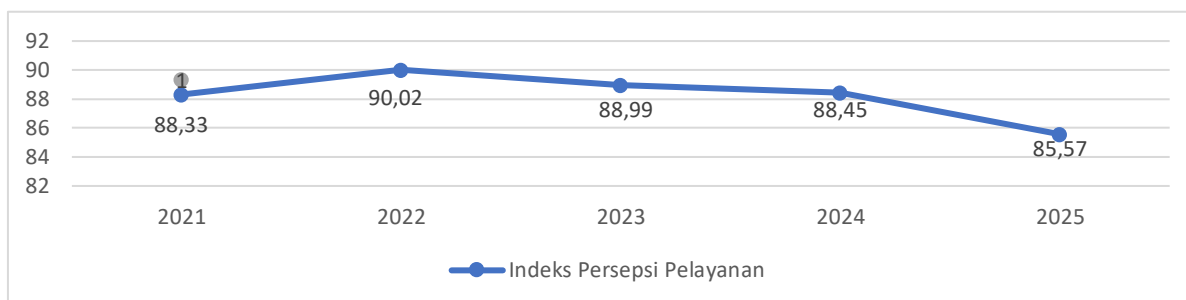


Indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2025 sebesar 85,57 menunjukkan pencapaian 96,15% dari target tahun 2026 (target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026). Untuk mencapai indeks persepsi kualitas pelayanan sesuai target tahun 2026, akan dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Perkembangan mutu pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir. Indeks Persepsi Pelayanan Publik tercatat sebesar 88,33, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 90,02 sebagai capaian tertinggi selama periode 2021-2025. Selanjutnya, pada tahun 2023 indeks mengalami penurunan menjadi 88,99, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 88,45. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana

indeks tercatat sebesar 85,57, yang merupakan capaian terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ini menjadi indikasi perlunya langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Perkembangan indeks persepsi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2025 digambarkan pada grafik 3.79.

Grafik 3. 79 Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2020-2024



Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan evaluasi penerapan standar pelayanan publik pada OPD.
2. Penyusunan, penyesuaian, dan penyempurnaan standar pelayanan publik.
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.
4. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
5. Penguatan dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital.
6. Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman dan implementasi standar pelayanan publik di seluruh OPD.
2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

- a. Penguatan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik di seluruh OPD;
- b. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pelayanan publik;
- c. Percepatan transformasi digital pelayanan publik;

- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan;
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian kualitas pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 6 Program dengan 17 Kegiatan dan 66 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 88.243.018.830,00,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 65 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
				Pagu	Realisasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	66	88.243.018.830,00	76.296.194.733,00
1	Program Pelayanan Penghubung	1	5	2.908.443.460,00	2.527.520.144,00
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7	36	85.087.153.370,00	73.533.960.589,00
3	Program Pendaftaran Penduduk	3	8	124.220.000,00	116.161.000,00
4	Program Pencatatan Sipil	3	9	57.103.000,00	54.736.000,00
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	6	58.413.000,00	56.173.000,00
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	2	7.686.000,00	7.644.000,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 88.243.018.830,00,- terealisasi sebesar Rp. 76.296.194.733,00,- atau 86,46%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.946.824.097,00,- (13,54%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tercapai 97,24% dengan realisasi anggaran 86,46% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 76,95%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 6.386.298.937.510,46 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Uraian penggunaan anggaran selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

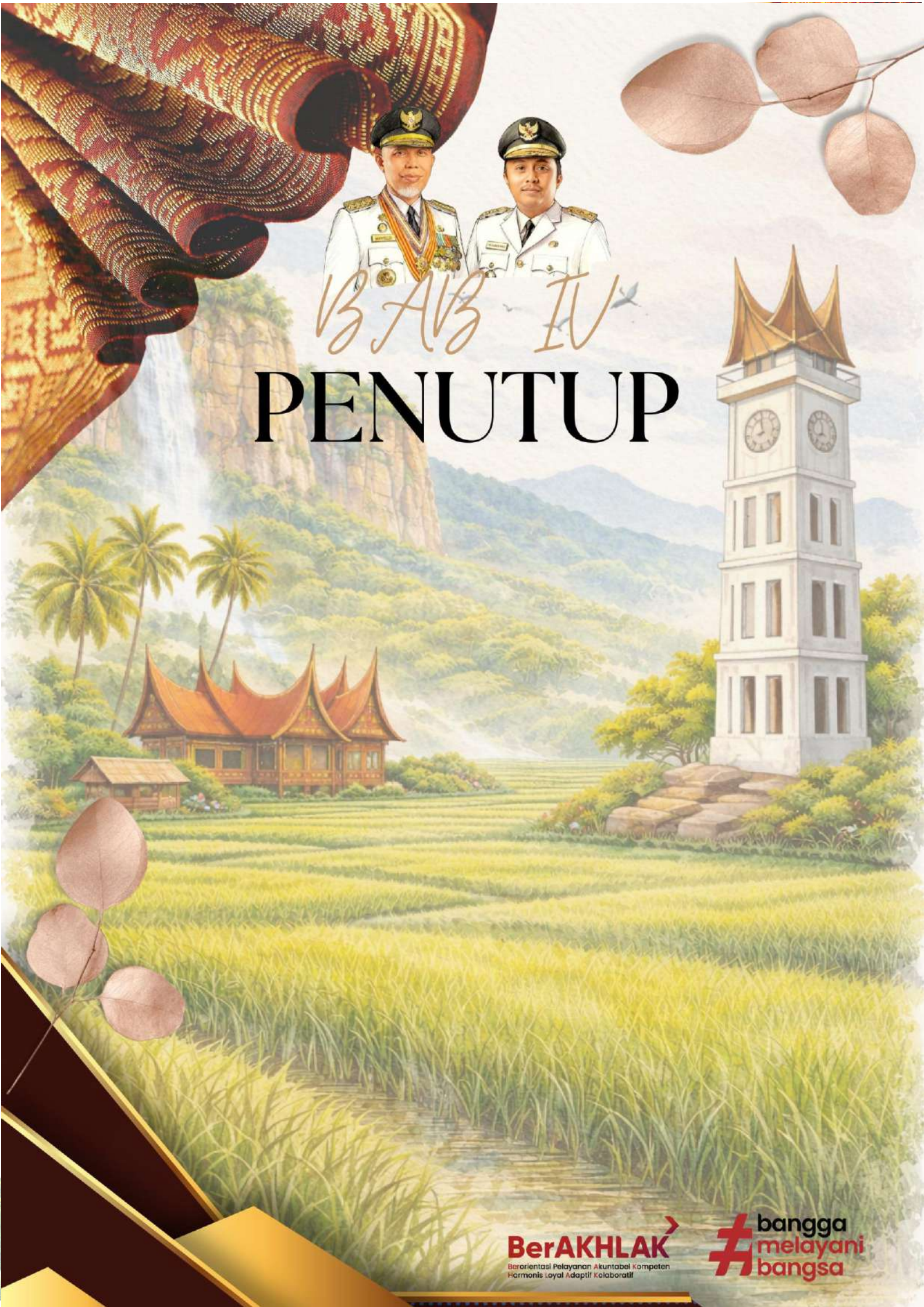
1. APBD tahun 2025 sebesar Rp. 6.386.298.937.510,46,- digunakan untuk mendukung pelaksanaan 148 Program (berkurang 135 program dibandingkan tahun 2024) dengan 283 Kegiatan (berkurang 19 kegiatan dari tahun 2024) dan 868 sub kegiatan.
2. Sebanyak 57,04% APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.642.600.539.481,03,- digunakan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan Sasaran 1, Misi 7 Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan proporsi anggaran sebesar 7,13% untuk pelaksanaan program ini.
3. Pagu dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 66 Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2025

No	SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	238.689.760.884,00	214.427.971.490,00	89,84
2	Menurunnya Prevalensi <i>Stunting</i>	109.133.103.839,00	105.042.551.350,00	96,25
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	704.678.284.875,00	677.671.114.949,00	96,17
4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	3.914.513.695,00	3.784.755.180,00	96,69
5	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	54.301.781.493,00	50.538.664.246,00	93,07
6	Meningkatnya Budaya Literasi	1.411.352.900,00	1.375.084.126,00	97,43
7	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.776.687.000,00	6.202.320.159,00	91,52
8	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	126.418.713.861,00	113.453.596.258,00	89,74
9	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	2.751.032.444,00	2.585.483.857,00	93,98
10	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	10.969.031.440,00	10.476.775.193,00	95,51

No	SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
11	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	3.455.112.649,00	3.114.757.756,00	90,15
12	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	4.892.822.943,00	4.570.278.925,00	93,41
13	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan Ukm Yang Sejahtera	9.103.040.700,00	8.252.825.277,00	90,66
14	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	3.475.646.750,00	3.371.711.516,00	97,01
15	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	606.181.906,00	556.600.671,00	91,82
16	Meningkatnya Peran Ekonomi Digital			
17	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatra Barat	7.052.514.000,00	4.773.308.395,00	67,68
18	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatra Barat	3.046.624.464,00	2.978.881.627,00	97,78
19	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	244.730.092.172,00	229.413.697.054,00	93,74
20	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	7.453.984.942,00	4.113.615.431,00	55,19
21	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	9.808.009.013,00	9.334.512.877,00	95,17
22	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	139.261.462.343,69	125.453.738.633,00	90,09
23	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	886.809.261,00	826.146.320,00	93,16
24	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.584.969.037.714,52	4.363.741.859.645,04	95,17
25	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	20.270.317.391,25	18.644.846.812,00	91,98
26	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88.243.018.830,00	76.296.194.733,00	86,46
TOTAL ANGGARAN		6.386.298.937.510,46	6.041.001.292.480,04	94,59

4. Pada tahun 2025, anggaran untuk mendukung pencapaian 26 sasaran Pemerintah Daerah yang berasal dari Perubahan APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 6.386.298.937.510,46,- terealisasi sebesar Rp. 6.041.001.292.480,04,- atau 94,59%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 345.297.645.030,419,- (5,41%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 yang tercapai 111,71% dengan realisasi anggaran 94,59% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 92,79%.



BAV IV PENUTUP

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



BAB IV

PENUTUP

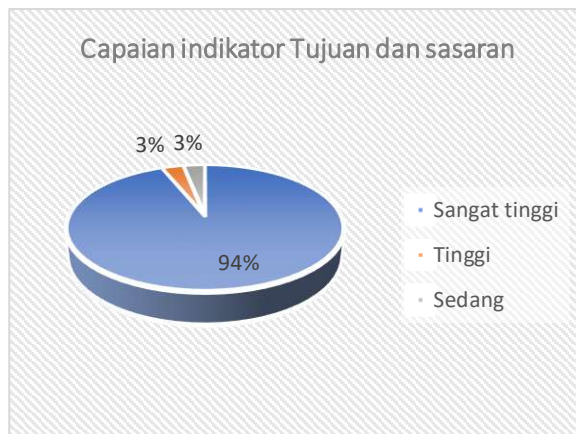
4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban/akuntabilitas pencapaian *kinerja* Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 yang menyajikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Berdasarkan informasi yang diuraikan pada bab 3, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 148 Program dengan 283 Kegiatan dan 868 sub kegiatan, dengan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.386.298.937.510,46,-.
2. APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 sebesar Rp. 6.386.298.937.510,46,- terealisasi sebesar Rp. 6.041.001.292.480,04,- atau 94,59%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 345.297.645.030,419,- (5,41%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2025 yang tercapai 111,71% dengan realisasi anggaran 94.59% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 92,79%
3. Rata-rata pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur pada tahun 2025 adalah 111,71% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi** dengan rincian sebagai berikut:



- a. Sebanyak 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sangat tinggi** (capaian kinerja: $91\% \leq 100\%$).
- b. Sebanyak 1 tujuan dan 1 Sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **tinggi** (capaian kinerja: $76\% \leq 90\%$).
- c. Sebanyak 1 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **rendah** (capaian kinerja: $51\% \leq 65\%$) yaitu sasaran Sumatra Barat sebagai pusat Perdagangan dengan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan.
- d. Sebanyak 1 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sangat rendah** (capaian kinerja: $\leq 50\%$) yaitu terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera.



4.2. Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan perbaikan terus-menerus (continuous improvement), baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam mengawal implementasi SAKIP secara konsisten, sehingga budaya kerja berorientasi hasil (result oriented) dapat terbangun di seluruh organisasi.
2. Meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja agar setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sehingga belanja daerah lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Mengoptimalkan peran Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian kinerja, serta Inspektorat Daerah dalam pengawasan dan evaluasi implementasi SAKIP, sehingga tercipta sistem pengendalian internal yang kuat dan berkelanjutan.



4. Menggunakan aplikasi SAKINAH untuk mengawal implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatea Barat dan menjadikannya sebagai media untuk mengevaluasi kinerja sampai level individu.
5. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.





LAMPIRAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



**REALISASI PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN					
I	MISI I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing				
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,41	77,27	99,82
	1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	74,79	74,69	99,87
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	12,50	9,60	123,20
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,47 14,30	9,77 14,31	103,17 100,07
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,85	54,19	108,71
II	MISI 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah				
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,10	59,34	94,04
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	63,27	63,27	100,00
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,69	17,69	100,00
	1.3 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga 1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,54 95,53 68,11 65,15	68,10 95,96 70,47 70,78	103,91 100,45 103,46 108,64

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
III	MISI 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan				
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5,00	7,13	142,60
	1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60	127,94	125,93
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03	132,17	125,84
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	54,838	54,61924	99,60
		1.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	44,158	43,966796	99,57
		1.1.5 Pendapan Peternak (Ribu)	55.418	58.445,34	105,46
		1.1.6 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	10,66	213,20
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,22	77,72	93,39
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	15,81	316,20
IV	MISI 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,65	16,65	94,33
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,15	8,55	93,44
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,63	3,71	65,90
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	2,58	5,38	208,53
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	13,60	0,55	4,04
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	10,60	5,01	47,26
	1.4 Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	240.385	256.718	106,79
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	10,50	20,94	199,43

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,25	6,61	91,17
V	MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,43	4,36	98,42
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,37	1,37	100,00
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,50	7,34	97,87
VI	MISI 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,786	0,678	86,31
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,691	0,693	100,29
		1.1.2 Kemantapan Jalan	71,00	71,10	100,14
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,58	89,23
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,81	80,12	101,66
	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	88,00	87,26	99,16
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	88,00	74,59	84,76
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11	16,67	150,05
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	70,79	70,92	100,18
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,40	59,40	100,00
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	68,38	69,16	101,14
	1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	89,70	89,70	100,00

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
VII MISI 7					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas					
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	87,00	89,32	102,67
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	79,00	78,85	99,81
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0040	2,9585	98,49
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,75	44,42	109,01
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,85	3,85	100,00
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	80,81	83,67	103,54
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	88,00	85,57	97,24
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran					111,71

Padang, Maret 2026



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

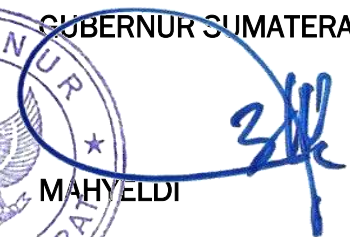
Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI 



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN				
I	MISI I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,41	Lintas Perangkat Daerah
	1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	74,79	D. Kesehatan, RSUD
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	12,50	D. Kesehatan, RSUD
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,47 14,30	D. Pendidikan D. Pendidikan
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,85	D. Pendidikan D. Nakertrans
II	MISI 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,10	OPD terkait 8 Area
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	63,27	B. Kesbangpol, Satpol PP
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,69	D. Kearsipan dan Perpustakaan
	1.3 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga 1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,54 95,53 68,11 65,15	D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	MISI 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5,00	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
	1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03	
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	54,838	D. Kelautan dan Perikanan
		1.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	44,158	
		1.1.5 Pendapatan Peternak (Ribu)	55.418	D. Peternakan dan Keswan
		1.1.6 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan holtikultura	5,00	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,22	D. Pangan
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	D. Kehutanan
IV	MISI 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital			
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,65	D. Perindustrian dan Perdagangan
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,15	
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,63	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	2,58	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	13,60	D. Koperasi dan UKM
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	10,60	D. Koperasi dan UKM
	1.4 Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	240.385	Lintas OPD

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	1.5 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	10,50	D. Penanaman Modal dan PTSP
	1.6 Meningkatkan peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,25	Lintas OPD
V	MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata			
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,43	D. Pariwisata
	1.1 Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,37	D. Pariwisata
	1.2 Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,50	D. Pariwisata
VI	MISI 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,786	Lintas OPD
	1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,691	D. Perhubungan
		1.1.2 Kemantapan Jalan	71,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
	1.2 Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	B. Penanggulangan Bencana Daerah
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,81	D. Lingkungan hidup
	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	88,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	88,00	
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11	D. Sumber Daya Air dan
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	70,79	
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,40	
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	68,38	

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	89,70	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
VII	MISI 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	87,00	Biro Organisasi
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	79,00	Biro Organisasi
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0040	Biro Pemerintahan
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,75	B. Pendapatan Daerah
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,85	D. Komunikasi Informatika dan Statistik
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	80,81	B. Kepegawaian Daerah
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	88,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	223.279.567.013	
	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	136.719.017.414	D. Kesehatan
	2 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	610.094.800	
	3 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	6.970.000	
	4 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	928.419.000	
	5 Program pengembangan daya saing keolahragaan	27.672.584.959	D. Pemuda dan Olahraga
	6 Program Rehabilitasi Sosial	57.342.480.840	D. Sosial
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	109.948.188.909	
	1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	108.746.514.909	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.201.674.000	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	655.125.219.295	
	1 Program pengelolaan pendidikan	651.345.972.784	D. Pendidikan
	2 Program pengembangan kurikulum	300.000.000	
	3 Program pendidik dan tenaga kependidikan	1.229.646.511	
	4 Program pengendalian perizinan pendidikan	100.000.000	
	5 Program pengembangan bahasa dan sastra	49.600.000	
	6 Program pengembangan kapasitas kepramukaan	2.100.000.000	D. Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	4.743.255.196	
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.727.957.490	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program perencanaan tenaga kerja	29.258.000	
3	Program penempatan tenaga kerja	177.172.300	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program hubungan industrial	182.835.000	
5	Program pengawasan ketenagakerjaan	222.936.475	
6	Program pembangunan kawasan transmigrasi	71.659.931	
7	Program pengembangan kawasan transmigrasi	38.330.000	
8	Program Peningkatan Kerjasama Desa	421.040.000	
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	872.066.000	
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	43.435.426.371	
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3.854.672.595	B. Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	5.883.189.200	
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	103.574.000	Satpol PP
4	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	713.720.000	
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	841.900.000	
6	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2.336.637.919	
7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	8.750.000	D. Kebudayaan
8	Program pengembangan kebudayaan	5.929.732.000	
9	Program pengembangan kesenian tradisional	1.812.226.000	Biro Kesejahteraan Rakyat D. Sosial
10	Program pembinaan sejarah	287.880.000	
11	Program pengelolaan permuseuman	2.842.634.927	
12	Program kesejahteraan rakyat	16.562.003.628	
13	Program Pemberdayaan Sosial	1.355.916.100	
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	771.090.829	
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	131.499.173	
F	Meningkatnya Budaya Literasi	1.624.217.000	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1.511.810.500	D. Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	112.406.500	
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.381.020.000	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	943.787.000	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Perlindungan Perempuan	1.097.031.000	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.275.000	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.759.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	254.256.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2.566.626.000	
7	Program Pengendalian Penduduk	17.920.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	99.670.000	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.337.696.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	151.793.213.139	
	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	21.649.837.482	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura dan D.Peternakan dan Keswan
	2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	70.890.505.239	
	3 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	714.362.860	
	4 Program perizinan usaha pertanian	45.360.000	D. Kelautan dan Perikanan
	5 Program penyuluhan pertanian	1.779.352.720	
	6 Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil	2.931.650.490	
	7 Program pengelolaan perikanan tangkap	18.630.315.100	Dinas Peternakan & Keswan
	8 Program pengelolaan perikanan budidaya	8.299.042.388	
	9 Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.358.361.150	
	10 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	597.262.000	
	11 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	14.928.929.204	
	12 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.922.877.805	
	13 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	6.866.061.311	
	14 Program perizinan usaha pertanian	203.653.890	
	15 Program penyuluhan pertanian	975.641.500	
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	3.963.789.154	
	1 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	3.059.070.948	D. Pangan
	2 Program penanganan kerawanan pangan	417.902.990	
	3 Program pengawasan keamanan pangan	486.815.216	
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	9.426.729.302	
	1 Program Pengelolaan Hutan	6.058.753.102	D. Kehutanan
	2 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	3.267.976.200	
	3 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	100.000.000	
K	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	3.643.294.070	
	1 Program standardisasi dan perlindungan konsumen	1.694.043.960	D. Perindustrian dan Perdagangan
	2 Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	1.949.250.110	
L	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	0	
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	18.725.146.800	
	1 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	19.430.900	D. Koperasi dan UKM
	2 Program pendidikan dan latihan perkoperasian	1.220.000.000	
	3 Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1.901.613.900	
	4 Program pemberdayaan usaha menengah usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	10.795.826.000	
	5 Program pengembangan UMKM	4.788.276.000	
N	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	4.814.010.548	
	1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.814.010.548	D. Pemuda dan Olahraga
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1.739.308.000	
	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	371.965.000	D. Penanaman Modal dan PTSP
	2 Program Promosi Penanaman Modal	218.524.900	
	3 Program Pelayanan Penanaman Modal	843.563.600	
	4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	286.105.500	
	5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.149.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	5.986.872.000	
	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.118.182.000	D. Pariwisata
	2 Program pemasaran pariwisata	4.868.690.000	
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	2.552.913.700	
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.039.188.700	D. Pariwisata
	2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.513.725.000	
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	291.170.016.439	
	1 Program Penyelenggaraan Jalan	286.704.615.510	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.253.810.929	D. Perhubungan
	3 Program Pengelolaan Pelayaran	6.710.000	
	4 Program Pengelolaan Perkeretaapian	4.880.000	
	5 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.200.000.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.281.034.370	
	1 Program Penanggulangan Bencana	5.067.632.970	B. Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Program Penanganan Bencana	213.401.400	D. Sosial
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	12.511.278.930	
	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	16.775.000	D. Lingkungan Hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.214.009.922	
	3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	101.824.950	
	4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	225.486.660	
	5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	28.594.000	
	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.061.805.000	
	7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.260.000	
	8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.195.000	
	9 Program Pengelolaan Persampahan	3.948.683.659	
	10 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.800.000.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
	11 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.050.644.739	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	167.914.532.671	
	1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3.814.502.000	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2 Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.526.515.000	
	3 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	853.424.000	
	4 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	4.770.000	
	5 Program penataan bangunan gedung	59.382.364.995	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	6 Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 7 Program pengembangan jasa konstruksi 8 Program Pengembangan Perumahan 9 Program Kawasan Permukiman	95.053.187.934 1.500.704.000 281.530.990 5.497.533.752	D. Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
V	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.456.690.221	
	1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 5 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 6 Program Tanah Ulayat	1.430.155.221 8.235.000 4.575.000 4.575.000 4.575.000 4.575.000	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.589.715.170.477	
	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 6 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 7 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Penataan Organisasi 9 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 10 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 11 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 12 Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	930.150.004.700 1.246.955.000 3.923.393.580 3.862.619.100 1.578.573.800 1.371.298.000 1.244.898.500 350.355.650 475.852.984 386.135.000 312.043.000 3.644.813.041.163	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah B. Pendapatan Daerah Inspektorat Daerah Bappeda Biro Organisasi Biro Pemerintahan & Otda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adm Pembangunan Lintas OPD
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	24.910.808.607	
	1 Program Kepegawaian Daerah 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 4 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 6 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 7 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 8 Perekonomian dan Pembangunan 9 Program Pengelolaan Arsip 10 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 11 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.328.824.500 5.572.971.928 5.662.353.000 8.719.116.959 212.484.000 92.400.000 387.624.000 611.005.400 87.965.900 14.431.000 1.221.631.920	B. Kepegawaian Daerah B. Pengembangan SDM D. Komunikasi, Informatika dan Statistik Biro Hukum Biro Perekonomian D. Perpustakaan dan Kearsipan B. Penelitian dan Pembangunan

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97.908.390.736	
1	Program Pelayanan Penghubung	3.704.399.870	Badan Penghubung
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	93.743.956.866	Sekretariat DPRD
3	Program Pendaftaran Penduduk	195.242.000	Dinas Kependudukan dan
4	Program Pencatatan Sipil	117.834.000	Catatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.518.000	
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.440.000	
TOTAL		6.438.050.092.948	


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI